# REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN

## DISERTASI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**


**Oleh :**

**SALIDIN**

**NIM : 10301900056**


**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**
**SEMARANG 2021**

REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK
DALAM SISTEM PERADILAN MILITER
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh
SALIDIN
NIM : 10301900056

UJIAN TERBUKA

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang, Desember 2021

| PROMOTOR | CO-PROMOTOR |
| --- | --- |
| **Prof. Dr. Hj. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum.** | **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.** |
| **NIDN : 0003025703** | **NIDN : 0628046401** |

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.**
**NIDN : 0621057002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salidin, S.H., M. Hum.

NIM : 10301900056

Alamat : Jl. Bakti Husada2/10 RT 011 RW 005 Mojo Gubeng Surabaya

Asal Instansi : Puslemasmil Babinkum TNI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan

Salidin, S.H., M.Hum.

NIM : 10301900056

**Penulis persembahkan disertasi ini kepada :**

- Ayahanda tercinta Rahayu Sujai (Alm) semoga Allah merahmati beliau;
- Ibunda tercinta Mutiara (Almh) semoga Allah merahmati beliau;
- Istri tercinta drg. Nur Kamala;
- Anakku tercinta Muhammad Ali Musthafa Kemal, S.H.;
- Anakku tercinta drg. Farah Rahmi Adita;
- Anakku tercinta Amalia Nurul Fitri;
- Anakku tercinta Elysa Qatrunnada;
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

# MOTO

1. “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
   (QS. An-Nisa' Ayat 135)

2. “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
   (Q.S. Al Maidah, Ayat 8)

3. “rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). (Gustav Rabruch)

4. “Sesungguhnya Kehidupan Manusia Merupakan Kilas Balik Menuju Ilahi Robbi, Berbuatlah Terbaik dan Bermamfaat Kepada Sesama Manusia, Demi Ridho Alloh Subhanahu Wa Ta ala.

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta ala atas limpahan iman, Islam, rahmat, hidayah, ilmu dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia sampai saat ini. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallohu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini yang berjudul: "Rekonstruksi Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan", masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangaun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Drs Bedjo Santoso, M.T., Ph. D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, telah memberikan kesempatan dan perhatian selama penulis mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Prof. Dr. Hj. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. sebagai promotor atas bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. sebagai Co Promotor yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam memberikan pengarahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, beserta staf yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
7. Seluruh Guru Besar padan dosen-dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah menjadi suri tauladan dalam keluasan ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan, serta pemahaman-pemahaman di bidang ilmu hukum selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;

Sehubungan dengan disertasi ini, Penulis telah melakukan penelitian baik melalui penelitian kepustakaan maupun melakukan wawancara terhadap para praktisi hukum militer, yang berprofesi sebagai penegak hukum di lingkungan peradilan militer, yaitu hakim militer, Oditur militer, Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Badan Pembinaa Hukum TNI, berkaitan dengan substansi Pasal 69 (1) huruf a (penyidik Ankum) dan Pasal 74 (wewenang Ankum) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, kemudian dianalisa dan diperoleh gambaran tentang berlakukanya asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, yang melatarbelakangi wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penydik terhadap anak buah di bawah wewenang komandonya. Selanjutnya, dipadukan dengan beberapa contoh dalam praktek Ankum sebagai penyidik, serta pengalaman penulis sendiri yang lama berkarir sebagai pejabat penyidik di lingkungan peradilan militer, menujukkan bahwa eksistensi Ankum sebagai penyidik belum dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Regulasi Lembaga dan kewenangan penyidik Ankum dalam sistem peradilan militer, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan penjelasannya dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1997, dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa, sesuai asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum supaya dapat menentukan nasib bawahannya yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur.

Regulasi lembaga dan kewenangan Ankum seperti tersebut di atas, dalam kontek penegakan hukum pidana terhadap prajurit saat ini, mengandung ketidakadilan, dengan alasan; pertama, apabila ratio legis Ankum dijadikan penyidik demikian, maka eksistensi Ankum sebagai penyidik menyimpang dari asas profesionalitas, karena Ankum tidak memiliki keahlian bidang penyidikan, dan Ankum berpotensi intervensi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer/ Oditur. Kedua, Ankum sebagai penyidik, dalam kenyataannya lembaga Ankum tidak mempunyai fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 38 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, lembaga Ankum tidak layak sebagai penyidik, karena Ankum bukan lembaga yustisi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketiga, Ankum sebagai penyidik, tidak menjamin *due process of law*, bahkan faktanya Ankum sering tidak netral/ membela anak buahnya dalam proses hukum (penyidikan), sehingga dapat menimbukan rasa ketidak adilan bagi pihak lainnya. Keempat. Ankum sebagai penyidik, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer/Oditur. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, seharusnya Ankum tidak bisa lagi menggunakan kewenangan penyidikannya. Namun kenyataannya, dalam hal penahanan terhadap tersangka, masih merupakan kewenangan Ankum, sedangkan penyidik Polisi Militer/ Oditur tidak diberi kewenangan utk menahan tersangka. Sistem kewenangan

penahanan terhadap tersangka seperti ini, dapat menimbulkan kesewenangan dalam penahanan tersangka dan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, tidak mencerminkan profesionalitas Ankum sebagai penyidik, namun lebih menunjukkan superioritas Ankum terhadap penyidik Polisi Militer/ Oditur. Dengan demikian, regulasi kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, tidak memenuhi nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum, sehingga perlu direkonstruksi.

Kelemahan-kelemahan Penegakan hukum dalam sistem peradilan militer saat ini, dapat dilihat dari aspek substansi hukumnya, aspek structural dan aspek kultur/budaya hukumnya. Kelemahan-kelemahan ini tidak bersifat tetap, namun dinamis, artinya dapat berubah sesuai perkembangan dari aspek substansi, struktur dan kultur/budaya hukumnya.

Kelemahan-kelemahan yang menonjol dari aspek struktural, menyangkut tidak kredibelnya Ankum dan Provos sebagai penyidik dan pembantu penyidik, dominasi peran Papera dalam penyelesaian perkara prajurit, belum berfungsinya pengadilan tata usaha militer, belum optimalnya lembaga pemasyarakatan militer, dan kualitas penyidik pada umumnya masih kurang. Dari aspek substansi hukum, masih adanya hukum positif dilingkungan peradilan militer merupakan peninggalan colonial. Dari aspek kultur/budaya hukum, masih kuatnya pengaruh figur- figur pejabat dalam structural organisasi TNI, sehingga mempengaruhi penegakan hukum di lingkungan TNI.

Dalam melakukan rekonstrusi penulis menggunakan *Grand theory* (Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan, *Meddle Theory* (Teori Sistem Hukum) *Lawrence M. Friedman* dan *Applied theory* (Teori Penegakan Hukum) Soerjono Soekanto, serta menggunakan perbandingan lembaga penyidik militer dari negara Azerbaijan, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Rahayu Sujai (Alm) dan Ibunda tercinta Mutiara (Almh),

semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau, Istri tercinta drg. Nurkamala dan anak-anak tersayang Muhammad Ali Musthafa Kemal, S.H., drg. Farah Rahmi Adita, Amalia Nurul Fitri dan Ellysa Qatrunnada, yang selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan disertasi ini, namun namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa disertasi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat, petunjuk dan kemudahan kepada penulis, serta semua pembaca. Semoga kita semua selalu dalam rahmat, hidayah dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Aaamiiin.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarkatuh.

Semarang, Desember 2021

Salidin, S.H., M. Hum.
NIM. 10301900056

## ABSTRACT

In the military justice sistem, the regulations of the investigative institutions, especially the investigators of superior with the right to levy punishment and their authorities, are regulated in Article 69 (1) point a and Article 74 of Law Number 31 of 1997, concerning Military Courts, that are not in accordance with the principle of professionalism because it does not have investigative expertise and functions related to judicial power. Therefore, the investigator's existence of superior with the right to levy punishment will not guarantee due process of law. In addition, it cannot provide justice values.

The purpose of this research was to analyze and reconstruct the regulations of investigators of superiors with the right to levy punishment and their authorities, weaknesses in the investigation, as well as reconstruction of institutional regulations and their authorities based on the value of justice.

It utilized a constructive paradigm. It was also a non-doctrinal type of research with a socio-legal research approach. The descriptive analysis of this research was expected to be able to provide a detailed, sistematic, and comprehensive description of the object studied. The data used were primary data and secondary data, namely data obtained through interviews and from library materials collected through library studies which were then analyzed qualitatively.

The results revealed that: first, superior with the right to levy punishment was appointed as an investigator of the members under his command authority, as a derivative of the principle of the command unit. The principle of the commander was fully responsible to the unit and the members. So, if they commit a crime, then the superior with the right to levy punishment can determine the fate of the members. Second, superiors with the right to levy punishment as an investigator had a legal gab. It means that they, attributively in the law, had the authority to investigate, but they could not conduct an investigation and be sworn in as an investigator. They delegated investigative authority to Military Police investigators and/or Military Prosecutor, but they still had the authority to detain suspects. The delegation of authority was ambiguous. It did not show professionalism and values of justice, considering that the authority to detain included in the investigative authority. Third, empirically, when a criminal act was committed by the members of superiors with the right to levy punishment, the suspects were processed by law. They often defended the members and were not neutral. Therefore, functioning as investigators would not be able to realize the due process of law. Fourth. Authority of superiors with the right to levy punishment in Article 74 of Law Number 31 of 1997 did not show their professionalism as investigators, but rather their authority to investigate the Military Police or Military Prosecutor. In reality, their positions were attributively the same as investigators. From the weaknesses of superiors with the right to levy punishment as investigators, in the future in the renewal of the law on military criminal procedures, they should not be assigned as investigators, but supervisors for investigations carried out by the Military Police/Military Prosecutor so that the investigation runs honestly and fairly.



Keywords: Reconstruction, Investigators of Superiors with The Right to Levy Punishment, Justice

## ABSTRAK

Dalam sistem peradilan militer, regulasi lembaga penyidik, khususnya penyidik Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan kewenangannya, diatur dalam Pasal 69 (1) huruf a dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, tidak sesuai dengan asas profesionalitas karena Ankum tidak memiliki keahlian penyidikan dan Ankum tidak tidak memiliki fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, eksistensi penyidik Ankum tidak akan menjamin *due process law* dan tidak dapat memberikan nilai-nilai keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi regulasi penyidik Ankum dan kewenangannya, kelemahan-kelemahan dalam penyidikan, serta rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan merupakan jenis penelitian non doctrinal, dengan metode pendekatan *sosio-legal research*. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yang diharapakan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dari obyek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primir dan data sekunder, yaitu data yang dipeoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Ankum dijadikan penyidik terhadap anak buah yang berada dibawah wewenang komandonya, sebagai turunan dari asas kesatuan komando, dan asas komandan bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya, sehingga dalam hal anak buahnya melakukan tindak pidana, maka Ankum dapat menentukan nasib anak buahnya. Kedua, Ankum sebagai penyidik terdapat legal gab, artinya, Ankum secara atributif dalam undang-undang memiliki kewenangan penyidikan, tetapi kenyataannya Ankum tidak bisa melakukan penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Ankum melimpahkan kewenangan penyidikannnya kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, namun kewenangan penahanan terhadap tersangka tetap dimiliki Ankum. Pelimpahan wewenang seperti ini ambigu, tidak menunjukkan profesionalisme dan nilai-nilai keadilan, mengingat kewenangan penahanan termasuk dalam kewenangan penyidikan. Ketiga, pengalaman yang terjadi (secara empiris), dalam hal terjadi tindak pidana oleh anak buah Ankum, kemudian tersangka diproses hukum, sering kali Ankum membela anak buahnya dan tidak netral, sehingga Ankum sebagai penyidik tidak akan dapat mewujudkan due process law. Keempat. Kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, substansinya tidak menunjukkan profesionalitas Ankum sebagai penyidik, tetapi lebih pada kewenangan Ankum superior terhadap menyidik Polisi Militer atau Oditur, padahal secara atributif kedudukan mereka sama-sama sebagai penyidik. Dari kelemahan-kelemahan Ankum sebagai penyidik tersebut, maka dalam pembaharuan hukum acara pidana militer ke depan, sebaiknya Ankum tidak dijadikan penyidik, tetapi ditempatkan sebagai pengawas penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer/ Oditur, agar penyidikan berjalan jujur dan berkeadilan.


Kata kunci : Rekonstruksi, Penyidik Ankum, Keadilan.

## SUMMARY

The military justice sistem in Indonesia implements the Military Criminal Procedure Code (Hapmil) in Law Number 31 of 1997, concerning Military Courts. In Article 69 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997, 3 (three) investigative institutions are stipulated, namely the superior with the right to levy punishment (Ankum), Military Police, and/or Military Prosecutor. Institutional regulations and investigators' authority in Article 69 paragraph (1) point a (superiors with the right to levy punishment as investigators) and Article 74 (authority of superiors with the right to levy punishment) Law Number 31 of 1997, in the current military justice sistem, are considered not based on the values of justice.

The investigative institutions in the provisions of Article 69 paragraph (1) point a (superiors with the right to levy punishment as investigators) Law Number 31 of 1997, and the explanation reveal that, according to the principle of the command unit, the commander is fully responsible for the unit and the members, the authority of investigation and the investigation of criminal acts committed by the members who are under the authority of their command is an authority attached to superiors with the right to levy punishment to determine the fate of the members referred to in settlement of criminal cases whose implementation is delegated to Military Police investigator and/or Military Prosecutor. The regulation of the institution of superiors with the right to levy punishment as mentioned above, in the context of enforcing criminal law against soldiers today, contains injustice, with the reasons; First, this institution is used as an investigator, judging from the aspect of the values that underlie/background of the institution as the investigator, namely as a derivative of the principle of the command unit, and the commander is fully responsible for the unit and its members. It is declared that the institution of superiors with the right to levy punishment has the authority as investigators to be able to participate in determining the fate of their subordinates who are being processed by law. If the reason that underlies this institution is

made as investigators, then it deviates from the principle of professionalism because it does not have expertise in the field of investigation. Second, the institution of superiors with the right to levy punishment as an investigator, in reality, the institution does not have a function related to the function of judicial power, as stipulated in Article 38 (1) and (2) of Law Number 48 of 2009, concerning Judicial Power. It means that the institution is not suitable as an investigator because it is not a judicial institution. Third, the institution of superiors with the right to levy punishment as the investigator does not guarantee a due process of law, even in the fact that in the legal process (investigation) against suspects (the members), it often happens that it is not neutral / tends to defend the members in the legal process, so that it can create a sense of injustice for the other party. Fourth. The institution of superiors with the right to levy punishment as an investigator, in its implementation, is delegated to the Military Police investigator. However, in reality, in the case of the detention of the suspect (its members), the Military Police investigator/ Military Prosecutor is not authorized to detain the suspect. The authority to detain suspects remains with the institution of superiors with the right to levy punishment. This sistem of detention authority for suspects can lead to arbitrariness and injustice in the detention of suspects, as well as legal uncertainty.

Furthermore, it is related to the authority of the institution of superiors with the right to levy punishment in the provisions of Article 74 of Law Number 31 of 1997. In Article 74, it is emphasized that the authority is to carry out investigations against the members, but in its implementation, it is carried out by Military Police investigators / Military Prosecutor. This institution receives a report on the results of the investigation and case file investigation results from Military Police investigators/Military Prosecutor, and finally, it has the authority to detain suspects (the members). The provisions of Article 74 of Law Number 31 of 1997, if we pay attention closely, do not reflect the professionalism of the institution of superiors with the right to levy punishment as an investigator, but rather a formality that it has the authority to investigate the members. Still, its implementation is carried out by Military Police

investigators/Military Prosecutor. The substance of Article 74 of Law Number 31 of 1997 shows the superiority of investigators of the institution of superiors with the right to levy punishment over Military Police investigators/Military Prosecutor. Whereas attributively (Article 69 (1) of Law Number 31 of 1997), the institution of superiors with the right to levy punishment, Military Police and/or Military Prosecutor are investigators with the same/equal position. However, in reality (empirically), in the investigation of suspects (the members), this institution tends to be superior to Military Police investigators or Military Prosecutor, with his authority to request a report on the results of the investigation and case files on the results of the investigation to the investigators of the institution of superiors with the right to levy punishment/ Military Prosecutor. With the regulation of the authority of the institution of superiors with the right to levy punishment in Article 74 of Law Number 31 of 1997, it is clear that it does not meet legal values, namely justice, benefit, and legal certainty, so it needs to be reconstructed.

We can see the weaknesses of law enforcement in the current military justice sistem from the aspect of legal substance, structural aspects, and aspects of legal culture/culture. These weaknesses are not permanent but dynamic. They can change according to developments in terms of substance, structure, and legal culture/culture.

From the aspect of legal substance, especially material law, it is a colonial legacy, such as the Military Criminal Code/KUHPM (Law Number 39 of 1947/ Wetboek van Militair Strafrecht, Staatsblad 1934 Number 167), the Criminal Code (KUHP). ), (Law Number 1 of 1946/ Wetboek van Strafrecht). Meanwhile, the formal law, such as Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, as positive law has been implemented for approximately 24 years, so it needs to be perfected. Material law is a product of colonial law and is still enforced in Indonesia. Of course, the socio-cultural background is different from the socio-cultural of the Indonesian, so it is necessary to revise/renewal to adapt it to the socio-cultural/legal culture, doctrines or current legal principles that are implemented in Indonesia.

From the structural aspect of the law, it places more emphasis on law enforcement institutions in military justice, especially investigative institutions. Weaknesses in this legal structure, including; First, the institution of superiors with the right to levy punishment and Provost investigators as investigators and assistant investigators are only a formality, because both have never conducted an investigation and are not professional investigators, so that the investigation products are invalid, and cannot be used as investigation material. Second, the officer with prosecutor function (Papera) in the process of resolving military cases has a dominant and decisive role, as stated in Article 123 of Law Number 31 of 1997. Starting from the process of investigating, prosecuting, and submitting cases of soldiers to military courts, is in the essence of the authority of the officer with prosecutor function, while Military Police Investigator/ Military Prosecutor only carried out orders from the officer with prosecutor function. The weakness of the authority domination of the officer with prosecutor function is not accompanied by a balanced and effective control of the judiciary in military justice. If this authority is not used carefully and wisely, it can lead to abuse of authority and injustice to the litigants.

Another weakness is that the Military Administrative Court (PTUM) has not functioned yet. In the military justice sistem, a military administrative judiciary is also needed to protect the human rights of military/Indonesian National Military members and maintain a balance between military interests and the legal interests of the military/Indonesian National Military members. The Procedural Law of the Military Administrative Court has been regulated in Article 265 to Article 343 of Law Number 31 of 1997, concerning Military Courts. In Article 353 of Law Number 31 of 1997, it has been mandated that regarding the Law on Military Administration Procedures, its implementation is regulated by a Government Regulation, no later than 3 (three) years after the law is enacted (three years from October 15, 1997). It should be no later than October 15, 2000, the Government Regulation governing the implementation of the Military Administrative Court Procedure Code has been established.

However, the reality is that until now the Government Regulation in question does not exist, so that until now the Military Administrative Court has not existed. Furthermore, the weakness in the military justice sistem, namely the existence of the Center of Military Correctional Institution (Puslemasmil), which supervises the Military Correctional Institutions (Lemmasmil), as an institution that carries out the technical function of fostering military prisoners, until now institutionally has not been regulated in law and is only regulated in the Commander of Indonesian National Military Regulations Number 33 of 2020, concerning the Organization and Duties of the Indonesian National Military Legal Office (Babinkum TNI). Center of Military Correctional Institution, as one of the judicial institutions of Indonesian National Military, is coordinated under the Indonesian National Military Legal Office so that the existence of the Center of Military Correctional Institution is not independent and does not have strong legality. As a result, the Center of Military Correctional Institution/Military Correctional Institutions' access to carry out their main tasks and functions is very limited.

Another very significant weakness in the legal structure (law enforcement) is the quality of the Human Resources (HR) of investigators. The quality of investigators here viewed from the educational aspect of investigators is mostly inadequate, understanding of the law (positive law) is still lacking, and mastery of criminal equipment/laboratories is still very minimal, even Army Military Police (Pomad) investigators until now do not have a criminal laboratory. So, the needs of investigations that require criminal laboratories are still dependent on other institutions.

From the aspect of culture /legal culture. In law enforcement in the military environment, the role of figures such as Commander/officer with prosecutor function/chiefs/superiors who hold power/authority in their units greatly influences soldiers in military life. The influence of these figures affects the legal culture of soldiers, especially in law enforcement in the military environment. The weakness of the figures' influence is that

under certain conditions (not generally applicable), there is still a feeling of reluctance or fear from subordinates or members to deliver correct advice to their superiors when there are actions from their superiors that are considered not in accordance with legal provisions. There is a sense of reluctance towards superiors in law enforcement that causes law enforcement not optimal.

Reconstruction of the institutional regulations and investigators' authority in the military justice sistem in Law Number 31 of 1997, concerning Military Courts, needs to be carried out so that the regulations of the institutions and authorities of investigators in the military justice sistem are based on the values of justice.

The reconstruction needs to be carried out, in particular on the regulations of investigators and assistant investigators (in Article 69 paragraph (1) point a and Article 69 paragraph (2) of Law Number 31 of 1997), and regulations on the authority of investigators (in Article 74 of Law No. Number 31 of 1997). The reconstruction of the investigative institutions and the Provost (Article 69 paragraph (1) point a, and Article 69 paragraph (2) of Law Number 31 of 1997), by removing the institution of superiors with the right to levy punishment as an investigator and the Provost as an assistant investigator. Furthermore, the investigative institutions in the military justice sistem are only the Military Police and Military Prosecutor. The reconstructions becomes:

**"Article 69 of Law Number 31 of 1997, the investigator are: a. Military Police, and b. Military Prosecutor"**

The reason is that the institution of superiors with the right to levy punishment as an investigator and the Provost do not have credibility as investigators and do not guarantee due process of law because the two institutions cannot conduct investigations and have never been sworn in as investigators. Meanwhile, the Military Police investigator or Military Prosecutor as a military judicial institution can become a credible and professional

investigator so that it meets the value of justice and can bring a sense of justice to the litigants.

Considering that the institution of superiors with the right to levy punishment will no longer be appointed as an investigator, consequently, it is necessary to reconstruct the authority of this institution in Article 74 of Law Number 31 of 1997. The substance of reconstruction based on the value of justice in Article 74 of Law Number 31 of 1997 is as follows;

Article 74 superiors who have the right to punish, have the authority to;

a. Hand over a member under his command authority who commits a criminal act to the investigator as referred in Article 69 point a or b. to carry out an investigation.
b. Receive a report on the implementation of the investigation from the investigator as referred in Article 69 point a or b.
c. Receive case files resulting from investigations from investigators as referred to in Article 69 point a and b.
d. Carry out supervision in the investigation process of its members who are being investigated by investigators as referred to in Article 69 point a or b.

From the reconstruction of Article 69 (1) point a and Article 74 of Law Number 31 of 1997, concerning Military Justice mentioned above, it is hoped that in the future renewal of the law on military criminal procedures, the substance of this reconstruction can be accommodated, so that it can be useful in an effort to bring justice values to the process of investigating Indonesian National Military soldiers in the military justice sistem.

# RINGKASAN

Dalam sistem peradilan militer di Indonesia, menggunakan Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, ditetapkan 3 (tiga) lembaga penyidik, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan/ atau Oditur. Regulasi Lembaga dan kewenangan penyidik dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a (Ankum sebagai penyidik) dan Pasal 74 (kewenangan Ankum) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dalam sistem peradilan militer saat ini, dipandang belum berbasis nilai-nilai keadilan.

Lembaga penyidik dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a (penyidik Ankum ) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan penjelasannya dikatakan bahwa, sesuai asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum supaya dapat menentukan nasib bawahannya yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur. Regulasi lembaga Ankum seperti tersebut di atas, dalam kontek penegakan hukum pidana terhadap prajurit saat ini, mengandung ketidakadilan, dengan alasan; pertama, Ankum dijadikan sebagai penyidik, dilihat dari aspek nilai-nilai yang mendasari/ melatarbelakangi lembaga Ankum sebagai penyidik, yaitu sebagai turunan dari asas kesatuan komando, dan komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kemudian di declair bahwa pada Ankum memiliki kewenangan sebagai penyidik agar dapat ikut menentukan nasib bawahannya yang sedang diproses hukum. Apabila ratio legis/ alasan yang mendasari Ankum dijadikan penyidik sebagai kelanjutan asas-asas tersebut, maka menyimpang dari asas profesionalitas, karena Ankum tidak memiliki keahlian bidang penyidikan. Kedua, Ankum sebagai penyidik, dalam kenyataannya lembaga Ankum tidak mempunyai fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana

ketentuan Pasal 38 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, lembaga Ankum tidak layak sebagai penyidik, karena Ankum bukan lembaga yudisiil. Ketiga, Ankum sebagai penyidik, tidak menjamin *due process of law*, bahkan kenyataannya dalam proses hukum (penyidikan) terhadap tersangka (anak buah Ankum), sering terjadi Ankum tidak netral/ cenderung membela anak buahnya dalam proses hukum, sehingga dapat menimbukan rasa ketidak adilan bagi pihak lainnya. Keempat. Ankum sebagai penyidik, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer. Namun kenyataannya, dalam hal penahanan terhadap tersangka (anak buah Ankum), penyidik Polisi Militer/Oditur tidak diberi kewenangan utk menahan tersangka. Kewenangan menahan tersangka tetap dimiliki oleh Ankum. Sistem kewenangan penahanan terhadap tersangka seperti ini, dapat menimbulkan kesewenangan dan ketidak adilan dalam penahanan tersangka, serta ketidakpastian hukum.

Selanjutnya terkait dengan kewenangan Ankum dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam Pasal 74 tersebut, ditegaskan tentang kewenangan Ankum melakukan penyidikan terhadap anak buahnya, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer/ Oditur, Ankum menerima laporan hasil pelaksanaan penyidikan dan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer/Oditur, dan terakhir Ankum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka (bawahan Ankum). Ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, bila kita cermati, tidak mencerminkan profesionalitas Ankum sebagai penyidik, namun lebih pada formalitas bahwa Ankum memiliki kewenangan penyidikan terhadap anak buahnya, namun pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer/ Oditur. Substansi dari Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, menunjukkan superioritas penyidik Ankum terhadap penyidik Polisi Militer/ Oditur. Padahal secara atributif (Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), Ankum , Polisi Militer dan/ atau Oditur adalah sama-sama sebagai penyidik yang posisinya sama/sederajad, yaitu sama-sama sebagai penyidik. Namun dalam kenyatannya

(secara empiris), dalam penyidikan terhadap tersangka (anak buah Ankum), Ankum cenderung superior terhadap penyidik Polisi Militer atau Oditur, dengan kewenangannya minta laporan hasil penyidikan dan berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik Ankum/ Oditur. Dengan regulasi kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, jelas tidak memenuhi nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum, sehingga perlu direkonstruksi.

Kelemahan-kelemahan Penegakan hukum dalam sistem peradilan militer saat ini, dapat kita lihat dari aspek substansi hukumnya, aspek struktural dan aspek kultur/budaya hukumnya. Kelemahan-kelemahan ini tidak bersifat tetap, namun dinamis, artinya dapat berubah sesuai perkembangan dari aspek substansi, struktur dan kultur/ budaya hukumnya.

Dari aspek substansi hukum, terutama hukum materiilnya merupakan warisan kolonial, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer/ KUHPM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947/ Wetboek van Militair Strafrecht, Staatsblad 1934 Nomor 167), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946/ Wetboek van Strafrecht). Sedangkan hukum formilnya seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, sebagai hukum positif sudah berlaku kurang lebih 24 tahun, sehingga perlu disempurnakan. Hukum materiil yang merupakan produk hukum kolonial dan masih diberlakuakan di Indonesia, tentu latar belakang sosio kulturalnya berbeda dengan sosio kultural bangsa Indonesia, sehingga perlu dilakukan revisi/ pembaharuan guna menyesuaikan dengan sosio kultural/ budaya hukum, doktrin atau asas-asas hukum terkini yang berlaku di Indonesia.

Dari aspek struktural hukum, lebih menekankan pada lembaga penegak hukum di lingkungan peradilan militer, utamanya lembaga penyidik. Kelemahan-kelemahan dalam struktur hukum ini, diantaranya; pertama, penyidik Ankum dan Provos sebagai penyidik dan pembantu penyidik hanya sebagai formalitas saja, karena kenyatannya Ankum dan Provos tidak pernah melakukan penyidikan dan bukan sebagai penyidik professional, sehingga produk penyidikan

Ankum dan provos tidak sah, dan tidak bisa dijadikan sebagai bahan penyidikan. Kedua, Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam proses penyelesaian perkara prajurit, mempunyai peran yang dominan dan menentukan, sebagimana bunyi Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan penyerahan perkara prajurit kepada pengadilan militer, pada hakekatnya kewenangan berada pada Papera, sedangkan Penyidik Polisi Militer/ Oditur hanya melaksanakan perintah dari Papera. Kelemahan dari dominasi kewenangan Papera ini, tidak dibarengi dengan kontrol dari lembaga pengadilan di lingkungan peradilan militer yang seimbang dan efektif. Apabila kewenangan tersebut tidak digunakan secara cermat dan bijaksana, dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidak adilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Kelemahan lainnya, Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM) belum berfungsi. Dalam sistem peradilan militer juga dibutuhkan lembaga peradilan tata usaha militer, guna melindungi hak asasi warga militer/ TNI dan menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum masyarakat militer/ TNI. Hukum Acara dari PTUM ini, sudah diatur dalam Pasal 265 samapai dengan Pasal 343 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 353 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, telah diamanatkan, bahwa mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (tiga tahun dari tanggal 15 Oktober 1997). Seharusnya paling lambat tanggal 15 Oktober Tahun 2000, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer sudah terbentuk. Namun kenyataannya sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada, sehingga sampai saat ini lembaga PTUM ini belum terwujud. Selanjutnya, kelemahan dalam sistem peradilan militer, yaitu keberadaan Pusat Lemasmil (Puslemasmil) yang membawahi Lembaga Pemasyarakat Militer (Lemmasmil), sebagai lembaga penyelenggara fungsi teknis pembinaan narapidana militer, sampai sekarang secara kelembagaan belum diatur dalam undang-undang, dan hanya diatur

dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI). Puslemasmil sebagai salah satu badan yustisi TNI, berkedudukan dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI, sehingga keberadaan Puslemasmil tidak mandiri dan tidak memiliki legalitas yang kuat. Akibatnya, akses Puslemasmil/ Lemasmil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjadi sangat terbatas.

Kelemahan dalam struktur hukum (penegak hukum) lainnya yang sangat signifikan, adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik. Kualitas penyidik disini dilihat dari aspek pendidikan penyidik kebayakan belum memadai, dan penguasaan terhadap alat perlengkapan/ laboratorium kriminal, masih sangat minim, bahkan penyidik Pomad sampai saat ini, belum memiliki Laboratorium criminal, sehingga untuk kebutuhan penyidikan yang memerlukan Laboratorium criminal masih tergantung kepada instansi lain.

Dari aspek kultur/ budaya hukum. Dalam penegakan hukum di lingkungan militer, peranan figure seperti Panglima/ Papera/ komandan/ atasan yang memegang kekuasaan/ kewenangan di satuannya, sangat berpengaruh terhadap prajurit dalam kehidupan militer. Pengaruh figure ini mempengaruhi budaya hukum prajurit, khususnya dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Kelemahan dari pengaruh figure ini, dalam kondisi tertentu (tidak berlaku secara umum), masih ada perasaan segan atau takut dari bawahan, untuk memberikan saran yang benar kepada atasannya, dalam hal ada tindakan/ perbuatan dari atasannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Adanya rasa segan terhadap atasan dalam penegakan hukum seperti ini, membuat penegakan hukum tidak optimal.

Rekonstruksi terhadap regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, perlu dilakukan agar regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer ini, berbasis pada nilai-nilai keadilan.

Rekonstruksi yang perlu dilakukan, khususnya terhadap regulasi lembaga penyidik dan pembantu penyidik (dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), dan regulasi kewenangan penyidik (dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997). Rekonstruksi terhadap lembaga penyidik dan Provos (Pasal 69 ayat (1) huruf a, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), dengan menghapus lembaga Ankum sebagai penyidik dan Provos sebagai pembantu penyidik. Selanjutnya lembaga penyidik dalam sistem peradilan militer hanya Polisi Militer dan Oditur. Rekonstruksinya menjadi;

"Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik adalah ; a. Polisi Militer; dan b. Oditur".

Alasannya, Ankum maupun Provos tidak memiliki kredibilitas sebagai penyidik dan tidak menjamin due process of law, karena Ankum dan Provos tidak dapat melakukan penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Sedangkan penyidik Polisi Militer atau Oditur sebagai lembaga yustisi militer, dapat menjadi penyidik yang kredibel dan professional, sehingga memenuhi nilai keadilan dan dapat menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Mengingat Ankum nantinya tidak lagi ditetapkan sebagai penyidik, maka konsekuensinya perlu dilakukan rekonstruksi terhadap wewenang Ankum pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Substansi rekonstruksi yang berbasis nilai keadilan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menjadi sebagai berikut;

Pasal 74 Atasan Yang Berhak Menghukum, mempunyai wewenang;

a. menyerahkan anggota di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b. guna dilakukan penyidikan.

b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b.

c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b.

d. melakukan pengawasan dalam proses penyidikan terhadap anggotanya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b.

Dari rekonstruksi Pasal 69 (1) huruf a dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer tersebut di atas, diharapkan dalam pembaharuan hukum acara pidana militer ke depan, substansi rekonstruksi ini bisa diakomodir, sehingga bisa bermanfaat dalam upaya menghadirkan nilai-nilai keadilan dalam proses penyidikan prajurit TNI dalam sistem peradilan militer.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

**DAFTAR ISI**


HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii
HALAMAN PERNYATAAN ..... iii
PERSEMBAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
ABSTRACT ..... xi
ABSTRAK ..... xii
SUMMARY ..... xiii
RINGKASAN ..... xx
DAFTAR ISI ..... xxviii
DAFTAR TABEL ..... xxxiv
DAFTAR BAGAN ..... xxxv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 13
C. Tujuan Penelitian ..... 13
D. Kegunaan Penelitian ..... 14
1. Secara teoritis ..... 14
2. Secara praktis ..... 15
E. Kerangka Konseptual ..... 15
1. Rekonstruksi Hukum ..... 15
2. Regulasi ..... 16
3. Lembaga Penyidik ..... 16
4. Kewenangan Penyidik ..... 17
5. Peradilan Militer ..... 18
6. Keadilan ..... 20
F. Kerangka Teori ..... 22
1. *Grand Theory*. Teori Negara Hukum dan Keadilan ..... 22
1.1. Teori Negara Hukum ..... 22
1.1.1 Hakekat Negara ..... 22
1.1.2. Negara Hukum ..... 25
1.1.3. Negara Hukum Indonesia ..... 33

2. Teori Keadilan .....42
3. *Meddle Theory*. Teori Sistem Hukum .....50
3.1. Struktur Hukum (*Legal Structure*).....51
3.2. Materi Hukum (*Legal Substance*).....53
3.3. Budaya Hukum ( *Legal Culture*) .....54
4. *Appleid Theory*. Penegakan Hukum .....58
4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi .....60
4.2. Subyek dan Obyek Penegakan Hukum .....62
G. Kerangka Pemikiran .....66
H. Metode Penelitian .....67
1. Paradigma Penelitian .....67
2. Jenis penelitian .....68
3. Metode Pendekatan .....68
4. Sumber Data Penelitian .....70
5. Teknik Pengumpulan Data .....72
6. Teknik Analisis Data. .....74
I. Sistematika Penulisan. .....74
J. Originalitas / Keaslian Penelitaan .....76
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....80
A. Pengadilan Militer di Indonesia .....80
1. Pengertian Pengadilan.....80
2. Eksistensi Peradilan Militer .....80
3. Yurisdiksi dan Yustisiabel Peradilan Militer .....86
3.1. *Yurisdiksi*.....86
3.2. *Yustisiabel* (orang-orang yang tunduk/ditundukan) pada Peradilan Militer .....96
3.2.1. Prajurit/Militer, atau Angkatan Perang .....96
3.2.2. Termasuk pula sebagai Militer/Tentara .....97
3.2.3. Yang dipersamakan dengan Militer .....98
4. Kekuasaan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer.....99
4.1. Kekuasaan Pengadilan Militer .....99
4.2. Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi .....100
4.3. Kekuasaan Pengadilan Militer Utama .....101
4.4. Kekuasaan Pengadilan Pertempuran.....102
5. Susunan Pengadilan Militer .....104
6. Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia .....104

B. Penyidik dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) .....105
1. Penyidik dan Syarat-syarat Penyidik .....105
1.1. Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu .....106
1.2. Syarat-syarat sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu .....108
1.3. Penyidik selain Penyidik Polri/PPNS .....111
2. Penyidik Angkatan Bersenjata RI ( Penyidik Abri/TNI) .....116
2.1. Pengertian Penyidik Abri/TNI dan Penyidik Pembantu .....116
2.2. Syarat-syarat sebagai Penyidik TNI.....118
3. Perwira Penyerah Perkara (Papera) .....122
3.1. Pengertian Papera.....122
3.2. Ketentuan Kepaperaan.....125
4. Kewenangan Penyidik dan Papera.....125
4.1. Kewenangan Penyidik .....125
4.1.1. Pengertian Kewenangan.....125
4.1.2. Sumber-sumber Kewenangan .....129
4.1.3. Kewenanangan Penyidik ( Polri dan PPNS) .....133
4.1.4. Kewenangan Penyidik TNI.....134
4.2. Kewenangan Papera.....136
5. Penyelidikan dan Penyidikan.....139
5.1. Penyelidikan.....139
5.1.1. Pengertian Penyelidikan.....139
5.1.2. Penyelidikan menurut Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).....143
5.2. Penyidikan.....144
5.2.1. Pengertian Penyidikan .....144
5.2.2. Pelaksanaan / dimulainya Penyidikan.....147
C. Asas-asas Dalam Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) .....150
1. Asas Kesatuan Komando .....150
2. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.....150
3. Asas Kepentingan Militer .....150

D. Sistem Peradilan Pidana.....152
1. Pengertian Peradilan Pidana .....152
2. Model Sistem Peradilan Pidana .....160
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....166
3.1. Kepolisian .....166
3.2. Kejaksaan.....167

3.3. Pengadilan.....168
3.4. Lembaga Pemasyarakatan.....168
3.5. Advokat.....169

BAB III REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK
DALAM SISTEM PERADILAN MILITER SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....170

A. Sekilas Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia.....170
1. Masa Pra Kemerdekaan (Pendudukan Belanda Dan Jepang).....170
2. Masa Awal Kemerdekaan (Tahun 1945-1950).....172
3. Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959).....181
4. Masa Juli 1959 – Maret 1966 (1959-1966).....186
5. Masa Maret 1966 – Tahun 1997 (1966-1997).....189
6. Masa Peradilan Militer 1997 Sampai Sekarang.....191
B. Riwayat Lembaga Penyidik dan Kewenangannya di Lingkungan
Peradilan Militer.....194
1. Dalam Ketentuan UU No 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara.....196
2. Dalam Ketentuan UU No 6 Tahun 1950, Tentang Menetapkan "UU Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara"(UU Darurat No 17 Tahun 1950).....201
3. Dalam Ketentuan Undang-Undang Darurat RI, No 1 Tahun 1958, Tentang Perubahan UU No 6 Tahun 1950 ( LN Tahun 1950 No 53), Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.....204
4. Dalam Ketentuan UU No 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.....210
C. Proses Penyidikan Menurut UU No 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.....214
D. Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Saat Ini Belum berbasis Nilai Keadilan.....218
1. Regulasi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik.....219
2. Regulasi Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).....228
3. Konflik Norma Dan Kewenangan.....237

BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER.....241

A. Kelemahan Substansi Hukum.....241
1. Kelemahan Regulasi Hukum Dalam Perspektif Teori Hukum.....242
2. Kelemahan Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik.....248

3. Kelemahan Hukum Positif Dalam Sistem Peradilan Militer .....251
1) Hukum Warisan Kolonial .....253
2) Hak Tersangka Didampingi Penasehat Hukum .....255
3) Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM) .....257
4) Independensi Pengadilan Militer .....257
B. Kelemahan Struktur Hukum.....260
1. Kelemahan Regulasi Lembaga Penyidik Ankum .....260
2. Kelemahan Komponen Penegak Hukum .....263
a. Ankum dan Provos .....266
b. Dominasi Kewenangan Papera Dalam Penyelesaian Perkara .....270
c. Pengadilan Tata Usaha Militer Belum Operasional .....278
d. Lembaga Pemasyarakatan Militer Belum Maksimal .....282
e. Problema Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik .....285
C. Kelemahan Kultur/ Budaya Hukum .....291
1. Kelemahan Regulasi Hukum Dalam Budaya Hukum .....292
2. Kelemahan Budaya Hukum .....294
3. Kemandirian Penegak Hukum .....297

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN .....304

A. Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Di Indonesia .....304
1. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara.....304
2. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum .....306
B. Penerapan Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila .....319
1. Konsepsi Negara Hukum .....319
2. Negara Hukum Pancasila.....335
a. Indonesia Sebagai Negara Hukum .....335
b. Negara Hukum Pancasila.....338
C. Penerapan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.....352
1. Keadilan Dalam Perspektif Islam .....352
a. Makna Keadilan .....353
b. Keadilan Dalam Penegakan Hukum .....357
2. Keadilan Dalam Pandangan Para Filsuf / Ahli .....361
a. Keadilan Dalam Teori Klasik dan Modern .....361
b. Perspektif Keadilan Dalam Penegakan Hukum .....371
3. Keadilan Dalam Pancasila .....374

D. Perbandingan Institusi Penyidik Anggota Militer Di Tiga Negara Asing .....388
1. Negara Azerbaijan .....388
1.1. Peradilan Pidana Militer Azerbaijan.....389
1.2. Hukum Acara Pidana Azerbaijan.....389
2. Negara Jepang.....394
2.1. Lembaga Penegak Hukum Pidana (Penuntut / Penyidik) .....396
2.2. Proses Penanganan Perkara.....398
3. Negara Korea Selatan .....407
3.1. Peradilan Militer Korea Selatan.....408
3.2. Hukum Acara Pidana .....410
E. Rekontruksi Nilai Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan .....417
1. Nilai-nilai Yang Mendasari Regulasi Lembaga Penyidik .....418
2. Nilai Keadilan Dalam Regulasi Lembaga Penyidik .....426
3. Rekonstruksi Nilai Lembaga Penyidik Berbasis Nilai Keadilan .....430
F. Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan .....435
1. Asas Hukum Yang Mendasari Rekonstruksi .....436
2. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Berbasis Nilai Keadilan .....444
G. Rekonstruksi Kultur / Budaya Hukum.....453
1. Harmoni Komponen Sistem Hukum.....453
2. Rekonstruksi Kultur / Budaya Hukum.....455
H. Pandangan Para Ahli dan Praktisi Hukum Militer Terhadap Hukum Acara Pidana Militer. .....457
I. Implementasi Nilai Keadilan Dalam Hukum Acara Pidana Militer.....471
1. Hukum Acara Pidana Militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) Sebagai *Ius Constituendum* .....472
2. Hukum Acara Pidana Militer Sebagai *Ius Constituendum* .....474
J. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer.....476
K. Profesionalitas Penyidik Polisi Militer Di Lingkungan Peradilan Militer.....479

BAB VI PENUTUP .....485

A. Kesimpulan .....485
B. Saran.....488
C. Implikasi Kajian Disertasi.....489
1. Teoritis .....489
2. Praktis .....489

DAFTAR PUSTAKA .....491

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....77
2. Tabel 2 Kewenangan Menyidik Tindak Pidana.....116
3. Tabel 3 Rekapitulasi Satuan Pomad .....286
4. Tabel 4 Keadaan dan Pendidikan Penyidik Pomad .....287
5. Tabel 5 Rekapitulasi Keadaan dan Pendidikan Penyidik Pomad .....288
6. Tabel 6 Rekapitulasi Keadaan Personel dan Perlengkapan Penyidik Pomad.....289
7. Tabel 7 Rekontruksi Pasal 69 (1) huruf a dan Pasal 74 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang Terkait Dengan Lembaga dan Kewenangan Penyidik, Dalam Rangka Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berkeadilan ..... 449
8. Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Penyidikan Pomdam Seluruh Indonesia TA. 2020 ..... 481

# DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 Subtansi Hukum Peraturan / kebijakan Tertulis dan Tidak Tertulis.....54
2. Bagan 2 Proses Penyidikan (Pemeriksaan Pendahuluan)..... 215
3. Bagan 3 Proses Penyerahan Perkara dan Penuntutan .....216
4. Bagan 4 Sumber Kewenangan Penyidikan ( Dalam UU No 31/1997 Pasal 69 (1) dan Penjelasannya) .....221
5. Bagan 5 Teori Bekerjanya Hukum .....246
6. Bagan 6 Tata Susunan Norma Hukum : Perbandingan Tata Susunan Norma Hukum Menurut Hans Nawiasky dan Menurut TAP. MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 97 .....311
7. Bagan 7 Proses Penanganan Perkara Pidana di Jepang .....398
8. Bagan 8 Rekontruksi : Semula Sumber Kewenangan Ankum Sebagai Penyidik (Dalam UU No 31/1997 Pasal 69 (1) dan Penjelasannya) Menjadi Ankum Sebagai Pengawas Penyidikan .....431

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), bertujuan mewujudkan Negara Indonesia yang tertib, aman, sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur tersebut harus disertai dengan kondisi stabilitas nasional yang mantap, tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna menopang stabilitas keamanan dan tegaknya kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia, maka sangat diperlukan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI).[1] Peran TNI sebagai alat pertahanan negara, maka dalam kehidupan sehari-hari diatur secara khusus, baik berupa peraturan disiplin militer/keprajuritan maupun peraturan perundang-undangan/ hukum militer.

Dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 27 (1) dijelaskan, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan dalam konstitusi tersebut berlaku terhadap semua warga negara, tidak terkecuali prajurit TNI, artinya anggota atau masyarakat TNI harus tunduk dan wajib menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Masyarakat TNI merupakan masyarakat yang diberi tugas khusus sebagai alat pertahanan negara, maka diatur dalam ketentuan hukum secara khusus pula. Dalam Undang-undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004, dan dirubah dengan

[1] Ketentuan pasal 7 (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, disebutkan *Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18, dijelaskan bahwa, Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dari ke empat badan peradilan tersebut, yang berlaku terhadap masyarakat militer/TNI adalah peradilan militer.

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya di lingkungan masyarakat militer (TNI AD, AL dan AU) dan berlaku terhadap orang/subyek hukum militer dan yang dipersamakan dengan militer. Hukum positif, khususnya hukum pidana yang berlaku terhadap anggota militer (selanjutnya disebut TNI), terdiri dari hukum Materiil yang meliputi; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang tindak pidana khusus lainnya seperti; Undang-undang Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana yang diatur secara khusus lainnya. Sedangkan hukum formilnya diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, diatur tentang lembaga-lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan peradilan di lingkungan Peradilan Militer dan salah satunya adalah mengatur tentang Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil). Hapmil sebagai hukum pidana formil di lingkungan TNI, mengatur bagaimana agar mereka yang telah melakukan pelanggaran supaya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman menurut pasal-pasal undang-undang, yang memuat ketentuan bagaimana cara pemeriksaan, penuntutan dan cara bagaimana perkara diselesaikan di muka sidang pengadilan. Dengan kata lain, hukum pidana

formil adalah bagaimana peraturan-peraturan hukum pidana materiil dipertahankan dan dijalankan[2]

Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pada prinsipnya memiliki asas-asas yang sama dengan asas-asas yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang berlaku umum terhadap masyarakat umum/sipil. Namun dalam Hapmil ada prinsip-prinsip atau asas-asas berlaku khusus bagi anggota militer yang merupakan ciri khas dalam kehidupan di lingkungan militer yang berlaku dalam Hapmil tersebut, seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer. Asas kesatuan komando, mempunyai arti bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai peranan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, mempunyai arti, bahwa dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih, sehingga komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Sedangkan asas kepentingan militer, mempunyai arti, bahwa untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.[3]

Asas-asas yang berlaku dilingkungan kehidupan militer tersebut di atas, juga dijadikan dasar dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya dalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam menentukan penyidik dan kewenangan penyidikan, seperti dalam ketentuan pasal 69 ayat (1), yang menjelaskan bahwa penyidik terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu (a) Atasan yang Berhak Menghukum

[2]Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, 2002, Hal. 8-9
[3]Penjelasan umum, atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

(Ankum), (b) Polisi Militer (Pom) dan (c) Oditur. Dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 69 ayat 1 (a ) Ankum sebagai penyidik. Dalam penjelasannya bahwa, sesuai dengan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana, yang pelaksanaannya (penyidikannya) dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer. Huruf (b) Polisi Militer sebagai penyidik. Dalam penjelasannya bahwa, Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi (Ankum tertinggi) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Sedangkan huruf (c) Penyidik Oditur. Dalam penjelasannya bahwa, Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi (Ankum tertinggi) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Selanjutnya kewenangan Ankum sebagai penyidik diatur dalam ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam ketentuan pasal 74 tersebut, ada empat kewenangan Ankum; *Pertama*, Ankum berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota dibawah wewenang komandonya, tapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau Oditur, *Kedua*, meminta laporan hasil penyidikan dari penyidik polisi militer/Oditur, *Ketiga*, menerima berkas perkara (BP) dari penyidik polisi militer/Oditur, dan *Keempat*, berwenang melakukan penahanan sementara terhadap bawahannya.[4] Kalau dicermati kewenangan penyidik

[4] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, pasal 74

Ankum sesuai pasal 74 tersebut, tindakan atau pekerjaan Ankum yang terkait langsung dengan kewenangan penyidikan, yaitu hanya kewenangan untuk menahan tersangka, sedangkan kewenangan lainnya lebih bersifat pengawasan dari Ankum untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan terhadap anggota bawahannya yang sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik polisi militer/Oditur.

Berkaitan dengan kewenangan Ankum dalam proses penyidikan (Ankum sebagai penyidik) ini, Faisal Salam menjelaskan, bahwa dalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil/ UU Nomor 31 Tahun 1997), proses pemeriksaan pendahuluan sangat berbeda dengan KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981), dimana kekuasaan komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal; (1) mengarahkan (*directing*), (2) mengkoordinir (*coordinating*) dan (3) mengendalikan (*control*). Hak komando dari Komandan diperoleh dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan TNI/Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur oleh undang-undang.[5] Seorang Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada, maka ketentraman/ketertiban pasukan akan terganggu. Oleh karena itu kedua macam wewenang itu tidak boleh lepas dari tangan seorang komandan, agar komandan dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.[6] Namun kedua macam wewenang atau haknya itu mempunyai sumber yang berlainan, maka cara melaksanakan kedua jenis wewenang tersebut berlainan pula. Pedoman hak menjalankan hak komandonya adalah apa yang layak dalam keadaan pada waktu itu dan yang tidak dilarang. Keputusan komandan dalam hal teknis dan strategis militer dan resikonya, maka keputusan/tindakan tersebut dinilai oleh atasannya dan oleh sejarah (penilaian yang sangat subyektif

[5]Faisal salam, *Op.Cit*, hal 26
[6]*Ibid*.

sekali), sedangkan cara menjalankan haknya untuk menghukum anak buahnya tidak dapat dilakukan semau- maunya, karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang secara jelas, yaitu dalam hal apabila dan bagaimana seorang komandan dapat menghukum seorang bawahannya.[7] Kewenangan Ankum/Komandan, baik yang terkait dengan hak komandonya maupun kewenangan dalam penegakan hukum tersebut, tentu tidak terlepas dari profesionalisme keprajuritan. Profesioalisme keparajuritan dimaksud, dapat dilihat dari dua aspek; pertama, mumpuni dalam taktik berperang dan kedua, mampu mengimplementasikan hukum dalam setiap penugasan.[8]

Merujuk pada ketentuan pasal 69 (1) dan pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dapat dipahami bagaimana peran dan kewenangan Ankum dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit bawahannya, dimana Ankum mempunyai kewenangan sebagai penyidik merupakan wewenang yang melekat pada Ankum yang diperoleh dari asas "atasan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap prajurit dibawah komandonya", sedangkan Polisi Militer dan Oditur mempunyai wewenang sebagai penyidik diperoleh sebagai pelimpaham wewenang dari Panglima TNI sebagai Ankum tertinggi, namun tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Dari uraian di atas, dapat dicermati bahwa, dari aspek normatif ada ketidakharmonisan atau pertentangan antara norma dalam Pasal 69 ayat 1 huruf a dan penjelasannya, dengan Pasal 74 huruf d, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut. Dalam penjelasan Pasal 69 (1) a, dikatakan bahwa sesuai asas kesatuan komando dan Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, maka kewenangan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan

[7] *Ibid*. hal 27
[8] W. Indrajid, *Peran TNI Dalam Konsep Keamanan Nasional (National security) Di Inonesia*, Jurnal Hukum Militer/ STHM/ Vol.3/No.1/Oktober 2018, hal.19.

yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Artinya, dalam hal penyelesaian perkara pidana kewenangan penyidikan Ankum telah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Dari kaidah ini seharusnya, Ankum tidak lagi menjalankan wewenang penyidikannya, termasuk kewenangan menahan terhadap tersangka, karena wewenang penahanan termasuk dalam ranah kewenangan penyidikan. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 74 huruf d, kewenangan penahanan masih berada pada Ankum. Disamping itu, terdapat konflik norma dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (tentang kewenangan penyidik) dengan Pasal 74 (tentang kewenangan Ankum), khususnya Pasal 74 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konflik norma ini akan terjadi apabila Ankum tidak mau menyerahkan anggota bawahannya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal 74 huruf a). Dalam kenyataan (secara empiris) sering terjadi, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan Ankum menyerahkan bawahannya yang bersalah melakukan tindak pidana untuk disidik oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, berikut sanksinya. Demikian juga dalam hal penahanan terhadap tersangka (bawahan Ankum), penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak tidak mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka (bandingkan Pasal 74 huruf d). Padahal pertimbangan untuk menahan tersangka dalam rangka kepentingan penyidikan, yang tahu adalah penyidik yang menangani langsung perkara tersangka, yaitu penyidik Polisi Militer/ Oditur (perhatikan Pasal 79 (1)).

Hal lain terkait dengan eksistensi Ankum sebagai penyidik ini, secara normatif Ankum ditetapkan sebagai penyidik, sama seperti Polisi Militer dan Oditur. Namun dalam kenyataannya (empiris), Ankum tidak bisa dan tidak pernah melakukan

penyidikan terhadap tersangka/ anggota bawahannya, dan Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik, sehingga Ankum tidak memiliki legalitas sebagai penyidik. Pengalaman dalam pelaksanaan penyidikan, Ankum cenderung tidak netral dan cenderung membela anak buahnya, sehingga penyidikan tidak bisa dilaksanakan secara berkeadilan.

Berkaitan dengan pertentangan substansi pasal-pasal tersebut di atas, baik secara normatif maupun empiris, perlu kiranya dilakukan penelitian mandalam, apakah lembaga Ankum sebagai penyidik dan kewenangannya tersebut, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum.

Khusus menyangkut kewenangan Oditur sebagai penyidik juga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 47 ayat (1) dan pasal 64 ayat (2) yang pada intinya, Oditur disamping memiliki kewenangan penuntututan juga dapat melakukan penyidikan. Dalam penjelasan pasal 64 ayat (2), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyidikan/dapat melakukan penyidikan" adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu. Dengan demikian, dalam Hapmil (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 69 (1)) terdapat tiga lembaga penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer dan Oditur.

Berkaitan dengan kewenangan Polisi Militer sebagai penyidik yang diperoleh sebagai pelimpahan wewenang dari Panglima TNI selaku Ankum tertinggi, telah beberapa kali diwujudkan dalam keputusan Panglima TNI, antara lain yang tertuang dalam Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep 04/P/II/ 1984, tanggal 4 Pebruari 1984 (sebelum keluarnya Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). Saat itu Polisi Militer Angkatan Darat (disebut Korp Polisi Militer) sebagai penyidik di lingkungan ABRI yang menyelenggarakan fungsi kepolisian militer,

meliputi; (a) Penegakan hukum, (b) Penegakan disiplin dan tata tertib militer di luar lingkungan Markas/Kapal/Kesatrian/Pangkalan, (c) Penyidikan, (d) Penyelidikan kriminalistik, (e) Pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib militer, (f) Penegakan hukum dan (g) Pengawalan protokoler kenegaraan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dan perubahan organisasi kepolisian militer pada masing-masing angkatan, dimana setiap angkatan dibentuk organisasi kepolisian militer, sehingga terbentuk polisi milier angkatan, terdiri dari Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) dan Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau), maka keluarlah Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tanggal 26 Maret 2004, Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer, meliputi; (a) Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, (b) Penegakan hukum, (c) Penegakan disiplin dan tata tertib militer, (d) penyidikan, (e) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer, (f) Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang, (g) Pengawalan protokoler kenegaraan dan (f) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 ini berlaku sampai sekarang. Selanjutnya seiring perkembangan organisasi kepolisian militer di lingkungan TNI, kemudian keluar Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/200/III/2007, Tanggal 16 Maret 2017, yang menetapkan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI (Pom TNI), namun tetap mengakomodir keberadaan Polisi Militer Angkatan (Pomad, Pomal dan Pomau).

Adanya Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tanggal 26 Maret 2004, Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/200/III/2007, Tanggal 16 Maret 2017, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI, merupakan peraturan internal TNI yang menegaskan fungsi-fungsi dan kewenangan penyidikan dari masing-masing

Pom TNI maupun POM Angkatan, sebagai wujud pelimpahan kewenangan penyidikan dari Panglima TNI selaku Ankum tertinggi kepada Polisi Militer Angkatan, namun dalam pelaksanaan penyidikan tetap berpedoman pada hukum acara pidana militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selain Ankum sebagai penyidik, penyidik lainnya adalah Polisi Militer dan Oditur Militer. Khusus Oditur sebagai penyidik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai catatan atas keberadaan Oditur sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer. Kewenangan Oditur sebagai penyidik dapat dilihat dari ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan; Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata/TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 64 ayat (2) disebutkan; Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (wewenang penuntutan), Oditur Militer dapat melakukan penyidikan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyidikan (dapat melakukan penyidikan)" adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu. Dilihat dari penjelasannya, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Oditur bukan merupakan penyidikan sebagai kelanjutan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau bukan penyidikan yang dilakukan secara bersama-sama antara Oditur dengan penyidik Polisi Militer, melainkan penyidikan yang dilakukan sejak awal secara tersendiri oleh Oditur berdasarkan perintah dari Oditur Jenderal, terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu.

Mencermati kewenangan Oditur bidang penyidikan sebagaimana dalam ketentuan pasal 64 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer di atas, kita bisa merujuk/ mengaitkan dengan Ketentuan

Peralihan pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berlaku umum, jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan bahwa, penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[9]

Dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dalam pasal 6 ayat (1) telah jelas penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus (penyidikan) oleh undang-undang. Artinya sejak Tahun 1981 dengan keluarnya KUHAP, amanat undang-undang bahwa yang menjalankan kekuasaan/fungsi penyidikan adalah Kepolisian Negara RI dan PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sementara dalam ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP dalam penjelasannya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu", ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955) dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang pidana tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun dalam kenyataanya, kewenangan Jaksa dalam penyidikan korupsi yang berdasarkan pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan ketiadaan kemauan politik legislatif maupun eksekutif untuk merubah pasal 284 ayat (2) KUHAP sampai saat

[9]Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Kemudian kewenagan Jaksa dalam penyidikan masuk dalam pasal 30 (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan

ini.[10] Situasi ini harus berakhir, solusinya Fatwa Mahkamah Konstitusi agar patuh pada pasal 284 (2) KUHAP. Dengan demikian KUHAP menetapkan akan menghilangkan ketentuan khusus acara pidana dalam waktu sesingkat-singkatnya, antara lain pada undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya. Ini berarti tidak ada lagi undang-undang yang melahirkan adanya acara khusus. Ingat, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apalagi dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1971 yang diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001) sama sekali tidak menyebut kewenangan Jaksa sebagai penyidik.[11]

Masih berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan ini, Andi Muhammad Sofyan mengatakan, kalau Jaksa ingin tetap sebagai penyidik, sesuai KUHAP, maka mereka harus jadi PPNS. Jadi kembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan *Criminal Justice Sistem (CJC)*; Polri sebagai penyidik, sesuai Ketentuan Umum KUHAP pasal 1 ayat (3) dan (4), Jaksa sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan pengadilan sesuai Pasal 1 ayat (6) a dan b dan Pasal 7 Ketentuan Umum KUHAP dan Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili, sesuai Pasal 1 ayat (8) hingga (11).[12]

Dengan mendasari ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang terkait dengan kewenangan Jaksa sebagai penyidik, apabila kewenangan Oditur sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer merujuk pada Ketentuan Peralihan pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, maka kewenangan Oditur sebagai penyidik perlu disesuaikan dengan mekanisme dalam tatanan *Criminal Justice Sistem* (CJS), dimana Polisi Militer sebagai

[10]Andi Muhammad sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, 2017, hal.100.
[11]*Ibid.*
[12]*Ibid.*

penyidik berwenang melakukan penyidikan, Oditur sebagai penuntut dan pelaksana keputusan pengadilan dan Hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengadili dalam rangka penegakan hukum pidana di lingkungan peradilan militer.

Tatanan dan mekanisme Integrited *Criminal Juctice Sistem* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dengan penegasan masing-masing; kewenangan/ kekuasaan penyidikan oleh Polisi Militer, kewenangan/ kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan oleh Oditur dan kekuasaan/kewenangan mengadili oleh Hakim di lingkungan peradilan militer, sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang mandiri, akan membawa proses penegakan hukum yang lebih baik, transparan dan berkeadilan serta berkepastian hukum, bagi prajurit TNI ke depan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan", menjadi penting untuk dilakukan.

## B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan disertasi ini, sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer saat ini, belum berbasis nilai keadilan.
2. Bagaimana kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer yang berbasis nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengungkap dan menemukan serta menganalisis kaidah normatif dan dasar-dasar hukum untuk regulasi lembaga penyidik yang memiliki kewenangan/kekuasaan penyidikan dalam proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer dengan mengutamakan pendekatan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum, sehingga proses penyidikan perkara pidana di lingkungan peradilan militer dapat menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum;
2. Mengungkap, menemukan, menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan penegakan hukum, terutama dalam proses penyidikan oleh penyidik Polisi Militer dihadapkan dengan peran Ankum sebagai penyidik dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara prajurit, serta untuk mengungkap bagaimana seharusnya peran Ankum dalam pembinaan prajurit dan pembinaan satuannya dalam rangka penegakan hukum bagi prajurit bawahannya, sehingga hasil penelitian ini bisa mendukung terwujudnya proses penegakan hukum di lingkungan TNI secara adil dan berkepastian hukum; dan
3. Menemukan model baru regulasi lembaga dan kewenangan penyidik yang efektif dan efisien dalam sistem peradilan militer berbasis nilai keadilan, dengan pendekatan asas keseimbangan, antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum, sehingga mampu mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit dan pihak-pihak yang berkrpentingan dalam proses hukum di lingkungan TNI.

## D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas tercapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. **Secara teoritis**, hasil penelitian ini sebagai bentuk penemuan baru, sehingga dapat dijadikan sumber referensi untuk perpustakaan kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), maupun perpustakaan umum, sehingga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum, khususnya Hukum Militer/Hukum Acara Pidana Militer, untuk pengembangan analisis tentang regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis nilai keadilan, melalui pendekatan asas keseimbangan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; dan
2. **Secara praktis**, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi bagi para praktisi hukum guna mengetahui lebih jauh tentang regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis pada nilai-nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang terkait dengan judul penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian. Konsep, artinya pendapat/rancangan yang telah ada dalam pikiran.[13] Istilah konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus*, artinya tangkapan, rancangan, pendapat, ide, gagasan, yang berarti proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan.[14] Pentingnya pemahaman tentang konsep ini untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

### 1. Rekonstruksi Hukum.

[13] W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:* Balai Pustaka, hal.520.
[14] Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara, hal. 122.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula. Merekonstruksikan berarti mengembalikan (memulihkan) sebagai semula.[15] Dari batasan yang diberikan dalam kamus umum bahasa Indonesia tersebut dapat dipahami, bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi/mengembalikan keadaan bangunan semula dengan penerapannya disesuaikan dengan realita yang ada pada saat ini. Rekonstruksi ini dikaitkan dengan rekonstruksi hukum, berarti mengembalikan/penyusunan kembali hukum positif, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai dan paradigma hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

2. **Regulasi.** Regulasi mempunyai arti; pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.[16] Sedangkan pengertian lain dari regulasi adalah pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang/ proses menetapkan peraturan umum oleh badan eksekutif atau badan yang mempunyai kekuasaan atau fungsi eksekutif.[17] Dalam kontek penulisan disertasi ini, regulasi diartikan sebagai pengaturan terhadap lembaga penyidik dalam sistem peradilan militer, dimana lembaga penyidik yang sudah ada secara atributif dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, kemudian direkonstruksi (dilakukan pengaturan kembali) agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang benar dan sesuai pula dengan nilai-nilai keadilan.

3. **Lembaga Penyidik**. Terdapat dua kata yaitu, lembaga dan penyidik yang masing-masing kata mempunyai arti tersendiri. Pertama, lembaga, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah lembaga mempunyai arti "badan (organisasi) yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu

[15]W.J.S Poerwodarminta, *Op.cit*, hal. 812
[16] Tim Beranda Yusticia, Kamus Istilah Hukum Super Lengkap, 2018, C-Klik Media, Hal. 496.
[17] Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, 2016, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, Hal. 356.

usaha"[18] Sedangkan yang kedua, penyidik. Pengertian penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11, dijelaskan bahwa, penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Penyidik TNI) yang selanjutnya disebut penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, apabila disatukan menjadi kalimat "lembaga penyidik", bisa diartikan sebagai "badan yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur yang berfungsi sebagai penyidik". Dalam kontek tulisan ini, maka lembaga/badan yang berfungsi sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer.

**4. Kewenangan Penyidik.**

a. Kewenangan. Kewenangan terdiri dari wewenang-wewenang berupa hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu Lembaga/badan tertentu. Wewenang adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan; hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.[19] Menurut A an Efendi dan Freddy Purnomo (mengutip pendapat dari Parajudi Admosudirjo), terdapat perbedaan antara wewenang dengan kewenangan, meskipun dalam praktek tidak selalau dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah

[18] *Ibid*. hal. 582

[19] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Babinkum TNI, 2015, *Kamus Hukum Militer*, hal.639

kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Dengan demikian kewenangan penegertiannya lebih luas daripada wewenang.[20]

b. Penyidik. Dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, tentang Peradilan Militer, dijelaskan bahwa, penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI), yang selanjutnya disebut penyidik adalah, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Dari kedua pengertian kewenangan dan penyidik tersebut di atas, maka dapat diformulasikan, bahwa kewenangan penyidik adalah hak dan wewenang dari badan/lembaga penyidik untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**5. Peradilan Militer.**

Peradilan militer terdiri dari dua kata, yaitu peradilan dan militer. Pengertian peradilan tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Menurut Kamus Hukum Militer, pengertian peradilan yaitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.[21] Sedangkan militer, mempunyai arti kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.[22] Istilah peradilan, terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang

[20]A an Efendi dan Freddy Purnomo, 2019, *Hukum Administrasi,* Sinar Grafika, hal.111
[21] Babinkum TNI, 2015, *Kamus Hukum Militer*, Diterbitkan Ulang oleh Babinkum TNI Hal. 534.
[22] *Ibid*., Hal. 441

abstrak, yaitu, hal yang memberikan keadilan. Hal yang memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang memohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dengan kata lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.[23]

Senada dengan pengertian di atas, peradilan militer juga mengandung pengertian, segala segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang dan/atau menemukan hukum *"in concreto"* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[24]

Pengertian peradilan berbeda dengan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga tempat subyek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.[25]

Dari pengertian istilah atau kata peradilan dan militer, maka dalam kontek tulisan disertasi ini, pengertian peradilan militer, dapat diartikan sebagai suatu proses hukum terhadap subyek hukum/subyek hukum militer, yang dijalankan oleh perangkat peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan militer, dengan menggunakan prosedur hukum acara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan pengertian pengadilan, telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan

[23] Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, *Op. Cit.*, Hal 321 – 322.
[24] Website: *http://www.pa-pulangpisau.go.id*. Arsip Artikel Pengadilan Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan. Published: Tuesday, 24 August 2021. Diunduh tanggal 7 Oktober 2021.
[25] *Ibid.*, Tanpa halaman.

kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi; pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.[26] Pengadilan militer berwenang mengadili subyek hukum yang tunduk kepada peradilan militer, yaitu anggota militer/TNI atau orang-orang yang karena kedudukannya/statusnya dipersamakan dengan militer.

Pengadilan militer mengadili dan memutus perkara-perkara tidak pidana yang dilakukan oleh anggota militer/TNI. Sebelum perkara dilimpahkan kepada pengadilan militer untuk disidangkan, pada tahap penyidikan, tersangka terlebih dahulu diproses hukum oleh penyidik. Pada umumnya penyidikan dilakukan oleh penyidik polisi militer, setelah berkas perkara tersangka selesai diberkas, kemudian dilimpahkan kepada Oditur dan selanjutnya ke pengadilan militer untuk dilakukan penuntutan dan putusan pengadilan. Keberadaan pengadilan militer ini, banyak menarik perhatian dari kalangan mahasiswa, akademisi dan pengamat masalah hukum, terutama menyangkut produk putusannya, bahkan ada yang menilai bahwa peradilan militer cenderung tidak independen dalam putusannya karena masih adanya pengaruh kuat dari figur-figur Komandan Satuan ataupun Papera yang masih dominan berpengaruh dalam proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, sehingga perlu diadakan pembaharuan baik dari aspek struktur, substansi dan budaya hukumnya guna mewujudkan peradilan militer yang professional, berkeadilan dan berkepastian hukum.

**6. Keadilan.** Kata keadilan berasal darikata "adil". Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata adil mempunyai arti, tidak berat sebelah (tidak memihak), sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[27] Kata "adil" berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut *"justice"* yang memiliki kesamaan arti dengan *"justitia"(*bahasa latin). Kata *Justice* dalam bahasa Inggris berasal dari kata "just"

[26] Ketentuan pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
[27] W.J.S Poerwodarminta, Op.cit hal.16

yang memiliki kesamaan arti dengan "*justus"*(bahasa latin), "*juste"* (bahasa Prancis), *"justo"* (bahasa Spanyol) dan "*gerech*t" (dalam bahasa Jerman).[28]

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan dan perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu, pertama; tidak merugikan seseorang dan kedua; perlakuan terhadap tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika dua prinsip itu terpenuhi barulah dikatakan adil.[29]

Dalam Islam, keadilan, prinsip-prinsip keadilan dan perintah untuk berbuat adil sangat dianjurkan. Standar keadilan dalam Islam berlaku secara universal melampaui suku, agama, ras dan golongan/bangsa. Banyak ayat-ayat Alquran yang menganjurkan/memerintahkan manusia untuk berbuat adil, diantaranya dalam Surat An Nisa, ayat 135," Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". Kemudian dalam ayat 58, surat An Nisa, Allah Swt memerintahkan, " Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". Kedua ayat Alquran di atas sangat relevan dan terkait dengan penegakan hukum. Seruan berbuat adil dan perintah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, merupakan seruan pentingnya berbuat adil terhadap semua pihak dan berlaku secara

[28] Dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, Metode penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2018, Hal. 285
[29]Ibid. (Dikutip dari footnot).

universal, sehingga dapat berlaku bagi semua insan pelaku penegak hukum, guna memahami sesungguhnya esensi keadilan tersebut menjadi tujuan dari penegakan hukum.

## F. Kerangka Teori.

Dalam proposal disertasi ini ada 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa, untuk itu ada beberapa teori pokok yang akan digunakan untuk membatu menganalisis ketiga permasalahan tersebut. Teori-teori itu dibagi menjadi tiga tataran, yaitu*; Grand Theory* (Teori Makro), *Middle Range Theory* (Teori Meso) dan *Applied Range Theory*, sebagai berikut;

### 1. *Grand Theory*. Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan

#### 1.1. Teori Negara Hukum.

**1.1.1. Hakekat Negara**. Istilah negara berasal dari "*De Staat"* (bahasa Belanda) dan "*The State"* (Inggris), *"L etat"* (Prancis) dan "*Der Staat"* (Jerman) yang bersumber dari "status" atau "statum" yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri. Secara etimologis, negara berasal dari bahasa Sansekerta yaitu, "nagari" atau "negara" yang artinya wilayah, kota atau penguasa.[30]

Membahas masalah negara tidak akan terlepas dari unsur manusia sebagai isi dan penggerak suatu negara. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah makhluk *Zoon Politicon*, dimana dalam kehidupannya akan selalu beraktivitas dan bergaul dengan sesama antara satu dengan yang lainnya. Dalam pergaulan tersebut secara alamiah akan timbul keterikatan emosi, keinginan dan tujuan-tujuan hidup bersamanya, sehingga membentuk suatu ikatan yang berbentuk organisasi. Semula bisa organisasi yang bersifat kesukuan/primordial yang masih homogen dan selanjutnya dikarenakan mempunyai hasrat/ keinginan bersama yang semakin besar dan heterogen serta mempunyai perasaan senasib sepenggungan/seperjuangan sebagai

[30]Tim Grasindo, 2017, *UUD 1945 dan Amandemennya, Jakarta*, Grasindohal.94

masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, kemudian meningkat menjadi suatu negara.

Padmo Wahyono[31] mengemukakan, mengenai terbentuknya negara secara ilmiah dilihat dari segi logisnya, dimulai dari masyarakat yang sederhana sampai menjadi negara yang modern, perkembangannya melalui beberapa fase, sebagai berikut :

*Pertama, Genonsenschaft* atau *Geriootschap,* yaitu suatu pengelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Jadi belum terorganisasi seperti sekarang, belum ada parlemen, belum ada kepala negara dan sebagainya. Lapisan yang membentuknya masih homogen atau segala hal diusahakan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, mungkin berdasarkan gotong royong dan apabila telah timbul sedikit rasa individualismenya, maka dasarnya tolong menolong. Yang menjadi dasar ialah siapa terkuat antara mereka yang sama itulah yang memimpin yang disebut dengan nama *Primus Inter Pares*. Bentuk ini secara logis adalah bentuk permulaan dari negara yang paling sederhana sekali.

*Kedua, Reich/Rijk,* ialah suatu bentuk dimana dalam suatu wilayah terlihat adanya pusat-pusat kekuasaan yang saling bertentangan, adanya persaingan dan saling atas mengatasi satu sama lainnya. Yang menjadi persoalan pada bentuk pertama ialah unsur rakyat, sedangkan pada bentuk kedua yaitu unsur pemerintahan yang berdaulat, tetapi antara pusat-pusat kekuasaan tadi belum terdapat pemerintahan yang tetap.

*Ketiga*, negara (staat) dalam arti sekarang, dimana ketiga unsur negara sudah terpenuhi dan hanya ada satu pusat kekuasaan saja. Pada bentuk ketiga ini unsur rakyat dan unsur pemerintahan sudah pasti serta unsur daerah/wilayahnya sudah

[31]Dikutip dari Backy Krisnayuda, 2017, *Pancasila & Undang-Undang, Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* Kencana, hal. 23-24

tertentu. Akan tetapi dalam staat ini akan dijumpai negara-negara yang tidak atas kemauan rakyat, melainkan akan dipaksakan oleh yang berkuasa dan dalam negara yang dipaksakan itu akan timbul gerakan dari rakyat yang merupakan suatu natie untuk melepaskan diri.

*Keempat*, Staat berkembang menjadi negara-negara nasional (*Democratische Natie*). Perkembangan dalam taraf ini disebut dengan nama perkembangan negara secara primer (*Primaire Staats Wording).*

Dari perkembangan terbentuknya negara tersebut, dapat dipahami bahwa, negara setidaknya ada tiga unsur yaitu; rakyat, wilayah dan pemerintahan, namun sampai saat ini pengertian tentang negara masih berbeda antara para ahli, antara lain;[32]

a. Menurut Notohamijoyo, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
b. Menurut Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *Souvereign*.
c. Menurut Wiryono, negara adalah suatu organisasi diantara suatu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok.
d. Menurut Logeman, negara adalah organisasi kewibawaan. Organisasi kewibawaan ini mempunyai obyek tertentu, yaitu mengatur dan menyelenggarakan tata masyarakat.

[32] Dikutip dari Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI, hal.7-10

Dari ketiga unsur negara, *Pertama*, unsur rakyat adalah semua orang yang berada dalam daerah negara dan sangat penting dalam suatu negara karena manusia merupakan oknum dan anggota masyarakat yang secara konkrit memilki kepentingan agar organisasi negara berjalan dengan baik. *Kedua*, unsur wilayah juga merupakan unsur penting dalam suatu negara, sebab tidak mungkin ada negara apabila tidak ada wilayah (teritorial) yang didiami oleh rakyat. Wilayah dapat diartikan sebagai suatu daerah tempat berlakunya susunan pemerintahan dan undang-undang atau ketentuan suatu negara, meliputi; daratan, perairan dan udara di atas daratan dan perairan tersebut. Batas-batas wilayah suatu negara ditetapkan dalam perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan. Sedangkan yang ketiga, unsur pemerintahan yaitu, yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyatnya. Ciri khas pemerintahan dalam negara adalah mempunyai kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk yang berada dalam negara tersebut.

**1.1.2. Negara Hukum.** Secara historikal, sesungguhnya pemikiran atau cita negara hukum itu telah lama muncul, bahkan jauh sebelum kemunculan ilmu negara/ketatanegaraan dan revolusi di Inggris 1688. Pemikiran negara hukum sesungguhnya muncul pertama kali dikemukakan oleh Plato kemudian dipertegas oleh pemikiran Aristoteles. Plato dalam bukunya Nomoi, memberi perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah diatur oleh hukum. Cita-cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya Aristoletes yang mengatakan bahwa, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.[33]

Cita-cita negara hukum dari hasil pemikiran Plato dan Aristoteles tersebut, selanjutnya direfleksikan lagi oleh pemikir-pemikir berpaham hukum alam atau hukum kodrad generasi berikutnya yang hidup pada abad ke 17 dan ke 18.

[33]Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, hal.126

Tulisan para pemikir tersebut, dengan adanya cita negara hukum dari Plato dan Aristoteles, seolah mendapat energi pemikiran dalam rangka mengkritisi dan reaksi terhadap praktek kenegaraan yang bersifat abosolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa/raja harus dibatasi agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap hak asasi rakyat dan warganya. Pembatasan tersebut dengan menerapkan supremasi hukum, bahwa semua tindakan penguasa negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tapi harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34]

Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* atau *The Rule Of Law*. Sebenarnya ada perbedaan antara rechtstaat dengan rule of law. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, *Rechtsstaat* memiliki karakter administratif, sedangkan *The Rule Of Law* berkarakter yudisial. *Rechtsstaat* bersumber dari tradisi hukum negara-negara eropa kontinental yang bersandar pada *Civil Law* dan legisme yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *Rechtsstaat* terletak pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Pilihan hukum tertulis dan paham legisme di *Rechtsstaat* didasari oleh penekanan pada kepastian hukum.[35]

Dalam paham negara hukum, harus ada jaminan bahwa, hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*Democratische Rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan , ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka *(Machtsstaat).* Prinsip negara

[34]*Ibid*. hal 127
[35]Backy Krisnayuda, *Op.cit*, hal. 24-26

hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-udang Dasar.[36]

Konsep negara hukum,[37] dalam beberapa perspektif;

Pertama, Konsep *Rechtsstaat.* Secara formal istilah *Rechtsstaat, The Rule Of Law* dan Negara Hukum menunjuk pada pengertian yang sama. Mengutip pendapat dari Cf. Azhari, bahwa *Rechtsstaat* (Jerman) menunjuk pada pengertian, "pemerintah tunduk pada hukum dan dapat menggunakan kekuasaannya hanya menurut hukum dan bahwa keterlibatannya dengan kebebasan dan hak milik harus dapat diprediksi dan dapat dikalkulasi. Paham negara hukum, bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan setiap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Hukum harus baik karena sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan hukum harus adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Scheltema menyebut ada 4 (empat) unsur utama negara hukum, yaitu; 1) Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah (a) asas legalitas, (b) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga mengetahui apa yang dapat diharapkan, (c) Undang-undang tidak berlaku surut, (d) Hak asasi dijamin dengan undang-undang, (e) Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. 2) Asas persamaan, yang unsur-unsurnya adalah; (a) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil, (b) Adanya pemisahan kekuasaan. 3) Asas Demokrasi, yang unsur-unsurnya adalah; (a) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara, (b) Peraturan tunduk kepada badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen, (c) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah dan 4) Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah; (a)

[36]*Ibid.*
[37]Eduardus Marius Bo, 2019, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, hal.233-236

Hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar dan (b) Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) menurut Imanuae Kant misalnya, memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker Staat* atau *Nachtwachterstaat* (negara penjaga malam), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Teori Imanuel Kant ini lebih cenderung pada fungsi negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban individu dan masyarakat. Sedangkan Friedrich Julius Stahl berpandangan bahwa, konsep negara hukum berubah dan berkembang lebih luas, negara tidak hanya sebagai penjaga malam tapi negara juga ikut campur dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan demi terwujudnya tujuan negara yakni kesejahteraan.[38]

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara harus menjadi negara hukum, sebagai semboyan yang menjadi daya dorong bagi perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan dan batas kegiatannya sesuai dengan suasana lingkungan kebebasan warga negara menurut hukum dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Penyelenggara negara (pemerintah) dalam menyelenggarakan aktivitas kenegaraannya harus terlebih dahulu menentukan kewenangan dan batas kewenagannya, sehingga tidak melanggar HAM rakyat/warga negaranya. Dengan kata lain, negara hukum pada perinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau memiliki dasar legalitas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[39]

[38]Widiada Gunakaya, *Op cit*. Hal.129
[39]*Ibid*. hal. 129-130

Menurut F.J. Sthall,[40] negara hukum memiliki unsur-unsur pokok, meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia., pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *Trias Politicia*, pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*Wetmatig Bestuur)* dan adanya peradilan administrasi negara.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya untuk mengesahkan dan membenarkan serta segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia. Unsur kedua dari negara hukum, yaitu pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *Trias Politicia*, yang membagi kekuasaan menjadi tiga macam, meliputi; (1) legislatif, merupakan lembaga yang membuat dan menetapkan undang-undang, (2) eksekutif, merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan (3) yudikatif, merupakan lembaga yang mengadili warga masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum/undang-undang.[41]Unsur lainnya dari negara hukum, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang, merupakan proses atau segala urusan yang dijalankan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan negara. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang merupakan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*).[42]

Sejalan dengan Friedrich Julius stahl tersebut, Hans Kelsen menyebutkan empat syarat *Rechtsstaat* kaitannya dengan negara hukum yang juga negara demokratis, sebagai berikut; a) negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. b) anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat. c) negara yang mengatur

[40]H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi dan Tasis*, Rajawali Pers, hal.7
[41]*Ibid.*
[42]*Ibid.*

pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara. d) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.[43]

Kedua, Konsep *Rule Of Law*.[44] Istilah *Rule Of Law* diperkenalkan oleh Albert van Dicey dari Inggris. Menurut Van Dicey, *Rule Of Law* adalah; supremasi absolut atau didahulukannya hukum yang mengatur, bukan didahulukannya pengaruh dari kekuasaan yang sewenang-wenang dan mengabaikan keberadaan kewenangan yang sewenang-wenang, yang dilakukan oleh kekuasaan prerogatif atau kekuasaan yang dimiliki diskresi luas pada pemerintah. Selanjutnya menurut Ian D. Loveland, konsep *Rule Of Law* mengandung makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas mengandung arti, "*...that people should obey the law and be ruled by it",* sedangkan dalam arti sempit The Rule Of Law adalah,"*...that government shall be ruled by the law and subject to it".* Pengertian terakhir merupakan arti ideal The Rule Of Law yang dinyatakan dalam frase, "*Government by law and not by men".*

Konsep *"The Rule Of Law"* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* dengan tujuan menentang absolutisme raja secara evolusioner dengan karakter *Commen Law (Judicial).* Sedangkan unsur-unsur *Rule Of Law* menurut A.V. Dicey adalah; (1) *Supremacy of Law.* (2) *Eguality Before The Law* dan (3) *Due Process Of Law*. [45] Ketiga unsur negara hukum menurut A.V. Dicey tersebut, pertama, supremasi hukum (*Supremacy Of Law*) diartikan bahwa, tak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya, kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa di hadapan pengadilan umum negara. Kedua, persamaan di depan hukum *(Equality Before The Law),* artinya bahwa setiap orang apapun pangkat atau kondisinya tunduk pada hukum

[43]*Ibid.*
[44]Eduardus Marius Bo, *Op.Cit*, hal.239-240.
[45]*Ibid.*

biasa yang merupakan lingkup yang berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *Equality Before The Law* atau persamaan di depan hukum, berarti semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sapadan dalam pengadilan yang sama pula.[46]

Sedangkan "*Due Process Law"*, artinya bahwa konstitusi dijiwai oleh *Rule Of Law* dengan alasan-alasan bahwa prinsip-prinsip umum konstitusi (misalnya, terkait dengan hak akan kebebasan pribadi atau hak mengadakan rapat umum) yang merupakan hasil keputusan yudisiil yang menentukan hak-hak individu pada kasus tertentu yang dibawa ke muka pengadilan atau secara sederhana dapat dikatakan, bahwa *Due Process Of Law* diartikan segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada suatu tindakan apapun yang tidak memiliki dasar hukum.[47]

Masih terkait dengan ketiga unsur-unsur *Rule Of Law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut, kemudian Philipus M. Hadjon, menguraikan tiga arti dari *The Rule Of Law* tersebut sebagai berikut:

> *Pertama*, Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari *"arbitrary power"* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
>
> *Kedua*, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *Ordinary Law If The Land* yang dilaksanakan oleh *Ordinary Court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara.

[46]H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hal.8-9
[47]*Ibid.*

*Ketiga*, Konstitusi adalah hasil dari *"The Ordinary Law Of The Land",* bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas, sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.[48]

Gagasan tentang negara hukum *(Rechtsstaat dan The Rule Of Law)* pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak asasi rakyat/warga negara dengan membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang dinamakan konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup di abad 19, dimana sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.[49] Dengan demikian, pemerintah dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Konsep konstitusionalisme atau demokrasi konstitusional abad ke 19, memberi peranan yang sangat terbatas pada negara ini disebut "negara hukum formal" (klasik), yang bisa disebut juga sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai kegiatan dari interest-group dalam masyarakatnya.[50] Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme abad 19 dan permulaan abad ke-20 ditandai dengan pemberian istilah *Rechtsstaat* (Eropa kontinental) atau *The Rule Of Law* (*Anglo Saxon*), disebut sebagai negara hukum formal (klasik) dengan ciri-cirinya

[48]Eduardus Marius Bo, *Op.Cit*, hal.240.
[49]*Ibid*. hal.254-255
[50]*Ibid*.

sendiri. Pemerintah pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik, negara diperkenalkan sebagai *Nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) yang sangat sempit ruang geraknya, bukan saja di lapangan politik tapi juga dilapangan ekonomi.[51]

Konsep negara hukum formal (klasik) mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20. Gagasan bahwa pemerintah (pasif) dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser ke arah gagasan baru, bahwa pemerintah tidak boleh pasif hanya sebagai penjaga malam, melainkan pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus berupaya membangun kesejahteraan rakyatnya dengan mengatur kehidupan ekonomi, sosial, mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan baru ini disebut sebagai gagasan *"Welfare State"* atau "Negara hukum materiil".[52]

Terlepas dari perbedaan istilah *"Rechtsstaat"* menurut tradisi Jerman, maupun tradisi Anglo Saxon dengan istilah *"The Rule Of Law",* dewasa ini telah dicapai konsensus minimum mengenai apa yang disebut *The Rule Of Law* dan *Rechtsstaat,* baik dalam arti formil maupun materil, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) elemen pokok sebagai berikut;[53]

a. Asas legalitas, termasuk proses pembuatan atau pembentukan hukum yang transparan, akuntabel dan demokratis (*legality, including a transparent, accountable and democratic process for enacting law*).
b. Kepastian hukum atau *Legal Certainly*.
*c*. Larangan bertindak sekehendak hati di luar aturan (*Probihation Of Arbitrariness)*
d. Akses kepada peradilan yang independen dan imparsial, termasuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tata usaha

[51]*Ibid.*
[52]*Ibid*. hal. 258
[53]Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia,* Kompas, hal. 134-135.

negara (*Access to justice before independent and impartial courts, including judicial review of administrative acts).*

*e.* Prinsip non diskriminasi dan persamaan di depan hukum (*Non Discrimination And Equality Before The Law)*

**1.1.3. Negara Hukum Indonesia.** Negara hukum Indonesia masih terus menerus dibangun dan masih membutuhkan pengidentifikasian lebih tajam lagi dari aspek substansi hukum, lembaga hukum dan budaya hukum untuk mewujudkan negara hukum Indonesia saat ini dan yang akan datang. Konsep negara hukum *(Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law)* yang sudah ada saat ini merupakan konsep negara hukum dimana sosiofilosofis dan sosio kulturalnya dari masyarakat barat yang berpaham individualistis dan liberal. Oleh karena itu, untuk konsep negara hukum dan sistem pemerintahan Indonesia harus tumbuh dan berkembang sesuai budaya dan karakter bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat),* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machsstaat).* Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem konstitusional, yaitu pemerintahan yang berdasarkan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).[54]

Dalam amandemen ketiga pada tahun 2001, dalam Undang-Undang Dasar1945, ditambahkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah Negera Hukum". Menurut Jimly Assiddiqie, kata yang dipakai dalam rumusan konstitusional tersebut adalah perkataan difinitif, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai salah satu defisinisi negara Indonesia, berarti konsep negara hukum itu menjadi roh eksistensial bagi keberadaan negara Indonesia. Jika roh negara hukum itu hilang, negara Indonesia menjadi tidak

[54] Bachsan Mustafa, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bhakti, hal.153

ada. Tidak ada negara yang bernama Indonesia, kecuali negara itu adalah negara hukum, yang pada intinya hendak menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara Indonesia ini adalah sistem norma hukum yang mengatur dan mengendalikan serta secara nyata bertindak sebagai pemimpin yang sesungguhnya dalam bernegara, sesuai dengan semboyan " *The Rule Of Law Not Of Man* ", bahwa yang sesungguhnya memimpin kita itu adalah aturan, bukan orang perorang. Tokoh pemimpin justru hanya berfungsi sebagai roll model, uswatun hasanah, sebagai teladan dalam memberikan contoh tindakan, dan dalam mengembangkan sistim kebijakan, menjalankan serta menegakkan kebijakan-kebijakan sistemik yang telah disepakati bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undangn Dasar 1945. Itulah prinsip dasar negara hukum yang menjadi roh keberadaan negara Indonesia sebagai satu sistem konstitusional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.[55]

Indonesia bukanlah negara hukum yang biasa *(Rechtsstaat)* ataupun negara hukum kesejahteraan *(Welfare Rechtsstaat)*, tetapi adalah negara hukum Pancasila yang berkeadilan sosial *(Social Justice Rechtsstaat)* bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu dan mempersatukan Indonesia, serta bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pentingnya keadilan sosial ini sebagai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasanya ditegaskan; (1) "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", (2) "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat". Sementara itu dalam penjelasan mengenai sistim pemerintahan negara ditegaskan bahwa, (1) "negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). (2) "pemerintahan

[55]Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hal 142

berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kedua pokok pikiran tersebut harus di baca sebagai satu kesatuan filosofis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.[56]

Menurut Jimly Assiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok dari negara hukum *(Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law)* yang berpedoman dengan Undang-undang Dasar 1945.[57] Prinsip-prinsip negara hukum tersebut, sebagai berikut;

a. Supremasi hukum *(Supremacy Of Law)*. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

b. Persamaan dalam hukum *(Equality Before The Law)*. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminasif dalam segala bentuk manifetasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative action* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative action* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu, misalnya kelompok masyarakat suku

[56]*Ibid*. hal. 146
[57]Dikutip dari Backy Krisnayuda, *Op.cit*. footnot hal.28-29

terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Adapun kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, kaum wanita atau anak-anak terlantar.

c. Asas legalitas *(Due Process Of Law).* Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikan, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rule and procedures.*

d. Pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal.

e. Organ-organ eksekutif independen. Pembatasan kekuasaan di jaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti Bank Central, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

f. Peradilan bebas dan tidak memihak. *(Independent and impartial judiciary).* Mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang.

g. Peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap warga negara untuk

menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan tata negara *(Constitutional Court)*. Disamping adanya pengadilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi ini adalah dalam rangka memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.

i. Perlindungan Hak Asasi Mannusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

j. Bersifat demokratis *(Democratische Rechtsstaat)*. Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan memcerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara *(Welfare Rechtsstaat)*. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

l. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Berkaitan dengn negara hukum Pancasila, Menurut Philipus M. Hadjon untuk Negara Republik Indonesia menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila yaitu; terjalinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalinya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.[58] Sedangkan yang menjadi unsur unsur negara Pancasila adalah :

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.[59]

Menurut Oemar Senoadji, bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri khas indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, oleh karena itu negara hukum Indonesia dapat pula di namakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom Of Religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan

[58]Philipus M. Hadjon 2007 , *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Peradaban, hal 80
[59]*Ibid.* hal 85.

beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.[60]

Sedangkankan Padmo Wahyono mengatakan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.[61]

Ismail Sunny dalam tulisannya mekanisme demokrasi Pancasila menjelaskan bahwa, negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur sebagai berikut;[62] a) menjunjung tinggi hukum. b) adanya pembagian kekuasaan. c) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remidi prosedural untuk mempertahankannya dan d) dimungkinkan peradilan administrasi.

Selanjutnya dari hasil kajian dan penelitian oleh Muin Fahmal, tentang konsep negara hukum, menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yaitu :

a. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, dimana Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat juga memuat prinsip agama;
b. Kedaulatan negara ada pada rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga negara yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan adanya persamaan dengan prinsip *Rule Of Law;*
c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara *(Distribution Of Power);*
d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman;

[60]Dikutip dari Widiada Gunakaya. *Op.cit,* hal.145
[61]*Ibid.*
[62]*http://digilib.uns.ac.id*., hal 27, diunduh tanggal 6 April 2020.

f. Adanya kerjasama antara DPR dan pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan; dan

g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.[63]

Dari teori-teori negara hukum, baik yang bersumber dari tradisi Eropa kontinental *(Rechtsstaat)* maupun tradisi *Anglo Saxon (The Rule Of Law)* pada prinsipnya menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya jaminan dari undang-undang terhadap pembatasan-pembatasan kekuasaan dari penguasa agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam konstitusi negara Indonesia juga sudah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, telah mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), serta adanya jaminan kebebasan kekuasaan kehakiman di lembaga/badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Teori negara hukum dan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sangat relevan dengan penelitian disertasi ini, mengingat dalam penelitian disertasi ini menyangkut rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang juga mengikuti kaidah-kaidah dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, artinya peradilan militer sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menjalankan fungsinya secara profesional, menegakkan hukum di lingkungan masyarakat militer harus mandiri, bebas dari pengaruh siapapun juga. Menjalankan fungsi peradilan dengan berdasar atas hukum, bukan atas kehendak orang perorang/figur tertentu atau

[63] *Ibid.*, hal.27-28.

faktor yang lain di luar hukum, menjamin hak-hak prajurit sebagai pencari keadilan dan menjamin aparat pengak hukum di lingkungan peradilan militer bertindak berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan dan kesewenangan.

Dalam peradilan militer terdapat kekuasaan/kewenangan penyidikan, kekuasaan/kewenangan penuntutan dan kekuasaan/ kewenangan hakim untuk memutus perkara di pengadilan sebagai lembaga tempat masyarakat militer mencari keadilan, harus juga mendapat jaminan untuk terlaksananya proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, harus berjalan dengan jujur, adil dan berkepastian hukum. Dalam penegakan hukum tidak ada diskriminasi dan semua prajurit TNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta perlakuan yang sama pula di depan hukum *(Equality Before The Law)*.

Dari aspek struktural penegak hukum, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan di lingkungan peradilan militer (Ankum, Polisi Militer dan Oditur), sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka segala tindakan penyidikan harus berdasarkan hukum, bukan atas dasar keinginan orang/figur-figur tertentu diluar kepentingan hukum atau murni kepentingan militer. Demikian juga dengan kekuasaan/kewenangan penyidikan juga harus atas dasar hukum, maksudnya kewenangan penyidikan diperoleh harus berdasarkan hukum, sesuai dengan kaidah-kaidah normatif, sehingga tidak menimbulkan konflik norma atau ketidakjelasan/ambiguitas dalam kewenangan penyidikan.

**2. Teori Keadilan.**

Kata keadilan berasal darikata "adil". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata adil mempunyai arti, tidak berat sebelah (tidak memihak), sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[64] Kata "adil" berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut *"justice"* yang memiliki kesamaan arti dengan *"justitia"* (bahasa

[64] W.J.S. Poerwodarminta, *Op. cit,*, hal 16

latin). Kata Justice dalam bahasa Inggris berasal dari kata *"just"* yang memiliki kesamaan arti dengan *"justus"* (bahasa latin), *"juste"* (bahasa Prancis), *"justo"* (bahasa Spanyol) dan "*Gerecht"* (dalam bahasa Jerman).[65] Menurut Kamus Istilah Hukum Populer, kata "adil" dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *"al adl"* yang artinya, sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.[66]

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan dan perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu, pertama; tidak merugikan seseorang dan kedua; perlakuan terhadap tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika dua prinsip itu terpenuhi barulah dikatakan adil.[67]

Dalam Islam, keadilan, prinsip-prinsip keadilan dan perintah untuk berbuat adil sangat dianjurkan. Standar keadilan dalam Islam berlaku secara universal melampaui suku, agama, ras dan golongan/ bangsa. Banyak ayat-ayat Alquran yang menganjurkan/memerintahkan manusia untuk berbuat adil, diantaranya dalam Surat An Nisa, ayat 135," Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". Kemudian dalam ayat 58, surat An Nisa, Allah Swt memerintahkan, " Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia

[65] Dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, *Metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, 2018, hal.285
[66] Joenaidi Efendi, dkk., *Op.cit.*, hal.215.
[67] Dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, *Footnot*, hal. 285

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". Kedua ayat Alquran di atas sangat relevan dan terkait dengan penegakan hukum. Seruan berbuat adil dan perintah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, merupakan seruan pentingnya berbuat adil terhadap semua pihak dan berlaku secara universal, sehingga dapat berlaku bagi semua insan pelaku penegak hukum, guna memahami sesungguhnya esensi keadilan tersebut menjadi tujuan dari penegakan hukum.

Pengertian dan macam-macam keadilan sudah banyak dirumuskan oleh para sarjana/cendikiawan/filosuf dari berbagai belahan dunia, sesuai dengan waktu, filosofi, kondisi dan masalah sosiokultural yang dihadapi oleh masing-masing filosuf. Namun macam-macam keadilan yang sering dibahas di dunia akademis, ada 4 (empat) macam keadilan, yaitu:[68] *Pertama*, keadilan distribusi *(Distributive Justice)*, biasa dikenal dan dikaitkan dengan konsep "keadilan ekonomi", yaitu berkenaan dengan fairness dalam apa yang didapatkan orang, mulai dari barang tertentu sampai ke perhatian. Masalahnya adalah apa yang dinilai pembagian yang adil dalam perspektif *Distributive Justice* masih menjadi perdebatan. Keadilan distribusi atau keadilan ekonomi berkaitan dengan persoalan memberikan kepada semua anggota masyarakat suatu bagian yang adil atas mamfaat dan sumber daya yang tersedia, meskipun disadari bahwa pembagian secara adil dan merata tersebut tidak mudah disepakati. Menurut para ahli, ada tiga kriteria yang bisa dipakai untuk menentukan proses pembagian yang dapat dinilai menghasilkan keadilan distributif, yaitu; (a) *Equity*, artinya ganjaran bagi seseorang harus setara dengan sumbangannya kepada masyarakat, (b) *Equality*, artinya setiap orang mendapat bagian yang sama, terlepas dari masukan atau kostribusi yang diberikan, (c) *Need* atau kebutuhan, merupakan

[68] Jimly Asshddiqie, *Op. cit.*,hal. 58-63

kriteria dasar pembagian berdasarkan kebutuhan, sehingga orang yang lebih membutuhkan dinilai adil untuk mendapatkan yang lebih banyak, sedangkan kebutuhannya sedikit dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang lebih sedikit. *Kedua*, keadilan prosedur *(Procedural Justice)*, yaitu keadilan prosedural yang berkaitan dengan ide *"fair play".* Keadilan prosedural berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan berdasarkan proses yang adil dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua pihak yang setara. Aturan yang sudah ditetapkan lebih dahulu harus diikuti secara imparsial (tidak memihak) dan diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan suatu keputusan yang tidak bias kepentingan atau berpihak. Mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur harus bersikap netral dan mereka yang secara langsung akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut haruslah mempunyai suara atau perwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan partisipasi publik yang luas, proses yang ditempuh mudah dipercaya, sehingga hasilnya pun mudah dipercaya. Pengelolaan proses yang adil, transparan dan akuntabel, merupakan persoalan yang sentral dalam sistem dan prosedur penyelesaian sengketa, termasuk dalam negoisasi, mediasi, arbitrase dan ajudikasi di lingkungan lembaga peradilan. *Ketiga*, keadilan pembalasan *(Retributive Justice).* Keadilan pembalasan yang bekerja berdasarkan penjatuhan sanksi yang membalaskan kesalahan atau pelanggaran norma yang telah dilakukan seseorang, meskipun dalam praktek apa yang menentukan hukuman yang adil dan setimpal selalu diperdebatkan. Data menunjukkan bahwa efektifitas pendekatan retributif ini dapat dikatakan terbatas. Pendekatan retributif lebih menyebabkan berkembangnya iklim balas dendam yang justru lebih keras dari pada reparasi atau pemulihan keadaan. Dalam kontek ini keadilan dipahami dengan emosi daripada dengan motivasi untuk keadilan ataupun pencegahan terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. *Keempat*, keadilan pemulihan *(Restorative Justice),*

merupakan keadilan yang memulihkan yang biasa disebut sebagai keadilan yang memperbaiki atau *Corrective Justice*. Dalam hal ini pencari keadilan bukan menuntut pembalasan, bukan pembagian, bukan sekedar pemenuhan prosedur aturan formal, tetapi lebih penting adalah pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindakan yang menimbulkan ketidakadilan. Pemulihan bisa dilakukan secara fisik ataupun non fisik. Misalnya pemulihan nama baik seseorang yang dirugikan oleh tuduhan atau pernyataan negatif yang tidak berdasar di media massa adalah dengan cara mengumumkan rasa penyesalan atau permintaan maaf dari pelaku kepada orang yang merasa dirugikan, terkadang juga orang yang dirugikan membutuhkan konpensasi ataupun restitusi berupa uang dengan maksud memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Tujuan utama keadilan restoratif yaitu untuk memberdayakan korban dimana pelaku didorong agar memperhatiakn pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan materiil, emosional dan sosial korban. Pusat perhatian keadilan restoratif adalah pada restorasi relasi dalam suatu martabat, artinya bahwa status *Quo Ente* (keadaan sebelum tindak pidana dilakukan) diasumsikan sesuai dengan keadilan. Keadilan restorasi tidak bertujuan mengadakan restorasi status *Quo Ente*, melainkan untuk mengadakan restorasi menuju situasi ideal kesamaan sosial.[69]

Dalam keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) prinsip-prinsip dasar meliputi:[70] *Pertama*, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yag terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Korban merupakan pihak yang secara langsung menderita oleh kejahatan, pelaku kejahatan juga menderita kerugian, yaitu dengan melakukan kejahatan maka ia mengalami kemerosotan mental, kehilangan kehormatan dan martabatnya sebagai

[69] Ahmad Makbul, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol.4/No.2/Nopember 2019, hal.94
[70] Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, hal 34-38.

manusia. Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh tindak kejahatan karena tatanan hidup bersama menjadi kacau balau, kewibawaan hukum dilecehkan dan rasa kedamaian masyarakat menjadi hilang diganti ketakutan dan kecemasan. Oleh karena itu keadilan restoratif ingin memulihkan ketiga pihak tersebut. *Kedua*, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restoratif) di atas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu; korban, pelaku kejahatan dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pengadilan. Kebutuhan korban terkait dengan pemulihan mental, sehingga korban membutuhkan informasi kenapa menjadi korban untuk menyembuhkan luka batinnya, korban menbutuhkan dukungan dan pemberdayaan dari masyarakat untuk ikut dilibatkan dalam perundingan, dan korban juga membutuhkan restitusi atas penderitaan dan kehilangan akibat kejahatan. Pelaku kejahatan membutuhkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pengakuannya, maka kemudian disepakati bersama kompensasi dan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan yang akan diberikan kepada korban. Demikian juga masyarakat yang dirugikan akibat terjandinya kejahatan karena telah terganggunya harmoni kehidupan bersama, maka masyarakat harus memperkokoh diri mencari kebenaran atas tindak pidana yang terjadi. Masyarakat harus membantu menciptakan kondisi yang dapat membantu pemulihan korban dan pelaku kejahatan. *Ketiga,* keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban pelaku kejahatan mengakui kesalahannya, sebaliknya korban membutuhkan untuk didengar diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf pelaku kejahatan merupakan proses penting untuk penyembuhan luka-luka batin korban, selanjutnya pelaku kejahatan memulihkan penderitaan fisik dan materiil yang diderita korban dengan memberikan kompensasi untuk membayar biaya penyembuhan luka-luka fisik dan

mengganti kehilangan materiil korban. Selanjutnya, pelaku kejahatan juga harus mengungkapkan pengakuan dan permohonan maaf kepada warga masyarakat dan juga memberikan kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

Keadilan juga diharapkan menjadi cita atau substansi dari hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal, sebaliknya gagasan hukum mengarah pada rechtsidee (cita hukum) yakni keadilan. Bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni; keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada "kesamaan hak di depan hukum", aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia (aspek ini menentukan isi hukum), sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.[71] Hal yang sama seperti dikutip oleh Anang Fajrul, dimana Radbruch menyatakan,[72] bahwa Substansi hukum meliputi tiga nilai; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana orientasinya untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha menwujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian sejati, keadilan bagi seluruh masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat.

[71] Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, Genta, hal.130
[72] Anang Fajrol U, *Pokok Wacana.* Com

Selanjutnya Radbruch menyatakan, nilai dasar pertama, tentang keadilan, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominannya kedudukan dan peranan keadilan bagi hukum, sehingga Radbruch menyatakan,"*Rechct Ist Wille Zur Gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap pihak minoritas atau pihak yang dikuasai. Nilai yang kedua, kemanfaatan hukum. Sesuai dengan penganut aliran utilitas menganggap bahwa hukum semata-mata hanya untuk memberikan kemanfaatan. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin masyarakat. Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan *(happiness)*, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka dalam pelaksanaan penegakannya haruslah memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, bukan sebaliknya.[73] Nilai dasar ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah, ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi suatu sistem dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[74]

Teori keadilan ini sangat relevan dengan penelitian ini, mengingat nilai-nilai keadilan selain memiliki nilai yang universal berlaku bagi kemanusiaan pada umunya,

[73] Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum,* Sinar Grafika, hal. 110-111.
[74] Anang Fajrul U, *Pojok Wacana*, *Op.cit*. hal. 3.

juga sangat dibutuhkan dan menjadi pedoman bagi setiap individu baik sebagai subyek maupun sebagai obyek dalam rangka penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, maka pelaku penegakan hukum di lingkungan TNI (Penyidik, Penuntut, Ankum, Papera, Hakim dan setiap atasan terhadap bawahannya), baik dalam hubungannya dengan penegakan hukum dalam proses peradilan pidana, maupun dalam kehidupan sehari-hari bagi prajurit TNI dan keluarganya, maka setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, tidak ada diskriminasi dan setiap individu prajurit terlindungi Hak-hak Asasinya. Dengan demikian, penegakan hukum di lembaga peradilan militer ke depan akan semakin berkualitas dan dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan.

**3. *Meddle Theory*. Teori Sistem Hukum.**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang mempunyai pengertian sebagai "Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian", atau dapat juga diartikan sebagai " Hubungan yang berlangsung secara terus-menerus diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur". Dengan demikian istilah sistem mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Istilah sistem ini pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh.[75]

Suatu sistem mempunyai karakteristik yang dikenali melalui ciri-cirinya. Menurut Elias M. Awad, ciri-ciri pokok suatu sistem meliputi:

a. Sistem bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka;

[75]Mahmutarom, HR, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam*, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional, hal. 285-286

b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem;

c. Diantara subsistem-subsistem itu ada saling ketergantungan satu sama lainnya, karena output dari suatu subsistem pada dasarnya merupakan input dari subsistem lainnya;

d. Suatu subsistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*self adjusment*), karena adanya sistem umpan balik (*feedback*);

e. Sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri (self regulation);

f. Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dituju.[76]

Sedangkan pengertian hukum, hingga saat ini definisi tentang hukum yang berlaku umum belum ada. Para ahli hukm masih berbeda pendapat tentang definisi tentang hukum tersebut. Menurut Kamus Istilah Hukum Populer,[77] Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Kembali pada pengertian sistem sebagaimana didefinisikan di atas, membawa implikasi terhadap hukum, terutama terkait dengan keterhubungan antara komponen satu dengan lainnya serta berorientasi pada tujuan yang diinginkan. Pemahaman hukum sebagai sistem menjadi penting karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat dan lingkungannnya.[78]

[76]*Ibid.*
[77]Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Op cit.*, hal177
[78]Mahmutarom, HR. *Op.cit.,* hal. 288

Apabila kita membahas suatu sistem hukum, maka untuk dapat menjelaskan berlakunya dan efektifitasnya hukum, keterkaitan antara subsistem di dalamnya, serta tujuan yang ingin dicapai, maka kita perlu menggunakan pendekatan sistem. Dari berbagai konsep atau teori tentang sistem hukum, diantaranya teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Menurut Lawrence Meir Friedman, bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu; (1) Struktur hukum *(Legal Structure),* (2) materi hukum *(Legal Substance)* dan (3) budaya *Hukum (Legal Culture).*

### 3.1. Struktur Hukum (*Legal Strukture*).

Menurut Laurence M. Friedman *the struktur of a sistem its skleton frameworker, it is the permanent shape, the institutional body of the sistem, the tought, rigid bones that keep the process flowing within bound.* (Stuktur dalam satu sistem hukum merupakan kerangka kerja yang memiliki bentuk permanen, atau merupakan kelembagaan dari suatu sistem yang kokoh dalam mempertahankan proses di dalam ikatan kerja).[79]

Kemudian Lawrence Friedman, menguraikan bahwa struktur hukum dalam sistem hukum menyangkut badan legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (kekuasaan kehakiman), bagaimana pengadilan memutus suatu perkara dan perkara-perkara apa yang diputus oleh badan pengadilan ini. Struktur hukum adalah badan (body) atau lembaga yang menyangkut bentuk, pola dan model *(form, pattern, persistently sistem)* bagaimana legislatif melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk perundang-undangan. Demikian juga mengenai eksekutif apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden beserta mentri-mentrinya, birokrat-birokrat dan bagaimana cara polisi melaksanakan tugasnya.[80]

[79]Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan denganRestorative Juctice,* Jala Permata Aksara, hal. 53
[80]*Ibid.*

Struktur hukum/pranata hukum atau yang disebut sistem struktur ini, yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Tentang struktur hukum ini, Laurence M. Friedmen, menjelaskan :[81]

*"To begin with, the legal syetem has the struktur of a legal sistem consist of elements of this kind: the number and size of court; their jurisdiction... struktur also means how the legislature is recognized...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal sistem... a kind of still photograph, with freezes the action"* (Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan , yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada).

### 3.2. Materi Hukum (*Legal Substance*).

Aspek kedua dari sistem hukum adalah materi hukum *(Legal Substance)*, yaitu seperangkat kaidah hukum, norma-norma, pola tingkah laku dari masyarakat atau disebut juga *Actual Rule Or Norm Used By Institutions.* Substansi hukum juga berupa putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan dapat berupa peraturan-peraturan yang baru atau hukum baru, termasuk juga substansi hukum berupa norma-norma yang hidup dan dipatuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu substansi hukum tidak hanya yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga formal seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif, tetapi juga hukum yang hidup (*Living Law*) dalam masyarakat, antara lain kaidah-kaidah hukum kebiasaan

[81]Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek, 2018, Rajawali Pers, hal.103)

yang tidak tertulis. Dengan demikian legal substance mencakup juga apa yang dihasilkan oleh masyarakat.[82] Sedangkan aspek budaya hukum *(Legal Culture)*, yaitu menyangkut ide-ide, sikap *(Attitudes)*, kepercayaan, pengharapan dan pendapat-pendapat mengenai hukum.[83]

Mengenai kultur hukum *(Legal Culture)*, sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, Laurence M.Friedmen menjelaskan, sebagai berikut : [84]

### 3.3. Budaya Hukum *(Legal Culture)*.

"*...peoples attitudes toward law and legal sistem? Their beliefs, values, ideas, and expectation...The legal culture, in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is use, avoided, or abuse. Without legal culture, the legal sistem is inert? A dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*" (Sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum? Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide dan harapan... budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam? Ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan hidup ikan berenang di lautan). Maksudnya adalah bahwa budaya hukum erat kaitannya dengan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Intinya, tingkat kepatuhan hukum yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

[82]Jonlar Purba, *Op.cit*., hal.54.
[83]Ibid.
[84]Suteki dan Galang, *Op.cit*.,hal 104

Dari komponen-komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut, dapat disederhanakan dan digambarkan sebagai berikut;

Bagan 1




*Pertama*, komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

*Kedua*, Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

*Ketiga*, komponen kultur, yaitu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan prilaku hukum seluruh warga masyarakat.[85]

[85]Mahmutarom HR, *Op.cit.*, hal.289

Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagai model bekerjanya suatu sistem hukum, saling mempengaruhi dan memperkuat satu dengan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan relativitas dominasi antar komponen yang ada, juga sesuai dengan waktu, tempat dan tradisi dimana sistem hukum itu berlaku. Teori sistem hukum Friedman ini dilatarbelakangi oleh perspektif yang bersifat sosiologis *(Sosiological Jurisprudence)* yang masih aplikatif hingga saat ini. Dalam kontek sistem hukum Indonesia, dimana sampai sekarang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meskipun kenyataannya masih mengakui keberadaan hukum adat dan Islam), yang masih berpandangan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Pandangan legalistik seperti ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia dengan berlakunya asas legalitas sebagai konsekwensi dari negara Indonesia yang berdasarkan hukum.

Sesuai kontek penulisan penelitian disertasi ini, struktur hukum lebih ditekankan pada struktur hukum dalam pengertian pranata hukum/ lembaga penegak hukum sebagai lembaga yang menentukan dalam menjalankan hukum, namun demikian dengan pendekatan bekerjanya suatu sistem, maka lembaga penegak hukum sebagai bagian dari subsistem struktur hukum, tidak bisa terlepas dari unsur struktur hukum lainnya, seperti lembaga pembuat undang-undang. Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas menegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh substansi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembuat undang-undang yang terdapat dalam struktur hukum.

Lembaga pembuat undang-undang, dalam membuat undang-undang harus berorientasi pada kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat, agar produk hukum yang dihasilkan (sebagai substansi hukum nantinya) dapat berlaku efektif. Oleh karena itu, dalam pembuatan

produk hukum harus dilandasi atas dasar kepentingan-kepentingan baik secara filosofis, sosiologis maupun kepentingan hukum itu sendiri. Landasan atau dasar filosofis misalnya, dalam rangka menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, landasan sosiologis guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan landasan yuridisnya bisa karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dapat menampung perkembangan persoalan masyarakat.

Penegak hukum tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik, bilamana peraturan perundang-undangan (substansi hukumnya) tidak dapat berlaku efektif, karena tidak sesuai dengan harapan/ keinginan dan cita-cita hukum masyarakat (budaya hukum masyarakat). Sebaliknya, substansi hukum sudah memenuhi harapan masyarakat (substansi dan budaya hukun), akan tetapi penegak hukumnya tidak kredibel, maka akan sulit hukum berlaku efektif.

Di Indonesia (selain lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) lembaga-lembaga yang terdapat dalam struktur hukum seperti penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hukum tidak akan bisa ditegakkan apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, maka hukum dan keadilan hanya merupakan angan-angan belaka, sehingga untuk menegakkan hukum dibutuhkan mentalitas para penegak hukum yang baik, agar cita-cita penegakan hukum yang adil tercapai,

seperti adagium yang menyatakan, *"Fiat Justitia Et Pereat Mundus",* meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan.[86]

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan kontek penulisan penelitian disertasi ini, terutama menyangkut lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum. Struktur hukum atau pranata penegak hukum di Indonesia, meliputi; (1) Kepolisian RI dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kepolisian RI, (2) Kejaksaan, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, (3) Kehakiman, dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakinan, (4) Advokat, dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat dan (5) penegak hukum di lingkungan peradilan militer dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Struktur hukum (penegak hukum) dalam penelitian disertasi ini, adalah para pelaku penegakan hukum di lingkungan TNI yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, khususnya pasal 69 (1), yang menyatakan penyidik terdiri dari; Ankum, Polisi Militer dan Oditur. Dari aspek struktur hukum (penegak hukum – penyidik), khususnya penyidik Ankum dipandang tidak memenuhi syarat profesionalisme sebagai penyidik, mengingat Ankum bukan lembaga yudisial yang memiliki keahlian dan memenuhi syarat normatif sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum formil (hukum acara pidana militer) di lingkungan peradilan militer. Untuk pembaharuan ini dibutuhkan bekerjanya sistem hukum, mulai dari struktur hukum (pembentuk undang-undang), substansi hukum (pembaharuan isi hukum) yang sesuai dengan cita, keinginan dan harapan hukum yang menghendaki penyidik

[86]Kurniawan Hermawanto dkk, 2017, *Teori Sistem Hukum Lawrece M.Friedman*, hal 1-2) https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_ HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN, diunduh tanggal 6 April 2020.

dilingkungan peradilan militer yang profesional (budaya hukum), guna terwujudnya masyarakat TNI yang sadar hukum dan menjuujung tinggi hukum dalam institusi TNI yang maju dan modern.

**4. *Appleid Theory*. Penegakan Hukum.**

Dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang dapat dijadikan patokan-patokan sebagai pedoman hidup bersama untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang rukun dan damai serta bahagia. Norma-norma tersebut dapat berupan norma hukum, norma susila dan kepercayaan yang mengatur dalam kehidupan secara pribadi maupun hidup bersama. Norma hukum bertujuan mengatur tata kehidupan bersama untuk terwujudnya keserasian diantara hubungan-hubungan masyarakat, sehingga tercapai ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Namun ada kalanya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk terjadi gangguan terhadap keserasian dan keseimbangan antara kepentigan pribadi dengan kepentingan bersama, bahkan terjadi konflik kepentingan diantara warga masyarakat, yang dapat menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya norma-norma hukum secara baik. Dengan demikian tentu sangat berpengaruh terhadap terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam hidup bersama, sehingga diperlukan pemulihan dengan mengedepankan kearifan lokal yang disepakati bersama, atau dengan cara penegakan hukum guna memulihkan ketentraman, ketertiban dan kedamaian bersama.

Dalam penegakan hukum, menurut pandangan Soerjono Soekanto, pakar sosiologi hukum, menyatakan bahwa, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.[87] Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Menurut Soerjono Soekanto, manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.[88]

**4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi**.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sebagai beriut:

a. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum);
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[89]

[87] Soerjono Soekanto, 2018, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, hal. 5
[88] *Ibid*. hal 6.
[89] *Ibid*., hal 8.

Dari kelima faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan penegakan hukum. Faktor hukumnya, terdapat asas-asas hukum yang berlaku umum tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif dan mencapai tujuannya serta berlaku efektif. Namun demikian, faktor hukum/undang-undang juga dapat memberikan gangguan terhadap penegakan hukum mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas hukum yang berlaku. Faktor penegak hukum, seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Advokat dan pemasyarakatan., masing-masing memiliki peran yang signifikan untuk terselenggaranya penegakan hukum. Para penegak hukum tersebut memiliki kedudukan yang isinya adalah hak dan kewajiban berupa peranan atau role, yang dijabarkan dalam peranan yang ideal *(Ideal Role)* dan yang seharusnya *(Expected Role)*, namun dalam analisa terhadap penegak hukum dibatasi pada peranan yang seharusnya *(Expected Role)* dan peranan aktual *(Actual Role)*.[90] Faktor sarana atau fasilitas juga sangat penting, karena penegakan hukum tidak mungkin berjalan lancar bila tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Faktor masyarakat juga sangat menentukan, mengingat penegakan hukum berada di tengah-tengah masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang diakui dan diterima dalam kehidupan masyarakat serta sangat menentukan efektivitas berlakunya penegakan hukum.

Berkaitan dengan faktor penegak hukum seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto di atas, bahwa penegak hukum (baca: kepolisian/polisi militer, Jaksa/Oditur, Hakim dan Advokat) yang masing-masing mempunyai peran ideal dan peran yang seharusnya, terkait hal tersebut, Laurensius Arliman S.[91] memaparkan

[90] *Ibid*., hal. 19-21.
[91]Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia,* dalam Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. https://www.researchgate.net/publication/337365333

karakter penegak hukum, sebagai berikut; 1) penyidik, peran ideal dari penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Peran seharusnya dari penyidik adalah; (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 2) Kejaksaan, peran idealnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Peran yang seharusnya adalah alat negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 3) Kehakiman, peran idealnya tertuang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedangkan peran yang seharusnya, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan; (1) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, (2) pengadilan dalam mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, (3) pengadilan wajib memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya, meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas. 4) Advokat, peranan yang ideal adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Peranan yang seharusnya yaitu, memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 5) Lembaga pemasyarakatan, peran idealnya adalah melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA INDONESIA, diunduh tanggal 6 April 2020.

pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan peran yang seharusnya adalah lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Selanjutnya penegakan hukum menurut Jimly Assiddiqie adalah,[92] proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 4.2. Subyek dan Obyek Penegakan Hukum.

a. Ditinjau dari sudut subyeknya menurut Jimly Assiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Ditinjau dari sudut subyeknya dapat dilakukan oleh subyek dalam pengertian luas atau sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.[93]

b. Ditinjau dari sudut obyeknya pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, mencakup dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai

[92]Jimly Assiddiqie, http//ww.jimly.com/MAKALAH/sb/*penegakan_ hukum*.PDF), diunduh pada tanggal 6 April 2020.
[93]*Ibid.*

keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan *"Law Enforcement"* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti yang luas, dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti yang sempit.

Dari uraian pengertian penegakan hukum, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit tersebut di atas, maka penegertian penegakan hukum adalah, merupakan upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, yaitu, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[94]

Dalam penelitian disetasi ini, diantaranya menyoroti masalah penegakan hukum, khusunya menitikberatkan pada penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana ini, maka terkait erat dengan politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana yang rasional) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan. Dalam penegakan hukum pidana yang rasional, menurut Ray Pratama Siadari,[95] meliputi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

[94]*Ibid.*, hal.2

[95]Ray Pratama Siadari, 2015, *Teori Penegakan Hukum*, https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html, diunduh tanggal 5 maret 2020.

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif;

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian (kepolisian militer - penulis), kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif; dan

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, dimana cita hukum bangsa Indonesia adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

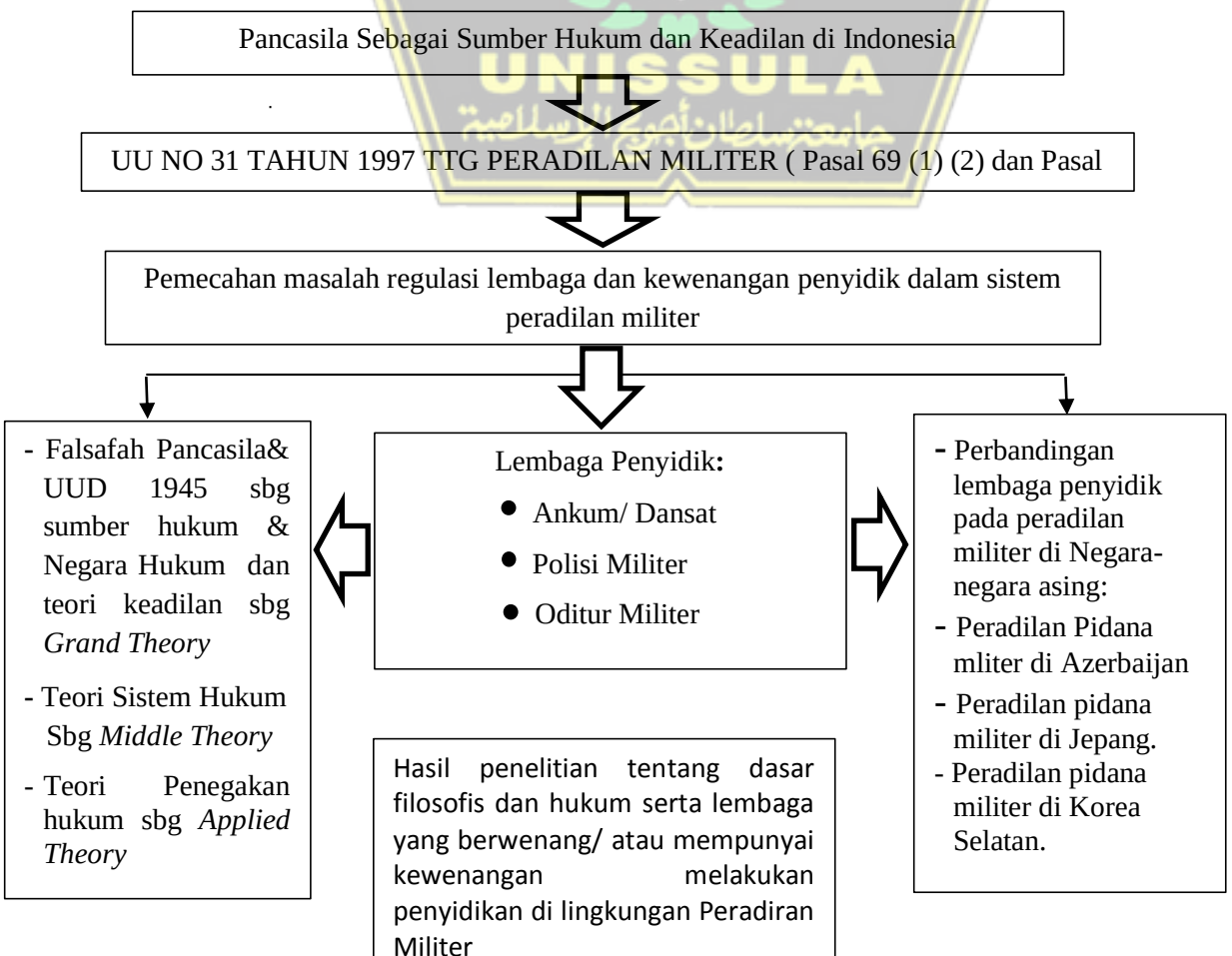
Teori penegakan hukum ini, baik melalui pendekatan sosiologi hukum maupun melalui pendekatan yuridis formal, sangat relevan dengan penelitian disertasi ini, karena ada keterkaitan langsung dengan fungsi Ankum, kepolisian militer dan Oditur yang memiliki kewenangan penyidikan di lingkungan peradilan militer.

Khusus untuk polisi militer selain memiliki kewenangan penyidikan, juga mempunyai fungsi penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi prajurit TNI.

Teori penegakan hukum melalui pendekatan sosiologi hukum, akan memberikan kontribusi pandangan dan pemahaman, baik dari aspek efektifitas hukum, efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga pelaksanaan penegakan hukum akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan penegakan hukum dengan pendekatan norma-norma hukum/yuridis formal, akan memberikan kontribusi terhadap kesiapan operasional penegakan hukum (secara rasional, terencana, terorganisir dan terpadu), terutama menyangkut kesiapan prangkat yuridis/ dasar hukum yang mendasari kewenangan penegakan hukum, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum di lingkungan TNI diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

## G. Kerangka Pemikiran.

**KERANGKA PEMIKIRAN**






## H. Metode Penelitian.

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah serangkaian panduan yang membimbing bagaimana peneliti melihat realitas (ontologi), melihat hubungan peneliti dengan obyek penelitian (epistemologi) dan bagaimana seharusnya penelitian itu harus dilakukan (metodologi).[96] Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik.

Menurut Erlyn Indarti, paradigma adalah merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau "payung" yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu "set" *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan belief dasar atau

[96]Turiman Fachturahman nur, *Menggunakan Paradigma konstruktivisme Dalam Penelitian Hukum*, http://rajawaligarudaPancasila.blogspot.com/2014/10/menggunakan-paradigma-konstruktivisme.html?m=1, diunduh tgl 11 Mei 2020.

*worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi lainnya. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set *belief* "dasar" tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama yang mengikat penganut/ penggunanya pada worldwiew tertentu.[97] E.G Guba dan Y.S. Linconl membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing 3 (tiga) "pertanyaan mendasar" yang menyangkut;[98]

a. Bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat di ketahui mengenai hal ini (disebut sebagai pertanyaan Ontologis). Konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam dalam konstruksi mental yang bersifat subyektif berdasarkan pengalaman sosial dan individual serta relatif.
b. Sifat hubungan atau relasi antar individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan Epistemologis dan termasuk pula peryataan Aksiologis). Konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif, temuan di 'cipta'/di'kontruksi' bersama.
c. Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahui (disebut sebagai pertanyaan *Metodologis*). Metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari konstruktivisme adalah hermeneutical dan dialektik yang menekankan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *Participant Observation*/pengamatan secara terlibat dan *Quasi Observation*.

**2. Jenis penelitian.**

[97]Erlyn Endarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
[98]*Ibid*. hal.18

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ini merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi dan realitas yang ditemukan baik saat ini maupun terdahulu, kemudian mengkaji dan menganalisisnya secara konperhensif.

Upaya menggambarkan kondisi atau realitas tersebut, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan posisi sebenarnya atas permasalahan ataupun issu hukum yang dibahas. Perlunya memahami permasalahan yang sedang dibahas, tidak hanya dari aspek teks norma hukum yang ada sebagai sebagai realitas, akan tetapi juga dari aspek kontek dibuatnya norma hukum tersebut, termasuk aktualisasi dan pengaruh nya dalam realitas sosial yang diharapkan.

**3. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *Sosio Legal Research.* Kajian *sosio legal research* merupakan kajian yang memadukan kajian hukum doctrinal dengan kajian social. Penelitian sosio legal ini merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu sosial, termasuk didalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya dan antropologi yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti asas-asas, doktrin dan perundang-undangan, yang menjadi kosep tunggal sebagai pendekatan sosiolegal.[99] Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Dengan metode penulisan *sosiolegal research* diharapkan untuk bisa menjawab masalah-masalah ketidak-adilan, bekerja atau tidak bekerjanya hukum, menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaharuan hukum dimungkinkan untuk dilakukan. Metode *sosio legal*

[99] Bambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio legal dan Konsekuensi Metodologinya*, diakses dari http://herlambangperdana,files,wordpress.com/2008/06/penelitian-sosial-legal-dalam-tun.pdf.pada tanggal 25 juli 2019. Diunduh tanggal 5 Maret 2020.

sesungguhnya akan memberikan upaya jawab atas gap, atau jurang pemisah, yang tidak semata-mata mengandalkan pada upaya keadilan berbasis norma atau teks *(Legal Justice)*, melainkan juga dari konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya *(Social Justice)*.[100]

Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lainnya, yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.[101] Pendekatan undang-undang juga bisa digunakan, bila terjadi konflik norma yang bersifat horizontal, yaitu apabila satu norma bertentangan dengan norma lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan yang disebut konflik horizontal intern. Konflik horizontal intern diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi norma berdasarkan pebafsiran sistematis atau teologis;[102]
b. Pendekatan Konseptual. Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi[103].

**4. Sumber Data Penelitian.**

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, diuraikan sebagai berikut;

[100] *Ibid.*
[101] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Kencana*, hal.133-134.
[102] I Made Pasek Dianta, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, hal. 156-157.
[103]Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*. hal.135-136

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer ini memungkinkan peneliti menemukan data/ hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dijelaskan sebagai berikut;

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritatif (autoritatif)[104] berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

d) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;

e) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

g) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

[104] H. Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.47

h) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan;

i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum, Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta hasil simposium yang terkait dengan obyek kajian penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier. Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti surat kabar, majalah, kamus, bulletin dan ensiklopedia,[105] serta akses internet yang terdapat informasi ilmiah yang relevan dengan obyek kajian penelitian ini.

**5. Teknik Pengumpulan Data.**

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner/angket. Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai fasilitator dengan menggunakan prinsip participan observer (peneliti menyatu dengan apa yang ditelitinya/ peneliti dekat dengan obyek dikajinya).

a. Metode Pengumpulan Data Primer.

[105] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.185.

1) Observasi. Merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrument pembantu dalam rencana penelitian ini. Diharapkan dengan pengamatan lagsung di lapangan ini mampu menjadi perantara antara yang diamati antara peneliti dengan keadaan atau fakta/ realitas social yang ada. Berdasarkan hasil observasi ini akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan petunjuk-petunjuk cara pemecahannya.

2) Wawancara. Wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan seseorang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan berkompeten di bidangnya, khususnya di bidang hukum militer dan khususnya hukum acara pidana militer. Pihak-pihak yang telah peneliti wawancarai meliputi pihak-pihak para praktisi hukum dan ahli militer, sebagai berikut;

1. Mayor Jenderal TNI Wahyuedo Indrajid, S.H., M.H., Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum TNI).
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer Utama MA RI.
3. Brigadir Jenderal TNI Edy Imran, S.H., M.H., Kepala Oditur Militer Tinggi – 2 Jakarta.
4. Kolonel Laut (KH) Dr. Ali Ridho, S.H., M.M., Kepala Oditur Militer II - 08 Jakarta.

5. Letkol Sus Wahyupi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II – 10 Semarang.
6. Letkol Chk Asmawi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer II – 10 Semarang.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder. Dilakukan dengan menelaah data yang berkaitan dengan buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, kamus hukum, serta hasil simposium yang terkait dengan obyek kajian penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier. Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti surat kabar, majalah, bulletin dan ensiklopedia.

**6. Teknik Analisis Data.**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka analisa data dilakukan dengan teknik analisa kualitatif atau analisis deskriptif kualitatif.[106] Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas

[106] *Ibid*., hal. 200.

data. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif dan sistematis.

Dari proses analisa ini, khususnya analisis awal dengan menggunakan teori-teori/asas-asas hukum untuk mencari kebenaran umum dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan logika induktif untuk menelaah obyek kajian yang sedang diteliti.

## I. Sistematika Penulisan.

Penulisan disertasi ini akan disusun dalam enam bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang bersisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran dan meode penelitian.

Bab II Kajian pustaka, berisi tentang:

A. Pengadilan Militer Di Indonesia;
B. Penyidik dan Perwira Penyerah Perkara (Papera);
C. Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana Militer.
D. Sistem Peradilan Pidana.

Bab III Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Saat Ini Belum berbasis Nilai Keadilan.

A. Sekilas sejarah peradilan militer di Indonesia.
B. Riwayat lembaga penyidik dan kewenangannya dalam sistem peradilan militer.
C. Proses penyidikan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.
D. Regulasi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik.

E. Regulasi Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Bab IV Kelemahan-kelemahan Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer.

A. Kelemahan Substansi Hukum.

B. Kelemahan Struktur Hukum.

C. Kelemahan Kultur/Budaya Hukum

Bab V Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan.

A. Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Di Indonesia.

B. Penerapan Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.

C. Penerapan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.

D. Perbandingan Institusi Penyidik Anggota Militer Di Tiga Negara Asing.

E. Rekonstruksi Nilai Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan.

F. Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan.

G. Rekonstruksi Kultur / Budaya Hukum

H. Pandangan Para Ahli dan Praktisi Hukum Militer Terhadap Hukum Acara Pidana Militer.

I. Implementasi Nilai Keadilan Dalam Hukum Acara Pidana Militer.

J. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer.

K. Profesionalitas Penyidik Polisi Militer Di Lingkungan Peradilan Militer.

Bab VI BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.

C. Implikasi Kajian Disertasi.

1. Teoritis.

2. Praktis.

## J. Originalitas / Keaslian Penelitian.

Penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan, belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama terhadap regulasi lembaga dan kewenangan penyidik, khususnya Ankum sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer.

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini yang menyangkut tentang regulasi lembaga dan kewenangan penyidik di lingkungan peradilan militer. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dijabarkan dalam bentuk table berikut :

**Tabel 1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Penelitian sebelumnya | Judul Penelitian dan Metodologinya | Hasil Penelitian | Penelitian Sekarang dan Perbedaannya |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiarsen Buaton/2011/ Disertasi Universitas Indonesia | Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia<br><br>Yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsepsional, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah dan pendekatan empiris secara | Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakimnan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dimana peradilan militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas besar TNI, maka | Pada penelitian sekarang fokus penelitian pada regulasi kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam hukum acara pidana militer Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, khususnya pasal 69 (1) dan pasal 74, dimana Ankum diberi kewenangan sebagai penyidik, maka |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | terbatas. | Peradilan Militer semakin independent dan Imparsial.<br>Bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Asas-asas tersebut tidak tercantum lagi dalam RUU Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.<br>Bahwa sistem peradilan militer yang seyogyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya miter dimana peradilan militer sebagai sarana untuk menjaga agar militer senantiasa mempunyai disiplin dan moril yang prima serta siap sedia dikerahkan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. | menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara Ankum dengan penyidik Pom/Oditur, akibatnya tidak terjaminnya keadilan dalam proses penegakan hukum prajurit.<br>Perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada eksistensi peradilan militer saat ini yang lebih independent, setelah adanya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dimana peradilan militer berada di bawah kekuasaan MA, namun menyoroti juga bahwa dalam RUU perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, sudah tidak dicantumkan lagi asas-asas seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer. Dengan adanya perubahan asas-asas tersebut, maka akan berpengaruh terhadap substansi undang-undang peradilan militer ke depan. Kedua penelitian ini secara substansi tidak ada korelasi secara khusus. |
| 2. | Slamet Sarwo Edy/ 2017/ Disertasi Universitas Gajah Mada | Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Study Tentang Struktur Peradilan Militer)<br><br>Metode penelitian hukum menggunakan | Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer mengatur keturutsertaan kesatuan dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih belum | Pada penelitian sekarang fokus penelitian pada regulasi kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam hukum acara pidana militer Undang-undang Nomor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan penelitian empiris. | mandiri, implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidak mandirian hakim dalam putusannya. Selain itu adanya peran Lembaga non yudisiil seperti Komandan satuan sebagai penyidik maupun sebagai penyerah perkara ke pengadilan dalam sistem penegakan hukum, demikian juga pembinaan peradilan militer tidak lepas dari pembinaan satuan sehingga menyebabkan ketidakmandirian sistem peradilan militer. | 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, khususnya pasal 69 (1) dan pasal 74. Dengan Ankum diberi kewenangan sebagai penyidik, maka menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara Ankum dengan penyidik Pom/Oditur, akibatnya tidak terjaminnya keadilan dalam proses penegakan hukum prajurit, sehingga regulasi kewenangan penyidikan perlu direkonstruksi. Perbedaannya, penelitian yang dahulu lebih fokus pada ketidakmandirian lembaga peradilan militer karena secara organisasi dan finansiil belum mandiri, serta keikutsertaan kesatuan, komandan satuan dalam penegakan hukum, sehingga implementasinya terhadap keputusan-keputusan hakim tampak tidak mandiri. Kedua penelitian ini secara substansi tidak berkorelasi secara khusus, namun ada sedikit kesamaan pembahasan menyangkut independensi peradilan militer. |
| 3. | Hendra Mulyadi/ 2018/ Tesis/ Fakultas Hukum Universitas Andalas. | Metode pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang | Penerapan asas kepentingan militer di Pengadilan Militer I-03/Padang sudah dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapat kendala yang berarti, hala mana dalam putusannya Majelis Hakim | Pada penelitian sekarang fokus penelitian pada regulasi kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam hukum acara pidana militer Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study kasus Pengadilan Militer I-03/Padang) | Pengadilan Militer I-03/Padang terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan prajurit mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman juga mempertimbangkan asas kepentigan militer tidak secara eksplisit akan tetapi secara implisit dan selalu berujung pada pemecatan (PDTH), namun dalam amar putusannya tidak ada perintah kepada terpidana untuk direhabilitasi setelah dipecat (PDTH). | Peradilan Militer, khususnya pasal 69 (1) dan pasal 74. Perbedaannya, pada penelitian yang dahulu menyangkut penerapan asas kepentingan militer oleh hakim peradilan militer terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh prajurit. Antara kedua penelitian ini, materinya tidak ada hubungan korelasi. |

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Pengadilan Militer di Indonesia

### 1. Pengertian Pengadilan.

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.[111] Susunan dan kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Sedangkan pengertian "peradilan", berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.[112] Dengan demikian peradilan militer dapat diartikan,segalan sesuatu yang bertalian dengan pengadilan dan tugas-tugas hakim dalam memutus perkara anggota militer atau orang yang tunduk kepada peradilan militer.

### 2. Eksistensi Peradilan Militer.

Eksistensi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat militer di Indonesia, ditentukan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945,(perubahan ke-3), Bab IX, pasal 24, ayat (1) Kekuasaan kehakiman

[111]Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.
[112]Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, Op.cit, hal. 321-322.

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan paradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan ayat 2 tersebut, jelas mengatur tentang peradilan militer sebagai badan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 18 disebutkan, bahwa badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, meliputi; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dari ketentuan-ketentuan baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut, jelas eksistensi dan kekdudukan peradilan militer sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer keabsahannya sangat kuat. Hal tersebut perlu ditegaskan mengingat, pada TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000, pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan, bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah dan DPR

telah mengundangkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana dalam pasal 65 ayat (2) menentukan bahwa, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer, dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk kepada peradilan umum dalam hal pelanggaran terhadap hukum pidana umum, yang diatur dalam undang-undang.[113] Dengan munculnya Pasal 3 ayat (4) Tap MPR yang ditidaklanjuti dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 terebut dan adanya Pasal 24 Undang-undang Dasar RI 1945, yang ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, muncul pro kontra tentang keberadaan peradilan militer. Disatu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa peradilan militer jauh dari jangkauan peradilan sipil, seolah-olah militer kebal terhadap hukum, dan peradilan militer yang mengadili militer akan bersifat memihak dan tidak independen seperti peradilan sipil pada umumnya. Namun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka organisasi, finansiil dan administrasi peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini yang membuat peradilan militer semakin independen bersifat imparsial. Dengan demikian eksistensi peradilan militer semakin kokoh.[220]

Apabila kita perhatikan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945, menghendaki agar kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan

[113]Pasal 65 *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia*. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 27)
[220]Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010)*, PT Galaxy Puspa Mega, hal. 2-3.

merdeka, bebas dari pengaruh apapun. Maka lembaga yang memegang kekuasaan untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum, sepatutnya sebagai lembaga yang otonom atau mandiri, terbebas dari kekuasaan negara lainnya.[221] Sedangkan pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tapi harus diatur dengan undang-undang, seperti lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Peleporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lainnya.[222]Usaha untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang merdeka/ independen terbebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) sudah tercapai dengan keluarnyaUndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, sudah dilakukan pemisahan yang jelas antara fungsi kekuasaan eksekutif dengan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[223]

Keberadaan peradilan militer ini sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah dirasakan perlunya peradilan militer yang secara organisasi berdiri

[221]Zainal Arifin Hoesin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Press, hal.161
[222]*Ibid.*
[223]Buaton, Tiarsen, *Op.cit*., hal. 44

terpisah dari peradilan umum. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum, yaitu :

a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok TNI yang penting dan berat;
c. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan misi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;
d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka (anggota TNI) aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokoknya.[224]

Sedangkan menurut Asep N Mulyana, setidaknya ada 3 (tiga) alasan terhadap keberadaan peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya: *Pertama,* peradilan militer telah ada bahwa karena kebutuhan, milier adalah masyarakat khusus terpisah dari msyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer milier merupakan *Primary Business* dari Angkatan Bersenjata dan Angkatan laut untuk berperang atau siap berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang dan tradisi militer sejak dulu. *Kedua*,

[224]Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, -https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf.* Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

penekanan terhadap kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien, yang tujuannya untuk mempertahankan "keadaan siap". Pelanggaran kedisiplinan militer harus ditangani dengan cepat dan dapat memberikan hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan orang sipil yang telah melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut, terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran militer di luar negeri, dianjurkan untuk dapat dilaksanakan pemeriksaanya di tempat melakukan pelanggaran tersebut daripada mengembalikan prajurit yang melanggar tersebut diperiksa di wilayah negaranya sendiri. *Ketiga,* kasus militer merupakan kasus yang khas bagi hakim sipil atau juri, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman merupakan komposisi yang salah untuk memberikan putusan terhadap prajurit. Dalam hal ini pengadilan yang khusus memeriksa dan mengadili subyek hukum militer memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta memahami kekhasan peradilan militer.[225]

Selanjutnya Asep N Mulyana, mengutip pendapat Rain Liijova, menjelaskan terdapat beberapa alasan eksistensi sistem peradilan militer pada saat ini; *Pertama,* jumlah yang sangat signifikan bahwa kebanyakan negara yang menganut sistem *Common Law* telah memutuskan untuk memiliki pengadilan militer. Hal ini disebabkan terdapatnya peran juri sebagai penguji fakta-fakta yang telah diterangkan oleh saksi dan memiliki peran untuk saling meng-cross check keterangan para saksi. Sementara pada negara-negara yang menganut sistem *Civil Law,* kebanyakan dari hakim-hakim penyidikan dan kemungkinan untuk memperlihatkan barang bukti di persidangan, telah mengurangi fungsi kebutuhan peradilan militer yang *"mobile"* bagi anggota angkatan bersenjata. *Kedua,*

[225]Asep N Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontenporer, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,* hal. 65-66.

Pengadilan militer cenderung terbentuk di negara-negara dimana angkatan bersenjatanya mendapat posisi khusus di masyarakat. Angkatan bersenjata memiliki pengaruh politik yang besar dibandingkan pemerintahan sipil yang tunduk kepada militer, terutama memberikan perluasan terhadap kewenangan peradilan militer untuk menangani disiplin prajurit dan perkara tindak pidana militer. Alasan tersebut sebagian penjelasan terhadap keberadaan pengadilan militer di beberapa negara Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia.[226]

Dari berbagai alasan, argumentasi dan realitas obyektif sesuai kultur dan sejarah militer dari suatu negara, yang menjadi landasan untuk menentukan terhadap keberadaan peradilan militer suatu negara, termasuk negara Indonesia. Eksistensi peradilan militer di Indonesia yang merupakan peradilan khusus, tentumemiliki karakteristik tertentu baik dari aspek struktur, kultur dan substansi hukumnya serta prosedur acara dan yurisdiksinya.

**3. Yurisdiksi dan Yustisiabel Peradilan Militer.**

**3.1. Yurisdiksi.** Menurut Kamus Hukum Militer, yurisdiksi berarti kekuasaan mengadili; kekuasaan hukum, *Yurisdictie* (Belanda).[227]Menurut Asep N. Mulyana, yurisdiksi peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Apabila yurisdiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya, maka yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya. Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yurisdiksi peradilan militer, sejatinya merupakan implikasi dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara kepada mahkamah

[226]*Ibid.*
[227]Kamus Hukum Militer, Babinkum TNI., *Op.cit,* hal.642

militer. Disamping itu, penetapan yurisdiksi peradilan militer terebut merupakan konsekuensi dari penetikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.[228]

Senada dengan hal tersebut di atas, menurut Moch. Faisal Salam bahwa, yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum, hal tersebut sebagai akibat dari pembagian wilayah komando militer, dimana pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara peradilan militer. Namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dapat berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili para yustisiabel yang seharusnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum sebagai akibat/konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan pidana untuk militer.[229]

Terkait dengan yurisdiksi peradilan militer ini, bilamana terdapat terdakwa yang melakukan beberapa kejahatan yang termasuk dalam yurisdikasi peradilan militer dan yurisdiksi peradilan umum secara bersamaan, maka penuntut umum militer dapat menyerahkan pemeriksaan perkaranya ke pengadilan umum, sebagai konsekuensi bahwa suatu tindak pidana yang sama tidak boleh diperiksa dan diadili melalui peradilan yang berbeda. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mekanisme untuk menetapkan yurisdiksi manakala terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan subyek hukum militer dan sipil secara bersamaan. Apabila terjadi perselisihan dalam penentukan yurisdiksi pengadilan yang akan menangani perkara dimaksud, maka Mahkamah Agung harus memberikan

[228]Asep N. Mulyana, Op.cit., hal.67
[229]Faisal Salam,Moch., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia,* Bandung, Mandar Maju., hal.46

pandangan dan pendapatnya mengenai yurisdiksi yang berkompeten untuk menanganinya.[230] Yurisduksi berdasarkan status militer memiliki makna, bahwa semua anggota angkatan bersenjata merupakan subyek yang diperiksa dan diadili di pengadilan militer, terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya.[231]

Yurisdikasi atau kompetensi peradilan militer, diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut;

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh sesorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
   a. Prajurit;
   b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
   c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
   d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat

[230] Asep N. Mulyana, Op.cit., hal. 71
[231] *Ibid*.

yang ditimbukan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.[232]

Apabila kita perhatikan rumusan Pasal 9, angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, dijelaskan bahwa, pengadilan militer berwenang mengadili "tindak pidana…" dan seterusnya. Artinya, dalam ketentuan pasal 9, angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, subyek hukum militer (anggota militer dan yang dipersamakan dengan militer), yang melakukan tidak pidana (khusus) militer maupun tidak pidana umum, diadili di peradilan militer.

Terkait masalah di atas, menurut Moch. Faisal salam, bahwa, hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, adalah hukum khusus. Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi orang pada umumnya. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (anggota militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan kepada hukum (khusus) militer. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer selain hukum pidana militer berlaku juga hukum pidana umum.[233]Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 1 KUHPM (diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947), yang berbunyi :

Untuk penerapan kitab undang-undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari Buku pertama, Kitab Undang-

[232]Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, pasal 9. (LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713).
[233]Faisal Salam,Moch., *Op.cit.*, hal. 30.

undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpang-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.[234]

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum. Dengan diberlakukannya hukum pidana umum disamping hukum pidana (khusus) militer, maka bagi anggota militer merupakan subyek tindak pidana umum dan juga subyek tindak pidana militer.[235]

Kalau kita bandingkan rumusan tentang yurisdiksi atau kompetensi peradilan militer Pasal 9 Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer ini, dengan rumusan tentang yurisdiksi peradilan militer dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer, ada sedikit perbedaan. Dalam RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer, tentang yurisdiksi atau kompetensi peradilan militer, juga dirumuskan dalam pasal 9, sebagai berikut:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

   a. Prajurit;
   b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
   c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; dan

[234]Undang-undang Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947*, LN Nomor 65 Tahun 1947, pasal 1.
[235] Faisal Salam,Moch., *Op.cit.*, hal. 30

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbukan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.[236]

Kalau kita cermati rumusan pasal 9 dalam RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer tersebut di atas, hanya ada sedikit perbedaan dengan rumusan pasal Pasal 9 Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer. Perbedaannya pada rumusan pasal 9 RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 31, Tentang Peradilan Militer tersebut, disebutkan bahwa, Peradilan militer berwenang mengadili : angka 1. Mengadili "***tindak pidana militer***…" dan seterusnya. Dalam rumusan ini jelas disebutkan tindak pidana militer. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer disini, belum jelas mengingat RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini yang nantinya merupakan hukum formil, sedangkan batasan atau definisi tentang tindak pidana militer ini, karena merupakan "norma substantif" seharusnya dituangkan dalam hukum materiil (hukum substantif).

[236]RUU PERADILAN MILITER, dibuat oleh hukum Online. *https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19319/node/638/rancangan-uu-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer*. Diunduh, 3 Agustus 2020.

Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur oleh undang-undang di luar KUHPM). Berarti secara yuridis menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.[237] Oleh karena itu pengertian tindak pidana militer perlu diperjelas, dan mengingat pengertian tindak pidana militer merupakan norma, maka harus dituangkan dalam KUHPM.

Dalam KUHPM belum dirumuskan secara final apa rumusan atau pengertian dari tindak pidana militer ini. Ada beberapa pendapat tentang pengertian tidak pidana militer dari beberapa sarjana. Menurut SR Sianturi, tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian: *Pertama*, tindak pidana militer murni *(Zuiver Militeire Delict)* adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.[238]

Demikian juga menurut Moch. Faisal Salam,[239] bahwa pengertian tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya yang khusus militer. Contoh kejahatan desersi yang daiatur dalam pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat 1 : Diancam karena desersi militer :

---

[237]Buaton, Tiarsen, *Op.cit*.,hal. 20
[238]S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM – PETEHAEN, hal. 19.
[239]Faisal Salam, Moch, *Op.cit*., hal.27-28.

Ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Ayat 2 : Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.

Ayat 3 : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan.

Selanjutnya menurut S.R. Sianturi, Dalam KUHPM tindak pidana militer kedua, yaitu tindak pidana militer campuran *(Gemengde Militaire Delict)*, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-undang Hukum Pidana lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan lebih berat dari

ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.[240]

Hal yang sama menurut Moch. Faisal Salam, bahwa tindak pidana militer campuran adalah, suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, disertai ancaman hukuman yang lebih berat.[241]

Dari kedua pengertian tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran seperti tersebut di atas, pada hakekatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus militer, dan sebagian lagi "diambil" dari tindak pidana umum, kemudian ditambah unsur khusus dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.[242] Selanjutnya, menurut M. Fajrul Falaakh perlu diperjelas definisi tindak pidana militer dengan ukuran-ukuran baru yang lebih adil, misalnya tidak hanya berdasarkan status (yang dapat diperluas kepada mereka yang dipersamakan dengan militer), melainkan juga memperhatikan *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*, bahkan pertimbangan-pertimbangan fungsional

[240]S.R. Sianturi, *Op.cit*., hal. 19.
[241]Faisal Salam, Moch, *Op.cit.*, hal.28-29.
[242]Agustinus P.H. dan Yuliana Yuli W, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta, Vol.1 No.2, Desember 2014, hal. 210-211.

juga dapat dimasukkan, misalnya pembedaan antara pelaku yang *on active duty* dengan *off duty*.[243]

Menurut penulis, untuk mendefinisikan tentang tindak pidana militer dalam KUHPM secara murni sebagai tindak pidana (khusus) militer, akan mengalami kesulitan, mengingat adanya ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 KUHPM yang menyebabkan prajurit/militer menjadi subyek baik pada tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, yang tidak bisa dipisah secara tegas, sehingga definisi tentang tindak pidana militer sangat tergantung dari subyek pelaku militer. Dengan demikian, apapun jenis tindak pidananya (tindak pidana umum ataupun tidak pidana militer) yang dilakukan oleh pelaku anggota militer, dapat dikatakan tindak pidana militer.

Selanjutnya bagaimana dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum? Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Pasal 184 (1), menyatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama diantara mereka yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel beradilan umum, maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Untuk tindak pidana koneksitas ini, telah ada peraturan terbaru seperti yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 yang menyatakan:

[243] *Ibid*.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[244]

Dengan demikian, adanya ketentuan Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 ini, maka Pasal 184 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 secara otomatis tidak berlaku.[245]

### 3.2. Yustisiabel (Orang-orang yang tunduk/ditundukkan) Pada Peradilan Militer.

Yustisiabel Peradilan Militer adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada peradilan militer, meliputi:

#### 3.2.1. Prajurit/Militer/Tentara, atau Anggota Angkatan Perang.

Pengertian prajurit, yaitu prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai prajurit adalah, warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.[246] Sedangkan kata militer berasal dari *"miles"* dari bahasa Yunani yang berarti, seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran,

[244]Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 8. TLN nomor 4358.
[245]Buaton, Tiarsen, *Loc.cit.*,hal. 21
[246]Pasal 1 Nomor 42, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer,*loc.cit.*

pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.[247] Sedangkan pengertian tentara, adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjatan.[248] Selanjutnya menurut pasal Pasal 46 KUHPM,[249] disebutkan yang dimaksud dengan militer adalah :

a. Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
b. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila dalam dinas sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalm pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

### 3.2.2. Termasuk Pula Sebagai Militer/Tentara.

Dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) KUHPM, yang menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk pula sebagai tentara, yaitu :

a. Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan;
b. Para komisaris wajib militer yang berpakaian dinas seragam setiap kali mereka melakukan tugasnya itu;

[247]S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, *Op.cit*.,hal. 28.
[248] Pasal 1, angka 21, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, *Loc.cit.*
[249]Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947, *Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara*, LN Nomor 65 Tahun 1947. Dalam bahasa Belanda disebut Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Stbl. 1934 No.167) diubah menjadi "Weboek van Militair Strafrecht"

c. Para pensiunan perwira sebagai anggota dari suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selaku itu;

d. Mereka yang mempunyai pangkat Tituler, baik yang diperbolehkan padanya atau atas Undang-Undang ataupun pada waktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan peraturan dewan pertahanan negara atas dasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keadaan Bahaya, selama dan sejauh mereka itu sedang melakukan pekerjaan yang didapatnya dari pangkat Tituler yang dimilikinya;

e. Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang;

f. Anggota tentara tersebut dalam ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.[250]

### 3.2.3. Yang Dipersamakan Dengan Militer.

Sebagai contoh tersebut dalam Pasal 50 KUHPM yang menjelaskan tentang bekas tentara yang dapat dipersamakan dengan tentara yaitu : para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.[251]

[250]E-journal, *http://e-journal.uajy.ac.id/17131/3/HK117952.pdf*., hal. 19-20., diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.
[251]*Ibid*.

Demikian juga para mobilisan. Apabila negara dalam keadaan bahaya, maka untuk menghadapi keadaan bahaya tersebut, harus mengerahkan seluruh kekuatan yang negara miliki dengan melakukan mobilisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997, tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Adapun tujuan mobilisasi tersebut untuk melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara. Dalam Pasal 6 dinyatakan, mobilisasi dikenakan terhadap : (a) warga negara yang termasuk didalamnya: 1) anggota rakyat terlatih, 2) anggota perlindungan masyarakat dan 3) warga yang diperlukan kerena keahliannya.[252]

**4. Kekuasaan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer.**

**4.1. Kekuasaan Pengadilan Militer.**

Pengadilan militer dalam menjalankan tugas sehari-hari adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah :

a. Prajurit pangkat Kapten ke bawah;
b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c, yang terdakwanya "termasuk dalam tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
c. Mereka yang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 9 angka 1, huruf a harus diadili oleh pengadilan militer.[253]

**4.2. Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi.**

[252]Moch. Faisal Salam, *Op.cit*., hal.36-38
[253]A. Wahab Daud, 1999, *Hukum Militer*, Jakarta, Pusbakum, hal.30

Pengadilan Militer Tinggi memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang, meliputi :

(1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama.

a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah :

1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;

2) Mereka sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 9 angka 1, huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas; dan

3) Mereka yang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 9 angka 1, huruf a harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

(2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

(3) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.[254]

### 4.3. Kekuasaan Pengadilan Militer Utama.

[254] *Ibid.*

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.Lebih lanjut Pengadilan Utama mengatur :

(1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang berwenang mengadili :
   a. Antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
   b. Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili atas perkara yang sama;
   b. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

(3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer atau pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.[255]

Wewenang Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan.

Wewenang disediakan oleh Undang-undang bagi Pengadilan Militer Utama terdiri dari :

(1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap :

[255] *Ibid*.,hal.32

a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing- masing;

b. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.

(2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tetang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

(3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran,atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

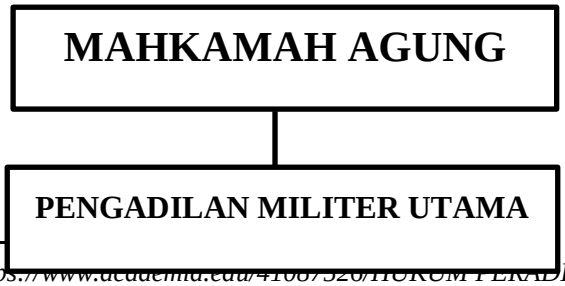
### 4.4. Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran mempunyai wewenang yang diberikan undang-undang terdiri dari : Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.[256] Pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh

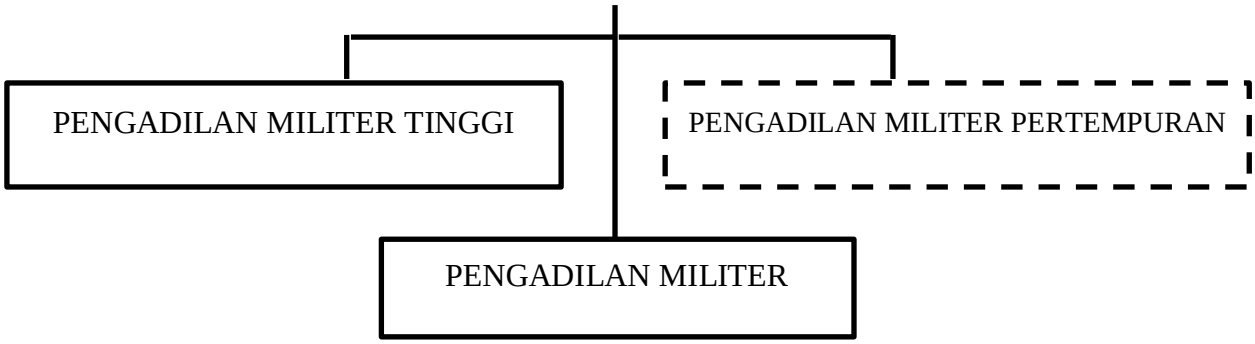
[256] *Ibid*.,hal.34

atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya (bahaya/darurat), sehingga mengakibatkan badan-badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya tidak dapat berfungsi lagi. Dalam masa keadaan darurat *(Etat De Siege, State Of Emergency, State Of Exeption)*, ada dua kemungkinan yang terkait dengan peranan badan peradilan. *Pertama*, badan-badan peradilan sipil yang ada tetap dan terus menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagaimana biasa. *Kedua*, badan-badan peradilan sipil tersebut tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang *(State Of War)*, pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara diantaranya yang berhubungan dengan subyek-subyek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil.[257]

**5. Susunan Pengadilan Militer.**[258]




[257]Aji Sakti Hidayatullah, *-https://www.academia.edu/41667520/HUKUM PERADILAN MILITER*, Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.
[258]Parluhutan sagala dan Fredy Ferdian,*Op.,cit.*, hal 12.




**6. Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia.[259]**

Kedudukan wilayah pengadilan militer di Indonesia, dibagi dalam beberapa daerah, sebagai berikut :

**I. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) I Medan, meliputi :**

1. I-01 Banda Aceh : meliputi Propisi Nangroe Aceh Darussalam.
2. I-02 Medan : meliputi Propinsi Sumatera Utara.
3. I-03 Padang : meliputi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau.
4. I-04 Palembang : meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.
5. I-05 Pontianak : meliputi Kalimantan Barat.
6. I-06 Banjarmasin : meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
7. I-07 Balikpapan : meliputi Kalimantan Timur.

**II. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta, meliputi :**

1. II-08 Jakarta. : meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tangerang dan Bekasi.
2. II-09 Bandung : meliputi Jawa Barat Bekasi, Banten dikurangi Tangerang.

[259] *Ibid.*

3. II-10 Semarang : meliputi Jawa Tengah.
4. II-11 Jogyakarta : meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**III. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya, meliputi;**

1. III-12 Surabaya : meliputi Jawa Timur dikurangi Blitar, Madiun, Kediri, Ngawi dan Jombang.
2. III-13 Madiun : meliputi Kediri, Ngawi, Jombang dan Madiun.
3. III-14 Denpasar : meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat.
4. III-15 Kupang : meliputi Nusa Tenggara Timur.
5. III-16 Makassar : meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
6. III-17 Manado : meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
7. III-18 Ambon : meliputi Maluku dan Maluku Utara.
8. III-19 Jayapura : meliputi Papua dan Papua Barat.

**B. Penyidik dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).**

**1. Penyidik dan Syarat-Syarat Penyidik.**

Pengertian penyidik dan syarat-syarat penyidik menurut ketentuan undang-undang yang berlaku :

**1.1. Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu.**

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),ketentuan umum Pasal 1, angka 1, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.[260] Sedangkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.[261] Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, disebutkan :

(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.[262]

Selain penyidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 di atas, terdapat penyidik pembantu, seperti yang tertuang dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini;

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.[263]

Dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP ini, dapat diketahui bahwa, penyidik itu bisa dari pejabat kepolisian negara, juga bisa dari pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus

[260]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, TLN RI nomor 3258
[261] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Loc.cit,*
[262]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Loc.cit.*
[263]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Loc.cit.*

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya, disebutkan, bahwa :

> (2) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

> Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini, adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP,bahwa penyidik bisa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 1.2. Syarat-Syarat Sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Terkait dengan lembaga penyidik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP tersebut, sebagai peraturan pelaksanaannya, maka keluar Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 (PP RI No 58 Tahun 2010),

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya disebutkan selain ketentuan sebagai penyidik, juga ditentukan tentang syarat-syarat sebagai penyidik, sebagai berikut :

PP RI No 58 Tahun 2010, Pasal 2 disebutkan :

Penyidik adalah :

a pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan

b. pejabat pegawai negeri sipil.[264]

PP RI No 58 Tahun 2010,Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara ;

b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun ;

c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal ;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

[264]Pasal 2, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP RI No 58 Tahun 2010,Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

PP RI No 58 Tahun 2010, Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

PP RI No 58 Tahun 2010,Pasal 3

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi ;

b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal ;

c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun ;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidk pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisan Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing;

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP RI No 58 Tahun 2010,Pasal 3A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/ Golongan 3A;

c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

(3) Persyaratan sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.[265]

Apabila kita perhatikan keberadaan penyidik dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat beberapa penyidik dengan persyaratan-persyaratannya tersendiri yang meliputi; penyidik pejabat Kepolisian Negara RI, Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pembantu yang sudah ditentukan standar atau syarat-syaratnya untuk menjadi penyidik ataupun penyidik pembantu.

**1.3. Penyidik Selain Penyidik Polri/PPNS.**

Selain penyidik yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP di atas, masih ada penyidik lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri, misalnya dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dalam pasal 45, disebutkan :

(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ;

[265] *Loc.cit.*

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.[266]

KPK diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) , KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 UU KPK) :

a. Melibatkan aparat penegak hukum,penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[267]

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang berbunyi :

*"Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."*

[266]Pasal 45,*Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002*, *Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi*. LN Nomor 137, Tahun 2002, TLN Nomor 4250.

[267]Tri Jata Ayu Pramesti,*https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan/.* Diunduh pada tanggal 25 agustus 2020.

Saat kasus korupsi tersebut sedang ditangani oleh penyidik kepolisian, KPK memiliki kewenangan mengambil alih perkara korupsi itu walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (lihat Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Namun, pengambilalihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK, yaitu :

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.[268]

Demikian jugapenyidik dalam perkara narkotika, ditentukan dalam pasal 75, 80, 81, 88, 92 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yaitu; penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), yang khusus melakukan penyidikan terhadap perkara narkotika.[269]

Dalam perkara pelanggaran/kejahatan terhadap Hak-hak Asasi (HAM) berat, penyidik yang berwenang menangani juga diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), Pasal

[268]*Ibid.*
[269]Bab XII, Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan, *Undang-undang Nomor 35, Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009.

21 ayat (1) dicantumkan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung, dan pasal 21 ayat (5) tentang penyidik *ad hoc* dalam perkara HAM berat.[270] Jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan seperti dicantumkan dalam Pasal 30 (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP, Jo. Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 44 (4), Pasal 50 (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010,tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam penjelasannya,semua penyidik tersebut di atas diakomodir dalam tindak pidana pencucian uang, dimana penyidik dimaksud sebagai penyidik tindak pidana asalnya. Pasal 74 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010, berbunyi sebagai berikut :

> Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.[271]

Dalam penjelasan Pasal 74 tersebut disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi-instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu penyidik dari Kepolisian Negara Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi

---

[270]*Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), pasal 21*. LN Nomor 208 Tahun 2000

[271]Bagian Kedua Penyidikan, *Pasal 74 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. LN Nomor 122 Tahun 2010.

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, sesuai kewenangannya.[272]

Dengan kata lain, selain penyidik Polri terdapat pula penyidik di luar penyidik Polri yang memiliki kewenangan menyidik tindak pidana tertentu. Contohnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi, selain Polri, terdapat Kejaksaan dan KPK yang dapat bertindak sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Begitu pula dalam tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan berbeda terdapat di dalam undang-undang pengadilan HAM. Dalam undang-undang ini, penyidikan tindak pidana pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Berbeda dengan kewenangan menyidik KPK dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan BNN dalam tindak pidana narkotika yang tidak menghapus kewenangan penyidik Polri seperti halnya dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dimiliki oleh Komnas HAM.[273]

TABEL 2

[272]Penjelasan,*Pasal 74 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*TLN RI Nomor 516.
[273]Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hal 48

Tabel Kewenangan Menyidik Tindak Pidana.[274]

| TINDAK PIDANA | PENYIDIK |
|---|---|
| Tindak Pidana Umum | Kepolisian |
| Korupsi | Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK |
| Penyalahgunaan Narkotika | Kepolisian, BNN, atau PPNS |
| Pelanggaran HAM Berat | Jaksa Agung |
| Lalu Lintas | Kepolisian, atau PPNS |
| Kehutanan | Kepolisian, atau PPNS |

**2. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Penyidik ABRI/ TNI).**

**2.1. Pengertian Penyidik ABRI/ TNI dan Penyidik Pembantu.**

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 11, pengertian Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Penyidik ABRI/TNI) yang selanjutnya disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya.[275] Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, disebutkan tentang penyidik, sebagai berikut :

(1) Penyidik adalah :

a. Atasan Yang Berhak Menghukum;

b. Polisi Militer; dan

[274]*Ibid.*
[275]Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian, Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997,*Loc.cit.*

c. Oditur.

(2) Penyidik Pembantu adalah:

a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;

b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;

c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara; dan

d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.[276]

Dari pengertian penyidik dan pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997di atas, dapat dipahami bahwa dalam sistem peradilan militer terdapat 3 (tiga) lembaga penyidik, yaitu; Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (Pom) dan Oditur Militer (Odmil). Sedangkan yang dimaksud dengan Atasan yang Berhak Menghukum/ Ankum, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997bahwa :

> Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.[277]

Aturan tentang Keankuman ini, telah diatur sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 55 Tahun 2020, Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).

Yang dimaksud dengan penyidik Polisi Militer, sesuai dengan penjelasan pasal 69 (1) b :

Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan memyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

[276]Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *Loc.cit*.
[277]*Loc.cit.*

Yang dimaksud dengan penyidik Oditur, sesuai penjelasan Pasal 69 ayat (1) c bahwa :

Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Barhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik pembantu, adalah sesuai bunyi Pasal 69 (2) :

a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;
b. Provos Tentara Nasional Angkata Laut;
c. Provos Tentara Nasionala Angkatan Udara; dan
d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.[278]

Provos sebagai penyidik pembantu, sesuai penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu komandan/ pimpinan pada markas/kapal/kesatrian/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya.[279]

### 2.2. Syarat-syarat Sebagai Penyidik TNI.

Dalam ketentuan pasal 70Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, disebutkan, bahwa :

persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.[280]

[278]Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *Loc.cit.*
[279]Penjelasan Pasal 69, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *loc.cit.*
[280]Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *loc.cit.*

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, keluarlah Peraturan Panglima TNI (Perpang), Nomor Perpang /171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer. Perpang Nomor Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ini sebagai pengganti Keputusan Panglima TNI, Nomor Kep/3/IV/2004, tanggal 21 April 2004, tentang persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu di lingkungan TNI, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi TNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perpang TNI/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 tersebut, Pasal 2 menjelaskan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu, harus memenuhi syarat, pada huruf (d) harus lulus dari kursus penyidik, artinya, sebelum memjabat sebagai penyidik, harus terlebih dahulu mengikuti kursus/ pendidikan penyidik. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disyaratkan; sebelum memangku jabatan sebagai penyidik atau penyidik pembantu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Dalam Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 ini, memang sebagai syarat bagi penyidik dan penyidik pembantu polisi militer, tidak termasuk Ankum dan Oditur.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dikutip bunyi Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebagai berikut :[281]

Pasal 1. Dalam peraturan ini,yang dimaksud dengan :

a. Penyidik adalah pejabat Polisi Militer tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

[281]Keputusan Panglima TNI Nomor :Kep/ 171 / XII/ 2011, tanggal 29 Desember 201,Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

b. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Tentara Nasional Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan di kesatuannya.

Pasal 2. Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik atau Penyidik pembantu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;

d. Lulus dari kursus penyidik;

e. Berwibawa,jujur dan adil;

f. Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin prajurit atau pidana; dan

h. Paling rendah berpangkat Sersan Dua.

Pasal 3. Penyidik dan Penyidik Pembantu diangkat dengan Keputusan Panglima TNI yang ditandatangani oleh Oditur Jenderal TNI atas nama Panglima TNI berdasarkan usul Komandan Pusat Polisi Militer.

Pasal 4.

Ayat (1) Sebelum memangku jabatannya, Penyidik dan Penyidik Pembantu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

“Bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang suatu kepada siapapun juga,”

“Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Bahwa saya akan setia kepada negara dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”

“Bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang yang akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi Penyidik/Penyidik Pembantu yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

“Bahwa saya dalam membuat berita acara atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar.”

Ayat (2) Sumpah atau janji sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi yang beragam islam, sumpah didahului dengan kalimat DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH;
b. Bagi beragama Kristen, Sumpah didahului dengan kalimat DEMI TUHAN SAYA BERSUMPAH dan ditutup dengan KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA;
c. Bagi yang beragama Hindu, Sumpah didahului dengan kalimat OM ATAH PARAMA WISESA SAYA BERSUMPAH dan ditutup dengan kalimat OM CANTI, CANTI, CANTI OM;

d. Bagi agama Budha, sumpah diawali dengan kalimat DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH; dan

e. Apabila seorang berdasarkan keyakinannya tidak membolehkan untuk mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya ia mengucapkan janji yang didahului dengan kalimat yang berbunyi SAYA MENYATAKAN DAN BERJANJI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH.

Perlu dijelaskan bahwa, bagi penyidik yang disumpah harus terlebih dahulu telah mengikuti sekolah atau kusus sebagai penyidik, sbagaimana persyaratan pada pasal 2 (d), sedangkan para provos satuan sebagai penyidik pembantu tidak pernah diikutkan kursus atau sekolah sebagai penyidik, sehingga provos satuan tidak disumpah sebagai penyidik

**3. Perwira Penyerah Perkara (Papera)**

**3.1. Pengertian Papera.**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dijelaskan bahwa, Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI/TNI) yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer umum.[282]

Selanjutnya dalam Pasal 122,Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dijelaskan lebih lanjut, bahwa;

(1) Perwira Penyerah Perkara adalah :

a. Panglima;

[282]Pasal 1 (angka 10), Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, *Loc.cit.*

b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem), untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Sebagai catatan, untuk Papera Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 122 (1) b, saat ini sudah tidak ada lagi, karena Polri sudah berdiri sendiri terpisah dari TNI.Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR /2000, Tentang pemisahan TNI dengan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR / 2000 Tentang peran TNI dan Polri, maka Polri secara resmi berdiri sendiri dan merupakan sebuah lembaga yang terpisah dari militer.

Setelah dilakukannya pemisahan secara kelembagaan antara TNI dan Polri, maka anggota Polri tidak lagi menjadi bagian dari Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), akan tetapi menjadi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara,

sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang militer tidak berlaku lagi bagi aparatur Polri.[283]

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tegas dicantumkan tentang tugas dan wewenang Polri, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian, sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada Peradilan Umum, sehingga permasalahan pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan pada peradilan umum yang proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri, dan produk-produk administrasi kepolisian tidak lagi tunduk pada Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer. Demikian juga dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Pmerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.[284]

### 3.2. Ketentuan Kepaperaan.

Sebagai penjabaran dari ketentuan kepaperaan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, selanjutnya

[283]Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang PRESindo, hal. 160.
[284]*Ibid*. hal. 160-161.

penunjukan kepaperaan diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/IV/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di lingkungan TNI, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Bagi Militer Tentara Nasional Indonesia. Dalam Perpang ini diatur tugas-tugas dan kepaperaan mulai dari : Bab 1: Ketentuan Umum, Bab 2: Wewenang Dan Tugas Papera, Bab 3: Papera Di daerah Operasi, Bab 4: Papera Terhadap Militer Yang berdinas Di Luar Negeri, Bab 5: Papera Di kementerian /Lembaga Luar Organik TNI, Bab 6: Papera Di Tingkat Angkatan, Bab 7: Ketentuan Lain-Lain dan Bab 8 sebagai Penutup. Aturan tentang Kepaperaan yang terbaru diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 56 Tahun 2020, Tentang Perwira Penyerah Perkara (Papera) bagi Militer/TNI, menyesuaikan dengan perkembangan organisasi TNI yang terkini.

**4. Kewenangan Penyidik Dan Papera.**

**4.1. Kewenangan Penyidik.**

**4.1.1. Pengertian Kewenangan.**

Pengertian kewenangan, menurut W. Riawan Tjandra mengutip pendapat dari Ateng Syafrudin, bahwa pengertian kewenangan berbeda dengan pengertian wewenang. Kewenangan *(authority, gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang *(competence, bevoegheid)* hanya mengenai satu onderdil (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(Rechtsbe Voegdheden).* Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan , tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)*, tetapi

meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bila ditinjau secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[285]

Menurut Agus Roni Arbaben,[286] analisis tentang kewenangan dengan mengutip pendapat beberapa sarjana/ahli hukum, diantaranya menurut Frans Magnis Suseno, bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Sedangkan menurut H.D Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Selanjutnya, menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut S.F Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks

[285]W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Grafika, hal. 96
[286]Agus Roni Arbaben, *-https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/.* Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah,memutuskan, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.[287]

Selanjutnya, menurut Nur Fatin,[288] secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *"bevoegdheid"* yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian wewenang adalah kemampuaan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Nur Fatin juga mengutip pendapat dari para sarjana yaitu, Hassan Shadhily, bahwa kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudirdjo pengertian wewenang dalam kaitannya dengan wewenang adalah sebagai berikut: "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan

[287]*Ibid.*
[288]Nur Fatin, *-http://seputarpengertian.blongspot.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan.html?m=*. Diunduh pada tnggal 10 Agustus 2020.

orang-orang tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.[289]

Wewenang juga merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum *(Rechtsracht).* Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum *(Rechtskracht).* Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah, sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama.[290]

### 4.1.2. Sumber-Sumber Kewenangan.

[289] Nur Fatin, *Loc.cit.*
[290] Agus Roni Arbaben, *loc.cit.*

Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: a) atribusi, b) delegasi dan c) mandat. Atribusi ditentukan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar atau ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.[291] Seperti yang disampaikan oleh Sovia Hasanah,[292] dengan mengutip dari Ridwan HR, bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersurat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenagan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut, diperoleh melalui tiga cara, sebagai berikut :

a. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah;
b. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan
c. Mandat, adalah terjadi ketika organ pemrintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi penerima

[291]W. Riawan Tjandra, *Op.cit.*, hal. 98-99
[292]Sovia Hasanah, *-https://www.hukumonline.co/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi—delegasi-dan-mandat/*, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Sedangkan pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, dengan tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.[293]

Terkait dengan bahasan tentang sumber kewenangan tersebut di atas, Agus Roni, dengan mengutip pendapat dari Nomensen Sinamo, menjelaskan bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi hanya ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, adapun mandat hanya kadang-kadang saja. Oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri. Secara Teori terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yakni atribusi (atribute), delegasi *(delegatie)* dan mandat *(mandaat)*, dengan penjelasan sevagai berikut :

*Pertama*, atribusi *(atributie)* adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah di maksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas *(legalitiebeginsel)*, wewenang ini dapat didelegasikan.

Kedua, delegasi *(delegatie)* adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi *(atribute)*

[293]Sovia Hasanah, *loc.cit.*

akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi *(delegataris).*

Ketiga, mandat *(mandaat)* adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya maka pada wewenang mandat *(mandaat)* tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat *(mandans),* penerima mandat *(mandataaris)* tidak dibebani tanggung jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan.

Terhadap pengertian mandat, S.F Marbun sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo menjelaskan, bahwa pengertian mandat menurut hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ada perbedaan yang prisipiil, hal ini jika dikaitkan dengan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang merujuk pada hubungan fungsional antara MPR dan Presiden, yakni Presiden sebagai mandataris MPR. Disini hubungan fungsional yang ada menggunakan istilah mandat *(mandataris).*

Perbedaan yang sangat prinsipiil, yakni berkaitan dengan tanggung jawab dan tanggunggugat pemberi mandat. Menurut hukum administrasi negara tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat, sedangkan Presiden sebagai mandataris MPR dimaknai Presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat, namun

demikian tanggunggugat tetap berada pada presiden, sebenarnya wewenang dimaksud cenderung wewenang delegasi.[294]

Selanjutnya, terkait dengan sumber-sumber kewenangan sebagaimana diurai di atas, Nur Fatin dengan mengutip pendapat dari Indroharto menjelaskan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : bahwa wewenang yang diperoleh secara "atribusi" , yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada wewenang yang diperoleh secara delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan lainnya. Jadi, Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan pada wewenang yang diperoleh secara mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya Nur Fatin menyimpulkan, bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. *Pertama*, komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum. *Kedua*, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan *Ketiga*, komponen konformitas hukum yaitu, mengandung adanya

[294]Agus Roni, *Loc.cit.*

standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[295]

Dari pengertian kewenangan dan wewenang di atas, kaitannya dengan lembaga penyidik, dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyidik (Polri, PPNS, Ankum, Polisi Militer dan Oditur) dan Papera dalam menjalankan wewenangnya, haruslah berdasarkan atau atas dasar legitimasi hukum atau undang-undang yang sah, sehingga tidak melakukan kewenangannnya secara sewenang-wenang. Keabsahan kewenangan atau wewenang dari penyidik dan Papera menjadi syarat mutlak di negara Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan.

### 4.1.3. Kewenangan Penyidik (Polri dan PPNS).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Penyidik Polri dan PPNS mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 :

(1) Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

[295]Nur Fatin, *Loc.cit.*

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

**4.1.4. Kewenangan Penyidik TNI.**

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Penyidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71:

(1) Penyidikdalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

sesorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;

c. mencari keterangan dan barang bukti;

d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Polisi Militer dan Oditur mempunyai wewenang :

a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan

b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Selanjutnya untuk penyidik Ankum mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 :

a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer dan Oditur;

b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur;

c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur; dan

d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya.

**4.2. Kewenangan Papera.**

Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Pasal 123 :

(1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang :

a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;

b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;

c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;

e. menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan

h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara Tinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah lainnya.

Pasal 125 (1)

(1) Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara. Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutupi demi

kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 126

(1) Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan :

a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;

b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau

c. Surat Keptusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum

(2) Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatau penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.

(3) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain.

Pasal 130 (1)

(1) Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara

kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

Apabila dicermati dari kewenangan Papera ini, maka dapat diketahui bahwa peran Papera sangat menentukan dalam penyelesaian perkara prajurit TNI, karena tanpa adanya penyerahan perkara dari Papera kepada Oditur, maka berkas perkara prajurit tidak bisa ditindak lanjuti oleh Oditur ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan militer.

## 5. Penyelidikan dan Penyidikan.

### 5.1. Penyelidikan.

#### 5.1.1. Pengertian Penyelidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 1 Angka 5 disebutkan, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Menurut Yahya Harahap, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau meminjam kata-kata yang dipergunakan dalam buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, "penyelidikan" merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.[296]

Dalam pengertian penyelidikan sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 di atas, perlu digarisbawahi kalimat, "**mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana**". Sasaran "mencari dan menemukan" tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana." Dengan perkataan lain, "mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana". Penyelidikan dilakukan sebelum proses penyidikan, dimana penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, apakah peristiwa pidana atau bukan. Kalau peristiwa tersebut sudah pasti tindak pidana, baru dilakukan proses penyidikan.[297]

Dengan demikian proses penyelidikan dialkukan denganmotivasi dan tujuan penyelidikanmerupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Oleh karena itu, secara filosofi dasar dari tindakan penyelidikan adalah untuk mencari peristiwa hukum pidana.[298]

Selanjutnya, Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, dengan mengutip Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

[296]Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 101.
[297]Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Setara Press, hal. 56-57.
[298]*Ibid.*

Tindak Pidana, Pasal 24 meyebutkan tentang pelaksanaan kegiatan penyelidikan, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Tempat kejadian Perkara (TKP). Pengelolaan/Olah TKP dengan tujuan di antaranya :

1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;

2) Olah TKP juga untuk mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, barang bukti; dan

3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

b. Pengamatan (observasi), dengan tujuan untuk :

1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yanag dibutuhkan; dan

2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang di ketahui sebelumnya.

c. Wawancara *(Interwiew),* dilakukan dengan tujuan :

1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan

2) Mendapatkan kejelasan dugaan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa,bagaimana,dan bilamana (peristiwa pidana terjadi).

d. Pembuntutan *(Surveillance)*, dilakukan dengan cara ;

1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;

2) Mencari tahu aktivitas,kebiasaan,lingkungan,atau jaringan pelaku tindak pidana;dan

3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

e. Pelacakan *(Tracking)*, dialakukan dengan tujuan untuk;

1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;

2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan /komisi /instansi terkait; dan

3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

f. Penyamaran *(Under Cover)*, dilakukan pada umumnya dengan cara :

1) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;

2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut,guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan

3) Khusus untuk tindak pidana narkoba dapat digunkan teknik penyamaran sebagai calon pembeli *(undercover buy)*, penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu *(controlled delivery)*, penyamaran disertai penindakan/pemberantasan *(raid planning execution)*.

g. Penelitian dan analisis dokumen,yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :

1) Mengompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan

2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.[299]

**5.1.2. Penyelidikan Menurut Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).**

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, khususnya dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), tidak mencantumkan penyelidikan ini sebagai rangkaian atau tahapan dalam proses penyidikan. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya tentang HAPMIL dalam tahap penyidikan, dikemukakan bahwa, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (HAPMIL) tidak secara khusus diatur

[299] *Ibid*., hal. 58-59.

tentang penyelidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.[300]

Dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya tentang HAPMIL tersebut, maka dalam proses penyidikan di lingkungan TNI tidak didahului oleh penyelidikan terlebih dahulu sebagai tahapan tersendiri sebelum dilakukan penyidikan terhadap tersangka. Namun demikian, dalam organisasi Satuan Polisi Militer, terdapat staf/bagian Penyelidikan Kriminal (Lidkrim) atau Reserse Kriminal (Reskrim) yang bertugas membantu penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan. Kasus/perkara yang dilaporkan (laporan dituangkan dalam laporan polisi/Lappol), sebelum Lappol diregester dan diberi nomor, tugas anggota Lidkrim/Reskrim mencari informasi/keterangan untuk memastikan apakah perkara yang dilaporkan tersebut tindak pidana atau bukan. Hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik guna menentukan langkah selanjutnya, bila hasil penyelidikan menentukan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara selanjutnya diregister dan dilakukan penyidikan, dan sebaliknya bila perkara yang dilaporkan bukan tindak pidana, maka perkara akan diserahkan kepada Ankum terlapor guna diselesaikan oleh Ankumnya.

### 5.2. Penyidikan.

#### 5.2.1. Pengertian Penyidikan.

Istilah penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing.* Sementara dalam bahasa Inggris disebut *"Investigation".* Menurut *de pinto,* menyidik *(opsporing)* berarti "Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang

[300]Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *Loc.cit.*

untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".[301]

Mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[302]

Pengertian penyidikan, baik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP, maupun menurut HAPMIL/Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, hampir sama, perbedaannya hanya menyangkut penyidiknya saja. Dalam KUHAP, pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2, dan dalam HAPMIL pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 16, yang menyatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Esensi dari penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya. Sedangkan tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya. Oleh karena alasan tersebut, maka sering kali proses penyidikan yang dilakukan

[301]Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa,*Op.cit.*, hal. 60
[302]*Ibid.*

oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis.[303]

Selanjutnya, terkait dengan proses penyidikan ini, Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, mengutip Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ,disebutkan dalam Pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan adalah :

a. Laporan polisi/pengaduan, terdiri dari :

   1) Laporan Polisi Model A. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi (Pasal 5 ayat 2); dan

   2) Laporan Polisi Model B. Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang di terima dari masyarakat (Pasal 5 ayat 3)

b. Surat perintah tugas. Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat (Pasal 6): dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, pejabat pemberi perintah;

c. Laporan hasil penyelidikan (LPH). LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat, kegiatan, hasil penyelidikan , hambatan , pendapat, dan saran (Pasal 7 ayat 2);

d. Surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8), yaitu; dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik,

[303] *Ibid*. hal. 60-61.

jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah; dan

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 Ayat 1). SPDP sekurang-kurangnya memuat (Pasal 25 ayat 2), meliputi; dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara,pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.[304]

### 5.2.2. Pelaksanaan/Dimulainya Penyidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP, apabila penyidik/ Polri menerima laporan perkara, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan perkara tersebut perkara pidana, selanjutnya dikeluarkan surat perintah penyidikan dan ditunjuk dalam surat perintah tersebut penyidik yang bertugas melakukan penyidikan. Langkah berikutnya penyidik harus memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 KUHAP.

Dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

[304] *Ibid*. hal. 61-63.

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP tersebut, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,Pasal 25 ayat 2 juga ditentukan bahwaSPDP dikirimkan kepada penuntut umum setelah terbit surat perintah penyidikan.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah elemen penting dalam sistem peradilan pidana, selain sebagai bentuk transparansi dalam penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan juga sebagai bentuk *check and balance* dari penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan (Dominus Litis) terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan juga berkaitan dengan kelancaran proses penegakan hukum karena setelah menerima SPDP, dimulailah tahap prapenuntutan oleh kejaksaan, berupa penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik guna kelancaran penyidikan.[305]

[305]Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Op.cit*, hal 53-54.

Berbeda dengan penyidk Polri atau PPNS sebagaimana tersebut di atas, untuk penyidik ABRI/TNI setelah menerima laporan/ pengaduan tentang peristiwa pidana, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (HAPMIL), Pasal 99 : ayat (1) Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, ayat (2) Dalam hal yang menerima laporan/ pengaduan adalah Ankum, maka Ankum segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur untuk melakukan penyidikan, ayat (3) Dalam hal yang menerima laporan/pengaduan adalah penyidik Polisi Militer atau Oditur, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankum Tersangka.

Dalam proses penyidikan di lingkungan peradilan militer, sesuai HAPMIL, tidak dikenal adanya SPDP sebagaimana dalam KUHAP. Kewajiban penyidik Polisi Militer atau Oditur setelah memulai penyidikan terhadap tersangka adalah wajib melaporkan kepada Ankum tersangka. Ankum mempunyai kewenangan untuk menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur sebagaimana ketentuan pasal 74 (b) dan Ankum juga berwenang menerima Berkas Perkara (BP) hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal 74 (c)).

Penyidik Polisi Militer setelah selesai melakukan penyidikannya, wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya tidak hanya kepada Ankum, tetapi juga kepada Papera dan Oditur (Pasal 101 ayat 1). Oditur menerima hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer, meskipun tidak ada penjelasannya, tetapi dapat ditafsirkan Oditur dalam kedudukannya sebagai penuntut ataupun sebagai penyidik, mengingat dalam ketentuan Pasal 124 (1) disebutkan, Oditur sesudah

menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Pasal 124 (2) disebutkan, dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya, dan Pasal 124 (3) apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi oleh penyidik.

## C. Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).

Dalam Hukum Acara Pidana Militer/HAPMIL disamping berpedoman kepada asas-asas umum dalam KUHAP, juga memiliki asas-asas khusus bagi anggota militer yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. **Asas Kesatuan Komando.** Dalam kehidupan militer dengan struktural organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Artinya dalam tubuh TNI keputusan dan kebijakan pimpinan tertinggi, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat sampai kepada Komandan paling bawah wajib dilaksanakan oleh prajurit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer itu sendiri.

2. **Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.** Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh

terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatun komando.

3. **Asas Kepentingan Militer**. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Apabila dihadapkan antara kepentingan hukum maka kepentingan militer dan pertahanan yang didahulukan.[306]

Dari asas kepentingan militer ini mempunyai pengertian bahwa untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus proses penegakan hukum baik dari kesatuan maupun di peradilan militer kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Selanjutnya terkait dengan asas kepentingan militer (komando) ini perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu arti kata komando. Komando bermakna adalah suatu perintah dari seorang komandan, komandan jenderal, komandan pusat, atau panglima, mereka ini berwenang memberikan pengarahan, koordinasi dan pengendalian terhadap sebuah unit tempur maupun non tempur (AD,AL,AU). Komando juga dapat diartikan : *Pertama*, komando berarti suatu bentuk organisai (bersifat) unit tempur operasional Komando Strategis Nasional (Kostranasa), Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional). *Kedua,*

[306]Hendra Mulyadi, 2018, TESIS :*Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tarhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)*, Hal. 58-59.

komando merupakan suatu kualifikasi kemampuan keprajuritan seperti kemampuan prajurit Infanteri yang diperoleh setelah lulus program latihan Komando.[307] *Ketiga*, asas tersebut di atas, berlaku dalam HAPMIL, dan berlaku dalam kehidupan prajurit TNI, terutama dalam kehidupan kedinasan TNI.

## D. Sistem Peradilan Pidana.

### 1. Pengertian Peradilan Pidana

Susunan dan organisasi sistem peradilan di Indonesia secara konstitusional merujuk pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, dan undang-undang organik yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang organik yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa , "kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", kemudian Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3)

[307] *Ibid.* hal. 61-62.

menyatakan bahwa, " Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Badan-badan lain yang dimaksud adalah badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial.[308] Sedangkan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengertian sistem peradilan pidana,[309] pada hakikatnya sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

[308] Oly Viana Agustine, 2019, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, Depok, Rajawali Pres, hal. 2.
[309] *Ibid*. (dikutip dari Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, hal 2 – 6)

Beberapa pengertian berdasarkan pendapat ahli, yang mencoba mendefinisikan pengertian sistem peradilan pidana. Remington dan Ohlin misalnya, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sedangkan Mardjono Reksodiputro mengartikan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem penegendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Dari kedua pendapat tersebut, ada persamaan terkait dengan proses bekerjanya sistem peradilan pidana secara berurutan menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan pengertian sistem peradilan pidana, menurut Barda Nawai Arif, berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman, Karenanya sistem peradilan pidana pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasi/ diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan

oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/ menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice sistem.*

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice sistem,* yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat. Di mana *criminal justice sistem* menurut black's law dictionary berarti:

*Criminal Justice sistem is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusatins have been disposed of or the assessed punishment concluded. The sistem typically has have three components law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges . peosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers, and parole officers).*

Jika diterjemahkan secara bebas menurut black's law dictionary sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan).

Beranjak dari beberapa pengertian ahli mengenai sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yakni:

1) Substansi merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2) Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
3) Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana.[310]

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Preocess*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.[311]

Dalam sejarah sistem peradilan pidana, untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice sistem*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasaan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut di kenal dengan istilah

[310] *Ibid.*, hal. 6.
[311] Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, hal. 33

"*law enforcement*". Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.[312]

Menurut Romli Atmasasmita istilah *Criminal justice sistem* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu isitilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh Romli tersebut, mempunyai ciri:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasaan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice.*

Dalam kaitan hal ini, Remington Dan ohlin, mengemukakan: *Criminal Justice Sistem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan,

[312] *Ibid*., (dikutip dari Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, hal. 33 – 46.)

praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sedangkan Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah: Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Beranjak dari defenisi tersebut di atas, Mardjono, mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sisitem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan) di harapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *Integrated criminal justice sistem*. apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.[313]

Dalam pengertian sistem peradilan pidana, Hagan membedakan pengertian antara "*criminal justice proses*" dan "*criminal justice sistem". Criminal justice proses* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan criminal Justice sistem adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan tentang batasan sistem peradilan pidana, tampak bahwa pendapat Mardjono Reksodipoetra tidak membedakan istilah "pengendalian" dan "penegakan hukum" sedangkan menurut pendapat Romli Atmasasmita kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda.

Terkait hal di atas, menurut Romli Atmasasmita memberikan penjelasan berikut: "Pengertian sistem peradilan dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manejemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manejemen dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law

[313] *Ibid.*, hal. 36

inforcement maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionallisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari perlaksanaan social defence yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*).

**2. Model Sistem Peradilan Pidana.**

Dari pengertian- pengertian sistem peradilan pidana dari beberapa ahli di atas, perlu diutarakan juga tentang bentuk pendekatan dan model sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, umumnya dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu : normatif, administratif, dan sosial. Ketiga pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Kedua, pendekatan administratif, yang memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manejemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.

Ketiga, pendekatan sosial, yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari empat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang di gunakan adalah sistem sosial.

Terkait dengan tiga pendekatan di atas, selanjutnya perlu juga dijelaskan dua model penyelenggaraan peradilan pidana, menurut seorang pakar Hebert L. Packer, berdasarkan pengamatannya terhadap penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat, sebagai berikut;[314]

1. Control Model.

*The Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelengaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efesiensi. Dalam model seperti inilah berlaku "Sarana Cepat" dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan berlaku apa yang disebut sebagai "*Presumtion Of Guilty*". Kelemahan dalam model ini adalah sering kali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi.

Dari uraian tersebut, dapat diuraikan, bahwa nilai yang melandasi *Crime Control model* adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

[314] *Ibid.*

2. Perhatian utama harus ditunjukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.

3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksankan berlandaskan prinsip cepat (*speddy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang mendukung adalah model administratif dan menyerupai model manajerial.

2. Asas praduga tak bersalah "*Presumtion of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efesien.

Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif , oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesedian tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*Plead of guilty*".

2. Due Process Model

Dalam *Due Process Model*, munculah nilai baru, adalah konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasan pada peradilan pidana. Jadi dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efesiensi. Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan " *Presumtion Of Innocence*".

Menurut Romli Atmasasmita model ini dilandasi oleh nilai-nilai:

1. Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, maka dalam hal ini, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

2. Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

3. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Proses peradilannya dipandang sebagai *Coercive* (menekan), *Restricting* (membatasi), dan (*Demeaning*) merendahkan martabat . Proses peradilan seperti ini harus dapat dikendalikan.

4. Model ini memegang teguh doktrin: (a) seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas tersebut, (b) terkandung asas "*Presumtion of innocence*".

5. Persamaan di muka hukum, "*Equality before the law*"

6. lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana.

Kedua Model tersebut diatas, baik *Crime Control Model*, ataupun *Due Proces Model* dilandasi oleh pemikiran apa yang disebit dengan "*Adversary Model*" yang berintikan sebagai berikut :

1. Prosedur peradilan pidana merupakan atau suatu sengketa (*disputes*) antara kedua belah pihak antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.

2. Tujuan utama dari prosedur peradilan pidana, adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan kejahatan.

3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan bukan merupakan keharusan, melainkan merupakan hal yang sangat penting.

4. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, sedangkan peranan tertuduh menolak atau menyanggah tuduhan. penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut, dan tertuduh adalah sebaliknya menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan dipersidangan yang akan menguntungkan kedudukannya dengan mengenyampingkan buktibukti lain sebagai penunjang fakta yang dimaksud.[315]

Dari karakterisitik masing-masing model terssebut di atas, maka *Crime control model* merupakan tipe *affirmative model*, adalah tipe yang selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari prosedur peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Sedangkan *Due process model*, merupakan *tipe negative model*, adalah tipe yang selalu menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan

[315] *Ibid*., hal. 43-44.

dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi.

Perbedaan antara *Crime control model* dan *due process model* akan terlihat dalam tabel berikut:[316]

| **Model** | **Mekanisme** | **Nilai** | **Tipologi** |
|---|---|---|---|
| ***Crime Control Model*** | 1. *Represif*<br>2. *Presumtion of guilt*<br>3. *Informal Fact-finding*<br>4. *Factual guilt*<br>5. *Efisiensi* | Didasarkan atas anggapan bahwa penyelelengaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (Criminal Conduct) | ***Afirmative Model*** |
| ***Due Process Model*** | 1. *Preventif*<br>2. *Presumtion of inocence*<br>3. *Formal-adjudicative*<br>4. *Legal guilt*<br>5. *Efektivitas* | Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peadilan pidana | ***Negative model*** |

Selanjutnya, Muladi mengemukakan kelemahan-kelemahan model sistem peradilan pidana seperti tersebut dibawah ini:

*Crime Control Model* tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana. *Due Model Proces* tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "*anti-authoritarian values*". Model famili atau "*famili model*" (*griffiths*) kurang memadai karena terlalu "*offender oriented*" karena masih terdapat korban yang memerlukan perhatian yang serius.

[316] *Ibid.*

Menurut Muladi model sistem peradilan yang cocok bagi peradilan pidana Indonesia adalah model yang mengacu pada: "*daad-dader strafrecht*" yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

### 3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.[317]

Pelaksanaan dan fungsi dari sistem peradilan pidana dapat terlaksana dan berfungsi secara sistematis hanya apabila masing-masing unsur memperhitungkan unsur-unsur lainnya. Apabila tidak demikian namanya bukan sistem dan hanya merupakan hubungan kerja biasa antara aparat penegak hukum seperti; polisi dan jaksa atau jaksa dengan hakim (pangadilan atau jaksa dengan pamasyarakatan) Tanpa hubungan secara fungsional antara masing-masing unsur sistem peradilan pidana akan sangan rentan terhadap perpecahan dan tidak akan bermanfaat. Segala permasalahan yang dihadapi oleh subsistem sistem peradilan pidana dapat diselesaikan dengan berbagai pendekatan institusi. Namun diantara sub sistem penegak hukum tersebut, tidak saling intervensi kewenangan, tetapi bertujuan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan *integrated criminal justice sistem*. Dari beberapa pendapat ahli di atas, komponen subsistem yang menyusun sistem peradilan pidana terdiri dari :

#### 3.1. Kepolisian

[317] Oly Viana Agustine, 2019, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, *Op. Cit*., hal. 13 - 20

Aparat kepolisian mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penvidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Kepolisian RI telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3.2. Kejaksaan

Demikian juga dengan Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 13 KUHAP menyebutkan bahwa: "Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim." Selain tercantum di dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem sistem peradilan pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, hubungan dalam

proses penyelesaian perkara antara kejaksaan dengan kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah kejaksaaan akan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

### 3.3. Pengadilan

Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana memegang fungsi penting sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan, di mana kewenangan mengadakan pengadilan berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan unggi, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

### 3.4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan, baik lembaga pemasyarakatan umum maupun militer merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana

lembaga pemasyarakatan mengemban tugas kemanusiaan untuk membina darapidana, dengan harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang di antaranya, agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat/ masyarakat militer.

### 3.5. Advokat

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Advokat dimasukkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat sebagai unsur penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa: “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dengan demikian, advokat tidak dapat dilepaskan dari bagian subsistem sistem peradilan pidana.

# BAB III

# REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

## A. Sekilas Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia.

### 1. Masa Pra Kemerdekaan (Pendudukan Belanda dan Jepang).

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan/ pendudukan dari Belanda yang cukup lama dengan diberlakukannya hukum kolonial (di Hindia Belanda), termasuk diantaranya hukum militer dan terakhir Jepang dengan waktu relatif singkat kurang lebih tiga tahun. Sejarah peradilan militer dimulai sebelum perang dunia kedua, dimana peradilan militer belanda dikenal dengan nama "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" sebagaimana tercantum dalam *bepalingen Betreffende de rechsmaacht Van de militaire rechter in nederlands Indie*, S.1934 Nomor 173 dan *De Provisionele Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie*, S. 1992 No. 163.[318]

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materiil yang anggotanya meliputi angkata darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL dan angkatan laut Belanda. Angkatan laut ini merupakan bagian integral dari *Koninklijke Marine* (Angkatan Laut Belanda), sedangkan KNIL merupakan organisasi tersendiri terlepas dari *Koninklijke Leger* (Tentara kerajaan Belanda). Dengan demikian, maka KNIL diperiksa dan diadili oleh Krijgsraad untuk tingkat pertama, dan *Hoog Militair Grechtshop* pada tingkat banding, sedangkan anggota

[318] Helvis, 2010, *Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 7

Angkatan Laut diperiksa dan diadili oleh *Zee Krijraad* dan *Hoog Militair Gerechtshoof.*

*Krijgsraad* memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah, dan orang-orang sipil yang bekerja di militer, sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof* merupakan pengadilan militer tingkat banding, serta mengadili pada tingkat pertama anggota militer berpangkat Kapten ke atas dan yang tertinggi di Hindia Belanda.[319]

*Krijgsraad* terdapat di kota; Cimahi, Padang dan Makasar. Untuk wilayah Cimahi dengan wilayah meliputi : Jawa Madura, Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Bali, Lombok. Padang dengan wilayah meliputi: Sumbar, Tapanuli, Aceh, Sumatera Timur, dan Makasar dengan wilayah meliputi: Sulawesi, Maluku dan Timor. Sedangkan *Hoog Militair* Gerechtshof berkedudukan di Jakarta.[320]

Selanjutnya pada Tahun 1942 masa pendudukan Balatentara Jepang, taanggal 2 Maret 1942, berdasarkan Osamu Gunrei Nomor 2 Tahun 1942, membentuk *Gunritukaigi* (Peradilan Militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas untuk mengadili perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara Jepang, dengan hukuman pidana terberat hukuman mati.

*Gunritukaigi* ini dikepalai oleh Sirei Kan (Pembesar Balatentara Jepang), yang beranggotakan: Sinbankan (Hakim yang memberikan putusan), Yosinkan

[319] *Ibid.*
[320] Muhammad Mahatir, -*http://mahatir71.blogspot.com/2011/12/peradilan-militer.html?m=1*, diunduh pada tanggal 19 september 2020.

(Hakim yang memeriksa perkara sebelum persidangan), Kensatakun (Jaksa), Rokusi (Panetra) dan Keiza (Penjaga terdakwa).[321]

**2. Masa Awal Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1950).**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam ketatanegaraan, termasuk dalam bidang hukum. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 disyahkan. Dalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat pasal 24 (1), berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan dalam ayat (2) nya menetapkan, bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal II peralihan yang berbunyi : "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini".

Berdasarkan ketentuan pasal II Peralihan ini, seyogyanya pengadilan ketentaraan bisa melanjutkan/mengambil alih pengadilan ketentaraan pada masa pendudukan Jepang, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang Republik Indonesia dibentuk, tanpa diikuti pembentukan peradilan militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, tentang Pengadilan Tentara, pada tanggal 8 Juni 1946 disamping pengadilan biasa. Namun demikian, tidak berarti bahwa pada masa diantara tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 8 Juni 1946 dalam lingkungan angkatan bersenjata tidak ada hukum/terjadi kekosongan hukum, namun pimpinan dilingkungan angkatan bersenjata tetap

[321] *Ibid.*

menerapkan prinsip disiplin dan keadilan harus tetap ditegakkan, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum diberlakukan hukum disiplin, sehingga keadilan tetap ditegakkan.[322] Dengan dibentuknya pengadilan tentara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, tetang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara. Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut di atas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada masa sebelum proklamasi, secara formil dan materiil tidak diperlukan lagi.[323]

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, tentang Pengadilan Tentara, ditetapkan bahwa pengadilan tentara dibagi menjadi 2 (dua) tingkat. Pada Aturan Umum, Pasal 1 dijelaskan bahwa;

Pengadilan Tentara terdiri atas :

a. Mahkamah – Tentara Agung;
b. Mahkamah - Tentara

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, menetapkan Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

a. Prajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
b. Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit yang dimaksud dalam sub a; dan

[322] Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia, *-https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/propfil-pengadilan/sejarah-pengadilan-militer.html*, (tanpa halaman), diunduh tanggal 19 September 2020.
[323] Muhammad Mahatir, *loc. Cit.*

c. Orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh pengadilan tentara.[324]

Pengadilan tentara diberi wewenang juga untuk mengadili siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya (pasal 4).

Selanjutnya, tentang Mahkamah Tentara Agung, menurut Pasal 12, berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, untuk perkara yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya adalah; a) prajurit yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor, dan b) seorang yang seandainya dituntut di hadapan pengadilan biasa, diputus oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.

Sedangkan Mahkamah Tentara (Pasal 18), berwenang mengadili semua perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang termasuk suatu pasukan yang berada di dalam daerah hukumnya dan dilakukan di dalam daerah hukumnya.

Pada masa itu, keadaan negara Indonesia yang baru lahir belum stabil, bahkan keadaan negara terancam karena Belanda masih ingin kembali menduduki Indonesia, dengan membonceng kepada tentara sekutu. Untuk menyesuaikan dengan situasi saat itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1948, tentang Peraturan Sususnan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam

[324] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, Tentang Pengadilan Tentara, Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1946, Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946 oleh Sekretaris Negara.

Lingkungan Peradilan Ketentaraan.[325] Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1948 ini mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Dalam Paraturan Umum, Pasal 1, mengatur peradilan tentara dengan susunan, yaitu :

1) Mahkamah – Tentara;
2) Mahkamah - Tentara – Tinggi; dan
3) Mahkamah - Tentara – Agung.

Mahkamah Tentara, (Pasal 9), berwenang memutus dalam tingkatan pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Mahkamah Tentara Tinggi, (Pasal 15), berwenang memutus dalam tingkatan perkara-perkara yang salah satu terdakwanya adalah prajurit berpangkat Mayor ke atas. Mahkamah Tentara Agung, (Pasal 30), berwenang pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubung dengan jabatannya yang dialakukan oleh : Panglima Besar, Kepala Staf angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, Panglima Tentara dan Territorium Sumatera, Komandan Territorium Jawa, Komandan Territorium Sumatera, Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah dan Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur.[326]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tersebut juga mengatur tentang Kejaksaan Tentara menjadi 3 (tiga) tingkat. Pasal 5 menetapkan, bahwa kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh :

[325] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, *Op. cit.*, hal. 10-11
[326] *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 1 Oktober 1948, Diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1948, Sekretaris Negara.*

1) Kejaksaan – Tentara;

2) Kejaksaan – Tentara – Tinggi;

3) Kejaksaan – Tentara – Agung.

Selanjutnya dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 menetapkan, bahwa kejaksaan dalam peradilan ketentaraan wajib melaksanakan yang dikehendaki oleh undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang harus diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan ketentaraan, dan mengusahakan menjalankan putusan-putusan pengadilan tersebut.

Sedangkan hukum pidana materiil yang berlaku pada masa berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946)

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Jo. S. 1934 Nomor 167); dan

3) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 Jo. S. 1934 Nomor 168).

Pada masa Tahun 1946 sampai dengan 1948 diadakan Peradilan Militer Khusus, untuk menyesuaikan dengan situasi yang belum stabil sebagai akibat dari peperangan yang terus berlangsung yang mengakibatkan putusnya hubungan antar daerah. Peradilan Militer khusus ini meliputi:

1) Mahkamah Tentara Luar Biasa, yang diatur dengan Paraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946;

2) Mahkamah Tentara Sementara, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947; dan

3) Mahkamah Tentara Daerah Terpencil, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947.[327]

Pada masa ini keadaan negara juga belum stabil, kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melakukan agresinya yang kedua terhadap Republik Indonesia. Agresi tersebut bermaksud untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya menghancurkan Pemerintah Republik Indonesia. Aksi agresi Belanda tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Dalam kondisi demikian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Darurat Nomor 46/ MBKD/Tahun 1949, yang mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh pulau Jawa – Madura, dimana peraturan tersebut memuat tentang:

1) Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer;

2) Pengadilan Sipil Pemerintahan Militer;

3) Mahkamah Luar Biasa; dan

4) Cara Menjalankan Hukuman Penjara.[328]

Setelah terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), maka terjadi lagi perubahan baik undang-undang mengenai susunan dan kekuasaan kehakiman dengan disyahkannya Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950

[327] Makalah Dispancaula, *-https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/*, tanpa halaman, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.
[328] *Ibid.*

menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam lingkungan Pengadilan Ketentaraan, sedangkan Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan pula sebagai Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara.[329]

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang dicabut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, sebenarnya hanya penggantian formil saja, sedangkan materinya tidak mengalami perubahan. Pada masa RIS ini lahir Mahkamah Tentara di banyak tempat, seperti :

1) Jawa dan Madura, Mahkamah Tentara terdapat di kota-kota :
   a) Jakarta, dengan daerah hukumnya Keresidenan Jakarta, Banten dan Bogor;
   b) Bandung, meliputi Keresidenan Periangan dan Cirebon;
   c) Pekalongan, meliputi Keresidenan Pekalongan dan Banyumas;
   d) Semarang, meliputi Keresidenan Semarang dan Pati;
   e) Yogyakarta, meliputi Keresidenan Yogya dan Kedu;
   f) Surakarta, meliputi Keresidenan Surakarta dan Madiun;
   g) Surabaya, meliputi Keresidenan Surabaya, Bojonegoro dan Madura; dan
   h) Malang, meliputi Keresidenan Malang dan Besuki.

[329] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, *Loc. cit*., hal.11

Dengan Yogyakarta sebagai tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi, untuk daerah Jawa dan Madura.

2) Sumatera, kedudukan Mahkamah Tentara di kota:

   a) Medan, meliputi bekas Kesesidenan Aceh, Riau dan Sumatera Timur;

   b) Padang, meliputi bekas Keresidenan Sumatera Barat dan Tapanuli; dan

   c) Palembang, meliputi bekas Keresidenan Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka – Belitung.

Bukit Tinggi merupakan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Sumatera.

3) Kalimantan, kedudukan Mahkamah Tentara di kota:

   a) Pontianak, meliputi bekas Keresidenan Kalimantan Barat dengan pulau-pulaunya; dan

   b) Banjarmasin, meliputi bekas Karesidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Jakarta merupakan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Kalimantan.

4) Daerah Indonesia Timur, kedudukan Mahkamah Tentara berada di kota:

   a) Makassar, meliputi Propinsi Sulawesi dan bekas Afdeling Ternate;

b) Ambon, meliputi seluruh Maluku dikurangi Ternate; dan

c) Denpasar, meliputi seluruh wilayah Propinsi Sunda Kecil (NTT – NTB).

Makassar sebagai kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di Mahkamag Agung di Jakarta.[330]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara, serta Jaksa pada Pengadilan Negeri menjadi Jaksa pada Pengadilan Tentara, jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Hal ini disebabkan pada masa itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli/ahli hukum di kalangan tentara untuk menjabat pada jabatan fungsi-fungsi pengadilan dan kejaksaan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pengadilan tentara dalam arti formil sudah ada, sedangkan dalam arti materiilnya masih dijalankan oleh tenaga/ personil non militer yang sudah terdidik di bidang hukum.[331]

### 3. Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950 – 1959).

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1950, kedudukan Republik Indonesia (Yogyakarta) berubah status menjadi Negara Bagian RIS. Pada saat itu Angkatan Bersenjata RIS yang terbentuk pada permulaan Tahun 1950, masih

[330] Makalah Dispancaula, *Loc.cit.*
[331] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, *Loc. cit.*, hal.11

membutuhkan pembenahan dan perhatian khusus mengingat organisasi militer saat itu tidak sesolid seperti sekarang ini, disamping itu masih terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasarkan Pasal 192 Konstitusi RIS Tahun 1950 yang mengatur tentang peraturan paralihan, maka semua peraturan perundang-undangan tentang paradilan tentara Republik Indonesia menurut hukum masih berlaku dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan Konstitusi RIS. Peraturan tentang peradilan militer Republik Indonesia yang masih berlaku, sebagai berikut : 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 36b Tahun 1949, tentang penghapusan Paraturan Darurat Nomor 46/MBKD/49 dan menghidupkan kembali pengadilan tentara yang ada sebelum tanggal 7 Mei 1949. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Darurat 1949 Nomor 46/MBKD/49, kemudian peraturan ini sebagian dicabut oleh Peraturan Darurat Nomor 4 Tahun 1949, Sedangkan untuk wilayah RI lainnya (diluar Jawa dan Madura) tetap berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.

Selanjutnya Pemerintah RIS berusaha mengisi peraturan-peraturan yang sangat diperlukan dibidang pertahanan dan keamanan. Setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan, disusul dengan disahkannya Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 sebagai undang-undang federal. Apabila dicermati, maka isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 ini merupakan kutipan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Dengan demikian terciptalah peraturan yang lebih sesuai dan seragam yang berlaku bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).[332]

Pada masa RIS ini, daerah hukum Mahkamah Tentara juga mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, seperti :

1) Jawa – Madura.

   a) Jakarta, bertambah daerah hukumnya termasuk Kabupaten Kepulauan Riau (Tanjung Pinang); dan

   b) Surabaya, bertambah daerah hukumnya termasuk Kediri.

2) Sumatera.

   a) Medan, daerah hukumnya dikurangi Kabupaten Kepulauan Riau, tapi ditambah Tapanuli; dan

   b) Padang, daerah hukumnya dikurangi Tapanuli tapi ditambah Kampar (Pekan Baru).

Kedudukan Pengadilan Tinggi Tentara yang sebelumnya di Bukit Tinggi dipindah ke Medan dengan wilayah hukum seluruh Sumatera.

3) Kalimantan. Untuk Pengadilan Tinggi Tentara dipindah dari Jakarta ke Surabaya.[333]

Selanjutnya Peradilan tentara di masa Undang-undang Dasar Sementara.

[332] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., *Op. Cit*., hal. 83-85.
[333] Makalah Dispancaula, *Loc. Cit*.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) RI, sesuai dengan ketentuan peralihan, yang tercantum pada Pasal 142 yang berbunyi, sebagai berikut:

> Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau dirubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa undang-undang ini.

Dengan demikian undang-undang dan peraturan-peraturan di masa RIS seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan RI, berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Sedangkan isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tersebut merupakan kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.[334]

Selanjutnya untuk kedudukan dan daerah hukum peradilan tentara, sesuai dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan secara berturut-turut dari Tahun 1950 samapai dengan Tahun 1956, sebagai berikut :

1) Daerah Jawa dan Madura, kedudukan pengadilan tentara berada di Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surakarta,

[334] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., Op. Cit., hal. 93-94.

Surabaya, Malang. Sedangkan kedudukan Pengadilan Tentara Tinggi masing-masing berada di kota Jakarta dan Surabaya;

2) Daerah Sumatera, kedudukan pengadilan tentara barada di kota Medan, Padang dan Palembang. Sedangkan kedudukan Pengadilan Tinggi Tentara berada di kota Medan;

3) Daerah Kalimantan, kedudukan Pengadilan Tentara berada di kota Pontianak dan Banjarmasin; dan

4) Daearah Indonesia Timur, kedudukan Pengadilan Tentara berada di kota Makassar, Ambon, Denpasar. Sedangkan kedudukan Pengadilan Militer Tinggi berada di kota Makassar.[335]

Pada periode ini pula, lahirlah undang-undang yang lebih menguatkan kedudukan dan keberadaan peradilan tentara/angkatan perang, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, Pasal 35, ditegaskan bahwa :

(1) Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara; dan

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan yang diserahi penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum

[335] *Ibid.*

pidana tentara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan undang-undang.[336]

Sebagai realisasi dari isi Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1954 tersebut, kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958, tentang Hukum Acara Pidana Tentara yang merubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950. Dengan digantinya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958 tersebut, maka Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) lebih berperan dalam proses penyelesaian perkara anak buahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Jaksa tentara yang waktu itu dipegang oleh Jaksa sipil dan Pengadilan Negeri bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun1958, maka wewenang Jaksa sipil tersebut berpindah ke tangan Komandan. Berpindahnya wewenang Jaksa ke tangan komandan sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara tersebut, maka fungsi Jaksa tentara dikurangi, yang tadinya bersifar aktif sekarang bersifat pasif.[337]

Pada masa itu, hakim dan jaksa tentara masih dijabat rangkap oleh hakim dan jaksa Pengadilan Negeri. Untuk mendapatkan tenaga ahli hukum di kalangan militer, baru pada tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Setelah didapat tenaga militer aktif yang berpendidikan hukum, maka mulai tahun 1961 diadakan penggantian terhadap tenaga-tenaga

[336] Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1954, Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia*, LN Tahun 1954 Nomor 84
[337] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, *Op.cit.*, hal.12-13

hakim dan jaksa tentara dari Pengadilan Negeri dengan tenaga-tenaga militer aktif tersebut.[338]

**4. Masa Juli 1959 – Maret 1966 (1959 – 1966).**

Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, pada masa ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya dalam penerapannya menjadi berbeda dengan periode sebelum Dekrit Presiden 1959, karena semakin disadari bahwa corak kehidupan militer memiliki kekhususan, sehingga dirasakan perlunya peradilan militer diselenggarakan sendiri oleh anggota militer.

Setelah adanya lulusan tenaga ahli dari Akademi Hukum Militer yang dibentuk tahun 1952, baru sekitar tahun 1961/1962 terjadi peralihan, kalau tadinya di peradilan/kejaksaan militer untuk jabatan ketua, wakil ketua serta anggota dijabat baik dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, kemudian dialihkan kepada tenaga militer aktif berpendidikan hukum militer. Sejak itulah peradilan militer secara formil dan materiil berdiri.[339] Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli atau sarjana hukum, sesuai instruksi Mahkamah Agung Nomor 229/2A/1961, bahwa mulai September 1961, hakim militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara.[340]

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 1965, diundangkan penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965, tentang Perubahan dan

[338] I*bid.*
[339] Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, *Op.cit*., hal. 60.
[340] Makalah Dispancaula, *Loc.cit.*

Tambahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer. Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, sekarang dijabat oleh pejabat dari kalangan militer sendiri.[341]

Perkembangan lainnya pada periode ini, bahwa peradilan tentara yang dibentuk berdasarkan Undand-undang Nomor 7 Tahun 1946, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, setelah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 22/PNPS/1965 (Istilah tentara diganti dengan militer), tadinya merupakan kesatuan yang berlaku untuk semua angkatan perang, baik darat, Laut dan Udara, tetapi karena situasi dan kondisi keadaan negara, dimana Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1949 diganti dengan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan kemudian adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali, maka membawa akibat (Sebagai pelaksana ketentuan Pasal 24 UUD 1945), maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada waktu itu setiap angkatan merupakan departemen dengan Panglima Angkatan sebagai Menteri, maka melalui Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, maka masing-masing angkatan menyelenggarakan peradilan militer sendiri-sendiri. Sejak itulah peradilan militer yang tadinya bersatu untuk semua angkatan, menjadi terpisah pisah dengan diselenggarakan oleh masing-masing angkatan.[342]

---

[341] *Ibid*.
[342] Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Op.cit., hal. 61.

Pada periode ini juga ada perkembangan yang menarik, yaitu dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian, di dalam Pasal 3, berbunyi "Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata", kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 294, tentang Kedudukan Tugas dan Tanggung Jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) sebagai Angkatan Bersenjata, dalam Pasal 1 berbunyi "Kedudukan AKRI sebagai Angkatan Bersenjata adalah sama dan sederajad dengan ketiga angkatan lainnya", yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 290 yang berbunyi." AKRI adalah sejajar dan sederajad denga Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara". Sebagai realisasi dan konsekuensi AKRI sebagai Angkatan Bersenjata, maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian RI (AKRI). Dengan demikian, yang tadinya AKRI apabila melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan Negeri, sekarang harus diadili oleh Pengadilan Militer.[343] Dengan demikian, peradilan di lingkungan peradilan militer dalam pelaksanaannya terdiri dari :

1) Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Darat;

2) Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Laut;

3) Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Udara; dan

4) Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Kepolisian.

[343] *Ibid*., hal 63

Peradilan ini terus berlangsung hingga setelah 11 Maret 1966, bahkan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian baru dimulai pada tahun 1966.[344]

**5. Masa Maret 1966 - Tahun 1997 (1966 -1997).**

Keberadaan peradilan militer (Peradilan militer di lingkungan AD, AL, AU dan Angkatan Kepolisian) yang terpecah-pecah, maka untuk kepentingan Angkatan Bersenjata yang kompak dan bersatu, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967, tentang integrasi Angkatan Bersenjata (ABRI). Dengan terjadinya integrasi ABRI, maka di bidang peradilan juga diadakan integrasi pula.[345] Dengan demikian, peradilan militer pada masing-masing angkatan berjalan sampai pada awal tahun 1973. Selanjutnya lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan militer. Terkait dengan proses integrasi peradilan militer, selanjutnya keluarlah keputusan bersama antara Mentri Kehakiman dan Menteri Pertahanan, secara berturut-turut :

1) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan/ Pangab, pada tanggal 10 Juli 1972, Nomor J.S.4/10/14 – SKEP/B498/VII/72; dan

2) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan/ Pangab, pada tanggal 19 Maret 1973, Nomor KEP/B/10/III/1973 – J.S.8/18/19, Tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan Daerah Hukum, Jurisdiksi serta Kedudukan Organisasi Pengadilan dan Kejaksaan Militer.

[344] Makalah Dispancaula, *Op.cit.*
[345] Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, *Op.cit.*, hal. 64.

Dengan adanya keputusan bersama seperti tersebut di atas, peradilan militer berjalan secara integrasi, tidak lagi berada pada masing-masing angkatan, tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh :

1) Mahkamah Militer (Mahmil);

2) Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti); dan

3) Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).[346]

Perkembangan peradilan militer selanjutnya, pada tahun 1982 keluar Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, menyatakan, bahwa "Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku".[347] Undang-undang ini semakin memperkuat keberadaan peradilan militer.

Pada tahun 1988 keluarlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa :

[346] Muh. Mahatir, Peradilan Militer, *Op.cit*.
[347] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. (Lembaran Negara Nomor 51 tahun 1982 dan Lembaran Negara Nomor 3 Tahun1988)

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Pada waktu terjadinya integrasi peradilan-peradilan angkatan, nama pengadilan masih menggunakan kata-kata Mahkamah Militer, Oditur Militer dan Polisi Militer ABRI/POM ABRI.[348]

Dengan adanya perkembangan peradilan militer, Undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang pertahanan keamanan negara, dan perkembangan angkatan bersenjata saat itu, maka dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, tentang peradilan di lingkungan ketentaraan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, tentang Hukum Acara Pidana di lingkungan peradilan ketentaraan dan Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1958, dirasakan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu ketiga undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.[349]

**6. Masa Peradilan Militer Tahun 1997 Sampai Sekarang.**

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka undang-undang yang berlaku di lingkungan peradilan militer seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, Tentang Peradilan di Lingkungan Ketentaraan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Hukum Acara Pidana di Lingkungan Peradilan Ketentaraan dan Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1958, Tentang Perubahan Atas

[348] Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, *Op.cit*., hal. 65.
[349] Moch. Faisal Salam, Hukum Acra Pidana Militer di Indonesia, *Op.cit*., hal. 22.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, sehingga perlu diganti, maka keluarlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, salah satu landasan pembentukan peradilan militer sesuai Undang-undand Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Disamping itu keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.[350]

Perkembangan lain yang signifikan dalam periode ini adalah, adanya pemisahan Polri dengan TNI yang menyebabkan terpisahnya pula peradilan bagi anggota Polri. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Tentang pemisahan TNI dengan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang peran TNI dan Polri, maka Polri secara resmi berdiri sendiri dan merupakan sebuah lembaga yang terpisah dari militer. Sebagaimana telah disinggung pada Bab sebelumnya, bahwa setelah

[350] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., *Op. Cit*., hal. 141

secara kelembagaan antara TNI dengan Polri dipisah, maka anggota Polri tidak lagi menjadi bagian dari Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), akan tetapi menjadi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang militer tidak berlaku lagi bagi aparatur Polri.

Kedudukan Polri dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan tentang tugas dan wewenang Polri, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian, sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada Peradilan Umum, sehingga permasalahan pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan pada peradilan umum yang proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri, dan produk-produk administrasi kepolisian tidak lagi tunduk pada Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.

Hingga sekarang Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, berlaku (Minus terhadap anggota Polri), dengan susunan kelembagaan peradilan militer yang terdiri dari:

1) Pengadilan Militer.

2) Pengadilan Militer Tinggi.

3) Pengadilan Militer Utama. Dan

4) Pengadilan Militer Pertempuran.[351]

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain mengatur tentang sesunan dan kekuasan pengadilan militer, susunan dan kekuasaan Oditurat dan yang penting juga mengatur tentang Hukum Acara Pidana Militer.

## B. Riwayat Lembaga Penyidik Dan Kewenangannya Dalam Sistem Peradilan Militer.

Sebagaimana kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 diadakan ketentuan pasal II Peralihan, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undaang-undang Dasar ini.[352] Atas dasar ketentuan peralihan ini, maka lembaga peradilan sebelum kemerdekaan masih tetap berlaku sebelum dibentuk lembaga peradilan yang baru. Seyogyanya pengadilan ketentaraan bisa melanjutkan/mengambil alih pengadilan ketentaraan

[351] Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.
[352] Dalam amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945, Pasal II berbunyi : "semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini"

pada masa pendudukan Jepang, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang Republik Indonesia dibentuk, tanpa diikuti pembentukan peradilan militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, tentang Pengadilan Tentara, pada tanggal 8 Juni 1946 disamping pengadilan biasa. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 ini, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara.

Apabila kita telusuri dari awal dikeluarkannya hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer (untuk pemeriksaan permulaan/ pendahuluan yang dilakukan oleh pengusut/ penyidik), dari awal kemerdekaan Tahun 1945 sampai dengan saat ini, ada beberapa peraturan hukum acara yang penting, antara lain :

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara, Tanggal 31 Oktober 1946;

2) Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950, Tanggal 30 Maret 1950, Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara, kemudian menjadi Udang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang Federal, Tanggal 31 Maret 1950. Mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 1950;

3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958, Tentang Perubahan Undang-udang Nomor 6 Tahun 1950

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53), Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan; dan

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.[353]

Dari beberapa peraturan hukum acara pidana di lingkungan peradilan tersebut di atas, dapat kita ketahui, bahwa lembaga/instansi/pejabat yang bertindak sebagai pengusut atau penyidik bagi anggota tentara/militer, dan kewenangannya sebagai berikut :

**1. Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara**.

Pejabat pengusut/penyidik kejahatan dan pelanggaran anggota tentara, terdapat pada Bagian II, Pemeriksaan Permulaan :

Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dakam pasal 39 dari *"Het Herziene Inlandsch Reglement"* dan dalam Bab III dari "*Rechtsreglement Buitengewesten"*, maka hak mengusut kejahatan dan pelanggara diserahkan juga:

a. Kepala-kepala pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang berpangkat opsir serta opsir-opsir bawahannya, terhadap anak buahnya masing-masing.

[353] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, *Op. Cit.,* (hal. 10, 11 dan 12)

b. Kepada pemimpin-pemimpin pasukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b Undang-undang tentang Peraturan Pengadilan Tentara, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman terhadap anak buahnya; dan

c. Kepala pegawai-pegawai polisi tentara, yang mempunyai angkatan yang sah dalam daerahnya masing-masing.

(2) Mereka terutama memakai pedoman, buat daerah Jawa dan Madura, titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari *"Het Herziene Inlandsch Reglemen"* dan buat daerah di luar-nya, bab III *"Rechts Reglement Buitengenwesten"*.

(3) Berhubung dengan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran tersebut mereka langsung di bawah pimpinan Jaksa Tentara.

(4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Jaksa Tentara dengan saksama.[354]

Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 pada tanggal 1 dan tanggal 15 dari tiap-tiap bulan mereka harus memberi laporan tertulis kepada Jaksa Tentara, tentang :

a. Penangkapan dan penahanan orang yang dilakukan oleh mereka;

b. Pelepasan orang-orang tersebut; dan

[354] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara, Pasal 3. Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1946, diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946, Sekretaris Negara.

c. Pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.

Peraturan Acara Pidana ini sebetulnya berlaku pada pengadilan umum, namun diberlakukan juga pada pengadilan militer. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa, pemberlakuan peraturan acara pidana pada pengadilan biasa/umum ini bersifat sementara sebelum membentuk undang-undang hukum acara pidana baru untuk pengadilan tentara. Hal ini bisa dipahami mengingat saat itu masih dalam suasana awal kemerdekaan, dimana institusi dan aparat pengadilan militer masih belum eksis seperti saat ini. Pemberlakuan Hukum Acara Pidana Umum pada pengadilan militer ini, sangat memudahkan pejabat pengadilan militer, karena pejabat pengadilan militer saat itu adalah hakim sipil yang berasal dari pengadilan umum yang diberi pangkat tituler dan mereka sudah menerapkan Hukum Acara Pidana tersebut pada pengadilan umum, sehingga mereka tidak ada kesulitan lagi menerapkan ketentuan tersebut pada pengadilan militer.[355]

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dakam pasal 39 dari *"Het Herziene Inlandsch Reglement"* dan dalam Bab III dari "*Rechtsreglement Buitengewesten".* Bunyi Pasal 39 *Het Herziene Inlandsch Reglement*, sebagai berikut :

Hal mencari kejahatan dan pelanggaran pada bangsa Indonesia dan pada bangsa asing, menurut perbedaan yang dibuat pada reglemen ini dan pada peraturan undang-undang yang lain, diwajibkan kepada pegawai, pejabat dan orang-orang teristimewa yang tersebut di bawah ini, masing-masing dalam seluruh daerah pegangannya :

[355] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., *Op. Cit*., hal. 65

1. Kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pejabat polisi yang lain yang rendah pangkatnya, apapun juga namanya. – dalamnya termasuk juga pejabat polisi di tanah partikulir, demikian juga *wijkmeester* dan kepala bangsa asing;

2. Kepala distrik dan kepala *onderdistrik*, demikian juga manteri polisi yang dibantukan kepadanya;

3. Pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara);

4. Jaksa pada pengadilan negeri;

5. Mereka yang dengan peraturan undang-undang yang khusus disuruh memegang peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan ini, yakni sekedar yang mengenai perbuatan yang dimaksud itu; dan

6. Pegawai polisi yang tidak dapat gaji yang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan pemerintah, masing-masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya pada akte angkatannya.[356]

Menurut R. Soesilo, Pasal 39 ini menunjuk kepada para petugas yang diserahi tugas kepolisian represif (memberantas) kejahatan/pelanggaran). Patih, Bupati dan Residen hanya mempunyai wewenang preventif, sedangkan Kepala *Onderdistrik*, Manteri Polisi dan Jaksa mempunyai kewajiban yang bersifat represif. Demikian juga Kepala Distrik, Polisi Negara, Polisi khusus dan Polisi tidak bergaji mempunyai tugas dan kewajiban baik preventif maupun represif.

[356] R. Soesilo, 1985, *RIB / HIR Dengan Penjelasannya*, POLITEIA BOGOR, hal. 21-22

Petugas yang diberi tugas dan wewenang mencari kejahatan dan pelanggaran, mempunyai maksud yaitu, "mengusut atau menyidik" kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.[357]

Namun demikian, dalam pemeriksaan permulaan terhadap anggota militer, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa hak mengusut kejahatan dan pelanggaran militer juga diserahkan kepada :

(1) Kepala Pasukan Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Laut dan Udara);

(2) Pimpinan Pasukan (Sesuai ketentuan Pasal 2 sub b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, Tentang Pembentukan Pengadilan Tentara); dan

(3) Anggota Polisi Militer, yang diangkat secara sah untuk daerah masing-masing.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa Komandan pasukan atau pimpinan pasukan dan Polisi militer diberi kewenangan untuk mengusut/melakukan penyidikan terhadap anggota tentara yang melakukan kejahatan/pelanggaran hukum. Namun dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan/ pengusutan, Kepala Pasukan, Pimpinan Pasukan dan Polisi Militer langsung dibawah pimpinan Jaksa Militer dan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dari Jaksa Militer (Pasal 3, ayat (3) dan ayat (4)). Selanjutnya (menurut Pasal 4), dengan tidak mengurangi kewajiban para komandan, maka mereka juga diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Jaksa Tentara tentang: a) Penangkapan dan

[357] *Ibid*. hal. 22 - 23

penahanan orang yang dilaksanakan oleh mereka; b. Pelepasan orang tersebut, dan c) Pembelahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.

Keberadaan Komandan Pasukan, Pimpinan Pasukan dan Polisi Militer dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran anggota tentara, dibawah Jaksa Tentara dengan kewajiban mengikuti petunjuk-petunjuk dari Jaksa tentara, mengingat saat itu Komandan Pasukan, Pimpinan Pasukan dan Polisi Militer belum mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara.[358] Oleh karena itu, Komandan Pasukan, Pimpinan Pasukan dan Polisi Militer dalam rangka tugas penyidikan/ pengusutan dibawah pimpinan dan petunjuk dari Jaksa Militer.

**2. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950).**

Ketentuan Udang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Undang-undang Federal), sebagai hukum acara pada peradilan ketentaraan, tidak berbeda jauh dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, khususnya pada acara pemeriksaan permulaan/pendahuluan. Dalam Udang-undang Nomor 6 Tahun 1950, khususnya pada Bab II Pemeriksaan Permulaan :

Pasal 3, dijelaskan lembaga pengusut/penyidik sebagai berikut :

[358] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., *Op. Cit*., hal.67.

(1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dakam pasal 39 dari *"Het Herziene Inlandsch Reglement",* hak mengusut kejahatan dan pelanggara diserahkan juga :

a. Kepala-kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat Perwira, terhadap anak buahnya; dan

b. Kepada anggota-anggota Polisi Militer yang berpangkat Perwira, dalam daerahnya masing-masing.

(2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman titel dua, bagian-bagian satu, tiga, empat dan lima dari "het Herziene Inlandsch Reglemen";

(3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung dibawah pimpinan Kejaksaan Tentara; dan

(4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Jaksa Tentara dengan seksama.

Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 pada tanggal 1 dan tanggal 15 dari tiap-tiap bulan mereka harus memberi laporan tertulis kepada Jaksa Tentara, tentang :

a. Penangkapan dan penahanan orang yang dilakukan oleh mereka;

b. Pelepasan orang-orang tersebut; dan

c. Pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka, dan perlakukan terhadap barang-barang tersebut.[359]

[359] Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950), Pasal 3 dan 4. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 20 Juli 1950 dan diumumkan, pada tanggal 4 Agustus 1050. (Lembaran Negara Tahun 1950).

Dalam ketentuan Udang-undang Nomor 6 Tahun 1950, khususnya pada Bab II Pemeriksaan Permulaan, Jaksa Tentara masih mempunyai peranan penting untuk memimpin dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal pengusutan/penyidikan terhadap anggota tentara yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya kewenangan atasan yang berpangkat perwira (opsir) diberi hak untuk mengusut terhadap anak buahnya, demikian juga kepada anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira (opsir), diberi hak untuk mengusut terhadap kejahatan dan pelanggaran anggota tentara di daerah hukumnya, namun karena atasan dan anggota Polisi Militer dirasakan belum memiliki pengalaman-pengalamam di bidang hukum, kususnya untuk pengusutan/penyidikan, sedangkan penyidikan dipandang sebagai persiapan penuntutan, maka mereka ditempatkan di bawah pimpinan Jaksa Tentara.[360]

Jaksa Tentara pada waktu itu mempunyai kewenangan yang sangat luas, sehingga hanya dalam hal-hal yang sangat penting saja ia diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Komandan tentara mengenai pelaksanaan tugasnya, sehingga keadaan ini kemungkinan menimbulkan pertentangan antara Jaksa Tentara dengan Komandan tentara dalam tugas penegakan hukum di lingkungan ketentaraan. Pertentangan itu bisa terjadi manakala seorang tersangka sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa sepengetahuan atasannya. Atasan bisa kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya.[361]

### 3. Dalam Ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

[360] Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia., *Op. Cit*., hal.92.
[361] *Ibid.*

**1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53), Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.**

Ketentuan tentang hukum acara peradilan ketentaraan dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958 ini, merupakan perubahan dari undang-undang hukum acara sebelumnya, yaitu perubahan dari Undang-udang Nomor 6 Tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 yang menyatakan, bahwa Bab II tentang Pemeriksaan Perubahan dari Undang-undang No.6 Tahun 1950, Tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran-Negara tahun 1950 No.53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri pasal-pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Dalam ketentuan Undang-undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958 ini, lebih tampak peran Perwira dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam penegakan hukum terhadap anggota tentara. Misalnya, dalam hal penahanan ditegaskan, bahwa tiap-tiap perwira pada umumnya berhak untuk menjatuhkan penahanan secara langsung atas diri seorang militer bawahannya (Pasal 3), dan tiap-tiap perwira wajib menjatuhkan penahanan secara yang diuraikan pada pasal 3, apabila ia mengetahui atau dengan alasan yang cukup dapat menyangka, bahwa seorang militer bawahannya itu telah melakukan suatu tindakan pidana yang berat (Pasal 4). Selanjutnya, penahanan yang dijatuhkan harus segera dilaporkan kepada atasan yang berhak menghukum, yang membawahkan langsung tersangka (Pasal 5). Atasan yang berhak menghukum, yang membawakan langsung tersangka dalam angkatannya sendiri, kemudian memeriksa perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan

atau di tahan terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanya dapat dilakukan selama-lamanya untuk 20 hari. Atas perintah atasan tersebut, maka pemeriksaan perkara itu dapat dilakukan oleh seorang perwira, seorang bintara atau oleh sebuah Komisi yang terdiri dari perwira/bintara. Kecuali jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 berpendapat bahwa, perkara tersebut harus diperiksa oleh "atasan yang berhak menghukum" sendiri, maka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Atasan tersebut berhak menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara itu kepada Jaksa Tentara yang berhak juga menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan, dengan ketentuan bahwa, baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tersebut tidak campur tangan dalam soal penahanan tersebut. (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3).[362]

Pasal-pasal penting lainnya, seperti Ankum bisa menentukan hukumannya dalam hal tersangka melanggar hukum disiplin (Pasal 7), Tersangka bila tidak cukup petunjuk/bukti harus dilepas (Pasal 8), Ankum harus melaporkan secara hirarkhis kepada Panglima/ Komandan tentang pendapatnya sehubungan penyelesaian perkara tersangka (Pasal 9), Keputusan Panglima/Komandan tentang penyelesaian perkara tersangka setelah mendapat saran dari Jaksa tentara (Pasal 10), Jika terdapat perbedaan pendapat antara Panglima/Komandan dengan Jaksa Tentara, tentang penyelesaian perkara tersangka (Pasal 11), Keputusan Panglima/Komandan tentang penahanan tersangka (Pasal 12), Keputusan Panglima/Komandan tentang penyerahan perkara tersangka ke Pengadilan

[362] Undang-undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958, Tentang Perubahan Undang-udang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53), Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan, Pasal 3 – Pasal 6. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1958, TLN Nomor 1493

ketentaraan atau pengadilan umum (Pasal 13), Keputusan Panglima/Komandan tentang penyelesaian perkara tersangka di luar pengadilan (Pasal 14).

Selanjutnya berkaitan dengan lembaga penyidik dan hak mengusut/penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran anggota tentara, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958, yang menetapkan bahwa :

"Hak mengusut kejahatan dan pelanggaran terhadap seorang militer diserahkan kepada :

a. Para Atasan yang berhak menghukum terhadap anak buahnya;

b. Tiap anggota Kepolisian Angkatan-angkatan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing terhadap anggota militer angkatannya;

c. Jaksa-jaksa di lingkungan pengadilan ketentaraan; dan

d. Para pegawai dan orang-orang lain yang disebut dalam pasal 39 H.I.R sekedar tidak ternyata bahwa tersangka adalah seorang militer.

Selanjutnya Pasal 16, yang menjelaskan, hal-hal ketentuan bagi pejabat atasan, Polisi Angkatan dan Jaksa Tentara terkait proses penyelesaian perkara tentara, hal yang penting antara lain:

a. Bagi pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub a berlaku pasal-pasal 6,7,8 dan 9;

b. Pengusutan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub b dilakukan dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara;

c. Pengusutan yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 39 H.I.R dilakukan menurut H.I.R., namun dalam hal pengusutan itu ternyata tersangka adalah anggota Angkatan Perang maka perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Tentara yang bersangkutan atau menyerahkannya kepada Polisi Angkatan yang bersangkutan;

d. Jaksa Tentara melaporkan kepada Ankum tentang adanya perkara baru yang sedang diusut oleh Polisi Angkatan atau Jaksa Tentara sendiri;

e. Baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tidak berhak untuk menentukan sesuatu tentang penahanan. Jaksa Tentara dapat mengusulkan supaya Ankum melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka;

f. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu berhak memerintahkan Jaksa Tentara untuk menyerahkan perkara kepada Ankum; dan

g. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu selalu dapat memrintahkan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Jaksa Tentara atau Polisi Angkatan.

Selain ketentuan Pasal 16 di atas, perlu juga diketahui tentang Pembantu Jaksa Tentara *(Magistraat* - Pembantu, *Hulpmagistraat)*, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut :

a. Para Atasan yang berhak menghukum, terhadap anak buahnya. Pembantu Jaksa Tentara (Hulpmagistraat) tidak dibawahkan Jaksa Tentara;

b. Para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat perwira, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing;

c. Para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat bintara, yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing; dan

d. Anggota militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung dengan persetujuan Menteri Pertahanan, terhadap suatu perkara tertentu.

Dalam penjelasan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958, ditegaskan bahwa dalam acara pidana tentara ini, khususnya mengenai phase pemeriksaan permulaan merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84) yang berbunyi, “Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara”

Adanya ketentuan bahwa, Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara tersebut, akibatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 mengalami perubahan yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958, namun RIB tetap menjadi pedoman Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan, karena yang mendapat perubahan hanya pada Bab II yaitu tentang pemeriksaan permulaan/pendahuluan, sedangkan pada Bab-Bab lainnya tetap berlaku seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, dengan ditambah beberapa pasal yang belum ada pada undang-undang yang lama.

Dengan adanya perubahan pada Undang-undang No. 6 Tahun 1950, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor1 Darurat Tahun 1958, terlihat adanya perubahan penting antara lain adalah :

a. Jaksa Tentara merupakan Penasihat Komandan yang berkewajiban memberikan saran kepada Kas Angkatan atau Komandan yang ditunjuk mengenai penyelesaian suatu perkara yang menyangkut anak buahnya;

b. Jaksa Tentara melakukan pengusutan terhadap perkara yang diserahkan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) kepadanya;

c. Melengkapi segala persyaratan yang diperlukan untuk berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tentara;

d. Melaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum mengenai perkara yang diterima dari instansi luar ketentaraan;

e. Memberi saran kepada Kas Angkatan/Komandan yang ditunjuk perihal perpanjangan penahanan seorang militer; dan

f. Apabila Jaksa Tentara melakukan pengusutan perkara, maka Jaksa Tentara tersebut membawahi Polisi Angkatan.[363]

Dengan adanya perubahan-peruahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1958, mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 18, sebagaimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa, titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer, dalam fase pemeriksaan permulaan/pendahuluan, tidak lagi dibebankan kepada Jaksa Militer, akan tetapi kepada atasan militer atau komandan militer dan Panglima militer.

**4. Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.**

Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 15 Oktober 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 84), sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, Tentang menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965 (Lembarab Negara Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2781) dan

[363] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 19.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1958, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493). Kemudian juga mengganti Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965, tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata (Lembaran Negara Tahun 1965, Nomor 23), serta Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965, tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota Angkatan Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1965, Nomor 21) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun1965 Nomor 92).[364]

Di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997, diantaranya pada Bab IV tentang Hukum Acara Pidana Militer, pada Pasal 69 yang menetapkan lembaga atau pejabat penyidik. Pasal 69 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah :

1) a. Atasan Yang Berhak Menghukum;

b. Polisi Militer; dan

c. Oditur Militer.

[364] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 15 Oktober 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 84), Pasal 352.

Kemudian pada ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu :

2) a. Provost TNI Angkatan Darat;

b. Provost TNI Angkatan Laut;

c. Provost TNI Angkatan Udara; dan

d. Provost Kepolisian Republik Indonesia.

Dari bunyi Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahawa yang dimaksud dengan Penyidik itu adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Meskipun Ankum dinyatakan sebagai penyidik, namun dalam pelaksanaan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer/Oditur, sebagaimana wewenang Ankum yang dijelaskan dalam Pasal 74, yang menyatakan bahwa, Ankum berwenang :

a. Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur;

b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur;

c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur; dan

d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah Komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan Yang Berhak Menghukum tersebut dan agar supaya Atasan Yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer.[365]

Sedangkan wewenang penyidik pembantu (Provost Angkatan), sebenarnya merupakan bagian dari organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/pimpinan pada markas/kapal/kesatrian/ pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya. Apabila ia melakukan penyidikan di bawah bimbingan Polisi Militer atau Oditur Militer.[366]

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;

c. Mencari keterangan dan bukti;

[365] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 35.
[366] *Ibid.*

d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;

h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[367]

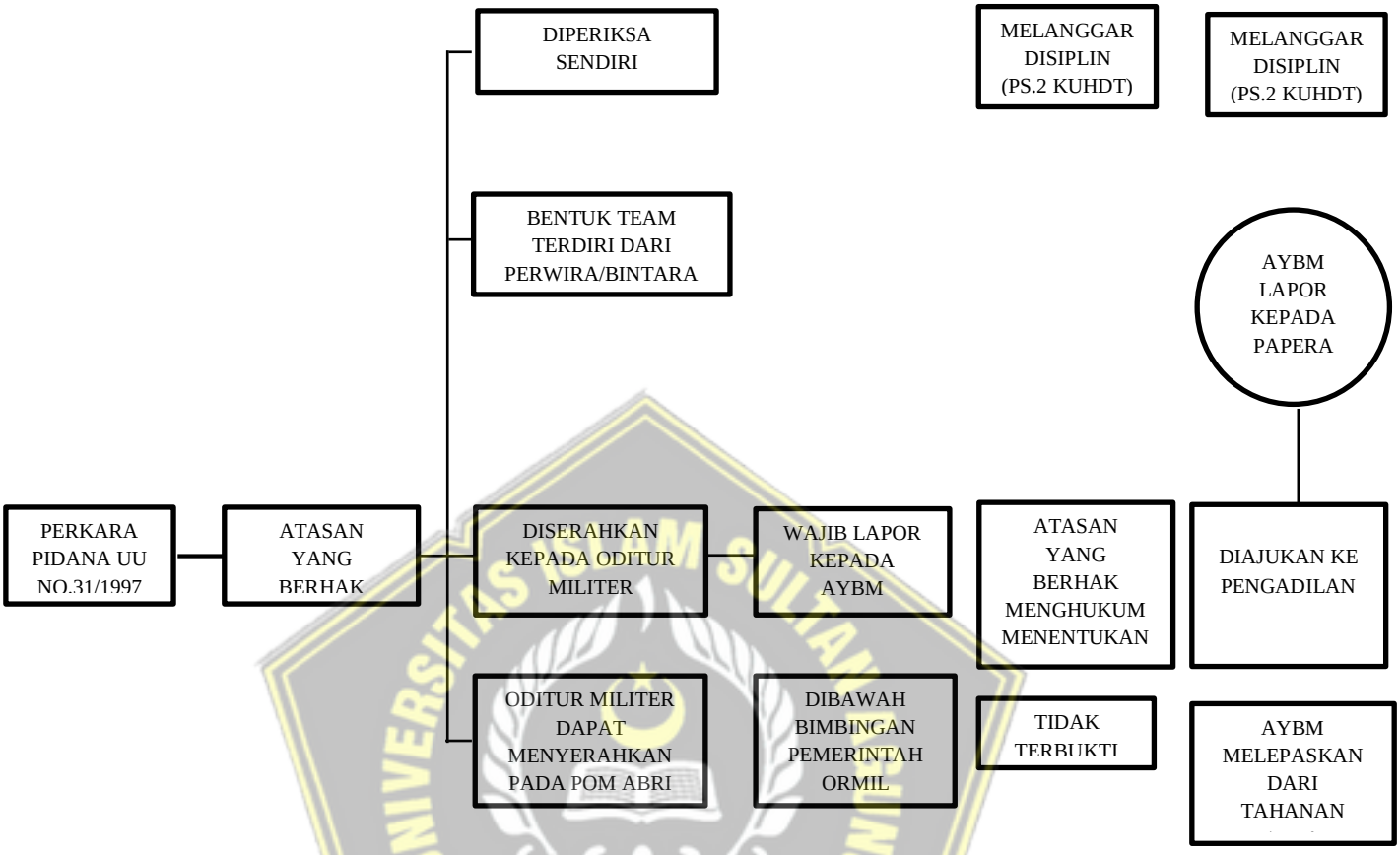
## C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, khususnya penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer, merupakan phase awal/permulaan dari proses penegakan hukum bagi pelaku kejahatan prajurit. Pelaksanaan penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, pada Pasal 99 samapai dengan Pasal 121. Proses penyidikan ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

[367] Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Pasal 71

Bagan 2

Proses Penyidikan (Pemeriksaan Pendahuluan)[368]




Keterangan : a. AYBM (Atasan Yang Berhak Menghukum).

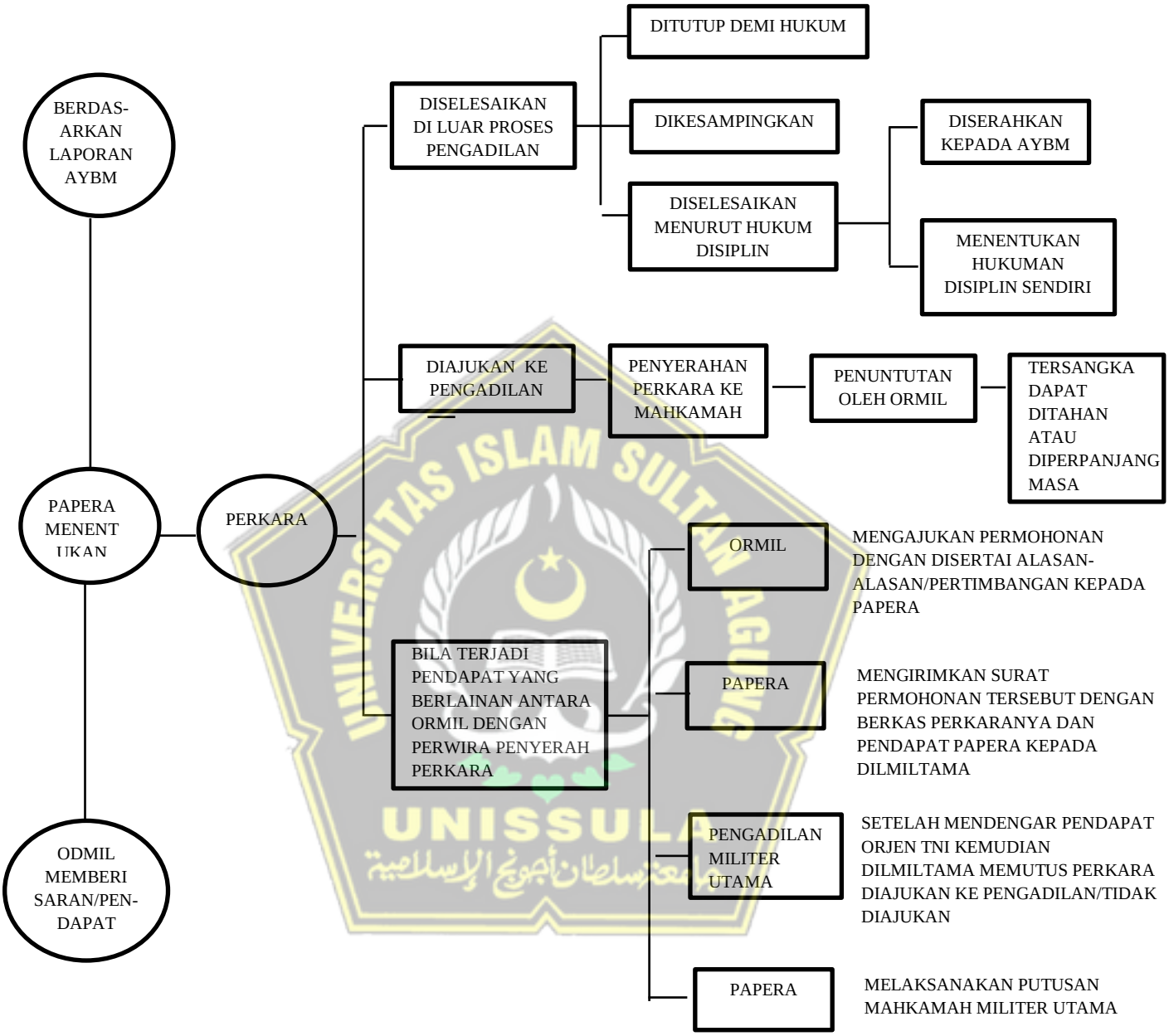
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Hukum Disiplin Militer, yang berlaku saat ini.

c. Istilah-istilah pada bagan 3 dan 4 sudah disesuaikan yang berlaku saat ini, seperti Orjen ABRI menjadi Orjen TNI dan sebagainya.

[368] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, *Op. Cit.*, hal.32-33

Bagan 3

Proses Penyerahan Perkara dan Penuntutan[369]




Dari gambar (Bagan 2) di atas, proses penyidikan/ pemeriksaan pendahuluan perkara prajurit menurut Hukum Acara Pidana Militer sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dapat dijelaskan sebagai berikut :

[369] *Ibid.*

a. Apabila terjadi tindak pidana prajurit, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (AYBM) dapat mengambil langkah sebagai berikut :

1) Tersangka bawahannya diperiksa sendiri Ankum atau dengan membentuk tim terdiri dari Perwira/Bintara; atau

2) Tersangka diserahkan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penyidikan, dengan kewajiban Oditur melaporkan hasil penyidikannya kepada Ankum/AYBM;

3) Oditur Militer dapat menyerahkan tersangka kepada Polisi Militer; dan

4) Bila hasil penyidikan ternyata tersangka melanggar disiplin, maka Ankum menentukan sendiri hukuman disiplinnya. Bila tidak terbukti, maka Ankum melepaskan Tersangka bila tersangka ditahan.

b. Apabila tersangka terbukti melakukan tindak pidana, maka Ankum/AYBM melaporkan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Selanjutnya Papera akan menyerahkan berkas perkara tersangka ke pengadilan militer guna dilakukan penuntutan, selanjutnya agar diputus oleh hakim di pengadilan militer.

Sebagai catatan dari penulis, bahwa sepanjang pengalaman penulis menjadi penyidik di lingkungan peradilan militer, Apabila terjadi tindak pidana prajurit maka Ankum/AYBM biasanya setelah dilakukan pemeriksaan/penyelidikan di satuannya, kemudian menyerahkan tersangka kepada penyidk Polisi Militer (bukan kepada Oditur Militer), selanjutnya penyidik Polisi

Militer melakukan penyidikan terhadap tersangka tanpa bimbingan dari Oditur Militer, karena penyidik Polisi Militer saat ini sudah memiliki sumber daya penyidik yang cukup baik. Namun dalam proses penyidikan Polisi Militer berkoordinasi dengan Oditur Militer guna mencari kesepahaman tentang kesempurnaan berkas perkara tersangka.

Dari gambaran proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan tersebut di atas, apabila kita memperhatikan prosedur penyidikan dan hubungan kerja antara ketiga penyidik (Ankum, Polisi Militer dan Oditur Militer) di lingkungan peradilan militer saat ini (sesuai hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), maka terdapat beberapa problem/masalah-masalah khususnya menyangkut lembaga penyidik, kewenangan penyidikan diantara penyidik tersebut yang perlu kajian lebih lanjut, mengingat masalah penyidikan (khususnya pemeriksaan pendahuluan) akan menghasilkan produk penyidikan berupa Berkas Perkara (BP) tersangka. BP tersangka ini sesungguhnya merupakan hal yang fundamental bagi kepentingan tersangka, korban dan pihak lain yang terkait dalam proses peradilan di lingkungan militer, guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

## D. Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer, telah diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Hukum acara pidana, baik di lingkungan peradilan militer (secara khusus), maupun di lingkungan peradilan umum, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dan juga untuk

mengatur dan membatasi kewenangan dari aparat penegak hukum seperti Polisi/Polisi Militer sebagai penyidik, Jaksa/Oditur sebagai penuntut, Hakim sebagai pemutus perkara, pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan dan penasehat hukum sebagai pemangku jasa hukum/sebagai unsur penegak hukum juga.

Hukum acara pidana militer dengan pengaturan kekhususannya juga untuk melindungi kepentingan tersangka/terdakwa dan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Namun demikian, dalam regulasi lembaga penyidik dan kewenangannya, ada beberapa problem, khususnya pada lembaga Ankum sebagai penyidik dan kewenangannya yang belum berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan (secara empiris) dapat merugikan pihak lain dalam proses hukum prajurit, serta bertentangan dengan asas profesionalisme penyidik. Problematika pada penyidik Ankum dan kewenagannya tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. **Regulasi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik.**

   Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, ditegaskan:

   (1) Penyidik adalah :

   a. Atasan yang Berhak Menghukum

   b. Polisi Militer dan

   c. Oditur.

   (2) Penyidik pembantu adalah:

a. Provost Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
b. Provost Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
c. Provost Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
d. Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)

Huruf a. Sesuai dengan asas kesatuan komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Huruf b. Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat limpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Huruf c. Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat limpahan wewenang dari Panglima selaku

Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

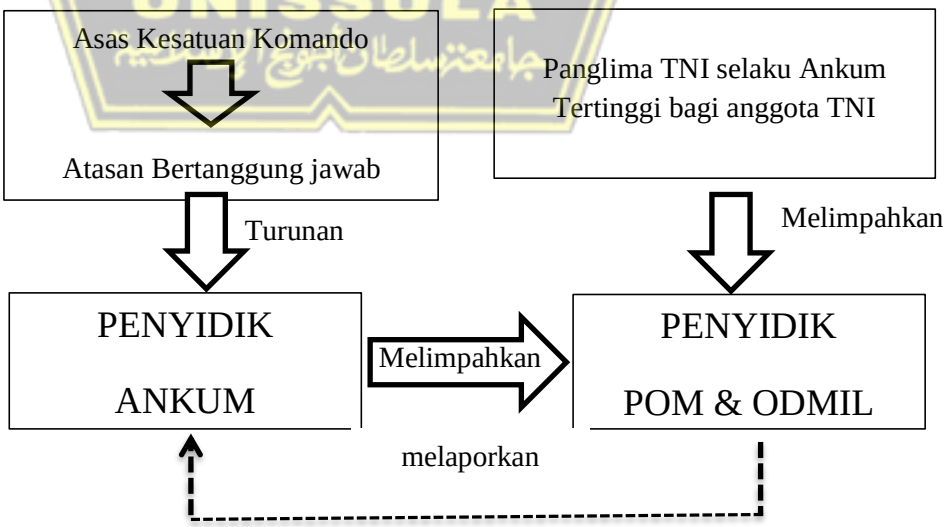
Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2)

Provost adalah bagian dari organik satuan yang tugasnya membantu komandan/pimpinan pada markas/kapal/ kesatrian/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan satuannya.

Dari ketentuan Pasal 69 (1) tersebut, dapat digambarkan skema/bagan sebagai berikut :

Bagan 4

Sumber Kewenangan Penyidikan
(Dalam UU No 31/1997 Pasal 69 (1) dan Penjelasanya)



Dari gambar bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa Ankum dijadikan sebagai penyidik, sebagai perwujudan dari asas bahwa Atasan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya, sehingga melekat pada diri Ankum kewenangan sebagai penyidik terhadap anak buah yang berada di bawah komandonya, untuk ikut menentukan nasib anggotanya dalam penyelesaian perkaranya, namun dalam pelaksanaan penyidikan Ankum melimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer (penyidik Polisi Militer yang melaksanakan penyidikan). Sedangkan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer mempunyai kewenangan sebagai penyidik diperoleh dari pelimpahan kewenangan dari Panglima TNI selaku Ankum tertinggi di lingkungan TNI. Hasil penyidikannya dilaporkan kepada Ankum.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, ditegaskan bahwa, persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 70 tersebut, selanjutnya keluar Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer. Substansi dari Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011tersebut, sebagai keabsahan sebagai penyidik dan penyidik pembantu di lingkungan peradilan militer, diantaranya : penyidik harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan sebagai penyidik dan penyidik terlebih dahulu harus disumpah sebagai penyidik. Namun perlu ditegaskan bahwa, Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 tersebut, dikecualikan bagi Ankum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, regulasi lembaga Ankum dijadikan sebagai penyidik, ratio legisnya adalah, agar Ankum dapat ikut menentukan nasib anak buahnya yang sedang menjalani proses hukum atau dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang dijalaninya. Ankum sendiri kenyataannya tidak pernah melakukan penyidikan, karena kewenangan dan pelaksanaan penyidikan telah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Selain itu, Ankum sesungguhnya bukanlah penyidik yang sebenarnya, meskipun secara atributif dalam Pasal 69 (1) a Ankum ditetapkan sebagai penyidik, karena Ankum dalam kenyataannya tidak pernah melakukan penyidikan. Kalaupun Ankum melakukan penyidikan sendiri terhadap anak buahnya, maka hasil penyidikannya tidak sah secara hukum, karena Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 69 (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang penyidik pembantu yang terdiri dari provostt Angkatan (AD, AL, dan AU). Dari substansi penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut, menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa provostt itu organ satuan, yang tugasnya membantu Komandan dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dalam satuannya. Dari redaksi antara bunyi Pasal 69 ayat (2), dengan penjelasannya terkesan tidak sinkron, karena dalam redaksi Pasal 69 ayat (2), ditetapkan bahwa provostt sebagai penyidik pembantu, tetapi dalam penjelasannya provost sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dalam satuan. Rumusan provost sebagai penegak hukum itu, mengandung pengertian luas tidak spesifik sebagai penyidik, namun provost sebagai organ satuan penegak hukum, disiplin dan tata tertib, lebih pada

tugas-tugas penegakan hukum secara umum, yaitu penegak disiplin dan tata tertib dalam satuannya.

Menurut penulis, sudah tepat substansi penjelasan dari Pasal 69 ayat (2) tersebut, bahwa provost sejatinya adalah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dalam internal markas/kesatuan, bukan sebagai tenaga penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik, sehingga provost tidak layak dijadikan sebagai penyidik pembantu. Alasannya : *Pertama*, Tempat Kejadian Perkara (TKP) pidana, sebagian besar terjadi di luar markas/kesatuan dan jarang TKP dalam markas/kesatuan. Apabila TKP di luar markas/kesatuan maka di luar kewenangan provost. *Kedua*, apabila provost dijadikan sebagai penyidik pembantu, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, seperti provost harus pernah mengikuti pendidikan penyidik dan provost harus disumpah sebagai penyidik pembantu. Tanpa adanya penyumpahan sebagai penyidik pembantu, maka produk penyidikan yang dihasilkan tidak sah, sebagaimana syarat-syarat sebagai penyidik yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

Kembali ke masalah Ankum sebagai penyidik, dengan ratio legis, Ankum dijadikan sebagai penyidik, agar Ankum dapat ikut menentukan nasib anak buahnya yang sedang menjalani proses hukum atau dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang dijalaninya, hal ini mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam proses hukum terhadap prajurit, dan pihak lain yang terkait dengan proses dan penyelesaian perkara prajurit. Mengingat Ankum sebagai atasan langsung dari tersangka (bawahan Ankum), akan mudah intervensi dalam proses penyidikan. Dalam kenyataannya, Ankum tidak netral dan

cenderung membela anak buahnya. Adanya intervensi dari Ankum sesuai dengan kepentingannya akan membuat proses penyidikan akan terganggu, bahkan penyidikan dapat terhenti. Keadaan demikian jelas akan merugikan pihak-pihak yang berperkara, karena pihak yang dirugikan tidak bisa mendapatkan rasa keadilan.

Berkaitan dengan kemungkinan adanya intervensi Ankum dalam penyidikan, disampaikan oleh Slamet Sarwo Edy, bahwa filosofis menempatkan peran lembaga non yudisial (seperti Ankum), peran komandan satuan sebagai penyidik maupun sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) ke pengadilan dalam sistem penegakan hukum, menyebabkan ambiguitas dan ketidakmandirian sistem peradilan militer.[370] Dilibatkannya Ankum sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer juga membuka peluang/celah intervensi Ankum terhadap penyidik polisi militer, misalnya dalam menentukan pelanggaran/kejahatan apa yang akan diterapkan terhadap tersangka (bawahan Ankum).[371]

Hal yang sama terkait dengan peluang intervensi Ankum maupun Papera dalam proses penyidikan, T. Gayus Lumbuun menyatakan bahwa, fungsi Ankum dan Papera yang ada dalam sistem peadilan militer merupakan persoalan terkait dengan struktur hukum peradilan militer. Ankum dan Papera memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan mekanisme hukum yang akan diterapkan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Ankum dan Papera memiliki otoritas untuk menentukan apakah sebuah tindak pelanggaran hukum ditempatkan sebagai pelanggaran disiplin, tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Bahkan ketika sebuah pelanggaran hanya

[370] Slamet Sarwo Edy, 2017, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 112. Email: slametsarwoedy@gmail.com).
[371] *Ibid*. hal 119.

dianggap sebagai sebuah pelanggaran disiplin, Ankum dapat langsung menentukan dan memberikan hukuman, hal ini menggambarkan adanya intervensi.[372]

Contoh Ankum bertindak tidak adil dan cenderung membela anak buahnya, terjadi dalam perkara yang dilaporkan pada penyidik Puspom TNI, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/2020/ Idik, Tanggal 11 Maret 2020, tentang tindak pidana memasuki rumah orang lain dengan paksa, pengrusakan dan pencurian di Jalan H. Juanda Nomor 17 Bandung Jawa Barat, atas nama pelapor Rudy Surjawan. Anggota TNI yang dilaporkan atas nama: Tersangka a.n. Letkol Laut (S) Drs. I. H, Nrp.12902/P, Jabatan Paban Ren Srena, Kesatuan Lantamal III Jakarta Koarmada 1, dengan Ankum Komandan Lantamal III Jakarta.

Latar belakang perkara, Tersangka merasa memiliki tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No 17 Bandung, dan memaksa masuk ke rumah pelapor (Rudy Surjawan) dan menduduki rumah dan tanah pelapor, padahal pelapor memiliki alas hak berupa sertifikat tanah di Jl. Ir. H. Juanda No 17 Bandung. Setelah rumah diduduki oleh Tersangka, ada tindakan pengerusakan dan ada barang yg hilang milik pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan perkara tersebut kepada penyidik Puspom TNI. Penyidik Puspom TNI melakukan penyidikan dengan memanggil Tersangka untuk dimintai keterangan, namun Ankum Tersangka, Danlantamal III Jakarta tidak menanggapi panggilan dari penyidik Puspom TNI, dan tidak menghadirkan tersangka kepada penyidik, tanpa alasan apapun. Akhirnya penyidikan tidak bisa dilanjutkan karena Tersangka tidak bisa diperiksa

[372] T. Gayus Lumbuun, *Peranan Peradilan Militer Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Materi Kuliah Umum di STHM Ditkumad, pada tanggal 2 Mei 2018), Jurnal Hukum Militer/ STHM/Vol.4/No.1/Juni 2019, hal. 50.

oleh penyidik Puspom TNI.[373] Akibatnya, hak-hak pelapor untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terabaikan.

Contoh lain dari Ankum atau atasan yang tidak netral dan cenderung membela anak buahnya, adalah sebuah kasus pidana yang diduga dilakukan oleh Letkol Inf BP (mantan komandan Kodim) di daerah Jambi yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan (anggaran dalam program cetak sawah) melanggar pasal 372 yo 378 KUHP, dengan BP-01/A-21/I/2017. Menurut keterangan penyidik di Detasemen Polisi Militer Jambi (Mayor Cpm Saragih) yang menangani kasus tersebut, bahwa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana, selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan kepada Otmilti di Medan. Berkas perkara tersangka masih dalam proses di Otmilti Medan, namun tersangka sebelumnya sudah dipindah tugas ke staf intel di Mabes TNI Jakarta. Selanjutnya perkara tersangka di Otmilti Medan tidak berlanjut ke penuntutan, karena perkara tersangka ditutup oleh Paperanya, dengan Keppera Nomor : Kep/ I/ IV/ 2017, tanggal 7 April 2017, dengan alasan untuk kepentingan hukum.

Terkait dengan penutupan perkara dengan alasan untuk kepentingan hukum, mestinya, kalau alasan penutupan perkara untuk kepentingan hukum, artinya berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer tidak memenuhi syarat formil atau materiil dan berkas perkara oleh Otmilti dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Namun dalam perkara ini tidak ada pengembalian berkas perkara oleh Otmilti kepada penyidik, tetapi langsung dilakukan penutupan perkara oleh Paperanya. Kejadian seperti ini jelas tidak memberikan rasa keadilan, seharusnya kasus tersebut diserahkan/ dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk diadili dan diputus sesuai ketentuan yang berlaku.

[373] Sumber Kolonel Cpm Didin S., Jabatan Kasat Idik Puspom TNI Mabes TNI Jakarta.

Dari beberapa contoh di atas, perlu adanya evaluasi terhadap alasan perlunya lembaga Ankum dijadikan sebagai penyidik, sebagaimana tertuang secara atributif dalam Pasal 69 (1) a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Evaluasi terhadap nilai-nilai yang dijadikan norma hukum yang membentuk Ankum sebagai penyidik. Nilai-nilai dari asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, kemudian dideclair bahwa pada diri Ankum melekat kewenangan sebagai penyidik, kemudian dijadikan norma bahwa Ankum menjadi penyidik bagi anggota/bawahannya. Setelah Ankum menjadi penyidik, apakah Ankum menjadi penyidik professional, dalam arti penyidik yang telah berpendidikan dan telah disumpah sebagai penyidik? Apakah hasil penyidikan Ankum dapat dijadikan bahan hukum (seperti Berita Acara Pemeriksaan, Penyitaan dan sebagainya) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan militer? Apakah Ankum sebagai penyidik dapat bertindak adil dalam proses penyidikan, tidak sewenang-wenang, dan tidak memihak/ tidak berat sebelah terhadap para pihak? Dengan evaluasi tersebut diharapkan ke depan, lembaga Ankum dalam sistem peradilan militer dapat dicarikan peran yang tepat dan dipercaya sebagai penegak hukum yang jujur dan dapat mewujudkan rasa/nilai-nilai keadilan.

**2. Regulasi Kewenangan Penyidik Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)**

Dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan Ankum mempunyai wewenang :

a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur;

b. Meminta laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur;

c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur; dan

d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Pada penjelasan Pasal 74, disebutkan bahwa :

> "Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan Yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan Yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam pelaksanaan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut, dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur".

Mencermati kewenangan Ankum pada Pasal 74 a, bahwa Ankum berwenang melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur. Substansi Pasal 74 a ini, berkaitan dengan penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf a, yang menjelaskan :

"Sesuai dengan asas kesatuan komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenangn komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menetukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya **dilimpahkan** (ditebalkankan- pen.) kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur."

Kedua penjelasan antara Pasal 69 (1) huruf a dengan penjelasan Pasal 74 terkait erat, bahkan dapat ditafsirkan, bahwa penjelasan pada pasal 69 (1) huruf a tersebut, dilaksanakan pada pasal 74 ayat (1). Kalau kita cermati penjelasan pasal 69 (1) huruf a, pada intinya, "Ankum melimpahkan kewenangan penyidikan (terhadap anggotanya) kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur". Kalimat **dilimpahkan atau melimpahkan** ( tulisan ditebalkan - penulis), pada penjelasan pasal (69) huruf a, apabila ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara, kewenangan (penyidikan) tersebut sudah "dilimpahkan", maka *"delegans"* atau orang yang telah melimpahkan wewenangnya tersebut, "tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut.[374]

Dalam hal terjadinya pelimpahan wewenang/kewenangan, secara teoritik kita mengacu pada hukum administrasi negara. Dalam literatur hukum administrasi negara, dikenal adanya sumber dan cara memperoleh kewenangan dan pertanggungjawaban kewenangan. Dalam negara hukum sebagai pilar utamanya adalah asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan/ wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Ridwan HR, dengan mengutip pendapat dari H. D. van Wijk/Willem Konejdenbelt, mendifinisikan sebagai berikut :

a. *Attrubutie: toekenning van een bestuursbevogheid door een wetgever aan een bestuursorgaan,* (Atribusi adalah pemberian wewenang

[374] Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara,* Surabaya, Laksbang Justitia, hal. 42.

pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

b. *Delegatie: overdracht van een bevogheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)

c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevogheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).[375]

Selanjutnya Ridwan HR menjelaskan, pengertian atribusi dan delegasi (dalam terjemahannya): Atribusi adalah wewenang dikemukakan bilamana undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Selanjutnya delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Sedangkan delegasi berarti pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya. Lebih lanjut Ridwan HR menjelaskan tentang delegasi yang diartikan sebagai "pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri, artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung

[375] *Ibid*., hal. 103-104.

jawab hukum atau tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.[376]

Dari uraian di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya bahwa organ pemerintahan memperoleh wewenang secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu perundang-undangan. Dalam atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada atribusi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi *(delegans)*, tetapi beralih pada penerima delegasi *(delegataris*). Sedangkan pada mandat, penerima mandat (*mandatris)* hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat *(mandans)*, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.[377]

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

a. Delegasi harus definitif, artinya pemberi delegasi tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

[376] Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 101-102
[377] *Ibid*., hal. 105.

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk minta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan

e. Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[378]

Didalam setiap pemberian wewenang, tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang menerima pelimpahan wewenang. Dalam hal pertanggungjawaban wewenang, pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandat atau delegasi. Jika yang dilakukan adalah pemberian mandat, maka si mandans (pemberi wewenang/penerima wewenang dalam atribusi) tetap bertanggung jawab. Berbeda bila dilakukan dengan cara delegasi, maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab, pertanggung jawaban sudah beralih kepada penerima wewenang *(delegatoris)*.[379]

Dari penjelasan tentang pendelegasian wewenang menurut literatur hukum administrasi negara tersebut di atas, maka kewenangan Ankum dalam Pasal 74 huruf a, sudah menjadi wewenang delegatoris, dalam hal ini penyidik Polisi Militer atau Oditur dan tanggung jawab penyidikan juga sudah beralih kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Dengan demikian, wewenang Ankum dalam Pasal 74 huruf a ini, sebenarnya bukan kewenangan penyidikan tetapi esensinya pelimpahan wewenang penyidikan dari Ankum kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, sedangkan Ankum sendiri bukan penyidik yang sebenarnya, karena Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik dan tidak pernah melakukan

[378] H. Abdul Latif, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group Jakarta, hal. 13-14.
[379] *Ibid.* Hal. 17.

penyidikan, meskipun Ankum secara atributif mempunyai kewenangan penyidikan.

Dari uraian tentang regulasi lembaga penyidik Ankum dan kewenangannya tersebut di atas, perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi Ankum dan kewenangannya sebagai penyidik, agar ke depan proses penyidikan dalam sistem peradilan militer dapat mewujudkan rasa keadilan dan berkepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam proses penyidikan.

Kewenangan Ankum pada Pasal 74 huruf b, adalah meminta laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur. Kewenangan inipun esensinya tidak terkait langsung dengan profesionalitas penyidikan, namun lebih bersifat pengawasan atau pengendalian dari Ankum terhadap penyidik Polisi Militer atau Oditur, dengan meminta laporan pelaksanaan dan perkembangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Kewenangan Ankum pada Pasal 74 huruf c, adalah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur. Kewenangan yang ketiga inipun, esensinya tidak terkait langsung dengan profesionalitas penyidikan, namun lebih bersifat pengawasan atau pengendalian dari Ankum terhadap penyidik Polisi Militer atau Oditur, dengan menerima berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Kewenangan Ankum pada Pasal 74 huruf d, adalah melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. Kewenangan Ankum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka ini, yang bersifat profesionalitas Ankum sebagai penyidik. Namun, seperti telah dijelaskan di atas, bahwa Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, tetapi untuk

kewenangan penahanan masih dimiliki oleh Ankum. Hal ini secara hukum administrasi masih dibenarkan, sebagian kewenangan Ankum masih digunakan sendiri oleh Ankum, namun kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan, bahkan bisa terjadi kesewenangan penahanan oleh Ankum. Mengingat penahanan terhadap tersangka sangat terkait dengan kepentingan penyidikan, sedangkan yang tahu persis tentang apakah tersangka perlu ditahan atau tidak, adalah penyidik yang langsung menangani perkara tersangka, yaitu Polisi Militer atau Oditur. Selain itu, penanganan, pengurusan dan pengawasan terhadap tahanan secara langsung oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, tetapi penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak diberi kewenangan untuk menahan tersangka, sehingga sering terjadi masalah administrasi penahanan (seperti surat perintah penahanan) terabaikan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan pelanggaran hukum, karena tahanan/ tersangka ditahan tanpa adanya surat perintah penahanan.

Masalah kewenangan penahanan terhadap tersangka, harus diperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan bilamana, terdapat bukti yang cukup (pertimbangan obyektif), adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran (pertimbangan subyektif dari penyidik). Pertimbangan subyektif dari penyidik ini, tentunya penyidik yang langsung menangani tersangka, dalam hal ini penyidik Polisi Militer atau Oditur, bukan Ankum. Namun bilamana diperlukan penahanan terhadap tersangka, penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak bisa melakukan penahanan terhadap tersangka, tanpa perintah dari Ankum.

Dalam hal kewenangan penahanan ini, meskipun disadari bahwa hal ini merupakan kekhususan dalam hukum acara pidana militer, tetapi sangat berpotensi terjadi ketidakadilan atau kesewenang-wenangan dari Ankum untuk menahan atau tidak menahan tersangka. Padahal pertimbangan subyektif perlu atau tidaknya tersangka ditahan, yang tahu pasti adalah penyidik yang langsung menangani perkara tersangka, yaitu Polisi Militer atau Oditur.

Dari regulasi kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, menunjukkan Ankum seakan menjadi atasan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur, karena substansi dari Pasal 74 ini sesungguhnya bukan pekerjaan yang terkait dengan profesionalitas penyidikan, tetapi lebih pada superioritas Ankum terhadap penyidik Polisi Militer atau Oditur. Ankum melimpahkan atau dapat memerintahkan penyidik Polisi Militer/Oditur untuk melakukan penyidikan terhadap anggotanya, selanjutnya Ankum menerima laporan pelaksanaan dan hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer/Oditur (artinya penyidik Polisi Militer/Oditur harus melaporkan kepada Ankum), dan untuk kepentingan penahanan terhadap tersangka, penyidik Polisi Militer/Oditur harus menunggu perintah dari Ankum, karena Ankum yang mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka (bawahan Ankum), sedangkan penyidik Polisi Militer/Oditur tidak mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka, (perhatikan Pasal 71 (2) dan Pasal 78 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

Dari ketentuan Pasal 74 ini, lebih terlihat jelas dominasi Ankum dalam penyidikan, padahal Ankum, Polisi Militer dan Oditur sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan secara atributif dalam Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, seharusnya ketiga lembaga penyidik (Ankum, Polisi Militer atau Oditur) mempunyai posisi yang sama, namun keyataannya dalam

posisi dan peran berbeda, dimana penyidik Polisi Militer atau Oditur lebih berperan sebagai pembantu Ankum (lihat dalam penjelasan Pasal 74).

Apabila kita penjelasan dari ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, masih sama dengan ratio legis Pasal 69 (1) sebagaimana tersebut di atas, yaitu; agar Ankum dapat ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang dalam proses hukum dan penyelesaian perkaranya. Pada posisi yang demikian, peran Ankum dalam penyidikan lebih mendominasi, sehingga potensi mempengaruhi dan intervensi terhadap penyidik Polisi Militer/Oditur sangat mungkin terjadi dalam penyidikan. Dengan demikian, proses penyidikan akan sulit mewujudkan nilai-nilai dan rasa keadilan.

**3. Konflik Norma dan Kewenangan.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana Militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat tiga penyidik yaitu, Ankum, Polisi Militer dan Oditur yang sama-sama memiliki kewenangan secara atributif, dalam penyidikan perkara pidana di lingkungan peradilan militer. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan, penyidik berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c. Mencari keterangan dan bukti;
d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;

h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat konflik norma antara Penyidik Polisi Militer atau Oditur dengan penyidik Ankum. Mengingat ketiga lembaga penyidik (Ankum, Polisi Militer dan Oditur) secara atributif mendapat kewenangan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 71 di atas. Akibat adanya konflik norma ini, maka dilapangan (secara empiris), terjadi konflik kewenangan, terutama kewenangan dalam hal penahanan terhadap tersangka. Meskipun dalam aturannya Ankum melimpahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, tetapi dalam kenyatannya Ankum masih merasa punya kewenangan untuk menyidik sendiri anggotanya. Hal ini bisa terjadi karena dalam Hapmil tidak ada penegasan bahwa, Ankum wajib menyerahkan anggotanya yang bersalah melakukan tindak pidana, kepada penyidik Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan. Contoh konflik norma ini dalam praktek seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Ilustrasi lainnya terjadinya konflik norma ini, misalkan dalam hal penyidik Polisi Militer menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah

terjadi tindak pidana oleh anggota militer/prajurit TNI, maka Penyidik Polisi Militer berkewajiban untuk melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tadi. Selanjutnya, Penyidik Polisi Militer melakukan penyidikan, misalnya melakukan pemanggilan terhadap tersangka, atau melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan atau penyitaan terhadap alat bukti yang terkait dengan perkara tersangka. Namun tindakan polisionil penyidik Polisi Militer ini, akan terjadi problema, apabila perkara ini ketika dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Ankumnya, ternyata Ankumnya tidak menghendaki perkara tersangka tersebut diproses hukum dengan dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer terhadap tersangka, dengan alasan bahwa perkara tersangka akan diperiksa dan dilakukan penyidikan sendiri oleh Ankum. Dalam posisi seperti ini, penyidik Polisi Militer tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka, karena Ankumnya tidak mengijinkan tersangka (bawahan Ankum) disidik oleh penyidik Polisi Militer. Dalam keadaan seperti ini, apakah penyidik Polisi Militer dapat disalahkan karena tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka, atau dapatkah Ankum dipersalahkan telah melakukan tindakan menghalang-halangi penyidikan oleh penyidik Polisi Militer? Meskipun Ankum bisa saja melakukan pemeriksaan sendiri terhadap anggota bawahannya yang melakukan tindak pidana.

Terjadinya konflik kewenangan penyidikan seperti tersebut di atas, adalah wajar dan bisa terjadi, mengingat Ankum merasa punya kewenangan untuk menangani perkara yang terjadi pada anggota bawahannya, sedangkan aturan hukumnya dalam Hapmil, tidak mewajibkan Ankum menyerahkan anggotanya yang bersalah melakukan tindak pidana, kepada penyidik Polisi Militer. Kondisi konflik norma dalam regulasi kewenangan penyidikan seperti ini, menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara prajurit, seperti telah dicontohkan di atas. Ketidakpastian dalam penyelesaian perkara ini menimbulkan ketidak adilan bagi pihak yang dirugikan dalam perkara pidana prajurit ini.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

# BAB IV

# KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

## A. Kelemahan Substansi Hukum.

Apabila kita berbicara tentang regulasi, sudah pasti menyangkut substansi hukum. Namun demikian, sesuai pokok bahasan dalam bab 4 (empat) ini, akan dibahas kelemahan- kelemahan regulasi bisa berkaitan dengan regulasi lembaga penyidik (struktur hukum) dan kelemahan dari aspek kultur (budaya hukum).

Dalam bahasan kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik (khususnya penyidik Ankum) dan kewenangan penyidik Ankum, berkaitan dengan regulasi ketentuan Pasal 69 ayat (1) a dan ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, yang dibahas dalam perspektif 3 (tiga) komponen yaitu; substansi, struktur dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana.

Mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) a dan ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, merupakan substansi pasal-pasal dalam ranah penegakan hukum (khususnya penyidikan), dalam hukum acara peradilan militer, maka pembahasannya juga ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat militer. Selanjutnya, akan dibahas pula kelemahan-kelemahan hukum positif dalam sistem peradilan militer (dalam komponen substansi, struktur dan budaya hukum), yang menjadi mempengaruhi ataupun hambatan dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan militer saat ini.

**1. Kelemahan Regulasi Hukum Dalam Perspektif Teori Hukum**.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa regulasi lembaga dan kewenangan penyidik terkait pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) a dan ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana pasal-pasal tersebut berada dalam ranah penegakan hukum (hukum acara pidana) dalam sistem peradilan militer. Ditinjau dari teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, bahwa factor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, atau efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: b) faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penjabaran dari kelima factor tersebut, yaitu; pada faktor pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efekvitas pada faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) adalah: peraturan hukum yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara

hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.[380]

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dari aparat penegak hukum dalam kaitannya ini, adalah meliputi kemampuan dan keterampilan yang professional dan mempunyai mental yang baik. Selain itu, hal yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya akan tergantung pada hal berikut: a) sampai sejauh mana petugas penegak hukum terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. b) sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. c) Teladan atau contoh seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat, dan d) sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas penegak hukum, sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada factor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen sarana tersebut adalah;

[380] https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html. Diunduh tanggal 22 Desember 2021.

Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, dan prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.[381]

Faktor yang kelima, adalah kondisi masyarakat, sebagai faktor pengukur efektivitasnya aturan hukum yang tergantung dari; a) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

b) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, c) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat penegak hukum berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor-faktor tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat di motivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.[382]

Terkait dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto ini, sebagai tambahan perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Romli

[381] *Ibid.*
[382] *Ibid.*

Atmasasmita yang mengatakan bahwa, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektif tidaknya peraturan hukum, adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[383]

Teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto sebagaimana diuraikan di atas, akan lebih lengkap bila kita mengaitkan dengan teori bekerjanya hukum dari William J. Chambliss dan Robert B Seidman, yang menyatakan bahwa, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini:[384]

Bagan 5

Teori Bekerjanya Hukum

[383] *Ibid.*
[384] *Ibid.*




Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bekerjanya hukum tersebut, yang dirumuskan secara teoritis oleh William J. Chambliss dan Robert B Seidman sebagai berikut:

1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuataan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuataan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.

4) Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuataan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.

Apabila kita menganalisa problem penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya dapat menggunakan teori- teori dari para pakar atau ahli, diantaranya pakar dari bangsa kita sendiri seperti Soerjono Soekanto dan pakar/ ahli dari manca Negara seperti; William J. Chambliss dan Robert B Seidman yang menyatakan secara teoritis ada tiga faktor yang berpengaruh berlakunya hukum yaitu : 1) peraturan Perundang-undangan, 2) aparat pelaksana (penegak hukum) dan 3) kondisi masyarakat (kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum), sebagaimana telah diuraikan di atas.[385]

Berpijak dari teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori berlakunya hukum dari William J. Chambliss dan Robert B Seidman sebagaimana dijelaska di atas, maka kelemahan-kelemahan regulasi, baik yang mengatur tentang kelembagaan/ lembaga maupun kewenangan dari lembaga, sangat tergantung dari proses di hulu, yaitu ketika peraturan hukum itu dibuat oleh lembaga pembuat peraturan hukum (kalau di Indonesia lembaga legislatif dan eksekutif). Seiring dengan itu, selama proses pembuatan peraturan hukum/

[385] *http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html?m=1*

Undang-undang tersebut, tidak lepas dari kepentingan (di luar kepentingan hukum), terutama kepentingan politik, ekonomi, budaya dan kepentingan-kepentingan pihak tertentu atau lembaga- lembaga kepentingan tertentu (kalau di Indonesia seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM, organisasi profesi dan organisasi keagamaan, dan sejenisnya).

Selain peran dari lembaga pembuat peraturan hukum/ undang-undang, ada pengaruh (umpan balik) juga dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok/ lembaga sosial kemasyarakatan, dalam merespon substansi peraturan hukum mulai dari tahap pembuatan peraturan hukum/ undang-undang, tahapan sosialisasi sampai pada tahapan pengundangan peraturan hukum tersebut, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

**2. Kelemahan Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik.**

Berkaitan dengan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik, khususnya penyidik Ankum dalam Pasal 69 ayat (1) a dan ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, berada dalam ranah penegakan hukum (hukum acara pidana) dalam sistem peradilan militer.

Kelemahan dari aspek normatif, antara substansi Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan penjelasannya dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat ketidaksingkronan atau pertentangan. (Sudah dijelaskan pada Bab III di atas), namun perlu dijelaskan secara singkat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai esensi hasil penelitian, terjadinya ketidaksingkronan atau pertentangan tersebut menyangkut kewenangan Ankum sebagai penyidik, yang secara normatif Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidkannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal Pasal 69 ayat (1)

huruf a dan penjelasannya). Dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian kewenangan penyidikan tersebut menurut teori kewenangan, seharusnya Ankum tidak bisa lagi menjalankan/ melaksanakan kewenangan penyidikan tersebut, karena kewenangan penyidikan dan tanggung jawab penyidikan sudah berada/ beralih kepada penyidik Polisi Militer/ Oditur. Namun dalam Pasal 74 huruf d, Ankum masih berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka (bawahan Ankum), padahal kewenangan penahanan termasuk dalam ranah kewenangan penyidikan. Selain itu, timbul adanya konflik norma antara ketentuan Pasal 71 (tentang kewenangan penyidik), dengan Pasal 74 (tentang kewenangan Ankum) khususnya huruf a dan b. Konflik norma ini terjadi, apabila Ankum tidak mau menyerahkan/ melimpahkan anggota bawahannya yang bersalah melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer. Hal ini bisa terjadi mengingat tidak ada ketentuan yang mewajibkan berikut sanksinya apabila Ankum tidak melimpahkan anggota bawahannya untuk disidik oleh penyidik Polisi Militer/ Oditur.

Disamping kelemahan dari aspek normatif, terdapat kelemahan juga dari aspek empiris (kenyataan dalam praktek), dimana Ankum ditetapkan sebagai penyidik, namun Ankum tidak bisa dan tidak pernah melakukan penyidikan, Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik sehingga Ankum secara kelembagaan maupun produk penyidikan Ankum menjadi tidak sah secara hukum. Selain itu Ankum sejatinya bukan tergolong lembaga yudisiil, karena fungsi Ankum tidak ada berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, ditinjau dari aspek kelayakan, kapasitas dan profesionalitas Ankum tidak layak dijadikan sebagai penyidik, karena Ankum dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tidak akan

bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagaimana dalam asas Due Process Of Law yang diakomodir dalam hukum acara pidana.

Adanya kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan terjadi saat pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut. Dalam hal ini paling menentukan adalah peran dari anggota lembaga pembuat undang-undang (pemerintah dan legislatif). Kalau kita cermati dari substansi Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, dimana norma-norma atau nilai-nilai dalam pasal- pasal tersebut sudah jelas arti dan maksudnya, namun secara normatif masih terdapat ambigu dan ketidakpastian. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa norma-norma yang terkandung dalam Pasal 69 dan 74 tersebut, memang dikehendaki demikian oleh pembuat undang-undang.

Terjadinya norma dalam Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersbut, tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak pemegang peran, baik lembaga TNI sebagai pihak yang berkepentingan di dadalam undang-undang ini mengatur hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), pihak pemerintah yang pada saat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini dibuat dan diundangkan, dimana posisi eksekutif/ pemerintah masih sangat dominan/ penentu kebijakan. Peran lembaga TNI juga sangat signifikan, mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer ini dibuat, untuk kepentingan TNI dalam rangka pertahanan negara.

Bagaimana untuk meminimalisir atau menghilangkan kelemahan-kelemahan dalam regulasi lembaga dan kewenangan penyidik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 dan 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini? Kembali pada teori berlakunya hukum, sekarang tergantung peran dari lembaga pembuat

peraturan hukum, bagaimana merespon Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dikaitkan dengan dinamika penegakan hukum pidana di lingkungan TNI, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajuan ilmu dan asas-asas hukum, demokrasi dan HAM yang secara factual berkembang di Indonesia. Mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer ini sudah berumur kurang lebih seperempat abad, sudah saatnya perlu dilakukan pembaharuan, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

**3. Kelemahan Hukum Positif Dalam Sistem Peradilan Militer.**

Sebelum masuk pada bahasan kelemahan hukum positif (substansi hukum) dalam sistem peradilan militer, agar dapat dipahami secara integral kelemahan-kelemahan hukum positif yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, maka perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sistem penegakan hukum (SPH), merupakan satu kesatuan yang integral dari berbagai sub sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum/*legal substance*", "struktur hukum/*legal structure*" dan "budaya hukum/*legal culture*". Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Dengan demikian, maka berarti sistem peradilan/penegakan

hukum pada hakekatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural dan sistem kultural.[386]

Dari pengertian sistem yang integral sebagaimana dijelaskankan di atas, maka dalam menjelaskan kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam sistem peradilan militer ini, lebih mengutamakan pada kelemahan hukum positif dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) di lingkungan peradilan militer.

Dalam komponen substansi hukum *(legal substabce)* yaitu, hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan peradilan militer, terdiri dari :

a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer;

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer/ KUHPM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947/ Wetboek van Militair Strafrecht, Staatsblad 1934 Nomor 167);

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946/ Wetboek van Strafrecht);

d. Peraturan Panglima TNI Nomor 55 Tahun 2020, Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum);

e. Peraturan Panglima TNI Nomor 56 Tahun 2020, Tentang Perwira Penyerah Perkara (Papera) bagi Militer TNI; dan

f. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020, Tentang Organisasi Dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

[386] Barda Nawawi Arief, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integratif (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister, hal. 58-60.

Dari beberapa hukum positif yang berlaku di lingkungan peradilan militer tersebut, terdapat kelemahan- kelemahan terkait dengan penegakan hukum pidana, antara lain;

1) Hukum Warisan Kolonial.

Dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Aspek kepastian hukum, setiap orang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi dan bagaimana hukumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Aspek kemanfaatan, bahwa penegakan hukum harus ada kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, dan aspek keadilan, bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan semua fakta yang terjadi, sehingga bisa diwujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.[387]

Dari 3 (tiga) asas penegakan hukum tersebut, sebenarnya berasal dari gagasan Gustav Radbruch, yang menyatakan ada tiga ide unsur dasar hukum, yang kemudian diidentikkan dengan tiga tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun apabila dari ketiga unsur keadilan tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), terjadi benturan atau pertentangan, maka yang harus diprioritaskan adalah aspek keadilan.[388] Untuk mewujudkan tujuan hukum atau asas-asas penegakan hukum tersebut dalam praktek penegakan hukum, maka substansi hukum yang digunakan harus sesuai dengan substansi rasa keadilan masyarakat Indonesia.

[387] E. Fernando M. Manullang, 2016, *Selayang Pandang Sistem hukum Di Indonesia*, Kencana, hal. 17.
[388] Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal. 98-99.

Dari faktor hukumnya (substansi hukumnya), yang menjadi kelemahan dalam sistem peradilan militer saat ini yaitu, bahwa hukum yang berlaku di lingkungan peradilan militer saat ini, hampir tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan dirasakan stagnan, dalam arti tidak ada pembaharuan hukum militer yang berarti ke arah cita hukum nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Hukum militer, terutama hukum materiilnya (KUHPM dan KUHP) masih menggunakan peninggalan/warisan kolonial, sedangkan hukum formilnya seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer (sudah berlaku kurang lebih 24 tahun), sudah sangat perlu adanya pembaharuan guna menyesuaikan dengan perkembangan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum, prinsip Hak Asasi Manusia, prinsip *Equality Before The Law*, sebagaimana telah dianut dalam hukum acara peradilan pidana pada umumnya.

Berkaitan dengan substansi Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Gayus Lumbuun mengatakan bahwa, ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, terdapat peran penting institusi peradilan militer, yaitu berperan sebagai lembaga yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan mengadili sengketa tata usaha militer. Namun secara keseluruhan, substansi peradilan militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip independensi, kepastian hukum, serta prisip Hak Asasi Manusia, sehingga peradilan militer yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, memiliki berbagai permasalahan yang

perlu diperbaiki melalui revisi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut.[389]

Lebih jauh Gayus Lumbuun mengatakan bahwa, dalam sistem peradilan militer perlu adanya jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan dengan peradilan militer. Hak didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan bertemu keluarga dan lain-lain, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer. Prajurit militer bagaimanapun juga merupakan warga negara, maka mereka juga memiliki hak yang sama dimuka hukum, sama dengan warga negara yang lain, dimana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.[390] Dalam sistem peradilan militer hak-hak tersangka dan terdakwa perlu dijamin sebab prajurit TNI merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai warga negara, meskipun diduga atau terbukti melakukan kejahatan, bukan berarti anggota TNI kehilangan hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam peradilan militer masih sangat lemah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.[391]

2) Hak Tersangka Didampingi Penasehat Hukum.

Terkait dengan yang disampaikan Gayus Lumbuun tentang hak tersangka didampingi penasehat hukum. Masalah hak tersangka didampingi pengacara/penasehat hukum. Sebenarnya hal penasehat hukum telah diatur dalam Pasal 216 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :

[389] Gayus Lumbuun, Jurnal Hukum Militer, Vol.4, No.1 Juni 2019, *Loc. cit.*, hal 49.
[390] *Ibid.*, hal. 52.
[391] *Ibid.*

(1) Penasehat hukum yang mendampingi tersangka pada tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seijin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuk; dan

(2) Penasehat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seijin Kepala Pengadilan.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 216 (1), dinyatakan :

"Yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang diberikan atas perintah" adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI-pen), sedangkan yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang dengan seijin dari Perwira Penyerah Perkara" adalah bantuan hukum yang disediakan oleh terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkaran Bersenjata."

Dari penjelasan Pasal 216 (1) di atas, khususnya "bantuan hukum yang disediakan sendiri oleh tersangka/terdakwa dari luar dinas bantuan hukum di lingkungan TNI, dengan seijin dari Papera. Timbul pertanyaan bagaimana seandainya, Paperanya tidak mengijinkan, atau diijinkan tapi penasehat hukumnya tidak sesuai dengan keinginan tersangka/terdakwa? Dari redaksi pasal 216 (1) dan penjelasannya tersebut, dapat ditafsirkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak bebas memilih penasehat hukum yang dari luar dinas bantuan hukum yang ada di luar lingkungan TNI, karena harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Papera tersangka/terdakwa. Kalau tersangka/terdakwa tidak mendapat ijin dari Paperanya untuk didampingi penasehat hukum dari luar dinas bantuan hukum di lingkungan TNI, atau personel penasehat hukumnya tidak disetujui oleh Paperanya, maka hal

ini dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak tersangka/terdakwa dan rasa keadilan bagi tersangka/terdakwa.

3) Pengadilan Tata Usaha Militer/ PTUM.

Masalah sengketa tata usaha militer. Dari aspek substansi, Hukum Acara dari Pengadilan Tata Usaha Militer ini, sudah diatur dalam Pasal 265 samapai dengan Pasal 343 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 353 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, telah diamanatkan, bahwa mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (tiga tahun dari tanggal 15 Oktober 1997). Seharusnya paling lambat tanggal 15 Oktober Tahun 2000, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer sudah terbentuk. Namun kenyataannya sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum terbentuk.

Belum keluarnya Peraturan Pemerintah tentang penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer ini, (Peraturan Pemerintah/PP merupakan produk dari sistem/lembaga eksekutif) yang mengatur mengenai penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer ini, maka Peradilan Tata Usaha Militer belum dapat terlaksana. Hal ini juga merupakan salah satu kelemahan dari hukum positif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

4) Independensi Pengadilan Militer.

Masalah independensi pengadilan militer, banyak pengamat atau pemerhati hukum militer dan peradilan militer berpendapat bahwa, peradilan

militer di Indonesia tidak independen, artinya peradilan militer masih bisa diintervensi oleh pejabat internal militer, khususnya Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (Papera), sehingga mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan hakim dalam putusannya, tidak independen/masih dipengaruhi oleh lembaga Ankum ataupun Papera. Untuk menjelaskan lebih lanjut dalam hal ini, akan dibahas pada pembahasan struktur hukum bab berikutnya.

Dari apa yang disampaikan oleh Gayus Lumbuun, bisa ditarik benang merahnya bahwa, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (Hapmil) belum sepenuhnya menjamin hak-hak prajurit yang sedang diproses hukum. Hal ini berarti pula bahwa, Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perlu segera dilakukan pembaharuan, guna menjamin rasa keadilan bagi prajurit.

Terkait dengan substansi hukum warisan colonial dan jaminan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, Jimly Assidqie juga mengingatkan bahwa, upaya penegakan hukum hanya merupakan satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan, jika materi hukumnya sebagian besar merupakan warisan masa lalu (warisan colonial - pen) yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan penegakan hukum, tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian seksama, yaitu : (1) pembuatan hukum *(The Legeslation Of Law Atau Law And*

*Rule Making)*; (2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum *(Socialization And Promulgation Of Law)* dan (3) penegakan hukum itu sendiri.[392]

Masalah pentingnya pembaharuan hukum sebagaimana disampaikan oleh Jimly Assidqie di atas, menyangkut politik hukum (kebijakan hukum dari pembentuk Undang-undang), yaitu lembaga legeslatif bersama pemerintah. Saat ini dari aspek substansi hukum positif kita, banyak yang harus segera diperbaharui, sebagai contoh hukum pidana (KUHP/KUHPM) peninggalan kolonial yang masih berlaku sampai sekarang. KUHP/KUHPM ini disadari bahwa secara filosofis dan sosiokulturalnya tidak sesuai dengan filosofi dan sosiokulturalnya bangsa Indonesia, sehingga penegakan hukum dengan menggunakan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia, akan sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut, karena penegakan hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Untuk kebutuhan pembaharuan hukum militer ini, tidak hanya hukum materiil (KUHP/ KUHPM), tapi juga pembaharuan diperlukan terhadap hukum formilnya, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, khususnya Hukum Acara Pidana Militer, sehingga hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan perkembangan hukum serta rasa keadilan saat ini, harus diperbaharui, namun pembaharuan hukum militer ini tidak boleh merugikan kepentingan TNI dan pertahanan keamanan Negara.

Sedangkan dari substansi aturan hukum yang bersifat internal TNI, seperti Peraturan Panglima TNI Nomor 55 Tahun 2020, Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Peraturan Panglima TNI Nomor 56 Tahun 2020, Tentang

[392] Jimly Assiddiqie, http//ww.jimly.com/MAKALAH/sb/penegakan_ hukum.PDF), *Loc. cit.*, hal.4.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) bagi Militer TNI, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020, Tentang Organisasi Dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, tidak ada masalah mengingat aturan-aturan tersebut mengatur internal TNI dan selama ini berjalan dengan baik.

## B. Kelemahan Struktur Hukum.

### 1. Kelemahan Regulasi Lembaga Penyidik Ankum.

Pada uraian kelemahan substansi hukum di atas, telah dijelaskan bahwa dari sudut pandang teori penegakan hukum dan berlakunya hukum, kelemahan regulasi hukum terjadi saat pembentukan hukum yang melibatkan peran lembaga pembuat peraturan hukum (legeslatif/pemerintah), lembaga pemegang peran lainnya. Pembahasan kelemahan regulasi lembaga penyidik Ankum sebagai kelemahan struktur hukum disini, lebih pada pembahasan dari aspek empiris yang menempatkan Ankum sebagai penyidik.

Pada kenyatannya, lembaga Ankum dijadikan sebagai penyidik dalam kontek penegakan hukum pidana, khususnya penyidikan di lingkungan peradilan militer, dalam arti menjalankan fungsi penyidikan, dapat dikatakan Ankum tidak berkontribusi apapun dalam proses penyidikan, karena memang Ankum tidak dibekali pengetahuan penyidikan, tidak pernah disumpah sebagai penyidik, sehingga tidak bisa melaksanakan penyidikan.

Kelemahan regulasi yang menempatkan Ankum sebagai penyidik, secara teoritis tidak mempertimbangkan asas kelayakan dan profesionalitas dari Ankum. Asas kelayakan yang penulis maksud, bahwa lembaga Ankum ini sejatinya tidak termasuk lembaga yudisiil yang fungsinya berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, seperti fungsi penyidikan yang diatur dalam hukum acara.

Ankum sejatinya sebagai organic satuan yang bertanggung jawab terhadap kesatuannya. Disamping itu, Ankum dijadikan sebagai penyidik tidak selaras atau menyimpang dari asas profesionalitas yang mengedepankan keahlian dalam profesi penyidik.

Berkaitan dengan pengertian ini, perlu dikemukakan pendapat dari para ahli, sebagai berikut;

Pertama, Sanusi menjelaskan 5 konsep berkaitan dengan profesi, yaitu:

a. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (experties) dari para anggotanya. Artinya, tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani professi (in-service training).

b. Profesional, menunjuk pada dua hal yaitu: (a) orang yang menyandang suatu profesi, (b) penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

c. Profesionalisme, menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standart yang tinggi dan kode etik profesinya.

d. Profesionalitas, mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

e. Profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai criteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.[393]

Kedua, Tantri Abeng. Terkait dengan profesi, Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kerativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.[394]

Dari beberapa pengertian profesi, profesional, profesionalitas, profesioalisme dan profesionalisasi yang dijelaskan di atas, kita dapat mengukur profesionalitas dari seseorang dalam lingkup profesi dan tugasnya.

Bagaimana dengan Ankum yang ditetapkan sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer. Penulis berpendapat bahwa, dari aspek profesionalitas Ankum tidak memenuhi syarat sebagai penyidik, dimana profesi penyidik butuh keahlian khusus bidang penyidikan. Namun Ankum dijadikan penyidik untuk ikut menentukan nasib bawahannya yang diproses hukum penyidikan, dalam penyelesaian perkara bawahannya.

Ditinjau dari teori penegakan hukum dan berlakunya hukum, regulasi lembaga penyidik Ankum ini memang sengaja dibuat demikian untuk TNI sesuai asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan adalah lembaga pembuat undang-undang, khususnya pemerintah saat itu dan lembaga TNI sendiri yang berorientasi pada kepentingan TNI dan perthanan Negara.

---

[393] *Ibid.* http://netaratna2.blogspot.com/2017/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_26.html?m=1

[394] *Ibid.*

Bagaimana dengan adanya kelemahan- kelemahan lembaga Ankum sebagai penyidik (aspek struktur), yang tidak memenuhi syarat kelayakan dan profesionalitas? Dalam hal ini, sangat tergantung dari respon pembuat undang-undang (khususnya legeslatif dan pemerintah), lembaga TNI dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, seperti LSM, para akademisi/ ahli hukum, lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang peduli terhadap kepentingan hukum militer, khususnya hukum acara pidana militer. Pendapat penulis dalam hal ini, mengingat Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer ini sudah berjalan seperempat abad (25 tahun), dalam rentang waktu ini sudah banyak terjadi perkembangan ilmu hukum, asas-asas hukum, asas keadilan, HAM dan prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta perkembangan demokrasi di Indonesia, maka perlu kiranya dilakukan pembaharuan terhadap Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sebagaimana dijelaskan di atas.

**2. Kelemahan Komponen Penegak Hukum.**

Sebagaimana dijelaskan di atas, komponen struktur *(legal structure)*, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Untuk lebih memahami kelemahan-kelemahan komponen struktur/para penegak hukum, perlu diperhatikan apa yang disampaikan oleh pakar sosiologi hukum Satjipto Raharjo, bahwa pada hakekatnya penegakan hukum itu merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang masih abstrak, sehingga untuk mewujudkan ide-ide menjadi

kenyataan diperlukan suatu managemen guna mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam struktur organisasi, serta dibutuhkan campur tangan negara melalui badan-badan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan badan peraturan perundang-undangan. Organisasi/badan-badan tersebut bekerja secara otonom untuk mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.[395]

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk meweujudkan perintah tersebut.[396] Dari sisi lain, penegakan hukum pada hakekatnya juga merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang, melainkan juga kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.[397]

Demikian juga dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan militer, diperlukan juga badan atau lembaga yang diberi tugas dan fungsi sebagai penegak hukum. Lembaga penegak hukum tersebut sudah dijabarkan dalam hukum acara pidana militer. Berkaitan dengan aspek struktural dalam penegakan hukum bagi prajurit militer ini, perlu kiranya disampaikan pendapat dari Gayus Lumbun, bahwa dari perspektif struktural sangat penting dibangun sebuah sistem peradilan militer yang menjamin *due process of law*, yang merupakan *codition sine quanon*

[395] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, GENTA Publishing, hal. 12.
[396] Ali Zaidan, M. 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hal. 111
[397] Edi Setiadi, H, dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, PRENADAMEDIA GROUP, hal. 136.

bagi perlindungan hak asasi manusia.[398] *Due Process Of Law* dapat diartikan, sebagai prosess hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat memperoleh keadilan substantif.[399] Sedangkan lawan dari proses ini disebut *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang, atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum.[400]

Berkaitan dengan beberapa pendapat tentang substansi komponen struktur hukum di atas, apabila kita jabarkan komponen struktur dalam sistem peradilan militer, maka komponen penegak hukum dalam sistem peradilan militer, terdiri dari:

a) Ankum, Polisi Militer dan Oditur (sebagai penyidik);

b) Oditur (sebagai penyidik dan penuntut);

c) Perwira Penyerah Perkara (Papera);

d) Pengadilan militer (sebagai pemutus perkara);

e) Advokat/Penasehat hukum (sebagai lembaga yang melakukan pembelaan terhadap tersangka, atau terdakwa); dan

f) Lembaga pemasyarakatan militer TNI (sebagai lembaga yang membina narapidana militer).

Dari beberapa komponen struktur hukum dalam sistem peradilan militer di atas, yang pada intinya bahwa, struktur hukum itu terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Militer

[398] Gayus Lumbuun, Jurnal Hukum Militer, Vol.4, No.1 Juni 2019, *Loc. cit.*, hal 50.
[399] Diah Ratna Sari Hariyanto, 2017, *Laporan Penelitian Due Process Of Law Dalam Kuhap di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Uayana, Hal. 8. http://erepo.unud.ac.id.
[400] Oly Viana Agustina, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, *Op. Cit.*, hal 10.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka dalam bahasan kelemahan-kelemahan struktur hukum ini lebih menekankan pada lembaga penegak hukum, utamanya lembaga penyidik. Kelemahan- kelemahan dari unsur penegak hukum ini, dianggap sangat berpengaruh terhadap mekanisme dan keadilan dalam penyidikan.

**a. Ankum dan Provos.**

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa, Ankum merupakan salah satu lembaga penyidik di lingkungan paradilan militer, selain penyidik Polisi Militer dan penyidik Oditur. Ankum sebagai penyidik merupakan salah satu kekhususan yang ada di dalam hukum acara pidana militer, namun sekaligus menjadi *legal gab* dari norma hukum Pasal 69 (1) huruf a dalam Hapmil Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Legal gab yang dimaksud adalah, bahwa Ankum secara atributif dalam undang-undang diberi kewenangan sebagai penyidik, tapi tidak sesuai dalam kenyataannya dimana, Ankum dan Provos tidak pernah melakukan penyidikan, dan secara yuridis tidak memenuhi syarat sebagai penyidik (sebagaimana telah dijelaskan di atas). Adanya *legal gab* ini, menjadi kelemahan dari struktur hukum (Ankum sebagai penyidik dan Provos sebagai pembantu penyidik).

Dalam kenyataannya (secara empiris), bahwa Ankum sebagai penyidik hanya sebagai formalitas saja untuk ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang dalam proses hukum pidana, karena kenyatannya Ankum tidak pernah melakukan penyidikan karena memang tidak bisa menyidik, dan kewenangan penyidikannya telah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Disamping itu, Ankum bukan sebagai penyidik professional yang sudah dididik

dan disumpah sebagai penyidik, sehingga produk penyidikan Ankum tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai bahan proses penyidikan, penuntutan dan proses di peradilan. Keabsahan sebagai penyidik telah diatur, sebagaimana dalam Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

Selain itu, dari aspek kelembagaan (aspek struktural), keberadaan penyidik Ankum dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti penyidik Polisi Militer, Oditur sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus di peradilan militer, ada ketidaksepadanan diantara penegak hukum tersebut, mengingat Ankum sesungguhnya bukan bagian dari lembaga yudisiil (lembaga/ badan yang menjalankan tugas penyidikan di lingkungan peradilan), atau dengan kata lain bahwa, Ankum bukan rumpun dari lembaga yudisiil. Namun Ankum sejatinya merupakan lembaga organik satuan sebagai pimpinan pengendali satuan dan penegak hukum disiplin di dalam satuannya. Jadi Ankum bukan sebagai penyidik yang sebenarnya terhadap tersangka dalam rangka proses penuntutan dan peradilan militer.

Mencermati keberadaan Ankum sebagai penyidik ini, penulis anggap penting mengingat ke depan peradilan militer sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum, dan lembaga penyidik di lingkungan peradilan militer harus merupakan tenaga-tenaga penegak hukum yang profesional. Hal ini sebagai konsekuensi dari diproklamirkannya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang harus segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka baik lembaga peradilannya

maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanannya, termasuk penyidiknya harus *acceptable* (layak sehingga dapat diterima dan sesuai aturan yang berlaku), kredibel (dapat dipercaya) dan profesional (memahami dan dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya), karena tugas-tugas bidang penegakan hukum mempunyai implikasi terhadap keabsahan dalam tindakannya.

Tindakan yang mempunyai implikasi hukum, misalnya sebagai contoh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa, tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-udang. Dari ketentuan ini jelas bahwa, upaya paksa terhadap seseorang sebagai subyek hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, hanya dapat dilakukan atas perintah dari kekuasaan yang sah (pejabat yang sah memiliki wewenang yang diberikan undang-undang – penulis). Tanpa kekuasaan yang sah, maka orang yang melakukan upaya paksa tersebut dapat dikatakan merampas hak orang lain dan bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 333 KUHP.

Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

(1) Selain Mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Penyelidikan dan penyidikan;

b. Penuntutan;

c. Pelaksana putusan;

d. Pemberian jasa hukum; dan

e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[401]

Dari bunyi ayat (2) tersebut di atas, jelas bahwa fungsi penyidikan berkaitan degan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, sudah selayaknya lembaga atau badan yang menjalankan fungsi penyidikan adalah lembaga/ badan yang satu rumpun dalam bidang yudisiil, yaitu penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Demikian juga dengan keberadaan provos satuan yang dijadikan sebagai penyidik pembantu. Pengertian penyidik pembantu, terdapat pada ketentuan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menjelaskan bahwa, Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya (pengertian provos dan penjelasannya telah dijelaskan pada bab terdahulu).

Provos ini juga bukan dari lembaga yudisiil, sebagaimana Ankum, sehingga tidak perlu diberi kewenangan sebagai penyidik pembantu, karena tidak memiliki keahlian penyidikan dan tidak disumpah sebagai penyidik. Mengingat provos ini sebagai pembantu penyidik Ankum, maka bila Ankum tidak kredibel, tidak akseptebel dan tidak professional sebagai penyidik, sudah selayaknya provos juga tidak dijadikan sebagai pembantu penyidik.

**b. Dominasi Kewenangan Papera Dalam Penyelesaian Perkara.**

[401] Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Iniversity, hal. 30.

Membahas tentang dominasi kewenangan Papera dalam penyelesaian perkara ini, penulis tidak bermaksud atau berpadangan fragmentaris atau mengkotak-kotakkan penegak hukum di lingkungan peradilan militer, namun hal ini merupakan realita dalam sistem peradilan pidana militer. Sebagaimana disampaikan oleh Yesmil Anwar bahwa, dalam kontek sistem peradilan pidana, justru lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparat penegak hukum yang mengemban tugas penegakan keadilan hukum.[402] Penulis sangat setuju dengan pandangan Yesmil Anwar di atas. Namun dalam bahasan ini, penulis sengaja menyampaikan ini dengan maksud bahwa, dengan dominasi kewenangan Papera dalam penyelesaian perkara ini, terdapat kelemahan-kelemahan apabila tidak ada control yang seimbang dari lembaga peradilan militer.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai salah satu unsur struktur hukum dalam sistem peradilan pidana militer. Dalam proses penyelesaian perkara prajurit, Papera mempunyai peran yang begitu dominan dan menentukan, sebagimana bunyi Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam sistem peradilan militer, proses penyelesaian perkara pidana prajurit, dimulai dari penyidikan, penyerahan perkara/penuntutan oleh Oditur, proses persidangan di pengadilan dan pembinaan Narapidana/prajurit binaan di Lembaga Pemasyarakaatan Militer TNI (Lemmasmil TNI). Dengan kewenangan Papera yang dominan dalam penyelesaian perkara prajurit, apabila kewenangan tersebut tidak digunakan secara cermat dan bijaksana, dapat menimbulkan ketidak adilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Apalagi kewenangan yang begitu besar itu

[402] Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Op. Cit*, hal. 58.

digunakan secara sewenang-wenang, jelas akan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kelemahan-kelemahan dari dominasi kewenangan Papera ini, dapat dilihat mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan penyerahan perkara prajurit kepada pengadilan militer, karena dalam proses tersebut, pada hakekatnya kewenangan berada pada Ankum dan Papera, sedangkan Penyidik Polisi Militer/Oditur hanya melaksanakan perintah dari Papera.

Kewenangan Papera dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang berbunyi :

(1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang :

a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
d. memperpanjang penahanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; dan
g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a;

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara Tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang berbunyi :

(1) Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan;

(2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. nama lengkap, pangkat nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;

b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum;

(4) Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusnya disampaikan kepada Penyidik.

Proses penyelesaian perkara prajurit, dimulai dari laporan/pengaduan dan penyelidikan oleh penyidik Polisi Militer. Setelah penyidik Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap Tersangka, selanjutnya Polisi Militer menyerahkan berkas perkara Tersangka kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum dan Oditur. Selanjutnya Perwira Penyerah Perkara dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) melalui Oditur Militer menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Tersangka.

Penyerahan perkara oleh Papera ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf f, mengandung maksud, bahwa Papera memerintahkan Oditur supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan pengadilan.

Dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) f dan Pasal 130 ayat (1) di atas, jelas bahwa dalam hal penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tingkat penuntutan ini merupakan wewenang mutlak dari Papera, sebaliknya

Oditur tidak memiliki wewenang apapun, hanya melaksanakan perintah Papera untuk melimpahkan berkas perkara Tersangka ke pengadilan dan disertai penuntutan.

Berkaitan dengan wewenang Papera menyerahkan perkara ini, Faisal Salam mengatakan, walaupun sebelum Komandan (Papera - pen) menentukan suatu perkara pidana, meminta pendapat dari Oditur terlebih dahulu, tetapi karena pendapat dari Oditur itu hanya suatu pendapat/ nasehat atau saran, namun hal tersebut tidak mengikat para Komandan/Papera. Akhirnya Komandan atau Papera sendiri yang menentukan apakah perkara pidana anggota prajurit diserahkan ke pengadilan atau tidak.[403]

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur tentang apakah perkara pidana prajurit tersebut diserahkan ke pengadilan atau tidak, misalnya Oditur berpendapat bahwa perkara pidana prajurit tersebut diserahkan ke pengadilan, sementara Papera berpendapat sebaliknya (diselesaikan di luar pengadilan), maka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur tersebut, maka diselesaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana perbedaan pendapat tersebut dimohonkan dan disidangkan di Pengadilan Militer Utama, untuk diputus oleh hakim Pengadilan Militer Utama. Putusan Pengadilan Militer Utama apakah perkara tersebut diselesaikan melalui sidang di pengadilan militer, atau diselesaikan di luar pengadilan militer, selanjutnya putusan dari Pengadilan militer Utama itulah yang harus dilaksanakan.

[403] Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, *Op.cit*, hal.144 – 145.

Menurut Faisal Salam, dalam prakteknya kesempatan untuk mengajukan permohonan perbedaan pendapat antara Oditur dengan Papera tersebut dimohonkan untuk disidang di Pengadilan Militer Utama, jarang bahkan tidak pernah terjadi sama sekali dipergunakan oleh Jaksa Tentara atau Oditur Militer yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, mungkin yang bersangkutan karena kebijakannya ditentang oleh bawahannya, sehingga unsur subyektif dari Komandan (Papera - pen) akan membawa akibat kurang baik/tidak menguntungkan bagi Oditur Militer dalam karirnya di kesatuan selanjutnya. Dengan kata lain, untuk keamanan pribadi Oditur Militer sendiri dalam kesatuannya, menerima saja putusan-putusan Komandan/Papera, walaupun diketahui bahwa, kepentingan yustisi suatu perkara harus mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.[404]

Selanjutnya Faisal Salam menyatakan, bahwa akibat dari sistem Papera ini sering mengakibatkan kesulitan atau kemacetan di dalam penyelesaian perkara atau membawa/mengajukan perkara ke sidang pengadilan. Banyak perkara tidak diselesaikan karena menunggu putusan penyerahan perkara dari Papera.[405]

Kendala penyelesaian perkara dari adanya sistem Papera ini, tidak hanya menyangkut teknis penyelesaian perkara saja, namun juga terdapat aspek yuridis terhadap berkas perkara yang tidak disertai dengan putusan penyerahan perkara dari Papera, karena perkara tersebut tidak bisa disidangkan. Hal ini dibenarkan oleh Estiningsih. Menurut Estiningsih,[406] dalam hal pelimpahan Berkas Perkara (BP) Tersangka, merupakan wewenang dari Papera, sedangkan Oditur militer sebagai penuntut hanya melaksanakan perintah Papera. Tanpa Keputusan

[404] *Ibid*., hal. 146
[405] *Ibid.*
[406] Hasil wawancara dengan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, Kepala Oditur Militer II-09 Semarang, Tanggal 26 Pebruari 2021.

Penyerahan Perkara (Keppera) dari Papera, maka Oditur tdk bisa melakukan penuntutan dan berkas perkara Tersangka tanpa Keppera dari Papera, tidak bisa diterima oleh pengadilan militer.

Peran dan kewenangan dari Papera yang begitu dominan ini, bila tidak ada kontrol dari lembaga yang kredibel, misalnya lembaga pengadilan di lingkungan peradilan militer/Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dapat terjadi kewenang-wenangan dari Papera. Kesewenangan ini bisa terjadi oleh karena akibat ketidakpahaman Papera terhadap aturan hukum yang berlaku, atau akibat dari Papera sendiri yang sengaja tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Ada contoh menarik dari penggunaan kewenangan Papera, yang menurut penulis tindakan Papera tersebut tidak dilakukan secara cermat dan berkeadilan, sehingga dapat merugikan prajurit atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam perkara Kopral Taruna (Koptar) VPY Nomor AK 2020.146 Yontar Remaja Mentar Akmil, yang diduga tidak turut dalam perintah dinas atau Tidak Hadir Tidak Sah (THTI) sesuai Pasal 103 (1) KUHPM atau Pasal 86 ke-1 KUHPM. (Taruna termasuk dalam pengertian prajurit siswa, tunduk kepada peradilan militer). Berkas Perkara No BP: BP-03/A-03/II/2021, Surat Dandenpom IV/2, R/84/II/2021, Tanggal 10 Februari 2021. Setelah perkara tersebut disidang di Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta, dengan Nomor Perkara 09-K/PM II-11/AD/II/2021, dalam persidangan di pengadilan militer tersebut, hakim membebaskan terdakwa dengan Nomor Putusan: Put/09-K/PM II-11/AD/II/2021, Tanggal 2 Maret 2021, dengan menyatakan bahwa, Terdakwa bebas/tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Inti dari perkara Koptar VPY tersebut, menurut penjelasan dari penyidik di Sub Detasemen Polisi Militer di Magelang, Kapten Cpm Bambang bahwa, Koptar VPY merasa bosan di Akmil, kemudian pergi tanpa ijin dari komandannya keluar kesatrian Akmil pergi menemui orang tuanya di Yogya, namun tidak bermaksud meninggalkan tugas sebagai taruna untuk selamanya atau desersi. Koptar VPY kemudian dijemput petugas dan dikembalikan ke Akmil untuk mengikuti kegiatan seperti biasanya. Namun Papera (Gubernur Akmil) dari Koptar VPY memutuskan menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan militer, namun setelah sidang hasilnya terdakwa (Koptar VPY) oleh pengadilan militer diputus bebas.

Sebagai catatan dari penulis, atas perkara Koptar VPY Nomor AK 2020.146 Yontar Remaja Mentar Aknmil, yang diputus bebas oleh hakim Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta, bahwa Papera sesuai kewenangannya berkeinginan untuk menyerahkan Tersangka kepada Pengadilan Militer untuk diputus dengan sanksi pidana. Dalam perkara ini sebenarnya Oditur Militer sebagai penuntut sudah memahami bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diserahkan ke pengadilan militer, karena perbuatan Koptar VPY tersebut masih dalam ranah disiplin dan bisa diselesaikan secara hukum disiplin, namun Oditur Militer sepertinya enggan menyarankan kepada Paperanya agar perkara tersebut diselesaikan internal kesatuan melalui mekanisme hukum disiplin, atau Oditur Militer enggan berbeda pendapat dengan Komandan/Papera dari Koptar VPY, yang menghendaki perkara Koptar VPY diserahkan ke pengadian militer, sehingga perkara tersebut diserahkan ke pengadilan militer dan dilakukan penuntutan, yang akhirnya perkara tersebut diputus bebas oleh pengadilan militer.

Contoh kasus di atas, sebagai wujud kelemahan dari dominasi peran Papera dalam penyelesaian perkara prajurit. Ditinjau dari aspek doktrin, Komandan bertanggung jawab terhadap anak buah dan kesatuannya, bila dihadapkan dengan kasus Koptar VPY di atas, ditinjau dari garis komando dan kewenangan Papera, tidak ada masalah. Artinya Papera berwenang menyerahkan terdakwa kepada pengadilan militer untuk diproses dan diputus perkaranya. Namun dari aspek tujuan hukum, maka penyerahan perkara terdakwa ke pengadilan militer, tidak memenuhi rasa keadilan (aspek keadilan), karena sejak awal sebenarnya kasus Koptar VPY tersebut sudah diketahui masih dalam wilayah pelanggaran disiplin, bukan pidana. Dari aspek kepastian hukum, harusnya Koptar VPY cukup diproses sesuai mekanisme hukum disiplin, bukan diproses ke pengadilan militer, sedangkan dari aspek kemanfaatan, jelas dengan menyerahkan perkara Koptar VPY ke pengadilan militer, tidak ada manfaat yang diperoleh, bahkan cenderung kontra produktif, karena membuat kondisi psykologi Koptar VPY menjadi kurang baik, mengingat perlakuan sebagai terdakwa di pengadilan bagi seorang taruna (anak didik) akan membawa trauma, merasa malu terhadap teman-temannya, dan dalam jangka panjang sangat berpengaruh dalam perjalanan karirnya.

**c. Pengadilan Tata Usaha Militer Belum Operasional.**

Sebagai salah satu indikator negara hukum adalah adanya peradilan administrasi atau pengadilan tata usaha dalam sistem hukumnya. Indonesia sebagai negara hukum, maka seharusnya ada lembaga peradilan administrasi atau peradilan tata usaha yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, lewat penyelenggaraan peradilan administrasi untuk menyelesaikan masalah yang

timbul dari kewewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara/ tata usaha militer yang tidak sesuai dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, dalam sistem peradilan militer juga dibutuhkan lembaga peradilan tata usaha militer, guna melindungi hak asasi warga militer/TNI dan menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum masyarakat militer/TNI.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dari aspek substansi, Hukum Acara dari Pengadilan Tata Usaha Militer ini, sudah diatur dalam Pasal 265 samapai dengan Pasal 343 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 353 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, telah diamanatkan, bahwa mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (tiga tahun dari tanggal 15 Oktober 1997). Seharusnya paling lambat tanggal 15 Oktober Tahun 2000, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer sudah terbentuk. Namun kenyataannya sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

Dalam sistem peradilan militer, yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM), sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan peradilan militer. Pengadilan Militer Tinggi, sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. Sedangkan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Militer, telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Sengketa tersebut muncul karena beberapa keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Militer, telah dibatasi dalam Pasal 265 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1) Keputusan Tata Usaha Militer (TUM) yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan
3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.[407]

Sebenarnya lembaga PTUM ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu peradilan di lingkungan peradilan militer, namun kenapa sampai saat ini lembaga PTUM ini beleum terwujud? Selain Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan PTUM ini belum ada, faktor penghambat lainnya adalah, adanya kekuatiran sebagian kalangan yang menyatakan bahwa, bila PTUM ini dijalankan, maka akan mengganggu hierarki dan rantai komando di militer. Akan banyak gugatan yang diajukan oleh prajurit bawahan kepada atasannya, bila bawahan tersebut merasa kepentingannya dirugikan. Akibatnya adalah wibawa dan kehormatan atasan atau komandan menjadi luntur dihadapan anak buahnya. Akan

[407] Sator Sapan Bangin, *Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer Di Indonesia*, tanpa halaman, http://Sthm ahm pthm.ac.id. Diunduh tanggal 18 Oktober 2021.

banyak bawahan yang menolak perintah atasan dengan berbagai pertimbangan dengan jalan mengajukan gugatan Tata Usaha Militer kepada pengadilan yang berwenang.[408]

Alasan-alasan di atas memang ada benarnya, namun untuk menjaga keseimbangan antara eksistensi PTUM dengan hierarki rantai komando, telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merupakan batasan mengenai keputusan-keputusan Pejabat PTUM yang tidak dapat dijadikan obyek gugatan oleh prajurit, yaitu sebagai berikut :

1) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2) Keputusan Tata Usaha Militer yang dignakan dalam bidang operasi militer;
3) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
4) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer dan hukum disiplin prajurit;
6) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; dan
7) Keputusan Tata Usaha Militer yang masih memerlukan persetujuan.[409]

[408] *Ibid.*

Dengan Pengadilan Tata Usaha Militer belum terbentuk, hal ini menunjukkan kelemahan dari struktur hukum dalam sistem peradilan militer. Konsekuensinya, apabila ada dari para pihak pencari keadilan, baik orang maupun badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer, maka belum ada jalan untuk mendapatkan keadilan.

**d. Lembaga Pemasyarakatan Militer Belum Maksimal.**

Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer, berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, khususnya pada Bab IV yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil). Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer. Dalam kontek seperti ini, mekanisme peradilan militer sebagai suatu proses atau kita sebut sebagai *"Criminal Justice Process"* diharapkan benar-benar berjalan sesuai mekanisme yang berkeadilan, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Terdakwa militer yang telah divonis dengan putusan hakim pengadilan militer dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), selanjutnya menjadi narapidana militer. Pembinaan narapidana militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil). Lembaga pemasyarakatan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Bagian Kesebelas Pelaksanaan Putusan Pengadilan, khususnya Pasal 256, yang berbunyi :

---

[409] *Ibid.*

(1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tempat lain yang menurut ketentuan peraturan perundanf-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu; dan

(3) Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.

Dari bunyi Pasal 256 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas, Narapidana Militer menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Lemasmil dalam organisasi secara teknis dibawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil). Puslemasmil sebagai penyelenggaran fungsi teknis pembinaan narapidana militer, berkedudukan dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI), yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI. Selanjutnya penyelenggaraan pemasyarakatan militer diatur dalam Keputusan Panglima TNI (Keppang TNI Nomor 1325 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer (Juggar Masmil), kemudian untuk Pembinaan Narapidana Militer (Napimil), diatur dalam Buku Pedoman Pembinaan Napimil, yang diterbitkan oleh Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer, Tanggal 26 Desember 2019, dan untuk pembinaan dan rehabilitasi Napimil diatur dalam Keppang TNI Nomor 1102 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Napimil.

Regulasi tentang penyelenggaraan Lemasmil selama ini masih diatur dalam Peraturan Panglima TNI, sedangkan Lembaga Lemasmil sendiri sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang. Substansi undang-undang yang mengatur tentang Lemasmil saat ini masih dalam pembahasan di Kemenhan dengan pihak terkait, namun belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang Lemasmil ini, sebagai bentuk kekurang pedulian pemerintah, khususnya institusi TNI terhadap Lemasmil sebagai lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan Narapidana Militer, guna mengembalikan Napimil menjadi prajurit yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi prajurit Saptamarga dan kembali menjadi prajurit yang handal dalam rangka tugas pertahanan Negara.

Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang Lemasmil ini, merupakan kelemahan dari struktur penegakan hukum dalam sistem peradilan militer, mengingat Lemasmil merupakan lembaga yang integral dengan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana militer, seperti Polisi Militer/Oditur (sebagai penyidik dan penuntut), Hakim Militer dan Pengadilan Militer (sebagai lembaga pemutus perkara) dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (sebagai lembaga yang membina Narapidana Militer), dimana lembaga-lembaga tersebut sebagai *Integrated Criminal Justice Sistem* dalam sistem peradilan militer. Disisi lain, belum adanya undang-undang tentang Lemasmil tersebut, maka akan menyulitkan Lemasmil menjadi lembaga yang mandiri mengatur urusan internal Lemasmil, terlepas dari Badan Pembinaan Hukum TNI. Ketidakmandirian Lemasmil tersebut berakibat pada ketidakmandirian Lemasmil dalam mengelola SDM, Organisasi, Personil dan Logistik yang mempengaruhi pada profesionalisme penyelenggaraan pembinaan terhadap Napimil.

**e. Problema Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik.**

Kelemahan dari aspek struktural (khususnya penyidik), dalam penegakan hukum di lingkungan militer ini, merupakan hal yang bersifat internal penyidik itu sendiri. Kelemahan- kelemahan tersebut berupa kualitas SDM penyidik, khususnya penyidik Polisi Militer. Kualitas dari penyidik disini dilihat dari aspek pendidikan formal, baik berupa pengetahuan tentang piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif), maupun berupa keterampilan operasional alat perlengkapan/laboratorium kriminal. Pendidikan penyidik menjadi fokus perhatian karena kualitas pendidikan penyidik akan sangat mempengaruhi dan terkait langsung dengan penyelesaian perkara pidana prajurit militer. Saat ini, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka modus operandi kejahatan juga semakin canggih, sehingga diperlukan pola penyidikan yang ditopang dengan kecanggihan teknologi untuk mendukung kerja penyidik dalam mengungkap perkara kejahatan prajurit TNI. Disamping itu, minimnya alat perlengkapan atau Laboratorium Kriminal (Labkrim) yang dimiliki instansi penyidik juga menjadi kelemahan, karena Labkrim sangat diperlukan untuk menopang kinerja penyidik dalam rangka mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka. Hal ini juga ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa perlu ditingkatkan profesionalitas aparatur penegak hukum, khususnya Polisi (Polisi Militer - pen) yang menjadi ujung tombak dalam menghadapi kejahatan dan pelaku kejahatan, harus didukung

oleh peningkatan fasilitas laboratorium kriminal dan tenaga ahli di bidang forensik yang memadai.[410]

Sebagai gambaran tentang kelemahan-kelemahan dari aspek struktural (khususnya Polisi Militer), penulis telah melakukan survey pada satuan-satuan Polisi Militer Angkatan Darat (Satpomad), yang merupakan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Hasil survey melalui kuistioner pada Satuan Polisi Militer Kodam di seluruh Indonesia, dengan hasil sebagai berikut;

**Tabel 3**

**Rekapitulasi Satuan Pomad**[411]

| NO | SATUAN POMAD | JML | KEDUDUKAN/ LOKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) | 1 | Jakarta | Sebagai Badan Pelaksana (Balakpus) Angkatan Darat |
| 2. | Pusat Pendidikan Pomad | 1 | Cimahi, Jawa Barat | Di bawah Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad) |
| 3. | Polisi Militer Kodam (Pomdam) | 15 | Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia | Sebagai satuan badan pelaksana dibawah kodam |
| 4. | Detasemen Polisi Militer (Denpom) | 46 | Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia | Sebagai satuan jajaran dibawah Pomdam |
| 5. | Sub Detasemen Polisi Militer (Sub | 166 | Tersebar di Seluruh wilayah | Sebagai satuan jajaran dibawah Denpom |

[410] Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hal.20.

[411] Rekapitulasi Satuan Pomad, mulai dari Organisasi/ Orgas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Berdasarkan Peraturan kasad, Nomor Perkasad/ 26/ 2019, Tanggal 26 Desember 2019, Orgas Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat (Pusdikpomad), Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/ 4/ II/ 2006, Tanggal 22 Pebruari 2006, Orgas Polisi Militer Kodam (Pomdam), Berdasarkan Peraturan Kasad, Nomor /58 /2017, Tanggal 4 Oktober 2017.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Denpom) | | Republik Indonesia | |

**Tabel 4**[412]

**Keadaan Dan Pendidikan Penyidik Pomad.**

| NO | SATUAN | JUMLAH PENYIDIK | | | JML NYATA | PENDIDIKAN / KURSUS PENYIDIK | | | | JML | SDH SUMPAH | BLM SUMPAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DSPP | KRNG | NYATA | | S1 | S2 | S3 | SUSIDIK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Puspomad (Jakarta) | 49 | 8 | 41 | 41 | 14 | 3 | - | 19 | 36 | 19 | 22 |
| 2. | Pomdam Iskandar Muda (Prov aceh) | 86 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3. | Pomdam I/Bukit Barisan (Prov. Sumatera Utara) | 195 | 103 | 92 | 92 | 3 | - | - | 42 | 45 | 45 | 47 |
| 4. | Pomdam II/Sriwijaya (Prov. Sumatera Selatan) | 172 | 98 | 74 | 74 | - | 1 | - | 30 | 31 | 22 | 52 |
| 5. | Pomdam Jaya/Jayakarta (Jakarta Raya) | 102 | 71 | 31 | 31 | 4 | - | - | 21 | 25 | 24 | 7 |
| 6. | Pomdam III/Siliwangi (Prov. Jawa Barat) | 168 | 70 | 98 | 98 | 4 | - | - | 52 | 56 | 56 | 42 |
| 7. | Pomdam IV/Diponegoro (Prov. Jawa Tengah) | 102 | 42 | 60 | 60 | 5 | - | - | 45 | 50 | 48 | 12 |
| 8. | Pomdam V/Brawijaya (Prov. Jawa | 140 | 64 | 76 | 76 | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 39 |

[412] Hasil survey melalui kuisonir kepada Satuan Pomdam seluruh Indonesia, pada minggu I dan II Januari 2021.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Timur) | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pomdam VI/Mulawarman (Prov. Kalimantan Timur) | 88 | 43 | 45 | 45 | 4 | - | - | 32 | 36 | 36 | 9 |
| 10. | Pomdam IX/Udayana (Prov. Bali) | 99 | 61 | 38 | 38 | 2 | - | - | 21 | 23 | 20 | 18 |
| 11. | Pomdam XII/Tanjungpura (Prov. Kalimantan Barat) | 88 | 44 | 44 | 44 | 2 | - | - | 20 | 22 | 21 | 23 |
| 12. | Pomdam XIII/Merdeka (Prov. Sulawesi Utara) | 69 | 46 | 23 | 23 | - | - | - | 19 | 19 | 12 | 11 |
| 13. | Pomdam XIV/Hasanudin (Prov. Sulawesi Barat) | 103 | 53 | 50 | 50 | 2 | - | - | 20 | 22 | 13 | 37 |
| 14. | Pomdam XVI/Patimura (Prov. Maluku) | 84 | 48 | 36 | 36 | 8 | - | - | 12 | 20 | 20 | 16 |
| 15. | Pomdam XVII/Cenderawasih (Prov. Papua ) | 55 | 29 | 26 | 26 | 2 | - | - | 15 | 17 | 7 | 19 |
| 16. | Pomdam XVIII/Kasuari (Prov. Papua Barat ) | 66 | 45 | 21 | 21 | - | - | - | 16 | 16 | 7 | 14 |

**Tabel 5**

**Rekapitulasi Keadaan Dan Pendidikan Penyidik Pomad**

| JUMLAH NYATA PENYIDIK | PENDIDIKAN/KURSUS PENYIDIK | | | | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S3 | KURSUS | SUDAH | BELUM | BELUM |

| POMAD | S1 | | | PENYIDIK | SUMPAH | SUMPAH | KURSUS PENYIDIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 798 | 50 | 4 | - | 424 | 409 | 389 | 374 |

**Tabel 6**[413]

**Rekapitulasi Keadaan Personil Dan Perlengkapan Penyidik Pomad**

| NO | SATUAN POMAD | KEKURANGAN PERSONIL PENYIDIK | KEKURANGAN ALKAP/ LABKRIM | KESULITAN RIK SAKSI/TSK | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomdam Iskandar Muda (Prov. Aceh) | √ | √ | | ➢ Masalah personil penyidik masih banyak yang belum di sumpah<br>➢ Masalah alat perlengkapan penyidikan<br>- Satuan Pomad di wilayah belum dilengkapi dengan labkrim.<br>- Organisasi labkrim ada di Puspomad,namun belum bisa operasional karena belum ada pengabsahan dari Kemenkes/Kemenkumham.<br>➢ Masalah pemeriksaan Tersangka/saksi masih ada kendala<br>- Tersangka/saksi berada di luar wilayah hukum Pomdam.<br>- Tersangka/saksi dari |
| 2. | Pomdam I/Bukit Barisan (Prov. Sumatera Utara) | | √ | √ | |
| 3. | Pomdam II/Sriwijaya (Prov. Sumatera Selatan) | √ | √ | | |
| 4. | Pomdam Jaya/Jayakarta (Jakarta Raya) | √ | √ | | |
| 5. | Pomdam III/Siliwangi (Prov. Jawa Barat) | | √ | √ | |
| 6. | Pomdam IV/Diponegoro (Prov. Jawa Tengah) | | √ | √ | |
| 7. | Pomdam V/Brawijaya (Prov. Jawa Timur) | | √ | √ | |

[413] Hasil survey melalui kuisonir kepada Satuan Pomdam seluruh Indonesia, pada minggu I dan II Januari 2021.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Pomdam VI/Mulawarman (Prov. Kalimantan Timur) | √ | √ | | satuan tugas (Satgas) tidak dihadirkan oleh paperanya.<br>- Papera di luar wilayah hukum Kodam |
| 9. | Pomdam IX/Udayana (Prov. Bali) | √ | √ | | |
| 10. | Pomdam XII/Tanjungpura (Prov. Kalimantan Barat) | √ | √ | | |
| 11. | Pomdam XIII/Merdeka (Prov. Sulawesi Utara) | √ | √ | | |
| 12. | Pomdam XIV/Hasanudin (Prov. Sulawesi Barat) | √ | √ | √ | |
| 13. | Pomdam XVI/Patimura (Prov. Maluku) | √ | √ | | |
| 14. | Pomdam XVII/Cenderawasih (Prov. Papua ) | | √ | √ | |
| 15. | Pomdam XVIII/Kasuari (Prov. Papua Barat) | √ | √ | | |
| | | | | | |

Dari tabel-tabel yang ditampilkan di atas, pada tabel 5 merupakan kedudukan Satuan Polisi Militer Angkatan Darat (Satpomad) tingkat pusat dan Pusat Pendidikan Pomad (Pusdikpomad), serta Satuan Pomad di daerah (di wilayah Kodam).

Pada tabel 6 dan 7 dapat dibaca dan dianalisa, bahwa tingkat pendidikan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), dari jumlah seluruhnya 798 orang penyidik, yang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 50 orang penyidik, atau 6, 27 %. Penyidik yang berpendidikan S2 baru 4 orang penyidik, atau 0,50 %, sedangkan penyidik yang berpendidikan kursus bidang penyidikan berjumlah 424 orang penyidik, atau 53,1 %. Dari prosentase tingkat pendidikan penyidik ini, belum ideal seperti yang diharapkan, yaitu masing-masing penyidik minimal berpendidikan formal setingkat S1atau S2 selain pendidikan spesialisasi bidang penyidikan, baik penyidik Bintara maupun Perwira. Kondisi dan keadaan pendidikan penyidik seperti ini, bila dihadapkan dengan tugas-tugas penyidikan saat ini dan kedepan yang semakin berat dan modus operandi kejahatan yang semakin canggih, sehingga kualitas penyidik dirasakan masih kurang dan menjadi kelemahan dari aspek struktural (khususnya penyidik Polisi Militer).

Sedangkan pada tabel 8 sangat jelas bahwa, penyidik Pomad selain dihadapkan pada masalah kekurangan personil (tenaga penyidik), juga tidak memiliki Laboratorium Kriminal (Labkrim), sehingga keadaan penyidik seperti ini, dapat menjadi kendala dalam proses penyidikan mengingat penyidikan saat ini sudah memasuki era penyidikan secara ilmiah *(scientific investigation)* untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.  khususnya dan pada upaya penegakan hukum di lingkungan peradilan militer pada ummnya, mengingat Polisi Militer sebagai ujung tombak terdepan dalam rangka penegakan hukum pidana.

## C. Kelemahan Kultur/Budaya hukum.

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu kultur hukum, seringkali juga disamakan

dengan istilah "budaya hukum masyarakat". Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.[414]

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum.[415]

**1. Kelemahan- kelemahan Regulasi Hukum Dalam Budaya Hukum.**

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa kultur hukum merupakan suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum.

---

[414] Abdul Halim Barkatullah, BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/45925/4/DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj2mJaGnvn0AhXiTWwGHYJkAqYQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2-0jQSkuvPwfT5WzTwasB1. Diunduh tanggal 24 Desember 2021.

[415] *Ibid.*

Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam regulasi hukum (dalam hal regulasi lembaga dan kewenangan penyidik), maka ditinjau dari kepentingan penegakan hukum, tergantung dari sikap dan respon dari aparat penegak hukum, (khususnya penyidik Polisi Militer atau Oditur) apakah dengan adanya kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum tersebut, tidak menghambat jalannya proses penyidikan, atau sudah dapat melaksanakan tugas penyidikan dengan baik atau sebaliknya. Dari aspek substansi hukum, apakah kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum tersebut membatasi kewenangan dari penyidik Polisi Militer/ Oditur, atau sebaliknya. Ditinjau dari kepentingan masyarakat/ masyarakat militer, khususnya dari lembaga TNI sendiri, bagaimana menyikapi adanya kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum, apakah bisa diterima dan dianggap tidak menjadi masalah yang menghambat penegakan hukum/ penyidikan atau mengharapkan adanya pembaharuan/ revisi terhadap regulasi lembaga dan kewenangan penyidik tersebut. Demikian juga dengan lembaga legeslatif, apakah mengharapkan adanya revisi atau pembaharuan terhadap substansi hukum acara pidana militer yang ada saat ini.

Ditinjau dari aspek berlakunya hukum bahwa, setiap peraturan hukum menunjukkan aturan tentang bagaimana pemegang peran diharapkan bertindak sebagai respon terhadap adanya kelemahan- kelemahan dari regulasi yang mengatur tentang lembaga dan kewenangan penyidik Ankum. Dalam hal ini, hampir sama dengan aspek kepentingan penegakan hukum di atas, bahwa semua tergantung dari bagaimana respon dari aparat penegak hukum, lembaga legeslatif, lembaga TNI dan lembaga sosial lainnya dalam menyikapi permasalahan tersebut, sebagai wujud kebutuhan, tuntutan dan kesadaran kolektif masyarakat hukum.

Disamping respon masyarakat dalam menyikapi kelemahan regulasi hukum tersebut, tergantung pula dari bagaimana respon dan sikap aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum. Apakah regulasi terhadap lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer tersebut, sudah dirasakan telah cukup mengikat tugas-tugas penyidikan, atau malah regulasi tersebut belum cukup untuk menguatkan penyidik sebagai dasar penyidikan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, menyikapi adanya kelemahan dalam regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum, sangat tergantung pada kesadaran kolektif masyarakat hukum/ masyarakat TNI untuk menentukan apakah kelemahan-kelemahan dalam regulasi lembaga dan kewenangan penyidik Ankum ini, perlu dikoreksi dan direvisi sesuai prosedur yang berlaku, atau masyarakat hukum/ masyarakat TNI sudah menganggap hal tersebut sebagai kekhususan dalam hukum acara pidana militer, sehingga tidak perlu dilakukan revisi terhadap regulasi lembaga dan kewenangan Ankum. Menurut penulis, dalam budaya militer kita masih sangat berorientasi pada kepemimpinan Komandan/ Panglima atau pimpinan, artinya apa yang menjadi arahan, petunjuk, keinginan pimpinan diikuti oleh bawahannya. Keadaan ini merupakan hal yang baik sebagai pengaruh kuat dari didikan disiplin dan loyalitas tegak lurus kepada pimipinan. Demikian juga, dalam hal penegakan hukum pimpinan menjadi figure sentral yang diikuti oleh bawahannya (tentu dalam hal yang baik). Oleh karena itu, pimpinan harus menjadi contoh tauladan dalam hal kesadaran, kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum. Seiring dengan itu, dalam hal pembenahan dan pembaharuan hukum di lingkungan TNI, perlu adanya masukan dari berbagai pihak (pemegang peran), akademisi hukum, institusi penerintah, LSM dan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk ikut berperan serta

dalam rangka penyempurnaan peraturan hukum militer, baik hukum materiil maupun formil, demi terwujudnya peraturan hukum militer yang baik dan berkeadilan.

**2. Kelemahan Budaya Hukum.**

Budaya hukum di lingkungan masyarakat militer, merupakan sikap, motivasi, semangat dan kesadaran kolektif warga masyarakat militer/TNI untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum serta Hak Asasi Manusia sebagai dasar berprilaku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka menjalankan tugas sebagai bayangkari bangsa dan negara. Hal sebaliknya juga terjadi dalam kehidupan prajurit militer, dengan terjadinya pelanggaran hukum atau ketidak patuhan terhadap hukum, dengan berbagai alasan dan latar belakangnya.

Dalam kondisi kesadaran hukum masyarakat militer yang baik, maka tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat militer semakin meningkat. Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, maka hukum harus menjadi Panglima dalam kehidupan prajurit TNI, terutama dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Dengan hukum dijadikan sebagai Panglima, maka dalam kehidupan masyarakat militer dan dalam penegakan hukum harus berorientasi pada aturan hukum/perintah hukum atau undang-undang, bukan semata berorientasi pada figur-figur tertentu. Figur atau tokoh harus menjadi panutan, simbul kebanggaan dan pelopor dalam ketaatan/kepatuhan terhadap hukum.

Dalam penegakan hukum di lingkungan militer, peranan figur sangat berpengaruh terhadap lingkungan kehidupan militer. Figur-figur tertentu yang dimaksud alam kehidupan militer adalah, para figur seperti

Panglima/Papera/Komandan/Atasan yang memegang kekuasaan/kewenangan dan pengendalian terhadap personel/anggota di bawah komandonya, baik dalam menjalankan tugas pokok satuannya, maupun kewenangan dalam ranah hukum. Figur-figur tersebut dapat dikatakan sebagai personifikasi dalam penegakan hukum, apabila figur tersebut menunjukkan komitmen tinggi dalam keataatan/kepatuhan terhadap hukum, maka prajurit bawahannya akan mengikutinya, dan sebaliknya. Figur juga harus dapat mengendalikan, menyelaraskan/menyeimbangkan antara kepentingan hukum dengan kepentingan militer, agar terwujud harmoni dan rasa keadilan bagi kepentingan para pihak, terutama kepentingan dan perlindungan hak-hak bagi prajurit militer.

Komandan atau atasan sesuai dengan asas "Komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buah dan satuannya", menjalankan corak kepemimpinannya yang bersifat *paternalistic*, artinya komandan menjadi figur yang bisa mengayomi, membimbing dan menjadi bapak terhadap anak buahnya. Corak kepemimpinan paternalistic seperti ini, masih dianggap cocok dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat militer. Dalam kondisi seperti ini, timbul pola hubungan yang guyub/menyatu antara pemimpin dengan yang dipimpin, sebagai wujud satu tekad dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dari sinilah muncul nilai-nilai kebersamaan dan jiwa korsa yang solid antara pemimpin dengan prajuritnya, dan soliditas diantara para prajurit. Kondisi seperti ini sangat bagus untuk tugas-tugas dan kepentingan militer, namun dalam ranah hukum dan untuk kepentingan hukum, soliditas pemimpin dengan prajurit, antara prajurit dengan sesama prajurit harus berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan penghormatan kepada hukum, sebagai wujud dari kesadaran hukum prajurit.

Kelemahan dalam budaya hukum, khususnya dalam penegakan hukum di lingkungan kehidupan kemiliteran saat ini, dalam kondisi tertentu (tidak berlaku secara umum), masih ada perasaan segan atau takut dari staf atau bawahan, untuk memberikan saran yang benar kepada atasannya, dalam hal ada tindakan/perbuatan dari atasannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh kasus kondisi seperti ini, banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan satuan. Sering terjadi proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam petunjuk administrasi pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa sudah mengetahui adanya penyimpangan, tetapi karena sudah menjadi keinginan dari atasannya, maka panitia tidak berani memberi saran untuk memperbaiki/meluruskan penyimpangan tersebut. Setelah terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah pidana, kemudian unsur penegak hukumnya juga segan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, karena menyangkut dan berhadapan dengan atasannya. Kalaupun dilakukan tindakan penegakan hukum, namun tidak maksimal, karena yang terkena penindakan hukum terhadap personel pada level tertentu.

Adanya rasa segan terhadap atasan dalam penegakan hukum seperti ini, sehingga membuat penegakan hukum tidak optimal. Aspek budaya hukum (diantaranya rasa segan terhadap figur-figur tertentu) inilah yang menjadi salah satu kelemahan dalam penegakan hukum di lingkungan prajurit/ militer.

**3. Kemandirian Penegak Hukum.**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa dalam Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997,

Tentang Peradilan Militer, diantaranya berasaskan pada Asas Kesatuan Komando, yang berarti bahwa, dalam kehidupan militer dengan struktural organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Artinya dalam tubuh TNI keputusan dan kebijakan pimpinan tertinggi, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, sampai kepada Komandan paling bawah, wajib dilaksanakan oleh prajurit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer itu sendiri. Kesatuan komando juga berarti seorang perwira/atasan/ komandan diberi kekuasaan atau wewenang untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pasukan/kesatuannya.

Asas kesatuan komando ini, dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana atau peradilan pidana dalam sistem peradilan militer, memiliki makna yang signifikan, artinya Panglima mempunyai wewenang untuk mengendalikan peradilan militer. Dulu sebelum tahun 2004, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI/TNI, secara organisatoris dan administrasif berada di bawah pembinaan Panglima. Namun pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ke 1, menyatakan; Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 1 ke 5:

> "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Pasal 3 ayat (1)

> "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan"
>
> Ayat (2)
>
> "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945"

Pengertian kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut Barda Nawawi Arief,[416] seharusnya diartikan secara luas, yaitu "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum, atau kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

[416] Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, hal. 33- 35.

Dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas tersebut, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Hal ini berarti dalam perspektif penegakan hukum pidana, maka "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya, keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana, yaitu "kekuasaan penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili" dan "kekuasaan eksekusi pidana", seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari kekuasaan pemerintah/eksekutif. Jadi pengertian "kekuasaan yang merdeka dan mandiri" juga harus diperluas tidak hanya pada "kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili". Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana. Hal ini berarti, keseluruhan proses dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus merdeka dan mandiri. Tidak ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu subsistem (yaitu pada sub sistem "kekuasaan mangadili").[417]

Bertolak dari pengertian sebagaimana pengertian di atas, maka seluruh proses penegakan kekuasaan kehakiman (penegakan hukum) di bidang hukum pidana , seyogyanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai " pemegang otoritas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" menurut konstitusi. Apabila berada di bawah naungan "otoritas lain" seperti di bawah Presiden, Departemen Kehakiman (Kemenkumham – pen),

[417] *Ibid.*

Pangab (Panglima TNI – pen), atau Kapolri, sulitlah memahami makna kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) yang merdeka dan mandiri.[418]

Dari apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief di atas, dapat disimpulkan bahwa, penegak hukum (Penyidik, Jaksa/Oditur, Hakim) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman harus merdeka dan mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila kita perhatikan, penyidik di lingkungan peradilan militer (Ankum, Polisi Militer dan Oditur), jelas dari organisasi, administrasi, finansial dan pembinaan karirnya berada dibawah naungan Panglima TNI. Dengan demikian, Ankum, Polisi Militer dan Oditur akan sulit untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara merdeka dan mandiri. Selain itu, Ankum, Polisi Militer dan Oditur masih menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Hapmil yang berasaskan kesatuan komando secara penuh. Sekarang bagaimana dengan posisi hakim militer atau hakim di lingkungan peradilan militer? Untuk memahami posisi kemandirian hakim di lingkungan peradilan militer, perlu dilihat ketentuan yang terkait dengan pembinaan peradilan militer dan personel militer atau hakim militer yang ditugaskan pada Mahkamah Agung.

Dakam Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004, Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkingan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 2 disebutkan :

[418] *Ibid.*

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004; dan

(2) Sejak pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004, Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkingan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung tersebut di atas, kemudian keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Panglima TNI, Nomor :KMA/065A/SKB/IX/2004, Nomor : Skep/420/IX/2004. Dalam Bab II Kerjasama Dalam Pembinaan Personel Militer, beberapa pasal yang menunjukkan kewenangan dari Panglima TNI berkaitan dengan penugasan personil TNI di Mahkamah Agung, antara lain:

Pasal 6, berbunyi :

(1) Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan structural bagi prajurit yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan dengan surat Keputusan Panglima TNI atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau atas pertimbangan Mabes TNI; dan

(2) Setelah Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7, berbunyi :

Kenaikan pangkat bagi prajurit yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer diproses dan/atau ditentukan oleh Mabes TNI atas usul Mahkamah Agung dan/atau atas pertimbangan Mabes TNI.

Pasal 8, berbunyi :

Pemberhentian dari dinas keprajuritan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat bagi prajurit yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer diproses oleh Mabes TNI atas usul Mahkamah Agung dan/atau atas permintaan Mabes TNI.

Dari ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dengan Panglima TNI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa posisi personel TNI yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung (termasuk hakim militer), tidak dapat dikatakan mandiri, tetapi masih ada keterkaitan dengan kewenangan Panglima TNI, terutama menyangkut pembinaan pangkat dan karirnya. Dengan demikian, personel TNI yang bertugas bidang penegakan hukum (dalam kekuasaan kehakiman) di lingkungan Mahkamah Agung, tidak akan mandiri sepenuhnya.

Terkait dengan kemandirian penegak hukum (hakim militer) di lingkungan peradilan militer, hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya (putusan-putusan hakim), harus seimbang dengan kepentingan TNI yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan Negara.

# BAB V
# REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN

## A. Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum di Indonesia.

### 1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara.

Substansi Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia, telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, alinea IV yang berbunyi sebagai berikut :

> "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dari rumusan pada alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tersebut, sudah jelas bahwa secara yuridis Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut tidak mencantumkan kata "Pancasila" secara eksplisit sebagai dasar negara, namun dengan anak kalimat "… dengan berdasar kepada…" ini memiliki makna bahwa dasar negara adalah Pancasila. Hal ini

didasarkan pada interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPK bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah "Pancasila".[419]

Dalam pembentukan Negara Indonesia, dari semula dirumuskannya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, kemudian setelah era reformasi MPR melalui Sidang Istimewa Tahun 1998, menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998, sehingga segala agenda reformasi yang meliputi segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber kepada nilai-niai Pancasila. Selanjutnya, wujud Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pancasila sebagai dasar filsafat negara (asas kerohanian negara), pandangan hidup dan filsafat hidup;

b. Di atas dasar itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan), yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat;

c. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia;

[419] Kaelan, Edisi Reformasi 2016, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, hal. 108

d. Selanjutnya di atas Undang-undang Dasar (sebagai basis), maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam satu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan;

e. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu bahagia bersama, baik jasaniah maupun rohaniah serta tuhaniah.[420]

Sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, maka seluruh penyelenggaraan kehidupan kebangsaan Indonesia, termasuk di dalamnya pembentukan dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia, senantiasa harus diselenggarakan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Artinya, seluruh kehidupan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan pada hukum positif di Indonesia, terselenggara sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang berkeadilan dan berkeadaban dalam semangat persatuan, didasarkan atas musyawarah yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**2. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum.**

Secara filosofis bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari kepribadian bangsa Indonesia, yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup guyub, rukun, suka

[420] *Ibid*. Hal. 109-110

saling tolong menolong dalam semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam memecahkan permasalahan secara bersama. Nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia ini, dapat dijadikan sebagai sumber norma hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hukum yang tumbuh dari akar budaya masyarakat Indonesia, akan bisa diterima dan berlaku efektif terhadap masyarakat Indonesia.

Jika Pancasila menjadi sumber hukum, maka Pancasila ditempatkan sebagai landasan etik dari hukum. Pancasila tergali dari berbagai nilai ekternal dan internal budaya bangsa, kemudian menjadi bahan dasar pembentuk hukum yang ideal. Filsafat hukum Pancasila secara logis mengutamakan sifat religius-komunal dibanding sifat individual. Religius berarti pengakuan terhadap diri manusia akan kehendak alloh pada diri dan alam semesta, sedangkan komunal berarti sebagai kehendak hidup bersama diantara individu-individu yang ada. Hukum yang terbentuk mengikuti falsafah religius komunal sesuai karakter dan paradigma berpikir manusia Indonesia. Dalam setiap penciptaan hukum, maka penciptaan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat luas sebagai suatu bentuk yang komunal, bukan atas dasar kepentingan individu, namun hak individu tetap memperoleh tempatnya dalam hukum Pancasila, hak individu tetap dihormati dan tidak kehilangan tempatnya.[421] Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, meskipun harus mengutamakan kepentingan umum.

Pancasila sebagai dasar negara adalah juga merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal ini sangat penting sekali untuk dipahami secara

[421] Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2018, *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman kabangsaan*, Depok, Prenadamedia Group, hal. 136-138.

sungguh-sungguh oleh segenap bangsa Indonesia, terutama oleh para pengelola negara, karena dengan pemahaman seperti ini akan menimbulkan tekad dan semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Harus disadari juga, apabila bangsa dan negara ini tidak memiliki dasar hukum yang utama tentu akan terjadi dan timbul bermacam-macam pikiran yang subyektif, yang benar adalah menurut ukuran pribadi masing-masing yang dapat menimbulkan perbedaan dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya hukum dasar itu harus diyakini, hanya ada satu yaitu Pancasila. Setiap masalah yang timbul pemecahannya hanya didasarkan kepada Pancasila sebagai hukum dasar, tidak ada sumber hukum lain, sehingga tidak akan terjadi perbedaan penafsiran dan pikiran yang berbeda-beda yang dapat terjadi perpecahan diantara warga dari bangsa Indonesia ini.[422]

Berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia ini, Kaelan menjelaskan bahwa, dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Inonesia yang pada hakekatnya tersimpul dalam asas kerohanian Pancasila. Konsekuensinya Pancasila asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia yang harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945,

[422] H. Wirman Burhan, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*, Depok, Rajawali Pers, hal. 186-187.

serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirinci, sebagai berikut :

a. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum yang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran;

b. Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari Undang-undang Dasar;

c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis);

d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pokok pikiran ke empat yang bunyinya "negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab"; dan

e. Merupakan sumber semangat bagi Undang-undang Dasar 1945, bagi para penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga penyelenggara partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat

dipahami karena semangat sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan Negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman serta dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamikan masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian Pancasila.[423]

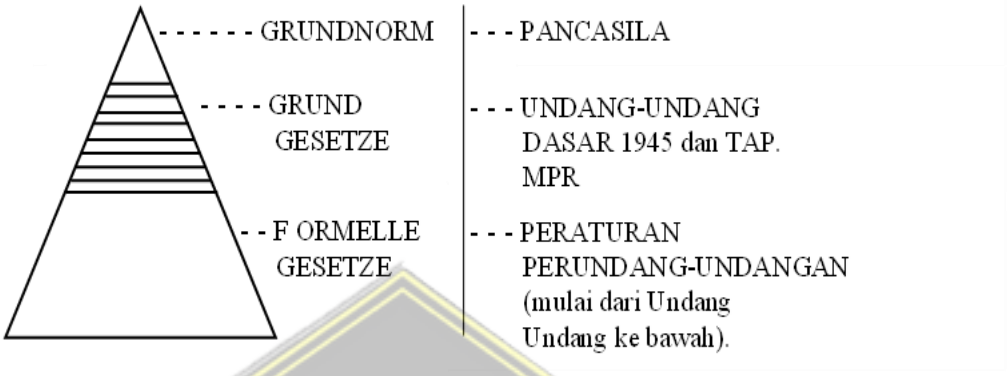
Menurut Philipus M. Hadjon,[424] tentang hakekat Pancasila, bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam arti ideologi dan filsafat hidup. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi negara atau Pancasila adalah falsafah hidup negara , dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara. Dalam susunan tertib hukum menurut Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966, Pancasila dikatakan sebagai "sumber" dari segala sumber hukum, dengan demikian Pancasila berada di atas Undang-undang Dasar dan semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber isi untuk Undang-undang Dasar (secara langsung) dan untuk peraturan perundang-undangan (secara tidak langsung, artinya melalui tahapan hirarki tata susunan norma hukum).

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, apabila menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, tentang lapisan norma hukum, maka Pancasila merupakan *"Grundnorm".* Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila mempunyai sifat dan kualitas *"Presupposed".* Untuk lebih jelasnya, dibuat bagan lapisan norma hukum , menurut teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

[423] Kaelan, Pendidikan Pancasila, *Op. cit*., hal. 110-111.
[424] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, *Op. cit*. hal.58.

Bagan 6[425]

Tata susunan norma hukum : Perbandingan tata susunan norma hukum menurut Hans Nawiasky dan menurut TAP. MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 97




Dalam tata susunan yang seperti itu, Pancasila dijabarkan pertama kali di dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR (Ketetapan MPR tidak diartikan sebagai peraturan perundang-undangan tapi sebagai norma hukum dalam lingkungan *Grund Gesetze*) dan selanjutnya dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menuntut tata susunan norma hukum kita, dimulai dengan Undang-Undang dan disusul dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaan Bawahan lainnya. Dengan demikian kalau dibalik, isi dari peraturan perundang-undangan dan isi dari TAP MPR, serta Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan *"Grundnorm"*.

Berkaitan dengan teori Hans Nawiasky ini, selanjutnya Ahmad Redi, mengutip teori Hans Nawiasky (murid dari Hans Kelsen) yang disebut dengan *Theory von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah, sebagai berikut :

a. Norma fundamental negara *(Staatsfundamentalnorm*);

[425] *Ibid*. (Dikutip dari Philipus M. Hajon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, hal. 59)

b. Aturan dasar negara *( Staatsgrundgesetz);*

c. Undang-undang formal *(Formel Gestz*), dan

d Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Menurut Hans Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara, sebaikya tidak disebut sebagai *Staats Grundnorm*, melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang Dasar *(Staatsverfassung)* dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.[426]

Selanjutnya Ahmad Redi dengan mengutip pendapat dari A. Hamid S. Attamimi, berdasarkan teori Hans Nawiasky membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia, menunjukkan dengan menggunakan teory Hans Nawiasky, maka struktur tata hukum Indonesia, adalah :

a. *Staatsfundamentalnorm :* Pancasila (Pembukaan Undang-undang Dasar 1945);

b. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;

c. formel gestz : Undang-undang; dan

[426] Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 41.

e. *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hirarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga keputusan Bupati atau Walikota.[427]

Pada intinya, konsep *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah :

a. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;

b. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;

c. Isi dari *Staatsfundamentalnorm* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara *(Staatsverfassung),* termasuk norma pengubahnya;

d. Hakekat hukum suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.[428]

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai

[427] *Ibid*., hal. 42.
[428] Kurnisar, Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia. *https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/467/385*

staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai "Cita hukum (*rechtsidee*)" mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.[429]

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *Grundnorm (Staatsfundamentalnorm* – menurut Nawiasky) dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum *(Legal Policy)* atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan *(Policy Making)* dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.[430]

Penerapan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, telah dinyatakan oleh beberapa produk hukum, baik yang berupa Ketetapan MPR

[429] *Ibid.,* hal. 246-248.
[430] *Ibid*. hal.249

maupun dalam bentuk produk perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor XX MPRS/ 1966 (jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978), yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakekatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Selanjutnya dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara, dengan tegas menyebutkan , Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[431]

[431] Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Kurnisar Kurnisar, Abstrak. *DOI: http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467*. Diunduh tanggal 14 April 2021

Dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan :[432]

Pasal 1, berbunyi sebagai berikut :

(1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;

(2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis; dan

(3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Tap MPR Nomor III/MPR/2000, dan disebutkan secara spesifik, bahwa Pancasila yang dimaksud sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Penegasan bahwa Pancasilan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga terdapat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun

[432] Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat RI, Nomor III/MPR/2000, Tentang sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2000.

2011ini, mencabut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan tegas menyebutkan bahwa, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.[433] Selanjutnya dijelaskan pula tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan tentang jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut :

> Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari atas :
>
> a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
> b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
> c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
> d. Peraturan Pemerintah;
> e. Peraturan Presiden;
> f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
> g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Pancasila yang berfungsi sebagai dasar Negara Republik Indonesia, maka sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh penyelenggaraan kehidupan pemerintahan, sosial, politik, ekonomi dan budaya, termasuk di dalamnya pembentukan dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia, senantiasa harus diselenggarakan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Selanjutnya, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini

[433] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82.

bermakna bahwa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap produk hukum atau materi/isi muatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, akan meneguhkan bahwa hukum positif Indonesia berakar dan tumbuh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, sehingga akan membawa kepada kesejahteraan bangsa, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## B. Penerapan Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.

### 1. Konsepsi Negara Hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Negara hukum yang seperti apa yang dianut oleh Indonesia, apakah negara Indonesia menganut konsep negara hukum *Rechtstaat* sebagaimana di Eropa Kontinental, atau konsep negara hukum *Rule of Law* sebagaimana di negara Anglo Saxon, atau konsep negara hukum

Nomokrasi Islam[434], konsep negara hukum *Sosiality Legality*[435], atau konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, ataupun konsep Negara hukum lainnya yang ada di dunia. Indonesia sebagai sebuah Negara demokrasi, sejak awal berdirinya sudah menentukan bahwa, falsafah, ideologi negara dan dasar Negara Indonesia adalah berpancasila, yang terdiri dari 5 (lima) sila yaitu; *Pertama,* Ketuhanan Yang Maha Esa, *Kedua* , yang Kemanusiaan yang adil dan beradab, *Ketiga* Persatuan Indonesia, *Keempat,* Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang *Kelima* adalah, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan kelima sila Pancasila ini tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam perkembangan konsep negara hukum ini, kita mengenal dua model yang terkenal dari negara hukum, yaitu; model Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum *(Rechtsouvereiniteit),* yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum), dan model Anglo Saxon, yang berdasarkan Common Law yang berintikan *The Rule of Law*.[436] Untuk lebih jelasnya, perlu kiranya secara singkat dijelaskan masing-masing *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*, sebagai berikut :

---

[434] Konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam merupakan konsep negara yang mengacu pada Al quran dan Sunnah. Dikutip dari footnot 3, dari I Made Hendra Wijaya, Menentukan Konsep Negara Hukum Di Indonesia, https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/prosemfhunmas/article/download/826/767. Hal. 199. Diunduh tanggal 19 April 2021

[435] *Ibid*. Footnot 4 Socialist Legality merupakan suatu konsep Negara hukum yang dianut oleh negara-negara komunis/sosialis yang tujuannya adalah untuk mengimbangi konsep Rule of Law yang dipelopori oleh negara-negara anglo saxon. Konsep Negara hukum Socialist legality menempatkan hukum dibawah sosialisme yaitu Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme. Konsep Negara hukum Socialist legality memberikan jaminan hak-hak dan kebebasan politik para warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan dan reputasi mereka.

[436] Made Hendra Wijaya, *KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015. https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/158/135

a. *Rechtsstaat*.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto,[437] bahwa sesungguhnya konsep "*Rechtsstaat"* atau "negara hukum" adalah konsep yang datang dari luar wilayah peradaban pribumi, dimana konsep ini yang termutakhirkan lewat revolusi kerakyatan yang terjadi di wilayah kawasan peradaban Eropa Barat. Konsep ini merupakan paradigma baru, bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tidak dibenarkan apabila bertindak atas dasar kekuasaan belaka, namun kekuasaan haruslah bertumpu pada kebenaran hukum positif, yaitu undang-undang yang berlaku (*ius constitutum*) yang paling dasar, yaitu Undang-undang Dasar. Dalam konsep *Rechtsstaat* lahir tiga karakteristik yang melekat, sine qua non, tak boleh tidak dalam konsep Rechtsstaat yaitu, harus diterapkan dalam kehidupan negara bangsa.

Ketiga karakteristik tersebut; *Pertama,* bahwa hukum dalam negara hukum harus dibentuk dalam wujudnya yang positif. Demi kepastian berlakunya, hukum harus dibentuk ke dalam rumus tertulis yang mendalilkan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan hukum tertentu dengan akibat hukumnya. *Kedua,* apa yang disebut hukum *(Ius Constitutum* atau *Lege* alias undang-undang) harus merupakan hasil proses legeslasi. *Ketiga,* Hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang (berikut undang-undang yang paling dasar disebut Undang-undang Dasar), akan mengikat seluruh warga bangsa secara mutlak.

[437] Fajrurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press, hal. 44-45

Selanjutnya mengutip pendapat Mahfud MD, bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law.* Istilah *Rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *Rule Of Law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan titik berat pengoperasian. *Civil law* menitikberatkan pada administrasi , sedangkan *common law* menitik beratkan pada aktivitas yudisial. Konsep *Rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid,* sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law* yang memberikan kebebasan pada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan.[438]

Menurut Philipus M. Hadjon,[439] bahwa konsep *Rechtsstaat* mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Konsep klasik disebut "*klassiek liberale en democratische Rechtsstaat*" atau "*democratische Rechtsstaat*", sedangkan konsep modern disebut "*sociale Rechtsstaat*" atau "*sociale democratische rechtsstaat*". *Liberale democratische rechtsstaat*, sifatnya yang liberal bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari John Locke, Montesquieu dan Immanuel Kant. Sifatnya yang demokratis, bertumpu pada pemikiran kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. Prinsip liberal bertumpu atas "*liberty*" dan prinsip demokrasi bertumpu atas "*equality*". Liberty menurut Immanuel Kant

[438] *Ibid*., hal. 46
[439] Dikutip dari Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, *Op. cit.*, hal.69-74

adalah *the free self assertion of each limited only by the like liberty of all.* Atas dasar itu Liberty merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas semua yang lain. Atas dasar demokratis, *Rechtsstaat* dikatakan sebagai negara kepercayaan timbal balik, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.

Atas sifat-sifat liberal dan demokratis tersebut, maka ciri-ciri *Rechtsstaat*, adalah :

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi; kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Dari ciri-ciri di atas, jelas bahwa ide sentral dari *Rechtsstaat*, adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dalam konsep Rechtsstaat yang liberal dan demokratis, inti perlindingan hukum bagi rakyat adalah, perlindungan kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu, melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan.[440]

Selanjutnya menyangkut *Sociale rechtsstaat*, merupakan varian dari *liberaal democratische rechtsstaat*. Varian dari *Social rechtsstaat* terhadap *liberaal democratische rechtsstaat,* antara lain, interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya serta dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari "*wet*" dan "*wetgeving*". Kebebasan dan persamaan yang semula dalam konsep *Liberaal Democratische Rechtsstaat* sifatnya formal yuridis, dalam konsep *Sociale Rechtsstaat* ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat, bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan individu lainnya. Hak-hak soisal, ekonomi dan kultural mendapat perhatian utama. Legitimasi kekuasaan politik tidak lagi merupakan masalah pokok, tetapi kekuasaan

[440] *Ibid*.

ekonomi dalam masyarakat kapitalis yang liberal dan kaitan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Dengan pergeseran-pergeseran tersebut, maka unsur-unsur pokok dari *Sociale Rechtsstaat* adalah: *Elementair Recht, Economische Mogelijkheden, Sociale Spreiding.* [441]

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, dalam *sociale rechtsstaat* prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural. Dengan demikian, semakin komplek sistem perlindungan hukum bagi rakyat dan juga semakin banyak sarana yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat, terutama hak-hak sosial, hak ekonomi dan kultural.[442]

Gagasan atau konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dalam pandangan pemikir hukum Eropa kontinental pada dasarnya terletak pada semangat dan kehendak untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut, tanpa adanya kekuatan yang mengontrol sebagai akibat situasi politik di Eropa saat itu. Konsep negara hukum di Eropa kontinental tersebut dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat*.[443] Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul "*Mathaphysiche Ansfangsgrunde de Rechtslehre*" berpendapat, bahwa negara harus bertindak pasif dan harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Pendapat tersebut mencerminkan adanya kehendak agar negara

[441] *Ibid.*
[442] *Ibid.*
[443] Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 125.

dalam menyelenggarakan kekkuasaan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi negara dalam menyelenggarakan kekuasaan harus didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), yaitu hukum yang baik.[444]

Pandangan dari Immanuel Kant tersebut mendapat dukungan dari seorang pemikir kenegaraan asak Jerman, seperti yang dikutif oleh Donal A. Rumokoy, bahwa "negara harus menjadi negara hukum", dimana negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus sedapat mungkin menentukan secermat-cermatnya batas-batas kegiatannya, dalam lingkungan suasana kebersamaan warga negara menurut hukum yang harus mendapat jaminan tanpa dapat ditembus.[445]

Selanjutnya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsurnya meliputi :

a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.[446]

Dari konsep negara hukum *(rechtsstaat)* dari Friedrich Julius Stahl ini, dapat disimpulkan bahwa, negara hukum bertujuan untuk melindungi

[444] H. Sarjana, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Thafa Media, hal. 56-67.
[445] *Ibid*.
[446] *Ibid*.

hak-hak asasi manusia dan pembatasi kekuasaan pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. *Rule Of Law*.

Paham *The Rule Of Law* dalam sistem hukum Anglo Saxon pada hakekatnya tidak berbeda dari paham *rechtsstaat* dalam sistem hukum Eropa Kontinental karena memiliki makna inti *The laws govern and not men*. Sistem hukum Eropa Kontinental *rechtsstaat* sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner terhadap absolutisme, sedangkan sistem hukum Anglo Saxon the rule of law berkembang secara evolusioner sebagai usaha untuk melepaskan diri dari sistem absolutisme.[447]

Prinsip *Rule of law*, dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, yang kemudian menjadi jargon di Amerika Serikat menjadi "*the rule of law, and not of Man*", yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Negara hukum atau yang disebut *"Rule Of Law"* menurut A. V. Dicey mempunyai 3 (tiga) ciri penting, yaitu; 1) *Supremacy of Law*, 2) *Equality before the law* dan 3) *Due process of law*.[448]

Ketiga ciri penting negara hukum atau *rule of law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey (A.V Dicey) tersebut, terdapat di dalam bukunya yang berjudul *Introduction To The Study Of The Constitution*, yang menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum yaitu :

[447] Fajrurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, *Op. cit*., hal. 56
[448] Jimly Asshiddiqie, 2018, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, *Op. cit.*, hal. 125-126.

1) *absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government* (supremasi absolut atau dominasi hukum reguler yang bertentangan dengan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang, dan tidak termasuk kesewenang-wenangan, dari hak prerogratif, atau bahkan berbagai otoritas diskresioner pada bagian dari pemerintah);

2) *equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary Law Courts* (kesetaraan di depan hukum, atau tunduk setara terhadap semua kelompok masyarakat kepada hukum biasa yang dikelola oleh pengadilan biasa); dan

3) *the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts; that, in short, the principles of private law have with us been by the action of the Courts and Parliament so extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution is the result of the ordinary law of the land* (hukum konstitusi, aturan-aturan yang ada di luar negeri biasanya membentuk sebagian undang-undang

konstitusi, bukanlah sumber melainkan konsekuensi hak-hak individu karena ditentukan dan dijalankan oleh pengadilan; bahwa, singkat kata, asas-asas hukum pribadi bagi kita merupakan keputusan pengadilan dan parlemen yang telah demikian diperluas untuk menentukan kedudukan pemegang tahta dan para abdinya; dengan demikian konstitusi merupakan hasil dari hukum negara).[449]

Masih berkaitan dengan ciri-ciri negara hukum, selanjutnya, menurut *"The International Commission Of Jurist*, prinsip-prinsip yang merupakan ciri-ciri penting Negara Hukum, sebagai berikut :

1) Negara harus tunduk pada hukum;

2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan

3.) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.[450]

Menurut Jimly Asshiddiqie,[451] ada 12 (dua belas) prinsip-prinsip pokok negara hukum. Kedua belas prinsip pokok ini merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum *(The Rule of Law*, ataupun *Rechsstaat),* dalam arti yang sebenarnya, sebagai berikut :

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

[449] Dikutip dari footnot 2, dari I Made Hendra Wijaya, Menentukan Konsep Negara Hukum Di Indonesia, *Op. cit*., hal 198.
[450] Jimly Asshiddiqie, 2018, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, *Op. cit*., hal. 126.
[451] *Ibid*., hal.127-134.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam prilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme.

2) Persamaan Dalam Hukum (*Equality before the law*).

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4) Pembatasan Kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian

kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal.

5) Organ-organ Eksekutif Independen.

Dalam rangka membatasi kekuasaan perlu pengaturan lembaga pemerintahan yang bersifat independen untuk menjamin demokrasi karena fungsi lembaga ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan pemerintahan. Lembaga, badan atau organisasi seperti Bank central, organisasi tentara, kepolisian, kejaksaan, Komisi HAM, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran dan sebagainya.

6) Peradilan Bebas Tidak Memihak.

Peradilan bebas tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya hakim tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun juga demi menjamin adanya keadilan dan kebenaran dalam setiap putusan hakim di dalam peradilan.

7) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara *(Constitutional Court).*

Dalam negara hukum modern sudah lazim mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi *(Constitutional Court)* dalam sistem ketatanegaraannya, dalam upaya memperkuat sistem *cheks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang dipisah-pisah untuk menjamin demokrasi, misalnya, mahkamah konstitusi ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan tersebut.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya jaminan dan perlindungan serta penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusi merupakan ciri yang penting bagi negara hukum yang demokratis.

10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)

Dalam negara hukum dianut dan dipraktekkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum diundangkan dan diterapkan untuk menjamin kepentingan semua

pihak/rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, apalagi untuk menjamin kepentingan segelintir orang atau pihak penguasa saja.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bersama (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum merupakan sarana unuk mencapai tujuan dan kemakmuran bersama/ semua warga bangsa. Cita-cita hukum baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui negara hukum dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan umum/ bersama.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka dalam setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam lembaga resmi dapat dilengkapi melalui peran serta masyarakat dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Hal yang sama tentang *"The Rule Of Law"* dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap rakyat, sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari "*The Rule Of Law*": Pertama, supremasi absolut atau predominasi dari reguler law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan

meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif "*Discretionary Authority*" yang luas dari pemerintah. Kedua, bersamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada "*Ordiary Law Of The Land*" yang dilaksanakan oleh "*Ordinary Court*", ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi, Ketiga, konstitusi adalah hasil dari "*The Ordinary Law Of The Land*", bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemijkian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya.[452]

Pandangan A.V Dicey di atas, dikatakan sebagai pandangan yang sempit, karena dari tiga pengertian dasar yang diketengahkan mengenai *The Rule Of Law,* intinya adalah *Common Law* sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa. Mengenai A.V. Dicey yang menolak kehadiran peradilan administrasi negara adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris. Bahwa di Inggris, inti kekuasaan raja semula adalah kekuasaan memutus perkara yang kemudian didelegasikan kepada hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja, tapi berdasarkan The Common Custum England, sehingga karakteristik dari *common law*

[452] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, *Op. cit.*, hal. 75.

adalah judisial, sedangkan karakteristik dari *civil law* (kontinental) adalah administrasi.[453]

## 2. Negara Hukum Pancasila.

### a. Indonesia Sebagai Negara Hukum.

Dalam konstitusi negara kita, Undang-undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Setelah Undang-undang Dasar 1945 mengalami amandemen, khususnya pada perubahan ketiga (tepatnya Sidang Tahuan MPR Tahun 2001), pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan dengan tegas bahwa, "Indonesia adalah negara hukum" tanpa menyebut *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Oleh karenanya, kemudian timbul pertanyaan, prinsip negara hukum Indonesia ini mengacu pada prinsip r*echtsstaat* atau *rule of law*?

Menurut Mahfud M.D. sebagaimana dikutip oleh H. Juhaya S. Praja, bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pilihan konsep prismatik atau integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan

[453]*Ibid.*, hal.77

prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep the *rule of law*.[454]

Untuk Negara Hukum Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, ada 12 (dua belas) prinsip-prinsip pokok negara hukum, dimana kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum *(The Rule of Law*, ataupun *Rechsstaat)*, dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie,[455] untuk Negara Hukum Indonesia, selain ke 12 (kedua belas) prinsip-prinsip negara hukum tersebut, ditambahkan satu lagi prinsip (prinsip ke tiga belas), yaitu "Berketuhanan Yang Maha Esa".

Sesuai dengan Sila pertama Pancasila, negara hukum Indonesia haruslah mengandung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 juga terdapat penegasan bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, sistem hukum dan cita negara hukum Indonesia harus pula berketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pengakuan bangsa Indonesia akan Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu, seperti tercermin dalam kalimat pembuka alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa…" Dengan adanya penegasan ini terdapat 3 (tiga) doktrin kedaulatan yang dianut oleh UUD 1945 secara simultan, yaitu; 1) doktrin Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi, seperti yang tercermin dalam Alinea

[454] H. Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Hal. 140.
[455] Jimly Asshiddiqie, 2018, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, *Op. cit.*, hal. 134.

Keempat Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 2) doktrin Kedaulatan Hukum atau Nomokrasi, seperti tercermin dalam Alinea Keempat dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan 3) doktrin Kedaulatan Tuhan atau Kemahakuasaan, seperti tercermin dalam Alinea Ketiga dan Keempat, serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Bagaimana implementasinya tentang prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia saat ini? Mengenai implementasi konsep negara hukum di Indonesia ini, selanjutnya H. Juhaya S. Praja, mengutip pendapat Sunaryati Hartono (pada era Tahun 1960-an), sebagai berikut :

> "… bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara *rule of law*, kiranya masih berlaku bahkan sampai saat ini. Kita belum memiliki *rule of law* itu, karena belum lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya *"law"* itu di negara kita Indonesia. Kalaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi hukum itu, karena sistemnya sendiri belum kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragu-ragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang *the rule of law* atau negara hukum Indonesia.[456]

Pendapat dari Sunaryati Hartono ini, bila kita simak dan memperhatikan praktek penegakan hukum saat ini, memang ada benarnya, terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana, *Due process of law* baik secara substantif maupun secara

[456] H. Juhaya S. Praja, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya, *Op. cit.*, Hal. 141

prosedural perlu adanya pembaharuan. Pembaharuan hukum pidana, terutama hukum pidana militer ke depan perlu dilakukan pembaharuan dari aspek struktural, substansi dan kultural. Pembaharuan ini diperlukan karena aspek (terutama) substansi hukum pidana (hukum pidana militer) sebagian besar masih peninggalan kolonial, dimana aspek sosio filosofisnya sudah tidak sesuai dengan kontek sosio filosofis masyarakat Indonesia saat ini.

**b. Negara Hukum Pancasila.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam perkembangan hukum saat ini mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Konsep prismatik atau integratif tersebut memadukan prinsip kepastian hukum *(Rechtsstaat)* dengan prinsip keadilan dalam konsep *The Rule Of Law*. Namun untuk negara Indonesia, para pendiri bangsa ini telah memformulasikan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya paradigma hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Eropa atau Barat, melainkan telah menggali dari tradisi asli budaya bangsa Indonesia, yang dirumuskan dalam 5 (lima) prinsip dasar yang tertuang sebagai sila-sila dalam Pancasila. Kelima prinsip dasar tersebut, yaitu; Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme). Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai-nilai

universal, tetapi juga berbasis pada partikularitas tradisi dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.[457]

Pancasila oleh para pendiri bangsa dinyatakan kedudukannya sebagaimana terlihat dalam UUD 1945, dalam penjelasan umum ditegaskan, Pancasila adalah cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

Mengutip pendapat Rudolf Stammler (1856-1939) berpendapat bahwa, cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitsteren) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi; dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*Zwangversuch zum Richtigen*). Oleh karenanya menurut Stammler keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian maka cita hukum yang adil (*Richtiges Recht*) adalah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.[458]

Terkait dengan cita hukum (rechtsidee), Gustav Radbruch (1878-1949) seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian, juga

[457] Fajrurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, *Op. cit.*, hal.72
[458] Akhmad Bumi, Pancasila Adalah Cita Hukum (Rechtsidee), *https://tabloidmatahati.com/pancasila-adalah-cita-hukum-rechtsidee/#.YIzsCLUzbIU*. Diunduh tanggal 1 Mei 2021.

menegaskan cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Radbruch termasuk dalam mahzab yang berusaha menjembatani dualisme *das Sein* dan *das Sollen* dengan mengkonstruksikan lingkup ketiga yaitu kebudayaan (kultur). Dengan demikian cita hukum itu gagasan, rasa, cipta, pikiran. Bukan sekedar cita-cita sebagai keinginan, kehendak, harapan yang selalu dipikirkan atau dihayalkan.[459]

Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila yang berwujud dalam hukum, pembukaan dari hukum dasar dari Undang-undang Dasar. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar sesuai kepribadian bangsa Indonesia atau tidak, selain sebagai fungsi regulatif yang menentukan hukum itu adil atau tidak. Dengan demikian, maka menurut UUD 1945, dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan yaitu, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), dan Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun terletak diluar sistem norma hukum. Dalam kedudukan yang demikian Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum.[460]

[459] *Ibid.*
[460] *Ibid.*

Masih menyangkut Pancasila sebagai cita hukum *(Rechtsidee)*, Jimly Assiddiqie berpandangan, bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai yardstick dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan Pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila termaktub didalamnya adalah modus vivindi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa yang majemuk. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak) sekaligus tempat tujuan hukum.[461]

Sementara menurut Mahfud M.D., sebagai cita hukum, Pancasila sebagai bingkai sistem hukum dalam negara hukum Pancasila, sebagai sistem yang khas Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila mengandung lima karakteristik, yaitu : 1) Negara hukum Pancasila berasas kekeluargaan, mengakui hak-hak individu, tapi tetap mengutamakan kepentingan nasional, 2) berkepastian hukum dan berkeadilan, 3) berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religious nation state), 4) mengandung hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat, dan 5) basis pembentukan hukum mestilah pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian,

[461] Fajrurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, *Op. cit.*, hal. 77

Pancasila sebagai cita hukum, menjadikan hukum Indonesia bukan merupakan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum yang hanya didasarkan pada agama tertentu saja. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradap, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia sebagai mahkluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi dan beradap manakala tidak hidup bersama dengan manusia lain. Sebagai cita hukum, Pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan kemana hukum dan penegakannya akan dibawa, tetapi sekaligus memberikan nilai axiologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya.[462]

Selanjutnya penjabaran Negara Hukum Pancasila sesuai sila-sila dalam Pancasila, dapat diuraikan sebagai berikut :[463]

1) Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki inti kata Tuhan, sehingga secara morfologis mengandung makna abstrak atau suatu hal yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia harus diukur dan sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan yang mempunyai nilai budi pekerti

[462] *Ibid*., hal 77-78
[463] Dikutip dari Made Hendra Wijaya, *KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA*, Jurnal Advokasi FH Unhas, Vol. 5 No.2 September 2015. Hal. 206-210. *https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/158/135.*

kemanusiaan yang luhur, selanjutnya terjabarkan dalam substansi suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur manusia harus sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam negara hukum haruslah hukum sebagai panglima yang terdepan, namun yang menjadi inti atau jiwa dari hukum tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanan di dalamnya, dimana nilai ketuhanan tersebut tidak hanya berpatokan pada suatu agama tertentu saja, namun harus dipandang sebagai nilai Ketuhanan yang bersifat universal, yaitu memiliki sifat Keadilan, memiliki sifat Kebenaran, memiliki sifat Kebaikan, memiliki sifat Welas Asih/ Pemurah, memiliki sifat Pengampunan, memiliki sifat Kesetaraan, memiliki sifat Kebebasan, memiliki sifat Menghormati, memiliki sifat Penghukuman, memiliki sifat Tidak Egois, dan sifat-sifat ketuhanan lainnya.

Yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Satu, walaupun di dunia ini banyak terdapat agama, kepercayaan dan keyakinan, namun Tuhan itu satu, yang sangat agung dan baik, yang tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Notonogoro yang menyatakan :

“isi-arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa , yang tidak terikat kepada bentuk Ketuhanan Yang Maha Esa yeng tertentu, akan tetapi tidak memperkosa dari inti dan istilah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain batas-batas daripada inti-isinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan di dalamnya”.

Dengan demikian, hukum yang ada di Indonesia sebagai pengayom dan pelindung bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia haruslah memiliki nilai dan sifat ketuhanan didalamnya, yang tidaklah memihak terhadap salah satu golongan tertentu, individu tertentu agama tertentu, atau keegoisan dari individu dalam membuat, menerapkan dan menjalankan hukum di Indonesia.

2) Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap yang berintikan kata manusia, yaitu manusia yang merupakan mahkluk individu dan mahkluk sosial yang memilki jiwa, akal, rasa, dan kehendak yang mencari sebuah kebahagiaan sempurna untuk tujuannya. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap juga merupakan sila mengenai kemanusiaan. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum, setiap hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya prinsip dasar dari negara hukum yang sangat menjunjung pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan, persamaan terhadap manusia, serta Hak- Hak Asasi Manusia.

Dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di negara hukum Indonesia didalamnya haruslah berisikan tentang nilai-nilai yang berisikan kemanusiaan, yaitu nilai saling menghormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terhadap manusia satu dengan lainnya, menganggap seluruh manusia adalah keluarga yang dilindungi, serta

menciptakan keharmonisan antara manusia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, tujuan dari pembentukan, penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus demi kebaikan seluruh umat manusia dalam arti luas, bermanfaat untuk kehidupan manusia, bangsa dan negara, memberikan perlindungan terhadap hak hakiki dari manusia, memberikan kecerdasan bagi manusia, dan bukan berdasarkan atas keegoisan, kekuasaan serta pengejaran yang bersifat materiil, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan semata, melainkan untuk kepentingan semua golongan warga masyarakat Indonesia.

3) Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Persatuan Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Para founding fathers bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku, ras dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai satu dari kesatuan di Indonesia di jalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk

mempersatukan tujuan, nilai dan jiwa masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda- beda.

4) Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang berintikan rakyat yang artinya seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citannya untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia, sehingga hak dan kewajiban dari rakyat dapat tercipta secara seimbang. Rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah mufakat merupakan wujud dari kehendak rakyat masyarakat, dimana seluruh suara dan kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik itu yang berasal dari kelompok minoritas maupun mayoritas, kaum miskin maupun kaum kaya yang ada di Indonesia, semuanya diperlakukan sama dan didengarkan serta diwujudkan untuk kepentingan bersama.

Didalam negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap keinginan dan kebaikan masyarakat, bukan atas keinginan dari keserakahan dan rasa egois dari

sebuah kelompok atau individu kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi. Hasil dari demokrasi Pancasila yang mufakat bukan berasal dari hitungan suara atau voting yang berisikan kalah dan menang, namum hasil tersebut harusnya berisikan kemenangan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, yang artinya bukan suatu kemenangan politik dari suatu kelompok yang ada di Indonesia, namum kemenangan dari segala bidang kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia, yang berisikan kebaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa indonesia. Di dalam negara hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawarahan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh masyarakat serta bangsa Indonesia.

5) Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kita memahami bahwa keadilan memang merupakan suatu yang bersifat luas dan abstrak, tetapi keadilan lah sebagai tujuan dari setiap individu masyarakat dan setiap bangsa di dunia. Selama ribuan tahun manusia mencari makna dan definisi dari keadilan. Mencari dan harapan untuk terwujudnya keadilan ini, tercermin sejak jaman dahulu budaya dan sejarah di Indonesia, setiap kali para Dalang saat mendalang dalam pergelaran wayang kulit, maka Ki Dalang selalu melantunkan "Suluk" yang merujuk pada sebuah image Universal Nusantara Indonesia, yaitu tentang Negara yang "tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku". Kata-kata dalang tersebut mewakili

*"The Cry For Justice"* seluruh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi tujuan bangsa Indonesia dewasa ini, dimana harapan dan wujud rasa keadilan yang berakar dari nilai-nilai Nusantara Indonesia pada jaman dahulu, dirangkum dan dimuatkan ke dalam Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indoneisa. Nilai adil dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan. Demikian juga dalam pelaksanaan dari undang- undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan-badan peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil serta tidak memihak/membeda- bedakan.

Konsep negara hukum meskipun bukan merupakan konsep asli yang tumbuh di Indonesia, namum konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan di negara Indonesia modern dewasa

ini. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu Negara Hukum Pacasila. Negara hukum Pancasila yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila, sehingga kehadiran Pancasila di dalam negara hukum Indonesia tentunya sebagai pandangan hidup dan pemersatu bangsa Indonesia, dimana hal tersebut sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang mengutamakan kehidupan harmonis, rukun dalam suasana kekeluargaan dan damai.

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum Pancasila ini, terdapat pendapat dari para sarjana tentang ciri-ciri negara hukum Pancasila, sebagai berikut;[464]

Menurut M. Tahir Azhary yaitu, meskipun dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 digunakan istilah rechtsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep rechtsstaat dan bukan pula konsep *Rule Of Law*, melainkan konsep negara hukum Pancasila, dengan ciri-ciri, sebagai berikut :

a. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. Kebebasan beragama dalam arti positif;

d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;

e. Asas kekeluargaan dan kerukunan;

[464] *Ibid.*, hal. 211-212.

f. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila;

g. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

h. Sistem Konstitusi;

i. Persamaan; dan

j. Peradilan bebas.

Selanjutnya Menurut Oemar Seno Adji, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Tetapi kebebasan yang positif, artinya tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum Pancasila, sebagai berikut:

a. Hubungan yang erat antara agama dan negara;

b. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa;

c. Kebebasan beragama dalam arti positif;

d. Ateisme tidak dibenarkan;

e. Komunisme dilarang; dan

f. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie; dalam penerapan konsepsi negara hukum di Indonesia dewasa ini, terdapat 13 prinsip pokok negara hukum yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga

dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Ketiga belas prinsip pokok negara hukum tersebut adalah :

a. Supremasi Hukum *(Supremacy of Law) ;*

b. Persamaan dalam Hukum *(Equality Before the Law)* ;

c. Asas Legalitas *(Due Process of Law)*;

d. Pembatasan Kekuasaan;

e. Organ-Organ Eksekutif Independen;

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

g. Peradilan Tata Usaha Negara;

h. Peradilan Tata Negara *(Constitusional Court);*

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia ;

j. Bersifat Demokratis *(Democratische Reshtsstaat);*

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara *(Welfare Rechtsstaat) ;*

l. Transparansi dan Kontrol Sosial ;

m. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah :

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;

b. Hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.[465]

Dari uraian dan penjabaran tentang negara hukum Pancasila di atas, maka dapat kita simpulkan, bahwa konsep negara hukum Pancasila pada intinya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Supremasi Hukum berdasarkan Pancasila;

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Persamaan Dalam Hukum;

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan;

d. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban; dan

e. Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak.

## C. Penerapan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.

### 1. Keadilan Dalam Perspektif Islam.

Prinsip keadilan dalam Islam sangat fundamental, karena keadilan merupakan dambaan setiap insan dalam pemenuhan kehidupan sosial dan keagamaannya serta dalam segala aspek kehidupannya. Oleh

[465] Philipus M. Hadjon, Perlingungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, *Op. cit.*, hal.85.

karena itu, dalam Islam menghendaki agar setiap orang dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya dasarnya sebagai manusia, yaitu terjaminnya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan agamanya, keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya.

**a. Makna keadilan.**

Islam berdasarkan kepada Al Quran dan Hadist. Dalam Al Quran setidaknya ada dua term yang menunjukkan makna keadilan, yaitu *"Adl dan Qist"*. Secara bahasa *"Adl"* berarti "meluruskan" dan "menyamakan". Arti "meluruskan" biasanya dipakai bila obyeknya hanya satu pihak, sebagai satu kesatuan sistem/struktut/unit, sedangkan arti "menyamakan" dipakai bila obyeknya lebih dari satu pihak (dua atau lebih) yang masing-masing sebagai satuan pihak/struktur/unit terpisah untuk menunjuk aspek perbandingan diantara satu sama lain. Tetapi esensi arti *"adl"* itu sendiri satu, yaitu menyamakan, menyejajarkan, menyebandingkan dan menyeimbangkan. Sedangkan *"Qist"* adalah salah satu bentuk keadilan, yaitu pemakaiannya lebih terarah kepada keadilan dalam pembagian atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.[466]

[466] H. Saeful Anwar, Konsep Keadilan Dalam Al-Quran Analisis Tafsir Maudui. *https://media.neliti.com/media/publications/282949-keadilan-dalam-al-quran-c2770940.pdf*, hal. 11-12. Dunduh tanggal 6 April 2021

Jika Arestoteles mengenal dua macam keadilan, yaitu keadilan komutatif (menyamakan semua orang dalam hukum dan pemerintahan sebagai konsep dasar), dan keadilan distributif (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya, seimbang dengan kewajiban yang ia lakukan atau jasa yang ia berikan), maka *Qist* lebih mendekati makna keadilan distributif ini sebagai bagian atau salah satu bentuk keadilan secara umum.[467]

Sedangkan menurut Tamzyiez Dery, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja *"adala"* dan mashdarnya adalah *al-adl* dan *al-idl*. *Al- adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal pikiran), dan *al- idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indra. Contoh yang pertama, adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh kedua; keadilan dalam timbangan, ukuran da hitungan.[468]

Selanjutnya, Tamzyiez Dery dengan mengutip pendapat dari M. Quraisy Shihab, mengatakan bahwa, keadilan yang berarti kesamaan, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al- adl* diungkapkan oleh Al Quran antara lain dengan kata *al- adl*, *al - qist* dan *al- mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan, sinonim kata *al-adl, al- qist, al- qashd, al- istiqamah, al- wasath, al- nashib dan al- hishsha.* Kata adil mengandung arti : *Pertama*: meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. *Kedua:* melarikan diri, berangkat atau

[467] *Ibid.*
[468] Tamzyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, Ejournal Unisba, Volume XVIII No.3 Juli – September 2002:337 – 352, *https://ejournal.unisba.ac.id.* Diunduh tanggal 6 April 2021.

mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar. *Ketiga:* sama atau sepadan atau menyamakan, dan *Keempat:* menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.[469]

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, Tamyiez Dery (dengan mengutip pendapat dari M. Quraisy Shihab dan Murtadha Muthahhari)[470], merumuskan kata "adil" menjadi empat makna, *Pertama*, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan (artinya) :

> "Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".

Kata *al-adl* pada ayat ini, berarti persamaan dalam arti bahwa, seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

---

[469] *Ibid.*
[470] *Ibid.,* hal. 311-312

*Kedua,* adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.

*Ketiga,* adil dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya". Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Murtadha Muthahhari, menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagian dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa sama rata—melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

*Keempat,* adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah

kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Firman Allah Swt dalam Al- Quran yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6 menegaskan :

> "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya …"

Kalau kita perhatikan "binatang melata" pada ayat ini berarti, segenap mahluk Allah yang bernyawa. Ayat lain yang menunjukkan hal yang sama adalah surat Fushilat (41) ayat 46 :

> "Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hambanya"

Keadilan ilahi, demikian Murtadha Muttahari menjelaskan, merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang buta aksara dan para filosuf yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya.

**b. Keadilan dalam penegakan hukum.**

Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, mengatur hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep yang menyeluruh dan

terpadu. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya.[471]

Diantara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, khususnya dalam rangka menetapkan (menegakkan) hukum, terdapat beberapa ayat Al-Quran, antara lain :

QS. An-Nisa' Ayat 135

- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Riwayat turunnya QS. An-Nisa' Ayat 135 ini, dari as- Sadyi, dia berkata "Ketika turun ayat ini yang saat itu Rasulullah Saw sedang menghukumi perkara dua orang laki-laki yang satu kaya dan yang satu lagi miskin. Rasulullah Saw membela orang fakir yang tidak mungkin menzalimi orang kaya. Maka Alloh Swt menolak ketetapan tersebut,

[471] Ardiansah, Keadilan dalam perspektif Islam, https://customslawyer.wordpress.com/2014/0621/keadilan-dalam-perspektif-islam/. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020.

melainkan memerintahkan beliau agar menegakkan keadilan bagi kedua orang tersebut dengan seadil-adilnya. (H.R. Ibnu Abi Hatim).[472]

Ayat di atas jelas memerintahkan menegakkan keadilan di bidang hukum, baik kedudukan orang mukmin tersebut sebagai hakim maupun sebagai saksi, baik terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapak maupun terhadap kerabat sendiri, dengan tidak membedakan status sosial seseorang, apakah orang kaya maupun orang miskin.

QS. An-Nisa' Ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Riwayat turunnya QS. An-Nisa' Ayat 58 ini, Ibnu Abbas berkata, "Ketika Fathul Makkah, Rasulullah Saw memanggil Usman bin Thalhah. Saat dia sudah tiba, beliau berkata, "Tunjukkan padaku kunci Ka bah", Usman membawakan kunci itu untuk beliau. Lalu al- abbas berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi jaminanmu, berikanlah padaku berikanlah padaku bersama dengan pengaturan pemberian air minum bagi jemaah haji." Usman menahan tangannya, Rasulullah bersabda, "Berikan kunci itu" Dia berkata, "Ini adalah amanah

[472] Ibnu Katsir, 2021, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung, Jabal, hal. 100.

Alloh.” Beliau membuka Ka bah, lalu masuk, setelah itu keluar dan thawaf. Lalu turunlah Jibril dengan membawa wahyu agar mengembalikan kunci itu.” Maka turunlah ayat ini. (H.R. Ibnu Mardawaih).[473]

Ayat tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa adil diartikan sama dengan sikap memperlakukan setiap orang, tidak membeda-bedakan hak-haknya. Adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, atau memberikan seseorang sesuai haknya. Ayat lainnya dalam Al Quran yang memrintahkan manusia untuk berlaku adil;

Q.S. Al Maidah, Ayat 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut diatas, juga menekankan begitu pentingnya setiap orang harus berlaku atau berbuat adil. Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau setiap orang sesuai haknya atas kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan. Jika keadilan disandingkan dengan

[473] *Ibid*., hal. 87

supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung oleh tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan, agar keadilan dapat dikejewantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan kosekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.[474]

**2. Keadilan Dalam Pandangan Para Filsuf/Ahli.**

**a. Keadilan Dalam Teori Klasik dan Modern.**

Diantara konsep atau teori keadilan yang klasik adalah teori keadilan dari Plato. Teori keadilan dari Plato,[475] menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", sedang orang yang adil adalah "*the self diciplined man whose passions are controlled by reason*". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Plato mengatakan: "*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*". Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya

[474] Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020.

[475] Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, Justisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No.2 Mei- Agustus 2014, hal. 120-121. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938. Diunduh pada tanggal 16 Mei 2021.

saja Plato melihat bahwa keadilan akan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya yang sesuai atau yang selaras baginya.

Fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing- masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Bagi Plato suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bertalian erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Selanjutnya konsep keadilan menurut Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurut Aristoteles, bahwa di dalam suatu

negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu, kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Pada teori keadilan Aristoteles ini, terdapat penekanan perimbangan atau proporsi yang dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa, kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya, pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa, keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Dalam teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa, "keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama".[476]

Masalah keadilan menurut Aristoteles,[477] dapat dikelompokkan menjadi adil dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur/ adil. Dengan kata lain ketidak adilan dapat diartikan sebagai tidak mengikuti hukum dan tidak jujur/tidak adil. Tidak adil/tidak jujur selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum belum berarti tidak adil/tidak jujur. Dengan begitu, hukum menjadi indikator apakah sesuatu hal itu adil atau tidak. Namun perlu digarisbawahi bahwa aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Kunci keadilan adalah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat maka harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk hukum

[476] *Ibid.*
[477] Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, 001: 10.22437/ujh.2.2.409-431. Hal 415-417. Ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/102/32.

harus dapat mengangkat realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh Negara.

Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat). Aturan mengajak untuk hidup dalam kesesuaian dengan setiap kebajikan dan melarang hidup dalam keserasian dengan kejahatan. Sesuatu yang menimbulkan kebajikan adalah ukuran taat aturan. Oleh karena itu masyarakat juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai aturan didalam hukum agar prinsip-prinsip keadilan dapat diwujudkan bersama. Perlu digarisbahawi juga bahwa kesengajaan adalah faktor penentu untuk menentukan seseorang itu berlaku adil atau tidak. Kita dapat mengatakan bahwa seseorang bertindak adil atau tidak jika ia melakukan tindakan itu dengan sengaja. Jika suatu tindakan dilakukan dengan tidak sengaja maka hal tersebut tidak termasuk adil melainkan hanya sebuah kebetulan saja. Harus ada niat atau kehendak yang dilakukan dengan pengetahuan penuh dari seseorang untuk berlaku adil. Dalam konteks pengelolaan perusahaan, maka kerugian yang dialami karena ketidaktahuan adalah kesalahan. Kerugian muncul sebagai suatu hal yang tidak diperkirakan, namun kerugian yang terjadi secara berlawanan dengan harapan ia termasuk pada kecelakaan, ada niat tetapi hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Jika kerugian terjadi dengan pengetahuan penuh dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu maka ini termasuk tidak adil.

Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang di sekitar. Hal demikian dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain, dengan kata lain ada manfaat bagi orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini harus terinternalisasi sebagai sikap hidup dan perilaku setiap individu-individu yang akhirnya terbentuk sebuah perilaku kebajikan dalam masyarakat. Dalam lingkup yang lebih besar, kebajikan individu ini akan mempengaruhi kebajikan negara dalam tata kelola kehidupan bersama. Dalam kaitan ini, Aristoteles menyebutkan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih banyak dari bagiannya dan mementingkan diri sendiri. Orang yang mengambil terlalu banyak untuk dirinya sendiri adalah orang yang lalim.

Selanjutnya dalam teori keadilan ini, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Dalam hal ini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi *(undivided goods)* yakni, kemanfaatan bersama misalnya, perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi *(divided goods)* yaitu, hak-hak atau benda-benda

yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.[478]

Sedangkan keadilan komutatif yaitu, terkait dengan masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Untuk obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah, apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki, akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Hal ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[479]

[478] Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, *Loc. Cit.*, hal. 120-121.
[479] *Ibid*.

Terkait dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi ini, pada sisi lain keadilan komutatif atau keadilan korektif (yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan komutatif) mendasarkan pada transaksi baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak yang terjadi pada ranah hukum privat. Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Oleh sebab itu pada konsep keadilan korektif ini berlaku: penerapan hukuman akan menebus kejahatan; restitution akan menebus kerugian akibat wanprestasi; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.

Konsep keadilan korektif ini menjadi dasar pertimbangan lahirnya tanggung gugat kepada orang lain. Dalam ranah hukum perdata, maka setiap tindakan yang merugikan orang lain karena kelalaian atau kesengajaannya dapat menjadi alasan untuk diajukannya gugatan. Oleh sebab itu konsep keadilan korektif ini sangat berkaitan dengan gugatan perdata. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Hakim menjadi pilihan ketika terjadi persoalan, karena hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan melalui putusannya yang adil. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan.[480]

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles sebagaimana dijelaskan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa, keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh

[480] Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Loc. Cit*.

warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu undang-undang. Sedangkan keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.[481]

Selanjutnya tentang teori keadilan dari para pemikir yang tergolong modern, diantaranya adalah, teori keadilan menurut Thomas Aquinas. Konsep pemikiran dari Thomas Aquinas masih menghubungkan keadilan dengan moral dan etik. Hal ini terbukti dengan titik fokus pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya kepentingan umum dalam sebuah masyarakat daripada validitas sebuah peraturan.

Menurut Thomas Aquinas,[482] keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Sikap hati dapat terbentuk melalui kebiasaan, sehingga harus ada pembiasaan untuk melakukan perbuatan baik sehingga keutamaan dapat tercapai. Keutamaan ini sangat berhubungan dengan tiga hal, yaitu akal budi, emosi dan kehendak untuk melakukan. Oleh sebab itu untuk melaksanakan keadilan juga akan tergantung

[481] Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, *Loc. Cit.*, hal.121.
[482] Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Op. Cit.*, hal 419-420.

pada adanya akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keutamaan yang dilaksanakan untuk kebaikan pada akhirnya berhubungan dengan keadilan.

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum (bonum comune). Di sisi lain konsep keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif *(justitia distributiva)*, keadilan komutatif *(justitia commutativa)*, dan keadilan vindikatif *(justitia vindivativa)*. Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing- masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengen perannya dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif yang digagas Thomas Aquinas ini pada dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Selanjutnya keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran *(exchange)* antara dua individu. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.

Selanjutnya konsep keadilan menurut John Rawls.[483] Konsep keadilan yang diutarakan oleh John Rawls yang terkenal dengan *justice as fairness*.

[483] *Ibid*., hal. 420-421.

Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial, meskipun demikian kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengutarakan bahwa pada konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asali (*original posistion*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Rawls menggambarkan adanya posisi asali bagi setiap orang dalam masyarakat, di mana setiap orang mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan pangkat, status, kekuatan ataupun kemampuan, sehingga setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang. Posisi asali ini bertumpu pada kondisi yang disebut dengan *equilibrium reflektif* yang didasarkan pada nilai kebebasan, rasionalitas, persamaan yang digunakan untuk mengatur struktur dasar masyarakat.

Negara menjadi salah satu unsur penting tegaknya keadilan. Keadilan dapat tercapai jika; pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung. Selain itu juga dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan-jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Pada poin pertama maka pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang seluas-luasnya (*equal liberty principle*), sebagai contoh setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dalam berpolitik yang tercantum dalam hak berpolitik, kebebasan beragama, dan kebebasan dalam hak-hak yang lain. Sedangkan pada poin kedua berlandaskan pada ketidaksamaan harus ada kontrol dari negara.

Di sisi lain, selubung ketidaktahuan menutup fakta setiap orang tentang keadaannya atas posisi sosial sehingga menutupi konsep keadilan sosial yang sedang berkembang. Melalui posisi asali dan selubung ketidaktahuan Rawls mengutarakan apa yang disebut dengan keadilan dalam konsep kesamaan yang adil (*justice as fairness*).

Dari beberapa teori atau konsep keadilan yang diutarakan oleh para filsuf/Ahli mulai dari yang klasik sampai modern, dapat ditarik benang merahnya bahwa, keadilan merupakan kebaikan, keharmonisan atau keselarasan. Keadilan menghendaki adanya keseimbangan, kebebasan yang sama bagi setiap orang, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam keadilan ada prinsip perbedaan yang diatur oleh pemerintah agar terjadi keharmonisan dan keadilan, dalam keadilan juga harus adanya persamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap orang. Teori atau konsep keadilan dibutuhkan dalam rangka membuat undang-undang atau putusan-putusan hukum, karena memang keadilan menjadi tujuan hukum. Namun yang perlu diingat bahwa, teori keadilan atau konsep keadilan yang dikemukakan oleh para filsuf/ahli tersebut, tumbuh dan berkembang sesuai pada jaman/waktu dan tempatnya, serta sesuai pula dengan sosiokultural masyarakat yang menyertainya. Bagi kita bangsa Indonesia, dalam rangka membuat undang-undang atau putusan hukum harus berdasarkan pada akar budaya dan rasa keadilan kita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**b. Perspektif Keadilan Dalam Penegakan Hukum.**

Perspektif keadilan dalam penegakan hukum ini, dimaksudkan bahwa, nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan yang harus diwujudkan dalam

setiap upaya penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, terciptanya harmoni dalam pelaksanaan hukum untuk mengayomi masyarakat, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan rasa keadilan bagi masyarakat, serta tujuan akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan bukan sebaliknya.

Dari perspektif keadilan dalam penegakan hukum tersebut, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, haruslah berorientasi pada substansi tujuan hukum sebagaimana digagas oleh Gustav Radbruch. Gustav Radburch mengajarkan konsep 3 (tiga) ide dasar hukum, yang diidentikkan dengan tiga tujuan hukum, yaitu : keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Meskipun disadari bahwa dalam kenyataannya, sering kali terjadi ketegangan atau benturan antara keadilan dengan kepastian hukum, antara kepastian hukum dengan kemamfaatan, atau antara keadilan dengan kemamfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tersebut) bagi si penggugat atau tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemamfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, kalau kemamfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. Radburch mengajarkan, bahwa kita harus menggunakan prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemamfaatan dan terakhir barulah kepastian. Jadi, asas prioritas yang ditawarkan Radburch merupakan asas prioritas baku.[484]

Nilai dasar hukum yang pertama keadilan. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok sebagai alat pembenar

[484] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Op. Cit., hal. 98-99.

kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya, maka fungsi utama hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.[485]

Nilai dasar kedua, tentang kemamfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa, tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemamfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya wrga masyarakat. Pada prinsipnya hukum itu hanya untuk menciptakan kemamfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Tokoh aliran utilitas adalah Jeremy Bentham, mendefinisikan , bahwa sifat segala benda cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemamfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.[486]

Sedangkan nilai dasar ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulakn

[485] Anang Fajrul, Pojok Wacana, http:/www.pojok wacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radburch/(Gustav Radburch. Gambar: Britannica.com). Diunduh tanggal 5 Nopember 2021.
[486] *Ibid.*

konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konterstasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain, ada sebagian pemikir beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana prilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.[487]

Ketiga nilai dasar atau tujuan hukum di atas, sangatlah penting sebagai nilai atau tujuan dari penegakan hukum/orientasi dari penegakan hukum. Mengingat pelaksanaan hukum dapat diwujudkan secara nyata dalam penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum bertujuan mengayomi seluruh warga masyarkat untuk menciptakan kedamaian, keadilan dan kebahagiaan, serta mewujudkan kesejahteraan bersama bagi semua warga masyarakat.

### 3. Keadilan Dalam Pancasila.

Konsep keadilan dalam Pancasila, dapat dijabarkan menurut sudut pandang dan latar belakang (historis) yang menyertainya. Ada yang menjabarkan konsep keadilan dalam Pancasila dari sudut pandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia saja, dan ada juga yang menjabarkan konsep keadilan dalam Pancasila dari sudut pandang bahwa, nilai-nilai keadilan dalam Pancasila sebagai refleksi dari pergumulan bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang menindas bangsa Indonesia, kemudian didasarkan juga pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari aspek suku, agama, ras dan antar golongan yang menjelma dalam struktur masyarakat Indonesia dari dahulu sampai sekarang.

[487] *Ibid.*

Menurut Hans Lura,[488] bahwa keadilan yang diperjuangkan bangsa Indonesia tidak terbatas pada gerakan memerdekakan diri sebagai Indonesia. Namun kesemuanya itu berangkat dari penderitaan rakyat yang menderita di atas tanahnya sendiri oleh para penjajah yang memeras seluruh kekayaan alam pribumi dan secara psikis meninggalkan luka yang mendalam. Pancasila yang diusung oleh pendiri bangsa menjadi kekuatan baru bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukannya. Pancasila menjamin hak-hak warga negara, mengatur relasi yang benar antar individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar adalah relasi yang adil. Ideologi Pancasila ini mewakili seluruh harapan rakyat Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang menghendaki adanya rasa persatuan, kebebasan, kesederajatan, untuk membangun kehidupan yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Tanpa empat pilar ini, Pancasila tidak dapat tegak berdiri sebagai sebuah pemaknaan penuh bagi kehidupan bersama di bumi Indonesia.

Dari seluruh pengalaman akan ketidakadilan itu melahirkan ideologi Pancasila yang melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Hans Lura dengan mengutip dari Thobias Messakh, mengidentifikasi empat konsep nilai utama yang secara konstitutif digunakan para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyepakati Pancasila. Empat nilai itu antara lain: persatuan, kebebasan, kesederajatan, dan kekeluargaan.

Selanjutnya Hans Luara[489] menjabarkan, *Pertam:* persatuan, mempunyai dua arti, yaitu: persatuan sebagai nilai dan persatuan sebagai wadah kerjasama. Persatuan sebagai nilai merupakan rasa solidaritas yang memperkokoh persatuan

[488] Hans Lura, KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA (Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh). http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/1046/823
[489] *Ibid.*, hal. 7-9.

sebagai wadah kerjasama. Sementara, persatuan sebagai wadah kerjasama memungkinkan terkonsentrasinya kemampuan yang besar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajah dan membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Semangat persatuan Indonesia ini yang menjiwai para pemimpin-pejuang kemerdekaan, sebab bagi mereka persatuan Indonesia merupakan syarat utama untuk mencapai Indonesia merdeka. Semangat persatuan ini juga menjadi spirit bagi peserta sidang BPUPKI dan PPKI, yang menghasilkan Pancasila sebagai UUD NKRI. Perbedaan suku dan agama, perbedaan kepentingan perseorangan dan kelompok, tidak boleh menjadi halangan bagi warga masyarakat Indonesia untuk bersatu. Hanya dengan semangat persatuan bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. *Kedua*: kebebasan. Selama masa penjajahan, hak kebebasan bangsa Indonesia dirampas oleh penjajah. Karena itu para pemimpin - pejuang kemerdekaan Indonesia dan berbagai organisasi perjuangannya bertujuan agar warga masyarakat Indonesia memperoleh kembali kebebasannya (sosial, politik, ekonomi, budaya). Dasar pembenaran terhadap hak kebebasan dari setiap warga bangsa Indonesia adalah martabatnya sebagai manusia. Dasar pembenaran ini diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: "bahwa sesungguhnya kemerekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam pernyataan ini, kebebasan tidak dihubungkan secara langsung dengan hak individu, tetapi hak segala bangsa. Kebebasan sebagai hak segala bangsa didasarkan pada peri kemanusiaan dan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa, hak akan kebebasan, pertama-tama melekat pada setiap individu sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak kebebasan bukan karena

kebangsaannya tetapi karena kemanusiaannya. *Ketiga:* kesederajatan. Hak kesederajatan adalah hak yang berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap orang sebagai oknum yang mempunyai martabat kemanusiaan yang sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki hak kesederajatan, artinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Sama seperti nilai kebebasan, nilai kesederajatan antara manusia pun terletak pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak kesederajatannya karena kemanusiaannya, bukan karena kesukuan atau keagamaanya, dan atribut lainnya. Semua warga NKRI mempunyai hak yang sederajat untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, yaitu antara lain: memiliki kebebasan, sumber penghasilan dan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan. Penindasan, diskriminasi, dan subordinasi bertentangan dengan nilai ekualitas. *Keempat:* kekeluargaan. Nilai kekeluargaan berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Inti dari nilai kekeluargaan adalah hidup saling peduli bagaikan kehidupan dalam satu keluarga. Karena itu dengan sendirinya nilai dalam kekeluargaan terkandung nilai kerjasama dan persatuan. Dasar asas kekeluargaan adalah bekerjasama dalam semangat saling peduli untuk mencapai kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam negara yang berasaskan kekeluargaan, perbedaan kepentingan antar warga negara (sebagai anggota dari satu keluarga) tidak boleh dipertentangkan, tetapi dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu. Dalam musyawarah ini kepentingan perorangan harus rela dikorbankan untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Demikian pula kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat tidak boleh dipertentangkan, sebab kepentingan rakyat

seutuhnya menjadi kepentingan pemerintah untuk diperjuangkan dan pemerintah harus selalu memelihara dan mengayomi rakyatnya.

Keempat nilai utama yang telah disebutkan di atas, tidak boleh dipahami secara terpisah. Sebab mereka saling mengkarakteristiki atau mengkonstitusi satu dengan yang lain. Artinya, nilai persatuan dan kekeluargaan mengkonstitusi nilai kebebasan dan kesederajatan sehingga kebebasan dan kesederajatan tidak boleh dijiwai egoisme atau individualisme. Sebaliknya nilai kebebasan dan kesederajatan mengkonstitusi persatuan dan kekeluargaan sehingga terhindar dari persatuan dan kekeluargaan yang dijiwai semangat feodalistis-hierarkhis, yaitu, persatuan dan kekeluargaan yang warganya tidak memiliki kebebasan dan kesederajatan. Kekeluargaan mengkonstitusi persatuan, kebebasan, dan kesederajatan, sehingga relasi antar warga bangsa Indonesia tidak menjadi relasi yang egoistis, tetapi relasi saling peduli satu dengan yang lain. Pancasila tanpa nilai persatuan, kebebasan, dan kesederajatan yang dijiwai semangat kekeluargaan bukanlah Pancasila yang dikehendaki dan disepakati founding fathers pada 18 Agustus 1945 untuk menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai utama ini mendasari semua sila-sila sebagai satu keutuhan.[490]

Masih berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, maka perlu dijabarkan tentang konsep keadilan Pancasila dalam setiap silanya. Lebih lanjut Hans Laura,[491] menjelaskan :

*Pertama:* Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat dua hal, yaitu pengakuan bahwa segenap warga negara Indonesia percaya kepada Tuhan, dan karena itu negara melindungi hak beragama setiap warganya. Oleh karena itu,

[490] *Ibid.*
[491] *Ibid.,* hal. 9-12.

sebagai konsekuensi etis dari pengakuan itu dalam perilaku kehidupan beragama antar warga dalam negara Indonesia, yaitu semua warga negara Indonesia saling mengakui dan menghargai hak keberagamaan masing-masing. Sila ini mengakui kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan diakui sebagai sumber segala yang baik bagi bangsa Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dituliskan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu." Berdasar ayat ini setiap warga negara bebas beragama dan menjalankan ibadah menurut agamanya. Semua warga mempunyai hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Konsekuensi etik moralnya adalah bahwa setiap warga negara wajib toleransi dalam arti saling menghormati antar pemeluk agama dalam semangat kekeluargaan. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, perbedaan doktrin agama tidak dipertentangkan tetapi didialogkan. Tujuan dialog adalah untuk saling mengenal dan saling memperkaya untuk mewujudkan kehidupan beragama yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia seutuhnya.

*Kedua:* Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Berdasarkan sila ini, semua warga negara Indonesia saling menghargai dan memperlakukan sebagai sesama manusia yang sederajat. Pengharagaan ini tanpa memandang suku, agama dan status sosial. Hak akan kesederajatan ini mencakup hak akan kebebasan untuk mengembangkan diri. Hal ini jelas tercantum dalam UUD 1945, pasal 28, 29 tentang kebebasan berserikat dan dan berkumpul, dan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Akan tetapi kesederajatan hak sebagai manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan berdasarkan asas kekeluargaan dalam persatuan Indonesia. Perwujudan hak-hak kemanusiaan setiap warga NKRI

tidak boleh dalam semangat mengejar kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan bersama dalam persatuan Indonesia dan persatuan segenap umat manusia.

*Ketiga;* Sila Persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia, terkandung konsep nilai komonalitas *(commonality).* Nilai kebaikan dan kesejahteraan dalam negara Indonesia tidak berdasarkan kepentingan yang individualistis, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Relasi yang adil antar warga negara Indonesia adalah relasi kebersamaan. Relasi kebersamaan ini harus bebas egoisme. Kebersamaaan warga negara Indonesia bukan kebersamaan dari para individu yang mengejar kepentingan diri sendiri, tetapi kebersamaan dari individu-individu yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri-sendiri yang dijiwai semangat kekeluargaan. Dalam konsep persatuan Indonesia terkandung nilai saling peduli. Karena itu, dalam relasi antar warga Persatuan Indonesia, sebagai wadah kebersamaan, tidak boleh ada eksploitasi, diskriminasi, sibordinasi, dan ketidak pedulian, sebab hal-hal itu bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan dari orang-orang yang sederajat martabat kemanusiaannya, yang berkebebasan, dan yang berhak atas sumber penghidupan untuk memperoleh kesejahteraan yang adil. Kebebasan dan kesederajatan itu dijiwai semangat solidaritas kekeluargaan.

*Keempat:* Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan atau demokrasi mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan sumber dan pemilik kekuasaan dalam negara Indonesia, bukan pemerintah. Semua warga negara Indonesia memiliki keuasaan politik yang sederajat (satu orang satu suara). Aspirasi politik rakyat Indonesia diwujudkan

dalam hukum dan undang-undang pelaksanaannya dipimpin oleh pemerintah. Kekuasaan rakyat tidak boleh dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Dalam musyawarah mufakat para wakil rakyat, tanpa dominasi kepentingan individu dan kelompok, dengan bijaksana mencari dan menyepakati apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya. Yang mengarahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah adalah kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya. Kehendak dan kepentingan ini telah dirumuskan dalam Pancasila. Karena itu yang memimpin hikmat dan kebijaksanaan para wakil rakyat dalam bermusyawarah adalah Pancasila. Hikmat dan kebijaksanaan individu dan kelompok *(individual reason)*, kehendak dan kepentingan individu dan kelompok harus takluk kepada hikmat dan kebijaksanaan dalam Pancasila.

*Kelima :* Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mencakup segenap aspek kehidupan bermasyarakat (sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Akan tetapi dalam Pancasila, ungkapan keadilan sosial secara khusus dipakai untuk menunjuk pada keadilan sosial-ekonomi. Setiap warga negara berhak memiliki sumber-sumber penghidupan, memperoleh pengetahuan dan keahlian untuk bekerja memperoleh penghasilan, mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan daya ekonominya. Pasal 33 UUD 1945 ditetapkan bahwa semua kekayaan alam dan potensi bangsa Indonesia dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat secara maksimal bagi segenap rakyat Indonesia. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam negara Indonesia iyalah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat seluruhnya, bukan kesejahteraan perorangan atau kelompok. Dalam semangat

kekeluargaan, setiap warga negara tidak boleh egoistis mengejar hanya kepentingan dirinya dan kelompoknya. Kebebasan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi harus dikendalikan oleh dua nilai yakni, kesederajatan martabat manusia dan solidaritas kekeluargaan. Perlu tetap dijaga agar tidak ada kelompok memonopoli kekuatan pasar, sebab monopoli kekuatan pasar akan menciptakan penindasan, yaitu yang kuat menindas yang lemah. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, warga masyarakat yang miskin dan lemah harus dimampukan (potensi dan peluang) agar lebih produktif. Tidak boleh ada penindasan ekonomi dalam negara Indonesia, tetapi yang kuat wajib menolong yang lemah sebagai sesama anggota dari satu keluarga, yaitu bangsa Indonesia.

Terkait dengan keadilan sosial, dalam kontek dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, yang dikutip oleh Purwanto,[492] bahwa Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat

[492]Purwanto, PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA:
Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.
https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf

dikurangi. Tujuan keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perwujudan keadilan sosial adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Masih terkait dengan masalah keadilan dalam Pancasila ini, menurut Ferry Irawan Febriansah,[493] bahwa dalam sila II Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", terkandung nilainilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai mahkluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai mahkluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai mahkluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

[493] Ferry Irawan Febriansah, KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA, hal.11. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/1545/1310

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang. Nilai-nilai Sila kedua ini diliputi dan dijiwai Sila pertama, meliputi dan menjiwai Sila ketiga, keempat, dan kelima. Nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Selanjutnya, dalam sila V Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan

pembangunan. Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memanjukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.[494]

Selanjutnya Ferry Irawan Febriansah[495] menjelaskan bahwa, keadilan berdasarkan Pancasila mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan keadilan yang lainnya (keadilan menurut pendapat filsuf/ahli, misal keadilan menurut Aristoteles, John Rawls dsb - pen). Persamaan dari keadilan berdasarkan Pancasila dengan keadilan yang lainnya yaitu memberikan hak yang sama terhadap warga negara dalam memperoleh hak nya sesuai dengan kapasitas warga negara itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia. Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dalah NKRI dan NKRI adalah Pancasila. Konklusinya, perbedaan antara keadilan yang lainnya dengan keadilan berdasarkan Pancasila terletak pada NKRI nya. Selain itu, perbedaan yang menonjol terletak pada negara sekuler dan non sekuler,

[494] *Ibid.*
[495] *Ibid.*, hal. 20-21.

dimana keadilan berdasarkan Pancasila (non sekuler) mengedepankan keadilan berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Lebih lanjut Ferry Irawan Febriansah,[496] menjelaskan tentang karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa", yaitu karakteristik keadilan yang mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan Sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberikan arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tesebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagai mana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara teori negara hukum, kemanusiaan merupakan hal yang utama dalam mewujudkan keadilan. Manusia membutuhkan keadilan dalam perlindungan hak

[496] *Ibid.,* hal. 21-22.

asasi mereka sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati dan dihargai. Konsep negara hukum selalu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan berdasarkan prinsip kedua dari Pancasila tersebut, memberikan keadilan berupa perlindungan hak asasi manusia. Memanusiakan manusia serta menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", yaitu mewujudkan persatuan bagi tercapainya keadilan di Indonesia. Keadilan harus diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila, Sila keempat Pancasila yaitu, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan. Sila keempat dari Pancasila tersebut, memberikan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih yang mengedepankan perlindungan bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila, Sila kelima Pancasila yaitu, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Persamaan tersebut mewujudkan keadilan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan. Keadilan diwujudkan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tersebut memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sama tersebut sesuai dengan teori keadilan yaitu keadilan dalam arti persamaan. Perlindungan pemerintah dalam mewujudkan keadilan tidak ada pengecualian bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan. Keadilan diberikan sama sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara.

Perinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila sebagimana diuraikan di atas, merupakan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari budaya asli bangsa Indonesia. Prinsip atau nilai-nilai keadilan dalam Pancasila itulah yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pembuatan/ pembentukan hukum di Indonesia. Sebagaiman telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa, Pancasila merupakan staatfundamental norm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila sebagai acuan bagi pembentukan hukum di Indonesia, atau nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur substansi hukum di Indonesia, baik hukum yang berlaku sekarang/hukum positif di Indonesia, ataupun hukum yang akan datang *(ius constituendum)* berlaku di Indonesia.

Semua uraian tentang konsep/prinsip-prinsip keadilan baik keadilan dalam perspektif Islam, maupun keadilan menurut konsep/pandanagn para ahli/filsuf dan utamanya keadilan menurut Pancasila, kesemuanya dapat dijadikan pedoman dalam merekonstruksi nilai-nilai dan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer yang berbasis pada nilai keadilan. Dalam

merekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer ini, diperlukan juga perbandingan tentang regulasi lembaga dan kewenangan penyidik pada sistem peradilan militer di negara lain, sebagai referensi guna perbaikan dan memastikan validitas lembaga penyidik di lingkungan peradilan militer di Indonesia.

## D. Perbandingan Institusi Penyidik Terhadap Anggota Militer Di Tiga Negara Asing.

### 1. Negara Azerbaijan.

Sejak Uni Soviet runtuh, Azerbaijan berupaya mengembangkan angkatan bersenjatanya menjadi militer yang professional. Militer Azerbaijan telah menjalani program modernisasi dan perluasan kapasitas yang ekstensif dengan anggaran militer $2,46 miliar pada tahun 2009. Jumlah angkatan bersenjata total 56.840 orang angkatan darat, 7.900 orang angkatan udara dan 2.200 orang angkatan laut. Terdapat 19.500 personil Garda Nasional dan 300.000 mantan personil militer wajib. Pada tahun 2017 Global Firepower menempatkan Azerbaijan pada peringkat 59 diantara 127 negara untuk kekuatan militernya.[497]

#### 1.1. Peradilan Pidana Militer Azerbaijan.

Azerbaijan dengan kekuatan militernya yang dianggap terbaik diantara Negara-negara kaukasus selatan, Azerbaijan juga memiliki lembaga dan perangkat hukum yang berlaku terhadap militernya. Azerbaijan memiliki lembaga yang berkompeten dalam melakukan penuntutan, baik penuntutan terhadap tindak pidana umum maupun penuntutan terhadap tindak pidana militer. Badan tersebut

[497] *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani Armed Force*, diunduh tanggal 5 Agustus 2021

adalah *The Public Prosecutor's Office*, yang merupakan suatu lembaga yang mengawasi penerapan undang-undang, melaksanakan penuntutan dan penyidikan, mewakili negara di pengadilan dan bertindak sebagai penggugat dalam kasus perdata, ekonomi dan administrative, serta mengajukan upaya hukum yang melawan putusan pengadilan.[498] *The Public Prosecutor's Office* merupakan bagian dari cabang peradilan yang terdiri atas Kantor Penuntut Umum Publik, Direktorat Anti Korupsi, Kantor Penuntutan Militer, Kanor Penuntut Umum Publik Republik Otonomi Nakhchyyan (NAR), Pengadilan Militer NAR"s, dan pengadilan di tingkat kabupaten dan kota.[499]

### 1.2. Hukum Acara Pidana Azerbaijan.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana militer dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Azerbaijan *(Criminal Code of Azerbaijan Republic)*, terdapat dalam Bagian XII Bab 35, tentang tindakan kriminil melawan petugas militer. Dalam *Criminal Code of Azerbaijan Republic*, diatur adanya dua kategori pelanggaran hukum militer, *Pertama*, kejahatan perang dimuat dalam Bab XVII *Criminal Code of Azerbaijan Republic*, dan kedua, tindak pidana terhadap kedinasan militer, dimuat dalam Bab XXXV Criminal Code of Azerbaijan Republic.[500] Sedangkan hukum acaranya dimuat dalam *Code of Criminal Procedure of the Azerbaijan Republic.*

Dalam *Code of Criminal Procedure of the Azerbaijan Republic*,[501] sebagai hukum acara pidana, terlihat peran Jaksa sebagai penuntut dan juga bertindak sebagai penyidik. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Jaksa

[498] Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontenporer, *Op. Cit.*, hal. 97
[499] *Ibid.*
[500] *Ibid.*, hal. 97-100
[501] *https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64892/92594/F1457735324/AZE64892*. Diunduh tanggal 6 Agustus 2021

sebagai lembaga yang berkompeten dalam melakukan penuntutan, baik penuntutan terhadap tindak pidana umum maupun penuntutan terhadap tindak pidana militer, dapat pula menggunakan wewenangnya sebagai penyidik, menugaskan atau memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Berikut ini akan diuraikan sekilas pokok-pokok kewenangan Jaksa dan penyidik dalam perkara pidana. Kewenangan Jaksa tersebut dimuat dalam Pasal 84 dan kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 85 Hukum Acara Pidana Republik Azerbaijan. Beberapa contoh lembaga Jaksa penuntut umum dan kewenangannya, sebagai berikut :

Pasal 84 Jaksa :

84.1. Dalam proses pidana, jaksa harus merujuk pada hasil penyidikan terhadap semua fakta yang terkandung dalam suatu perkara dan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang dipercayainya;

84.2. Jaksa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas berikut sesuai dengan KUHAP;

84.2.1. memeriksa permohonan dan dokumen lain terkait tindak pidana yang telah dilakukan atau direncanakan, memulai suatu perkara pidana jika sudah memiliki dasar dan bukti yang cukup, dengan demikian, dapat menggunakan wewenang penyidik, untuk melakukan penyidikan atau mendelegasikannya kepada penyidik tahap awal atau penyidik lanjutan;

84.2.2. bertanggung jawab atas prosedur penyidikan kasus;

84.3. Selama proses pra-persidangan, jaksa yang berwewenang atas prosedur penyidikan kasus bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan KUHAP. Seorang Jaksa yang telah melakukan penyidikan, bertanggung jawab atas prosedur penyidikan atau bertindak sebagai jaksa penuntut umum di pengadilan dilarang untuk menyebarkan informasi terkait hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang, keluarga atau rahasia negara, profesi, perniagaan dan informasi rahasia lainnya yang dilindungi oleh undang-undang;

84.4. Jaksa yang telah melakukan penyidikan terhadap kasus pidana atau yang bertanggung jawab atas prosedur penyidikan dilarang menghadiri persidangan sebagai jaksa penuntut umum. ;

84.5. Jaksa yang bertanggung jawab atas prosedur penyidikan wajib menggunakan hak-hak sebagai berikut dalam melakukan proses pengawasan terhadap penyidikan tahap awal dan penyidikan lanjutan:

84.5.1. memastikan bahwa pejabat penyidikan tahap awal dan penyidikan lanjutan mematuhi ketentuan hukum saat menerima, mencatat, dan memproses permohonan tuntutan dan informasi lain terkait pelanggaran hukum yang dilakukan atau direncanakan;

84.5.2. memperoleh materi dan dokumen terkait perkara pidana dan keterangan tentang perkembangan penyidikan dari penyidik tahap awal atau penyidik lanjutan, dan memeriksa materi dan dokumen perkara pidana serta mengikuti jalannya proses penyidikan;

84.5.7. memberikan instruksi tertulis kepada penyidik tahap awal atau penyidik lanjutan terkait penyidikan tindak pidana, pilihan, perubahan atau penghentian tindakan pembatasan, penggeledahan pihak yang bersalah, isi surat dakwaan, penetapan putusan dan penyidikan atau prosedur lainnya;

84.5.11. mengajukan penahanan ke pengadilan atas penahanan terdakwa sebagai tindakan pembatasan, untuk menambah masa penahanan dan dalam kasus yang telah diatur dalam Pasal 177.3 dan 444 KUHAP; dan

84.5.15. menyerahkan perkara pidana atau perkara penuntutan lainnya ke pengadilan untuk diperiksa keabsahannya.

Pasal 85. Penyidik (Beberapa contoh penyidik dan kewenangannya).

85.1. Dalam rangka penuntutan pidana, penyidik wajib menaati ketentuan undang-undang dan berdasar pada instruksi jaksa dan nilai-nilai yang dipercayainya dalam mengambil keputusan prosedur yang diperlukan dan melaksanakan penyidikan serta prosedur lainnya;

85.2. Penyidik berkewajiban melaksanakan tugas-tugas berikut sesuai dengan KUHAP:

85.2.1. memeriksa permohonan dan informasi lain yang diterima terkait pelanggaran yang dilakukan atau direncanakan, memulai proses penyidikan jika telah memiliki dasar dan bukti yang cukup, mengambil alih kasus, mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran hukum dan menyelidiki kasus secara menyeluruh, lengkap dan objektif, serta melaksanakan semua penyidikan dan prosedur lain dalam kewenangannya;

85.2.2. menjelaskan hak-hak tersangka sejak saat penahanan dan hak-hak terdakwa sejak ditetapkan menjadi terdakwa atau pada saat penangkapan, dan menjelaskan alasan penahanan, dakwaan atau uji coba masa penahanan, tergantung pada kasusnya;

85.2.7. melaksanakan perintah jaksa;

85.2.8. memberikan penjelasan tertulis dan lisan kepada jaksa dan pengadilan;

85.4. Sesuai dengan KUHAP, penyidik memiliki hak-hak berikut:

85.4.1. memperoleh dokumen dan materi lain yang mengandung keterangan terkait tindak pidana dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya;

85.4.2. menahan tersangka, meminta keterangan tersangka, korban serta saksi-saksi, meminta keterangan ahli, melakukan identifikasi dan tindakan penyidikan, seperti pemeriksaan TKP, penggeledahan TKP, penggeledahan pihak-pihak yang terlibat (termasuk pemeriksaan fisik) dan penyitaan barang bukti;

85.4.3. meminta otoritas negara untuk menyediakan juru bahasa, tenaga ahli dan profesional dan, dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, memanggil mereka untuk menghadiri prosedur

penyidikan yang tepat sebagai saksi, juru bahasa, tenaga ahli dan profesional;

85.4.4. meminta otoritas negara dan perusahaan auditor untuk melakukan inspeksi, inventarisasi, penilaian ahli dan verifikasi lainnya.

Dari cuplikan kewenangan Jaksa dan penyidik dalam perkara pidana, baik perkara umum maupun perkara militer di Negara Azerbaijan, dapat dilihat bahwa kewenangan Jaksa yang sangat dominan dan menentukan dalam penyidikan maupun penuntutan perkara pidana. Dengan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut yang professional dalam perkara pidana militer, maka proses peradilan militer dapat berjalan baik dan efektif.

**2. Negara Jepang**

Pasukan bela diri Jepang (Jietai atau Japan Self-Defense Force – JSDF) merupakan angkatan bersenjata Jepang yang didirikan setelah berakhirnya pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Pada bulan Juli 1954, Pasukan bela diri Jepang didirikan, dengan tiga cabang, yaitu; *Ground Self Defence Force (GSDF)* sebagai angkatan darat, *Maritim Self Defence Force (MSDF)* sebagai angkatan laut dan *Air Self Defence Force (ASDF)* sebagai angkatan udara. Pasukan bela diri Jepang memiliki personil 239.430 orang (data tahun 2005), yang terdiri dari 147.737 orang angkatan darat, 44.327 orang angkatan laut dan 45.517 orang angkatan udara, dan 1.849 orang pada kantor komando gabungan, serta 57.899 orang sebagai pasukan cadangan.[502]

[502] *http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Bela_Diri Jepang*, diunduh tanggal 6 Agustus 2021.

Sistem militer Jepang memiliki bentuk unik. Semua personil pasukan bela diri Jepang secara teknis adalah warga sipil. Mereka berseragam diklasifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus dan tunduk pada PNS biasa yang bekerja di Departemen Pertahanan Jepang. Tidak ada rahasia militer, hukum militer atau pelanggaran militer yang dianggap dapat dilakukan oleh seorang personil militer, baik di dalam atau di luar pangkalan militer, ketika bertugas atau di luar tugas, mengenai masalah militer atau non militer. Semua hal tersebut diputuskan dalam prosedur normal oleh pengadilan sipil dalam yurisdiksi yang sesuai.[503]

Dalam hal penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Jepang, peranan *Public Prosecutor* (Jaksa penuntut umum) memiliki pengaruh yang sangat penting, baik yang dilakukan polisi maupun dalam proses peradilan pada umumnya. *The Public Prosecutor* merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan Negara serta indepedensi profesinya dilindungi oleh undang-undang. Kedudukan lembaga penuntutan di Jepang merupakan bagian dari kementerian kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, mengajukan permohonan penerapan atas undang-undang yang telah diterbitkan oleh pengadilan, melakukan pengawasan dan eksekusi atas putusan hakim, serta kewenangan lain yang diamanatkan undang-undang. Apabila dibutuhkan, *The Public Prosecutors Offices* juga memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi lainnya yang ditujukan untuk kepentingan penyidikan.[504]

### 2.1. Lembaga Penegak Hukum Pidana. (Penuntut/ Penyidik)

[503] *Ibid.*
[504] Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontenporer, *Op. Cit.*, hal. 127

Susunan organisasi kejaksaan di Jepang terdiri atas :[505]

1) Kantor Kejaksaan Agung *(Supreme Public Prosecutors Office)* yang dipimpim oleh Jaksa Agung;

2) Kantor Kejaksaan Tinggi *(High Public Prosecutors Offices)* yang dikepalai oleh Kejaksaan Tinggi dan jumlah keseluruhan di Jepang sebanyak delapan Kejaksaan Tinggi;

3) Kantor Kejaksaan Negeri *(District Public Prosecutors Offices)* yang dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan jumlah keseluruhan di Jepang sebanyak 50 orang yang memimpin sebanyak 203 cabang Kejaksaan;

4) Kantor Kejaksaan Negeri Setempat *(Local Public Prosecutors Offices)* yang juga dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan jumlah keseluruhan di Jepang sebanyak 438.

The Public Prosecutors dapat melakukan penyidikan dan penyidikan tambahan, yakni berupa melakukan pengambilan keterangan saksi dan korban secara langsung. Apabila diperlukan, *The Public Prosecutors* dapat memerintahkan polisi untuk mendapatkan dan mengumpulkan barang bukti. Lebih lanjut, The Public Prosecutors dapat menginisiasi dan menyelesaikan proses penyidikan tanpa keikutsertaan polisi, seperti halnya terhadap kasus-kasus rumit terkait dengan penyuapan atau kejahatan finansial skala besar yang melibatkan politikus, level pimpinan kementerian, atau pengusaha eksekutif.

[505] *Ibid.,* hal. 128

Sebagaimana telah disinggung di atas, sesuai pada mandat konstitusinya, Jepang tidak memiliki undang-undang rahasia militer. Disamping itu, juga tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer, baik yang dilakukan di pangkalan militer, saat menjalakan tugas kedinasan, maupun saat yang bersangkutan menjadi anggota militer. Semua penanganan atas pelangaran yang dilakukan anggota militer di Jepang mengacu pada aturan dan prosedur perdilan sipil sesuai dengan yurisdiksinya. Oleh karena tidak adanya peradilan militer, maka setiap pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh seluruh warga Negara Jepang akan diperiksa dan diadili di pengadilan umum. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota Pasukan  Bela Diri Jepang juga akan disidangkan melalui persidangan pidana biasa dengan mengunakkan hukum acara dan undang-undang pidana. Sementara itu, apabila anggota Pasukan  Bela Diri Jepang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin, seperti halnya desersi, sanksi dijatuhkan oleh Komandan Pasukan.

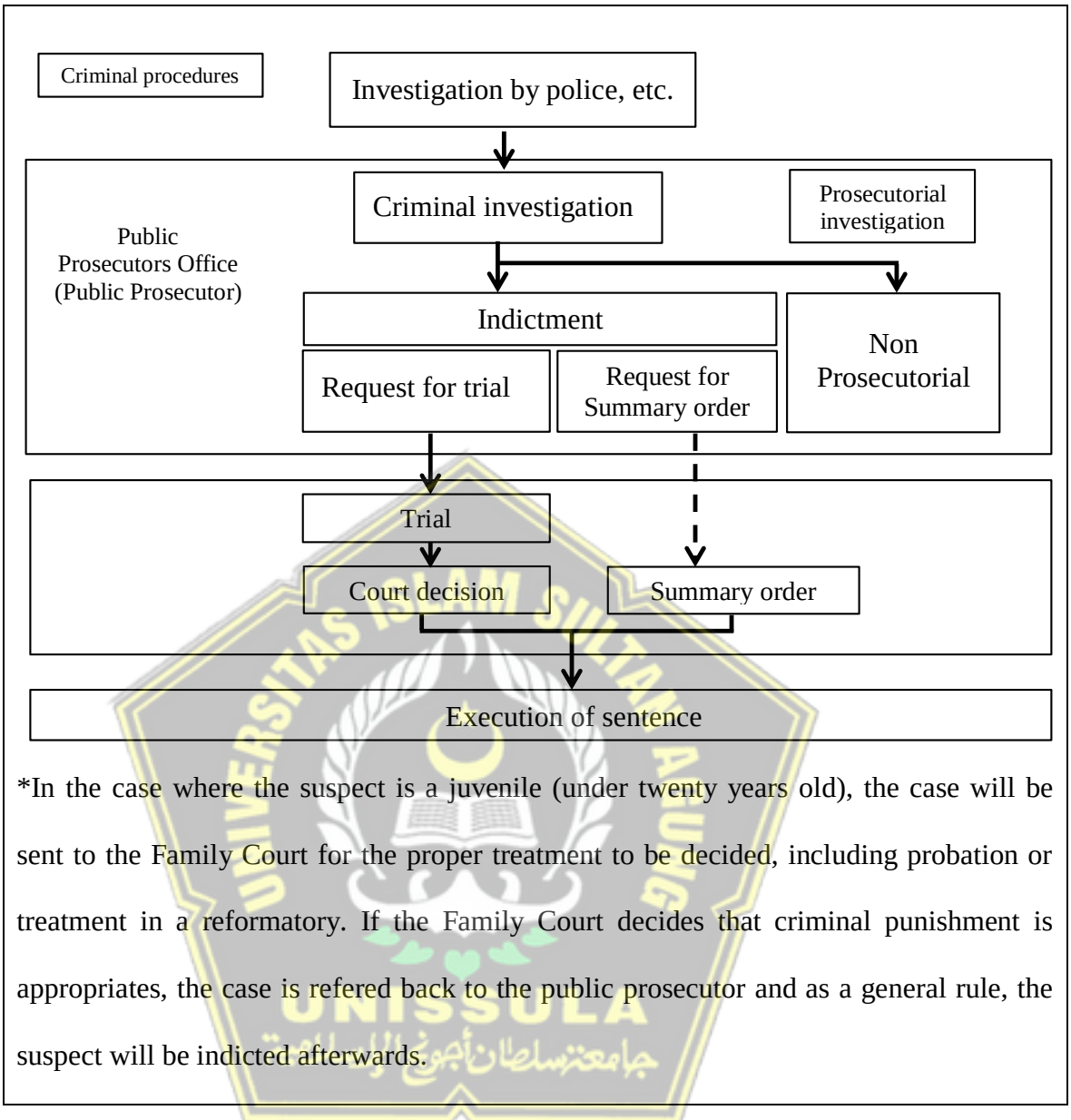
Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Pasukan Bela Diri Jepang, pada hakekatnya, kewenangan untuk melakukan penyidikan berada ditangan Polisi dan Jaksa. Oleh karena itu, setiap tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota Pasukan  Bela Diri Jepang akan disidik oleh polisi maupun jaksa.[506]

### 2.2. Proses Penanganan Perkara.

Bagan 7

Proses Penanganan Perkara Pidana di Jepang[507]

[506] Ibid.
[507] Asep N. Mulyana Hukum Pidana Militer Kontemporer, Op.Cit., hal. 129




*In the case where the suspect is a juvenile (under twenty years old), the case will be sent to the Family Court for the proper treatment to be decided, including probation or treatment in a reformatory. If the Family Court decides that criminal punishment is appropriates, the case is refered back to the public prosecutor and as a general rule, the suspect will be indicted afterwards.

Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana di Jepang, diatur dalam *Code of Criminal Procedure (Part I and Part II)*.[508] Penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bagian kedua, Bab 1 Pasal 189 sampai dengan Pasal 246, sedangkan penuntutan diatur dalam Bagian kedua, Bab 2 Pasal 247 sampai dengan Pasal 270 KUHAP Jepang.

[508] *http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3364&vm=02&re=02*, diunduh tanggal 5 Agustus 2021

Dalam KUHAP Jepang tersebut, yang menunjukkan lembaga penyidik/penuntut dan kewenangannya (penyelidikan dan penyidikan), diantaranya sebagai berikut :

Bab I : Penyelidikan dan Peyidikan.

(Beberapa contoh lembaga Polisi dan kewenangannya).

Pasal 189

(1) Petugas kepolisian menjalankan tugasnya sebagai polisi peradilan sesuai dengan ketentuan undang-undang lain, atau sesuai dengan peraturan Komisi Keamanan Publik Nasional atau Komisi Keamanan Publik Prefektur.

(2) Pejabat kepolisian peradilan harus, apabila polisi peradilan tersebut menganggap bahwa telah terjadi suatu pelanggaran, menyelidiki/ menusut pelaku dan barang buktinya.

- Jaksa (Penuntut Umum) dan Kewenangannya:

Pasal 191

(1) Penuntut umum, apabila dianggap perlu oleh penuntut umum tersebut, dapat menyelidiki/mengusut sendiri suatu tindak pidana.

(2) Pembantu penuntut umum harus menyelidiki/ mengusut tindak pidana atas perintah dari penuntut umum.

Pasal 192

Harus ada kerja sama dan koordinasi timbal balik antara Jaksa penuntut umum dan Komisi Keamanan Publik Prefektur dan Polisi peradilan mengenai suatu penyelidikan/pengusutan.

- Jaksa penuntut umum memberi petunjuk atau perintah kepada Polisi.

Pasal 193

(1) Penuntut umum, dalam wilayah hukum kejaksaan tersebut, dapat memberikan petunjuk umum yang diperlukan kepada polisi peradilan tentang penyelidikannya/ pengusutan. Instruksi tersebut diberikan dengan menetapkan standar umum penyelidikan/pengusutan yang adil dan hal-hal khusus lainnya yang diperlukan untuk keperluan penuntutan.

(2) Penuntut umum, dalam wilayah hukum kejaksaan tersebut, juga dapat mengeluarkan perintah umum kepada polisi peradilan agar mereka dapat bekerja sama dalam penyelidikan/pengusutan.

(3) Penuntut umum, jika penuntut menyelidiki/mengusut sendiri suatu tindak pidana, jika perlu, dapat mengeluarkan perintah kepada polisi peradilan dan meminta mereka membantu penyelidikan/ pengusutan tersebut.

(4) Dalam hal tiga ayat di atas, polisi peradilan harus mengikuti petunjuk dan perintah dari Jaksa penuntut umum.

- Tindakan disipliner terhadap Polisi

Pasal 194

(1) Jaksa Agung, Pengawas Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri, jika dianggap perlu, apabila polisi peradilan tidak mengikuti petunjuk dan perintah dari jaksa penuntut umum tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dapat mengajukan tuntutan tindakan disipliner terhadap atau pemecatan polisi peradilan tersebut, baik kepada Komisi Keamanan Publik Nasional maupun Komisi Keamanan Publik Prefektur dalam kasus polisi peradilan yang merupakan polisi, atau kepada orang yang memiliki wewenang tindakan disipliner atau pemecatan yang merupakan polisi peradilan selain polisi.

- Kewenangan Penyitaan

Pasal 197

(1) Berkenaan dengan penyelidikan, dapat dilakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penyelidikan tersebut; dengan ketentuan bahwa tidak dapat diterapkan disposisi wajib kecuali telah ditetapkan ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini.

(2) Kantor pemerintah atau organisasi pemerintah atau swasta dapat diminta membuat laporan mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan penyelidikan.

(3) Apabila jaksa penuntut umum, pembantu jaksa penuntut umum, atau polisi peradilan merasa perlu melakukan penyitaan atau

menyita rekaman yang dibuat berdasarkan perintah penyalinan rekaman, maka orang tersebut dapat menentukan rekaman elektronik atau magnetik yang diperlukan dari rekaman elektronik atau magnetik yang berkaitan dengan sumber transmisi, tujuan transmisi, tanggal dan waktu transmisi dan riwayat transmisi komunikasi elektronik lainnya yang direkam dalam kegiatan bisnis, dapat menentukan jangka waktu paling lama 30 hari, dan dapat meminta secara tertulis kepada orang yang terlibat dalam urusan penyediaan fasilitas untuk melakukan komunikasi elektronik untuk digunakan dalam komunikasi orang lain atau orang yang membangun fasilitas tersebut untuk melakukan komunikasi elektronik yang mampu bertindak sebagai perantara transmisi oleh orang yang banyak dan tidak ditentukan untuk keperluan urusan orang tersebut sendiri untuk tidak menghapus sejarah tersebut. Dalam hal ini, apabila dipandang tidak perlu lagi melaksanakan penyitaan atau menyita rekaman yang dibuat berdasarkan perintah penyalinan rekaman mengenai rekaman elektronik atau magnetik tersebut, maka orang tersebut harus mencabut permintaan tersebut.

- Kewenangan Penangkapan

Pasal 199

(1) Apabila terdapat cukup kemungkinan penyebab untuk menduga bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana oleh seorang tersangka, maka penuntut umum, pembantu jaksa penuntut umum atau polisi peradilan dapat menangkap orang tersebut dengan surat perintah

penangkapan yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh hakim; namun dengan ketentuan bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda tidak lebih dari 300.000 yen (20.000 yen saat ini untuk pelanggaran selain yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang tentang Hukuman Kekerasan Fisik dan Lainnya dan Undang-Undang tentang Ketentuan Pidana yang terkait dengan Kegiatan Ekonomi), penahanan pidana atau denda ringan, tersangka dapat ditangkap hanya jika tersangka tidak memiliki tempat tinggal tetap atau jika tersangka tersebut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tidak menghadap sebagaimana diatur dalam Pasal sebelumnya.

(2) Jika hakim menganggap bahwa terdapat cukup kemungkinan alasan untuk menduga bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana, maka hakim tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, atas permintaan jaksa penuntut umum atau polisi peradilan (dalam kasus polisi peradilan yang merupakan polisi, hanya orang yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional atau Komisi Keamanan Publik Prefektur dan yang berpangkat sama dengan atau di atas kepala inspektur; hal tersebut berlaku selanjutnya dalam Pasal ini); dengan ketentuan bahwa hal ini tidak berlaku jika hakim menganggap bahwa menangkap tersangka jelas tidak perlu.

(3) Dalam hal meminta surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jaksa penuntut umum atau polisi

peradilan harus memberi tahu pengadilan mengenai semua permintaan atau dikeluarkannya surat perintah penangkapan, jika ada, yang sebelumnya telah dilakukan terhadap tersangka yang sama untuk pelanggaran yang sama.

Bab II Penuntutan.

(Beberapa contoh lembaga Jaksa Penuntut Umum dan kewenangannya)

Pasal 247

Penuntutan diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 248

Apabila penuntutan dianggap tidak diperlukan karena karakter, usia, dan lingkungan pelaku, beratnya pelanggaran, dan keadaan atau situasi setelah pelanggaran, tidak perlu dilakukan penuntutan.

Pasal 249

Penuntutan tidak berlaku terhadap orang selain terdakwa yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum.

- Batas Waktu Penuntutan/Kadaularsa

Pasal 250

1) Batas waktu penuntutan berakhir setelah lewatnya jangka waktu berikut ini berkenaan dengan tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang dan terancam dengan pidana penjara tanpa pekerjaan atau hukuman yang lebih berat (kecuali bagi mereka yang terancam dengan hukuman mati);

(i) 30 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara seumur hidup tanpa pekerjaan;

(ii) 20 tahun untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama 20 tahun;

(iii) 10 tahun untuk tindak pidana selain tindak pidana yang diatur dalam dua butir sebelumnya.

(2) Batas waktu penuntutan berakhir setelah lewatnya jangka waktu berikut untuk tindak pidana selain tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang dan terancam dengan penjara tanpa pekerjaan atau hukuman yang lebih berat :

(i) 25 tahun untuk delik yang diancam dengan hukuman mati;

(ii) 15 tahun untuk delik yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara seumur hidup tanpa pekerjaan;

(iii) 10 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama 15 tahun atau lebih;

(iv) 7 tahun untuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama kurang dari 15 tahun;

(v) 5 tahun untuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama kurang dari 10 tahun;

(vi) 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama kurang dari 5 tahun atau denda;

(vii) 1 tahun untuk delik yang diancam dengan hukuman kurungan atau denda ringan.

Apabila kita cermati dari beberapa contoh pada Bab I tentang penyelidikan dan penyidikan, terutama menyangkut lembaga penyelidik dan penyidik antara Jaksa penuntut umum dengan Polisi, maka dapat dikatakan bahwa, yang mempunyai peran penting dalam penyelidikan dan penyidikan adalah Jaksa

penuntut umum, sedangkan Polisi kewenangannya atas perintah dan petunjuk dari Jaksa penuntut umum. Demikian juga pada Bab II tentang penuntutan ini, jelas peran Jaksa penuntut umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Jepang, peranan Jaksa penuntut umum sangat menentukan, baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan terhadap semua perkara pidana, sipil maupun militer.

### 3. Negara Korea Selatan

Angkatan Bersenjata Republik Korea (Daehanminguk Gukgun), adalah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Korea Selatan dan merupakan salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia, dengan kekuatan personil mencapai 3.695.000 pada tahun 2008 (655.000 aktif dan dan 3.040.000 cadangan regular). Angkatan Bersenjata Korea Selatan, terdiri atas Angkatan :

1) Daehanminguk Yukgun (Angkatan Darat);
2) Daehanminguk Haegun (Angkatan Laut);
3) Daehanminguk Haebyeongdae (Korp Marinir); dan
4) Daehanminguk Gonggun (Angkatan Udara).[509]

Dakam bidang hukum, Korea Selatan menganut *Civil Law Sistem* dan kodifikasi hukum pidananya dimuat dalam *Criminal Code Of The Republic Of Korea.* Hukum pidana Korea tidak memisahkan secara tegas antara pelanggaran dan kejahatan, sehingga dalam *Criminal code Of The Republic of Korea*, hanya

[509] *https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Bersenjata _Republik_Korea*. Diunduh tanggal 5 Agustus 2021

terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu: Buku pertama, tentang ketentuan-ketentuan umum, dan Buku kedua, tentang ketentuan-ketentuan khusus.[510]

### 3.1. Peradilan Pidana Militer Korea Selatan.

1) Kewenangan *Korean Public Prosecutor's*

Penuntut Umum Korea memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Kewenangan melakukan penyidikan merupakan suatu premis yang tidak terhindarkan atas dakwaan dan merupakan titik awal mula untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Korea, kewenangan untuk melakukan penyidikan berada di tangan penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sebagai pemimpin maupun pemeran utama dalam penyidikan tindak pidana, melakukan kontrol, dan memberikan arahan kepada polisi yang merupakan asisten dari penuntut umum.

2) Kewenangan *Minister of Justice*

Public Prosecutor merupakan lembaga eksekutif yang termasuk ke dalam tatanan Kementerian Kehakiman. Meskipun kinerja penuntut umum publik merupakan tindakan yudisial, Kementerian Kehakiman sebagai pengawas tertinggi atas Penuntut Umum mengarahkan dan mengawasi kinerja penuntut umum dalam tugas penuntutan yang bersifat umum. Bagaimanapun juga, Menteri hanya dapat memberikan arahan dan mengawasi Jaksa Agung (Prosecutor General) dengan tujuan untuk mengkhususkan kasus.

Suatu perkara yang khusus memiliki makna suatu kasus yang dihadapi hanya dapat ditangani oleh seorang penuntut umum yang khusus dan spesifik. Oleh karena itu, hanya Jaksa Agung yang dapat memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap penuntut umum dalam rangka tindakan

[510]Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontenporer, *Op. Cit.*, hal. 134

penyidikan, membuat dan mempersiapkan dakwaan, serta mempertahankan dakwaan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sejak penuntut umum masuk ke dalam kelembagaan Kementerian Kehakiman, Menteri Kehakiman merupakan pejabat yang dapat memegang tanggung jawab politik dan kinerja penuntut umum secara umum berada di bawah pengawasan Menteri Kehakiman. Sementara pada sisi yang lain, penuntut umum seharusnya terbebas dari tekanan partai politik dan lembaga eksekutif lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan Korea memberikan batasan hak terhadap Menteri Kehakiman untuk melakukan fungsinya sebagai pejabat yang melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap Penuntut Umum.

Dalam sistem penuntutan di Korea, menjadikan Jaksa penuntut umum yang memegang peran utama dalam penyidikan tindak pidana. Penuntut umum tidak hanya berperan dalam penyidikan secara langsung, tetapi juga memberikan instruksi kepada Polisi yang melakukan penyidikan. Penuntut umum merupakan otoritas pokok dan terakhir dalam penyidikan tindak pidana dan Polisi merupakan asisten dari penuntut umum. Suatu perkara yang ditangani oleh penuntut umum, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat memberikan arahan dan pengawasan terhadap penuntut umum dalam rangka tindakan penyidikan, mempersiapkan dan membuat dakwaan, serta mempertahankan dakwaan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.[511]

### 3.2. Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka proses perkara pidana di Korea, diatur dalam hukum acara *Republic of Korea: Penal Procedure Code*.[512] Lembaga penyidik dan kewenangannya diatur dalam Bagian kedua, Bab I Pasal 195 sampai dengan

[511] *Ibid*., hal. 134-135
[512] *https://www.refworld.org/docid/3ae6b5af0.html.* Diunduh tanggal 5 Agustus 2021

Pasal 245. Sedangkan tentang penuntutan diatur dalam Bab VIII tentang Penuntutan, Pasal 246 sampai dengan Pasal 265 KUHAP Korea.

Bab I Penyidikan.

(Beberapa contoh lembaga penyidik dan kewenangannya)

Pasal 195 (Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum)

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, Jaksa penuntut umum dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku, fakta-fakta dan barang bukti yang ada dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 196 (Penyidik Kepolisian)

1) Penyidik, pejabat administrasi kepolisian, pengawas kepolisian, kepala kepolisian, atau letnan kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagai penyidik polisi atas perintah jaksa penuntut umum.

2) Sersan polisi atau polisi patroli membantu penyidikan kejahatan sebagai asisten penyidik polisi dibawah perintah jaksa penuntut umum atau penyidik polisi.

3) Penyidik polisi beranggotakan orang-orang selain yang disebutkan dalam dua Ayat sebelumnya dapat diangkat menurut undang-undang.

Pasal 200 (Permohonan Kehadiran Tersangka, dan Pemberitahuan Hak Penolakan Pemberian Keterangan)

1) Jika penyidikan diperlukan, seorang jaksa penuntut umum atau penyidik polisi dapat memohon kehadiran dan keterangan dari tersangka.

2) Dalam hal permohonan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat sebelumnya, tersangka harus diberi informasi terlebih dahulu bahwa tersangka dapat menolak untuk menjawab pertanyaan.

Pasal 201 (Penahanan)

1) Apabila memiliki dasar yang kuat bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak pidana dan apabila tersangka termasuk salah satu sebagaimana dimaksud dalam Ayat Pasal 70 (1), maka jaksa penuntut umum dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan diteruskan dengan proses penahanan dengan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh hakim pengadilan yang berwenang atas permohonan jaksa penuntut umum, dan penyidik polisi dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh hakim pengadilan yang berwenang atas permohonan jaksa penuntut umum yang dimohonkan surat perintah oleh penyidik polisi: Dengan syarat, perkara tersebut tergolong tindak pidana yang dapat diancam dengan denda 50.000 Won atau kurang, penahanan atau denda ringan, penangkapan dengan penahanan tersebut hanya dapat

dilakukan jika tersangka tidak memiliki tempat tinggal tetap.

2) Dalam hal permohonan surat perintah penangkapan untuk penahanan, data yang mengkonfimasi perlunya penahanan harus disertakan.

3) Apabila hakim pengadilan negeri yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menganggap bahwa permohonan tersebut memiliki dasar yang kuat, maka hakim harus menerbitkan surat perintah penangkapan. Sebaliknya, apabila surat perintah tidak dikeluarkan, hakim harus menyebutkan intisari dan alasan penolakan dalam surat tersebut, menandatangani dan menyegel, serta mengembalikannya kepada jaksa penuntut umum yang telah membuat permohonan.

4) Apabila jaksa penuntut umum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika sebelumnya jaksa telah memohon atau menerima surat perintah penangkapan untuk penahanan atas fakta pidana yang sama, maka jaksa harus mencantumkan intisari dan alasan dalam permohonan kedua surat perintah tersebut terkait penangkapan untuk penahanan. [Pasal Ini Diubah Sepenuhnya dengan Undang-Undang No. 2450, 25 Januari 1973]

Pasal 206 (Penangkapan Mendesak)

(1) Apabila bukti yang kuat telah ditemukan yang menyatakan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati, pidana kurungan atau pidana penjara seumur hidup atau kurungan tiga tahun atau lebih termasuk dalam Pasal 70 ayat 2 dan 3, jika tidak memungkinkan untuk memperoleh surat perintah penangkapan dari hakim pengadilan negeri yang berwenang karena keadaan mendesak, jaksa penuntut umum atau penyidik polisi dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, tanpa surat perintah dengan alasan keadaan mendesak.

(2) Apabila penyidik polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penyidik polisi tersebut terlebih dahulu harus mendapat perintah dari jaksa penuntut umum: Dengan ketentuan bahwa jika tidak mungkin untuk menerima perintah terlebih dahulu karena keadaan mendesak, mereka harus tetap mendapatkan persetujuan diakhir sesaat setelah penangkapan. [Pasal Ini Diubah Sepenuhnya dengan Undang-Undang No. 2450, 25 Januari 1973]

Bab VIII tentang Penuntutan.

(Beberapa contoh lembaga Jaksa penuntut umum dan kewenangannya)

Pasal 246 (Penuntutan Umum oleh Negara)

Penuntutan umum diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 247 (Dakwaan Diskresi dan Penuntutan Umum yang Tidak Terpisahkan)

(1) Jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan umum setelah mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

(2) Penuntutan umum yang diajukan terhadap sebagian fakta dari suatu tindak pidana akan mempengaruhi keseluruhannya.

Pasal 248 (Dampak Penuntutan Umum)

Penuntutan umum tidak dapat diajukan terhadap seseorang selain terdakwa yang telah ditunjuk oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 249 (Masa Pembatasan)

1) Penuntutan umum berakhir setelah melebihi tenggat waktu sebagai berikut:

(1). Lima belas tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati;

(2). Sepuluh tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kerja paksa atau penjara seumur hidup;

(3). Tujuh tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara paling lama sepuluh tahun atau lebih;

(4). Lima tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara paling lama sepuluh tahun;

(5). Tiga tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana atau penjara untuk jangka waktu paling lama kurang dari lima tahun, atau penangguhan putusan akhir untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun atau lebih, atau denda 10.000 Won atau lebih;

(6). Dua tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan penangguhan putusan akhir untuk jangka waktu paling lama lima tahun atau lebih; dan

(7). Satu tahun untuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan penangguhan putusan akhir untuk jangka waktu paling lama kurang dari lima tahun, atau denda kurang dari 10.000 Won, penahanan, denda ringan, atau penyitaan.

2) Masa pembatasan untuk suatu tindak pidana yang bisa diajukan penuntutan umum dan tidak ada putusan akhir yang dijatuhkan, adalah lima belas tahun sejak tanggal penuntutan umum itu diajukan.

Dari perbandingan lembaga penyidik dan kewenangannya dalam peradilan pidana terhadap anggota militer, dari beberapa negara asing, seperti Azerbaijan,

Jepang dan Korea Selatan, jelas bahwa lembaga penyidik dari ketiga negara tersebut, meliputi Jaksa penuntut umum dan Polisi. Namun dapat disimpulkan secara umum bahwa, peran Jaksa penuntut umum lebih dominan, bahkan sangat menetukan dalam proses penyidikan, karena Jaksa dapat memberikan arahan, petunjuk bahkan memberi perintah kepada Polisi dalam proses penyidikan. Hal yang perlu dicatat disini, lembaga penyidik terhadap anggota militer pada ketiga negara pembanding (Azerbaijan, Jepang dan Korea Selatan), tidak ada yang melibatkan atasan dari prajurit militer yang dijadikan sebagai penyidik, kecuali Atasan atau Komandan satuannya yang memberikan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar disiplin, seperti di Jepang.

Bila dibandingkan dengan lembaga penyidik dalam perkara pidana militer di Indonesia, peranan penyidik Ankum sangat menentukan dibanding dengan penyidik Polisi Militer atau Oditur, dalam arti, bilamana Ankum tidak mau menyerahkan anggotanya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, maka Polisi Militer atau Oditur tidak bisa memaksa. Meskipun kenyataannya Ankum tidak pernah dan tidak bisa melakukan penyidikan karena tidak memiliki keahlian/ tidak professional sebagai penyidik. Dengan adanya perbandingan institusi penyidik terhadap personil militer antara (Azerbaijan, Jepang dan Korea Selatan) dengan Indonesia, maka dalam pembaharuan Hapmil di Indonesia ke depan, institusi penyidik seharusnya hanya Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik yang profesional, (tanpa Ankum sebagai penyidik). Dengan adanya hanya lembaga penyidik Polisi Militer atau Oditur dalam Hapmil, hal ini ada kemiripan dengan lembaga penyidik pada ketiga negara pembanding (Azerbaijan, Jepang dan Korea Selatan), dimana dalam KUHAP ketiga Negara pembanding tersebut, lembaga penyidik hanya Jaksa

Penuntut Umum (Dalam Hapmil: Oditur Militer) dan Polisi (dalam Hapmil: Polisi Militer).

## E. REKONSTRUKSI NILAI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN.

Bertolak dari Asas Kesatuan Komando dan kelanjutannya Asas Komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buah dan kesatuannya, yang dijadikan salah satu dasar dalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, maka dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, ditetapkan Ankum sebagai salah satu penyidik, selain penyidik Polisi Militer dan Oditur. Ankum sebagai penyidik, merupakan kekhususan dalam Hamil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, namun menyimpang dari asas profesionalisme, mengingat Ankum tidak memiliki keahlian bidang penyidikan. Selain itu, juga mengandung legal gab (kesenjangan antara rule/norma dengan praktek/ kenyataannya), artinya, secara rule/norma Ankum berfungsi sebagai penyidik terhadap anak buah di bawah wewenang komandonya, namun dalam prakteknya, Ankum selain tidak mempunyai keahlian bidang penyidikan, juga tidak pernah disumpah sebagai penyidik, sehingga hasil penyidikannya secara hukum tidak sah. Terkait dengan kewenangan Ankum sebagai penyidik ini, secara yuridis terdapat konflik norma antara Ankum dengan penyidik Polisi militer yang menyebabkan konflik kewenangan diantara kedua lembaga penyidik tersebut. Kenyataannya, dalam penyidikan perkara pidana prajurit oleh penyidik Polisi Militer, sering terjadi konflik kepentingan dimana Ankum tidak netral/cenderung membela anak

buahnya, sehingga dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara prajurit menimbulkan ketidak adilan bagi para pihak terkait.

**1. Nilai- nilai Yang Mendasari Regulasi Lembaga Penyidik.**

Nilai keadilan merupakan nilai intrinsik di dalam hukum yang harus dapat diwujudkan dalam setiap regulasi hukum. Regulasi terhadap lembaga penyidik, juga tidak lepas dari nilai dan tujuan hukum meliputi; keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.Terkait dengan regulasi penetapan Ankum sebagai penyidik, dalam Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, penulis menilai adanya ketidak adilan, mengingat ditetapkannya Ankum sebagai penyidik tidak mengandung nilai keadilan, kelayakan/ kemamfaatan dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 , ditetapkan Ankum sebagai penyidik, kemudian dalam penjelasannya, dikatakan bahwa sesuai asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, ***kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum supaya dapat menentukan nasib bawahannya yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana*** yang ***pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur***. (cetak tebal miring-pen)

Apabila kita cermati penjelasan dari Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas, nilai-nilai yang mendasari kewenangan Ankum sebagai penyidik itu bermula dari asas kesatuan komando, selanjutnya komandan bertanggung jawab kepada anak buahnya, kemudian di declair bahwa pada Ankum melekat kewenangan sebagai penyidik. Penulis menyadari, bahwa

ditetapkannya Ankum sebagai penyidik ini merupakan kekhususan dalam hukum acara pidana militer, dengan latar belakang hukum acara pidana militer yang terdahulu (sebelum Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan militer, diundangkan), dimana atasan/komandan diberi wewenang untuk memeriksa bawahannya. Namun perlu disampaikan juga bahwa, saat itu Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik di lingkungan peradilan militer masih sangat terbatas, bahkan dalam proses penyidikan awal terhadap prajurit, selain atasan juga penyidik Polisi Tentara (Polisi Militer-pen), diberi wewenang untuk memeriksa perkara pidana militer, dibawah koordinasi jaksa. Selanjutnya tahap penuntutan dan persidangan masih dirangkap oleh jaksa dan hakim sipil pada pengadilan negeri. Keadaan dahulu sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang, dimana SDM penyidik Polisi Militer atau Oditur sudah cukup dan memenuhi syarat sebagai penyidik professional, sehingga tidak perlu lagi Atasan atau Ankum dijadikan sebagai penyidik, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan asas-asas hukum, substansi hukum/ perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini.

Dari penafsiran Otentik[513], terhadap Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas, dapat diartikan bahwa " sesuai asas kesatuan komando dan Komandan bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya" maka pada Ankum melekat kewenangan sebagai penyidik dan Ankum dijadikan sebagai penyidik dengan maksud untuk ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang diproses hukum. Penafsiran demikian, sudah tentu disadari oleh pembentuk undang-undang sebagai kekhususan dalam Hapmil

[513] Penafsiran Otentik, dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri. Disebut penafsiran otentik, karena tertulis secara resmi dalam undang-undang, yang berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri. Penafsiran ini dimaksudkan agar dalam praktek hukum tidak diberikan pengertia lain dari apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. (Topo Santoso, 2020, Hukum Pidana Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, hal. 362.)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Namun dengan perkembangan ilmu hukum, asas-asas/doktrin hukum, HAM saat ini, dan dideklarasikannya Indonesia sebagai negara hukum, maka semua produk hukum masa lalu harus menyesuaikan dengan asas-asas/ doktrin hukum saat ini. Indonesia sebagai Negara hukum, maka hukum harus dijadikan sebagai panglima, artinya segala penyelenggaraan pemerintahan Negara dan tindakan aparat penegak hukum, harus berdasarkan pada ketentuan hukum bukan berdasarkan pada figur-figur tertentu. Sebaliknya figur-figur harus menjadi pelopor dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Demikian juga, dengan Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, sebagai hukum acara yang merupakan produk hukum masa lalu, harus menyesuaikan dengan asas-asas hukum dan nilai-nilai keadilan yang actual saat ini, agar hak-hak tersangka dan para pihak terlindungi oleh hukum. Demikian juga, kewenangan aparat penegak hukum dibatasi sesuai standar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang/Hapmil.

Dengan berorientasi kepada asas-asas hukum dan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap HAM, persamaan di depan hukum, dan prinsip-prinsip negara hukum, maka regulasi Ankum sebagai penyidik perlu dilakukan pembaharuan. Pembaharuan regulasi Ankum sebagai penyidik, harus memenuhi nilai dan tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum, dengan aplikasi orientasinya sebagai berikut;

Pertama, Ankum sebagai penyidik merupakan kelanjutan dari nilai-nilai asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya. Dengan kata lain, dari “asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya”, kemudian dimaknai bahwa pada komandan/Ankum melekat kewenangan sebagai penyidik. Orientasi

penafsiran seperti ini, pada saat Hapmil Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 diundangkan, mungkin tidak dipersoalkan, tapi penafsiran dalam kontek saat ini tentu terdapat pergeseran makna dan orientasi.

Menurut penulis, apabila dicermati dari bunyi Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, tidak terlepas pada 'kontek penegakan hukum terhadap prajurit TNI". Jika "penegakan hukum terhadap prajurit TNI" dalam kontek saat ini, maka pemaknaan terhadap nilai "asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya" menjadi "tidak tepat" bila dimaknai/diartikan bahwa, "pada Ankum melekat kewenangan penyidikan" terhadap anak buahnya, sehingga Ankum dijadikan sebagai penyidik terhadap anak buahnya. Dengan kata lain, secara logika hukum, pemaknaan asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab penuh kepada satuan dan anak buahnya, dalam kontek saat ini "tidak tepat" bila dimaknai bahwa, "pada Ankum melekat kewenangan melakukan penyidikan kepada anak buahnya". Alasannya, Pejabat penyidik merupakan lembaga dari badan yustisi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum pidana (penyidikan) dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, yaitu, keseluruhan kekuasaan kehakiman dibidang penegakan hukum pidana, diwujudkan/ diimplementasikan dalam empat tahap kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana), yang merupakan satau kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah "sistem peradilan pidana yang terpadu". Kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana, meliputi; "kekuasaan

penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili" dan "kekuasaan eksekusi pidana".[514].

Kekuasaan kehakiman bidang penegakan hukum pidana (penyidikan) sebagaimana dijelaskan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman; dan
(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 38 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi: Yang dimaksud dengan "badan-badan lain", antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Dari penjelasan dan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 di atas, lebih jelas lagi bahwa, lembaga penyidik atau pejabat penyidik itu merupakan badan yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan badan tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, advokad dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan badan/lembaga kepolisian, kejaksaan,

[514] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Op. Cit.*, hal. 34-35.

advokat dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa lembaga penyidik Ankum dalam Hapmil Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak termasuk dalam pengertian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, ke depan lembaga Ankum sebagai penyidik perlu direkonstruksi. Selanjutnya lembaga penyidik dalam sistem peradilan militer, selayaknya dijabat oleh pejabat dari lembaga/badan yustisi seperti Polisi Militer dan/atau Oditur yang selaras dengan asas profesionalitas[515]. Artinya kewenangan penyidikan seharusnya diberikan secara atributif kepada pejabat dari lembaga/badan yustisi yang memiliki keahlian/profesionalitas bidang penyidikan, seperti Polisi Militer atau Oditur. Sedangkan Ankum yang merupakan organik satuan TNI, ditempatkan secara profesional pada tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan satuan dan sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dalam satuannya.

Setelah lembaga Ankum bukan sebagai penyidik, kemudian Ankum focus bertugas sebagai penyelenggara pembinaan satuan dan sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dalam satuannya, maka dalam kontek "penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI", maka pemaknaan/ pengertian saat ini terhadap nilai-nilai dalam "asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya", dihadapkan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit bawahan Ankum, maka harus dimaknai/diartikan

[515] Muhammad Risqi Abdulloh, Asas Profesionalitas, Asas Profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tetang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 3 poin ke 6. https://id.scribd.com/doc/111429311/Asas-Profesionalitas. Dunduh tanggal 12 Nopember 2021.

bahwa “kewenangan penyidikan dimiliki dan dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur”. Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polisi Militer dan/ atau Oditur, sebagai manifestasi dari pelimpahan wewenang penyidikan dari Panglima sebagai Ankum tertinggi, kepada Polisi Militer atau Oditur. Selanjutnya sebagai “bentuk tanggung jawab” dari komandan/Ankum atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya, maka komandan/Ankum harus berkomitmen “demi penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum serta nilai-nilai demi keadilan”, Ankum memastikan anak buahnya diproses hukum dengan melimpahkan penyidikannya kepada penyidik yang berwenang dan professional, yaitu Polisi Militer dan/ atau Oditur, (bukan Ankum menyidik sendiri anak buahnya).

Alasan lain, bahwa Ankum tidak perlu dijadikan sebagai penyidik, yaitu; apabila Ankum melakukan penyidikan sendiri terhadap anak buahnya, maka diragukan komitmen Ankum akan bertindak adil, tidak memihak atau tidak membela anak buahnya. Oleh karena itu, jika Ankum melakukan sendiri penyidikan terhadap anak buahnya, dapat dikatakan tidak memenuhi nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Tidak memenuhi nilai keadilan, karena Ankum bekerja tidak sesuai dengan keahliannya dan menyimpang dari asas profesionalitas. Tidak memenuhi nilai kemamfaatan, mengingat Ankum bukan penyidik yang sebenarnya karena Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik, maka hasil penyidikan Ankum tidak sah, sehingga tidak ada mamfaatnya. Tidak memenuhi nilai kepastian hukum, karena Ankum secara atributif dijadikan penyidik, tetapi kenyataannya Ankum tidak pernah melakukan penyidikan, sehingga tidak ada kepastian hukum. Demikian juga, kalau dikatakan bahwa, Ankum dijadikan penyidik sebagai kekhususan dalam Hapmil dan untuk kepentingan pertahanan negara, maka sama artinya dengan

kewenangan Polisi Militer atau Oditur menjalankan tugas penyidikan terhadap prajurit TNI atas limpahan wewenang penyidikan dari Panglima TNI sebagai Ankum tertinggi. Dengan demikian penyidik Polisi Militer atau Oditur mempunyai kekhususan untuk menangani perkara pidana prajurit demi untuk kepentingan pertahanan negara, mengingat Ankum dengan Polisi Militer atau Oditur sama-sama prajurit TNI dalam kesatuan komando, yang menerima perintah tugas dari Panglima TNI.

Kedua, dalam penjelasan Pasal 69 (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, "Ankum dijadikan sebagai penyidik dengan maksud untuk ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang diproses hukum". Penafsiran terhadap kalimat "Ankum dijadikan sebagai penyidik dengan maksud untuk ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang diproses hukum", menimbulkan banyak tafsir atau praduga yang macam-macam. Apabila yang menjadi alasan atau ratio legis dari regulasi ditetapkannya Ankum sebagai penyidik adalah untuk ikut menentukan nasib anggotanya yang sedang diproses hukum, maka Ankum berpotensi menyalahgunakan wewenangnya, tidak netral, berpihak kepada anak buah/cenderung membela anak buahnya dan berpotensi akan intervensi/turut campur tangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atau Oditur. Adanya intervensi dan keberpihakan penyidik Ankum kepada anak buahnya, sudah pasti akan menimbulkan proses penyidikan tidak berjalan dengan baik dan mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Mengabaikan nilai-nilai keadilan, sama artinya dengan perbuatan tidak adil yang berorientasi haya pada kepentingan sendiri/kelompok, atau memihak pada kepentingan - kepentingan tertentu yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Nilai keadilan harus berorientasi kepada kepentingan dan

kemamfaatan bersama, yang dapat memenuhi harapan bersama, menempatkan hak-hak dan perlindungan individu sesuai dengan prestasi masing-masing. Tindakan yang tidak adil sangat dicela baik dalam ajaran agama maupun dalam hukum positif.

**2. Nilai Keadilan Dalam Regulasi Lembaga Penyidik.**

Berbicara tentang nilai-nilai keadilan, yang terkait dengan pembahasan ini, hendaknya kita memperhatikan nilai-nilai keadilan, baik nilai keadilan menurut perspektif agama Islam, keadilan menurut pandangan dari para ahli hukum atau filsuf, khususnya seperti Plato dan Aristoteles, maupun keadilan menurut Pancasila, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Nilai atau makna keadilan dalam perspektif agama Islam: Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman. Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, adil dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu

dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya". Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagian dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Demikian juga makna keadilan bagi Plato. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan *"Giving Each Man His Due"* yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Bagi Plato suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bertalian erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Selanjutnya, makna nilai keadilan, menurut pandangan Aristoteles. Aristoteles menyebut bahwa keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang di sekitar. Hal demikian dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain, dengan kata lain ada manfaat bagi

orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini harus terinternalisasi sebagai sikap hidup dan perilaku setiap individu-individu yang akhirnya terbentuk sebuah perilaku kebajikan dalam masyarakat. Dalam lingkup yang lebih besar, kebajikan individu ini akan mempengaruhi kebajikan negara dalam tata kelola kehidupan bersama. Dalam kaitan ini, Aristoteles menyebutkan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih banyak dari bagiannya dan mementingkan diri sendiri. Orang yang mengambil terlalu banyak untuk dirinya sendiri adalah orang yang lalim.

Demikian juga, makna keadilan dalam Pancasila, makna dari kata adl/ adil diartikan sebagai sikap seimbang atau tepat. Kemanusiaan yang adil (pada Sila II) dapat dipahami sebagai prinsip memperlakukan manusia secara sama, sederajad, tanpa perbedaan. Selanjutnya pada Sila V, keadilan sosial menekankan asas, bahwa semua penduduk hendaknya memperoleh persamaan perlakuan dalam berbagai bidang kehidupan.[516]

Dari beberapa pemaknaan dari kata adil seperti di atas, dapat ditarik benang merahnya, bahwa adil atau keadilan, bermakna sama/kesamaan. Seseorang itu dikatakan adil, apabila orang tersebut memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Adil juga berarti seimbang, yang berarti keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Adil juga berarti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan juga merupakan prinsip memperlakukan manusia secara sama, sederajad, tanpa perbedaan. Dari makna adil atau keadilan tersebut, timbul nilai-nilai keadilan seperti persamaan,

[516] Ilham Khoiri (Wartawan Kompas), Kolom Bahasa, Kata Arab Dalam Pancasila, Harian Kompas, Selasa, 9 Nopember 2021, hal. 5.

keseimbangan, kesesuaian/proporsional, sederajad tanpa perbedaan dan pengakuan/ memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

Berkaitan dengan nilai- nilai keadilan tersebut di atas, bila diaplikasikan dengan konstruksi lembaga penyidik Ankum dalam Pasal 69 (1) a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 saat ini, penulis berpendapat bahwa lembaga Ankum sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan, dalam arti tidak adanya kesesuaian atau proporsionalitas, bila Ankum dijadikan sebagai penyidik, karena Ankum tidak memenuhi syarat sebagai penyidik, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 201, sebagai keabsahan penyidik dan penyidik pembantu di lingkungan peradilan militer. Disamping itu, Ankum dijadikan sebagai penyidik, maka Ankum tidak akan dapat menghadirkan rasa keadilan kepada para pihak, mengingat terdapat konflik kepentingan antara Ankum dengan tersangka/anak buahnya. Konflik kepentingan antara Ankum (sebagai atasan sekaligus sebagai penyidik) dengan anak buahnya sendiri yang membuat Ankum tidak dapat berlaku adil kepada semua pihak. Ankum tidak akan bisa bertindak netral/tidak memihak. Keadaan obyektif seperti ini membuat Ankum sulit bertindak adil, memperlakukan sama kepada setiap orang, tanpa membeda bedakan orang, sehingga lembaga penyidik Ankum perlu di rekonstruksi.

### 3. Rekonstruksi Nilai Lembaga Penyidik Berbasis Nilai Keadilan.

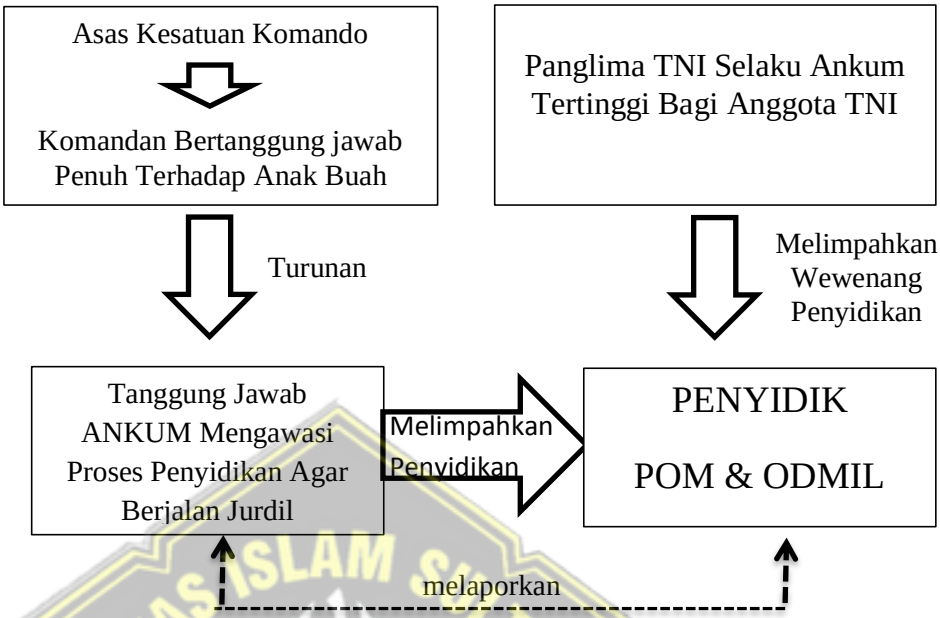
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa diantara tiga lembaga penyidik di lingkungan peradilan militer, yaitu Ankum, Polisi Militer dan/atau Oditur. Lembaga Ankum sebagai penyidik saat ini dipandang tidak dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan kepada para pihak, maka untuk mendorong agar penyidik di lingkungan peradilan militer dapat melakukan penyidikan berbasiskan nilai keadilan, sebaikya Ankum tidak lagi ditetapkan sebagai penyidik, agar tidak terjadi konflik kepentingan, selanjutnya penyidik cukup Polisi Militer dan Oditur. Untuk menjaga keseimbangan dan guna mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam proses penyidikan prajurit TNI, maka sebaiknya ke depan Ankum berperan sebagai pengawas penyidikan. Artinya, Ankum sebagai pengawas penyidikan atas anak buahnya, yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, agar penyidikan dilakukan secara profesional, cepat, serta dapat menghadirkan nilai keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, untuk mewujudkan penyidikan yang professional dengan berbasiskan nilai-nilai keadilan, maka harus ada perubahan pemaknaan nilai-nilai dari asas komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sebagaimana berikut ini;

Dari ketentuan Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, sebagaimana tersebut dalam Bagan 1 pada Bab III di atas, selanjutnya rekonstruksinya dapat digambarkan dalam skema/bagan sebagai berikut :

Bagan 8

Rekonstruksi: Semula Sumber Kewenangan Ankum Sebagai Penyidik

(Dalam UU No 31/1997 Pasal 69 (1) dan Penjelasanya)
Menjadi Ankum sebagai pengawas penyidikan




Dalam Asas Kesatuan Komando mengandung makna bahwa, seorang Komandan/Ankum mempunyai kewenangan untuk mengatur/mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan kesatuan dan anak buahnya, agar tugas-tugas pokok satuan tercapai. Selanjutnya Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Dalam pengertian ini, Komandan dapat berperan dan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih terhadap anak buahnya, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Rekonstruksi nilai dengan pemaknaan kembali dalam "kontek saat ini" terhadap nilai-nilai dalam asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya (telah dijelaskan di depan). Agar tidak mengulang hal yang sama, akan dijelaskan intinya saja, bahwa dari asas-asas tersebut di atas, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh

anggota militer bawahan dari Ankum, maka Ankum harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara prajurit bawahannya. Sebagai bentuk tanggung jawab Ankum/ Atasan terhadap penyelesaian perkara anak buahnya tersebut, Ankum wajib menyerahkan proses penyidikannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang dan profesional, yaitu penyidik Polisi Militer atau Oditur. Selanjutnya, Ankum berpartisipsi secara aktif mendorong penyidik dengan cara kooperatif membantu penyidik untuk terlaksananya penyidikan berjalan lancar dan cepat. Selanjutnya Ankum mengawal dan mengawasi jalannya penyidikan agar penyidikan berjalan jujur, adil, transparan dan cepat, sehingga penyidikan dapat mewujudkan rasa keadilan.

Peran serta Ankum dalam proses penegakan hukum (penyidikan) sebagaimana dijelaskan di atas, akan paralel dengan pemahaman bahwa, seorang komandan/Ankum sebagai figur pemimpin kesatuan dan anak buahnya, wajib menjadi contoh dan tauladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap kesatuan dan anak buahnya, maka dalam penegakan hukum terhadap anak buahnya, sudah selayaknya Komandan/Ankum turut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, dengan menyerahkan/melimpahkan anak buahnya yang bersalah melakukan tindak pidana untuk diproses hukum oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur. Ankum beserta stafnya mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk kepentingan proses hukum anggotanya dengan mengawal/mengawasi proses penyidikan terhadap anak buahnya, agar berjalan sesuai aturan hukum acara yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari penyidikan, selanjutnya penyidik Polisi Militer/Oditur harus melaporkan hasil penyidikannya kepada Ankum tersangka. Ankum sebagai figur satuan harus tetap mendorong ditegakkannya hukum terhadap siapapun juga tanpa

pandang bulu, termasuk anggotanya sendiri, sehingga diharapkan kesadaran hukum prajurit meningkat dan sebaliknya pelanggaran hukum prajurit dapat diminimalisir.

Proses penyidikan sebagaimana digambarkan di atas, juga tidak lepas dari asas kepentingan militer, dimana untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dimana kepentingan militer harus didahulukan. Hal ini merupakan kekhususan dari hukum acara di lingkungan peradilan militer untuk kepentingan pertahanan Negara.

Dengan adanya rekonstruksi lembaga penyidik Ankum ini, diharapkan akan mewujudkan nilai keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum di lingkungan TNI nantinya. Wujud keadilan manifestasinya, berupa lembaga penyidik dalam sistem peradilan militer adalah Polisi Militer atau Oditur yang telah memenuhi syarat sebagai penyidik, sesuai ketentuan dalam Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011, sebagai keabsahan sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer. Penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak mempunyai konflik kepentingan, akan bertindak netral/ tidak memihak dan dapat bekerja secara professional, sehingga diharapkan dapat menghadirkan nilai keadilan. Wujud kemanfaatan, Penyidik Polisi Militer atau Oditur sebagai penyidik professional, akan menghasilkan produk penyidikan yang memenuhi syarat materiil dan formil, dengan tempo penyidikan yang cepat dan lancar, sehingga sangat bermanfaat dalam percepatan

penyelesaian perkara prajurit. Wujud kepastian hukum, dengan Penyidik Polisi Militer atau Oditur, maka tidak ada lagi konflik norma dan legal gab dalam aturan hukum dan praktek penyidikannya. Aturan hukumnya jelas, lembaga penyidiknya kompeten dan produk penyidikannya valid/ sah dapat diterima dalam peradilan militer, sehingga menjamin kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara prajurit TNI.

Rekonstruksi terhadap lembaga penyidik Ankum dalam sistem peradilan militer ini, juga dipengaruhi oleh studi perbandingan lembaga penyidik yang berwenang terhadap personel militer, di 3 (tiga) Negara asing, yaitu Negara Azerbaijan, Jepang dan Korea selatan, dimana lembaga penyidik yang berwenang menyidik anggota militer di tiga negara tersebut, terdiri dari Jaksa dan Polisi/Polisi Militer. Dari studi perbandingan tersebut, dapat menambah wawasan bahwa tidak semua negara, termasuk negara yang relatif maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang juga terdapat peradilan militer untuk anggota militernya, dalam hukum acara pidana militernya tidak menetapkan atasan prajurit (Ankum) menjadi lembaga penyidik terhadap anak buahnya.

Dari rekonstruksi lembaga penyidik berbasis nilai keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka lembaga penyidik dalam sistem peradilan militer ke depan, diharapkan akan semakain kredibel dan profesional, guna mewujudkan peradilan militer yang maju dan modern.

## F. REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer/Hapmil, dari perspektif struktural, substansi dan kultural sangat penting dibangun sebuah sistem peradilan militer yang menjamin *due process of law*,[517] yang merupakan *codition sine quanon* bagi perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due proses of law), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).[518] Oleh karena itu, Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang saat ini berlaku di lingkungan peradilan militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) juga harus menjamin *due process law*. Guna menjamin *due process law* tersebut, maka Hukum Acara Pidana Militer yang berlaku saat ini harus disempurnakan dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan dan asas-asas negara hukum Indonesia yang berdasarkan

[517] Menurut Marjono Reksodiputro, menyatakan bahwa istilah due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (due process of law) menurut Marjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak dan kemerdekaan dari seseorang warga negara. Selanjutnya menurut Andi Hamzah, juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membeda-bedakan orang, artinya hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa. Dikutip dari Laporan penelitian Due Process Of Law Dalam KUHAP Di Indonesia, oleh Diah Ratna Sari Hariyanto, Kadek Erlina Wijayanthi dan Febripusoa Surya Candra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,Januari2017.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/bdab235797398bb7613a0cb31889994d.pdf Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.

[518] Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, hal 50)

Pancasila, namun tetap memperhatikan kepentingan TNI/militer dan kepentingan pertahanan negara dalam asas kesatuan komando.

**1. Asas Hukum yang Mendasari Rekonstruksi.**

Dalam Hapmil Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Mililiter, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf a (penyidik Ankum dan penjelasannya), dan Pasal 74, tentang kewenangan Ankum yang menjadi pokok bahasan ini. Dalam bahasan ini, fokus pada rekonstruksi lembaga penyidik (khususnya penyidik Ankum), dan kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, sedangkan penyidik Polisi Militer dan Oditur serta kewenangannya tidak ada masalah, sehingga tidak dibahas. Masalah yang perlu dibahas sebagai berikut;

*Pertama*, dari aspek struktural. Lembaga penyidik Ankum dalam Pasal 69 (1) huruf a, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, perlu untuk direkonstruksi, dengan alasan (secara empiris) sebagai berikut :

a. Ankum atau Komandan Satuan (Dansat) sejatinya adalah organik satuan TNI yang berfungsi sebagai pembina satuan dan penegak hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan satuannya, sebenarnya bukan sebagai organ yudisiil yang berfungsi sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer;

b. Ankum dijadikan sebagai penyidik, dengan alasan sebagai konsekuensi dari asas kesatuan komando dan komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buah dan kesatuannya. Dari asas tersebut kemudian di declair bahwa pada komandan/ Ankum melekat kewenangan sebagai penyidik, dan Ankum dijadikan sebagai penyidik dengan maksud, agar dapat ikut

menentukan nasib anak buahnya yang sedang diproses hukum. (telah dijelaskan pada bab sebelumnya), yang pada intinya terhadap asas ini, dalam kontek kekinian secara logika hukum sudah tidak tepat dan menyimpang dari asas profesioalitas;

c. Sepanjang berlakunya Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, dalam pelaksanaan penyidikan, Ankum tidak pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka (anggota bawahan Ankum). Dalam pelaksanaan penyidikan Ankum melimpahkan kepada penyidik Polisi Militer/Oditur;

d. Dari aspek profesionalisme penyidik, faktanya Ankum tidak bisa melakukan penyidikan karena Ankum tidak memiliki keahlian bidang penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik, sehingga kalaupun Ankum melakukan penyidikan, maka hasil penyidikannya tidak sah secara hukum (telah dijelaskan pada bab sebelumnya);

e. Ankum sebagai penyidik terhadap anak buah di bawah komandonya, tidak bisa menjamin independensi dalam penyidikan. Sering terjadi Ankum tidak netral dan cenderung membela anak buahnya, sebaliknya terjadi pula, Ankum menghendaki agar bawahannya yang melakukan tindak pidana ringan sifatnya, seharusnya diselesaikan secara hukum disiplin, tapi Ankum melimpahkan perkara bawahannya tersebut kepada penyidik Polisi Militer. (telah dicontohkan dalam Bab IV tentang perkara Koptar Viria Putera Yumansah, Yontar Remaja Mentar Akmil di atas); dan

f. Terdapat konflik norma yang berakibat konflik kewenangan antara Ankum dengan penyidik Polisi Militer atau Oditur, sebagaimana telah disampaikan pada bahasan terdahulu.

(Agar tidak mengulang, untuk melengkapi alasan rekonstruksi lembaga Ankum sebagai penyidik, dapat dilihat juga pada uraian tentang nilai- nilai yang mendasari regulasi lembaga penyidik pada sub bab sebelumnya).

*Kedua,* aspek substansi hukum. Kewenangan Ankum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa; Ankum mempunyai wewenang : a) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang berada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, b) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur, c) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur, dan d) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. Substansi Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini perlu direkonstruksi, karena tidak menunjukkan profesionalitas kewenangan penyidik dan tidak mengandung nilai-nilai keadilan.

Kewenangan Ankum sebagaimana pada Pasal 74 huruf a, terkait dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan penjelasannya (khusus yang menyangkut pelimpahan kewenangan penyidikan). Pada intinya, bahwa kewenangan penyidikan pada Ankum, dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya ***dilimpahkan*** (ditebalkan/miring - pen) kepada penyidik Polisi Militer dan atau Oditur. Artinya bahwa Ankum melimpahkan kewenangan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Masalah arti dan

makna pelimpahan kewenangan penyidikan dan akibat hukumnya, perlu ditelusuri sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Dalam literatur hukum administrasi, dikenal adanya sumber-sumber kewenangan. Agar tidak mengulang hal yang sama tentang pengertian dan sumber kewenangan yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III sebelumnya, maka dalam bahasan ini akan dijelaskan pokok-pokoknya saja tentang sumber-sumber kewenangan dan implikasinya. Seperti telah diketahui bahwa, wewenang tidak dengan sendirinya melekat pada suatu jabatan, seperti yang disampaikan oleh Donald E. Erickson yang menyatakan :

> "*An administrative agency has no inhernt power. Any authority agencies may have is vested in them by statute or by constitution. Administrative determinations are enforceable onlu in the manner provided by statute. The power and authority to be exercised by administrative agencies must be granted by clear and unmistakable statutory language since a doubtful power does not exist, and an express grant of power is subject to astrict interpretation*".
>
> (Badan pemerintahan tidak memiliki wewenang yang melekat padanya. Setiap badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan harus diberikan dengan bahasa

yang jelas dan tidak diragukan karena tidak ada wewenang yang ragu-ragu, dan pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang ketat).[519]

Selanjutnya, menurut Rene Seerden dan Frits Stroink bahwa, wewenang dapat diperoleh secara atribusi (*attribution*) atau delegasi (*delegation*). Atribusi berarti memberikan kewenangan asli, sementara delegasi berarti orang yang telah diberikan kewenangan asli tersebut oleh ketentuan undang-undang diberikan kewenangan untuk memindahkan atau mendelegasikan semua atau sebagian dari kewenangannya kepada orang lain. (*attribution means granting original power, delegation means that the organ witch has been granted the original power is authorized by law to tranfer (delegate) all or some of its power to another organ*). Oleh karena itu, pada delegasi dipersyaratkan adanya dasar hukum dalam ketentuan undang-undang.

Jadi, atribusi adalah wewnang yang diberikan yaitu diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu jabatan. Sedangkan delegasi adalah peralihan wewenang dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya. Kesimpulannya, dalam delegasi terjadi penggantian pemilik wewenang dari pemberi delegasi (*delegator*) kepada penerima delegasi.[520]

Berbeda dengan mandat. Mandat berarti perintah tugas. Dalam mandat, penerima mandat (*mandatory*) menjalankan perintah atau tugas dari pemberi mandat. Dengan demikian, tidak ada peralihan kewenangan.[521]

[519] A an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, *Loc. cit*, hal. 112.
[520] *Ibid.*
[521] *Ibid.*

Terkait dengan sumber kewenangan yang diperoleh dari delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang disebut delegataris.[522] Menurut Philipus M. Hadjon, ada 5 (lima) syarat delegasi :

1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan.
2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan
5) Adanya peraturan kebijakan untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[523]

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan pengertian; atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 angka 22), selanjutnya delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih

[522] Dewa Gede Atmaja, 2018, Teori- Teori Hukum, Malang, Setara Press, hal. 157-158.
[523] *Ibid.*

tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (pasal 1 angka 23), sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (pasal 1 angka 24).[524]

Dari pengertian delegasi dalam literatur hukum admiistrasi negara tersebut di atas, maka dalam hal delegasi kewenangan penyidikan dari Ankum kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, (sebagaimana dalam Pasal 69 (1) a dan penjelasannya dan Pasal 74 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer), maka Ankum sebagai penyidik sejatinya sudah tidak bisa lagi menggunakan wewenang penyidikan kepada anak buah dibawah wewenang komandonya, karena telah melimpahkan wewenang penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Dengan kata lain, Ankum praktis tidak bisa melakukan penyidikan apapun terhadap anak buahnya. Konsekuensinya, Ankum tidak bisa melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1), tetapi yang melaksanakan ketentuan Pasal 71 (1) ini penyidik Polisi Militer atau Oditur. Konsekuensi selanjutnya, apabila ketentuan "delegasi wewenang penyidikan" dari Ankum kepada penyidik Polisi Militer/Oditur dipatuhi, maka konflik norma yang menimbulkan konflik kewenangan dalam pelaksanaan penyidikan antara Ankum dengan penyidik lainnya, seharusnya tidak perlu terjadi, karena Ankum seharusnya menyerahkan atau melimpahkan anak buahnya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer/Oditur, meskipun dalam ketentuan Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak ada keharusan Ankum wajib

[524] A an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, *Loc. cit*, hal. 112.

menyerahkan anak buahnya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Terkait dengan ketentuan Pasal 71 (2) huruf a, dimana penyidik Polisi Militer berwenang menjalankan perintah Ankum untuk menahan tersangka (bawahan Ankum). Ketentuan ini, bila kita menggunakan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal dalam Hapmil itu, khususnya antara pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), terdapat ambigu atau tidak mengandung kepastian hukum. Disatu sisi Ankum melimpahkan kewenangan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer, disisi lain Ankum masih memegang kekuasaan/ kewenangan penahanan terhadap tersangka. Meskipun dilihat dari hukum administrasi hal ini masih dibolehkan, tetapi hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa kewenangan penahanan tersebut, masuk dalam lingkup wewenang penyidikan yang sudah dimiliki oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Masalah wewenang penahanan terhadap tersangka, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perlu tidaknya tersangka itu ditahan untuk kepentingan penyidikan, dengan pertimbangan obyektif maupun subyektif, yang tahu betul adalah penyidik yang langsung menangani penyidikan terhadap tersangka, yaitu penyidik Polisi Militer/Oditur. Bukan penyidik Ankum. Dengan demikian, ke depan kewenangan penahanan terhadap tersangka ini perlu direvisi, agar penyidik Polisi Militer/ Oditur harus diberi kewenangan penahanan terhadap tersangka.

**2. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Berbasis Nilai Keadilan.**

Dari pengertian delegasi sebagaimana diuraikan di atas, maka pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang penyidikan dari penyidik Ankum kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, maka mempunyai implikasi hukum bahwa, kewenangan penyidikan di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur. Penyidik Polisi Militer atau Oditur selain menerima pelimpahan kewenangan penyidikan dari Ankum, juga menerima pelimpahan kewenangan penyidikan dari Panglima TNI sebagai Ankum tertinggi (sebagaimana penjelasan Pasal 69 (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 31Tahun 1997). Dengan demikian, dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-undang Nomor 31Tahun 1997 ke depan, harus dilakukan rekontruksi lembaga penyidik dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a ini, yaitu dengan cara tidak perlu lagi menetapkan Ankum sebagai penyidik. Selanjutnya lembaga penyidik cukup Polisi Militer dan Oditur yang menjadi penyidik di lingkungan peradilan militer. Alasannya, Ankum tidak memiliki kredibilitas sebagai penyidik dan tidak menjamin *due process of law*, karena Ankum tidak dapat menjalankan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Sedangkan penyidik Polisi Militer atau Oditur telah mengikuti pendidikan penyidikan dan disumpah sebagai penyidik, sehingga menjadi penyidik yang professional. Disamping itu, penyidik Polisi Militer atau Oditur sebagai organik militer/ pejabat badan yudisiil di lingkungan TNI, yang menerima pelimpahan wewenang penyidikan dari Panglima TNI selaku Ankum tertinggi.

Pejabat penyidik Polisi Militer atau Oditur telah ditetapkan oleh undang-undang dan telah dibekali pengetahuan dengan berbagai peraturan atau Keputusan Panglima TNI sebagai Ankum tertinggi, maupun peraturan atau keputusan dari para Kepala Staf Angkatan dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan tugas dan fungsi penyidikan dalam sistem peradilan militer, sehingga tidak perlu dikuatirkan lagi bahwa penyidik Polisi Militer atau Oditur belum memahami tugas dan fungsi penyidikan dihadapkan dengan kepentingan hukum, kepentingan militer, dan kepentingan pertahanan Negara, dalam asas kesatuan komando.

Selanjutnya, bagaimana dengan Pasal 69 (2) huruf a, b, c dan d tentang penyidik pembantu? Penyidik pembantu tersebut terdiri dari provos angkatan (provos TNI AD, AL, AU) dan Polri (provos Polri sudah tidak lagi menjadi penyidik pembantu, sejak Polri pisah dengan TNI). Tentang provos angkatan sebagai penyidik pembantu ini, pendapat penulis juga harus dihapus. Alasannya, pertama, provos angkatan itu kenyataannya tidak pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka anggota TNI organik satuannya, karena provos hanya memiliki kemampuan penyidikan terbatas, tidak pernah sekolah penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Kedua, provos angkatan merupakan organik satuan yang berfungsi sebagai pembantu Komandan/Ankum menegakkan disiplin terbatas di lingkungan satuannya. Dengan demikian, setelah Ankum tidak menjadi penyidik, maka provos angkatan juga tidak perlu dijadikan sebagai penyidik pembantu, sebaiknya Provos kembali kepada tugas pokoknya, yaitu sebagai pembantu Komandan/Ankum dalam penegakan hukum disiplin dan tata tertib serta pengamanan di lingkungan satuannya.

Selanjutnya rekonstruksi lembaga penyidik Ankum dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 31Tahun 1997, dari semula: penyidik adalah Ankum, Polisi Militer dan Oditur, direkonstruksi menjadi:

**"Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik adalah : a. Polisi Militer; dan b. Oditur".**

Alasan merekonstruksi Pasal 69 (1) huruf a (penyidik Ankum) Undang-undang Nomor 31Tahun 1997 tersebut, mengingat keberadaan Ankum sebagai penyidik tidak bisa diharapkan dapat menjalankan penyidikan secara professional dan berkeadilan. Justru yang terjadi Ankum tidak memiliki kredibilitas sebagai penyidik dan tidak menjamin due process of law, karena secara empiris/ fakta yang terjadi Ankum tidak pernah melakukan penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Kalau keberadaan Ankum sebagai penyidik dengan maksud untuk ikut menentukan nasib anggotanya, maka dengan Ankum turut serta mengawasi proses penyidikan terhadap tersangka/anak buahnya, berarti Ankum dapat memastikan bahwa hak-hak, perlindungan dan rasa keadilan terhadap tersangka/anggotanya dapat terjamin. Disamping itu, Ankum dapat memberikan kontribusi yang positif kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, guna percepatan penyelesaian perkara tersangka/ anak buahnya.

Dengan keberadaan Ankum nantinya tidak lagi ditetapkan sebagai penyidik, maka konsekuensinya harus dilakukan harmonisasi dengan substansi Pasal 74 yang mengatur kewenangan Ankum. Harmonisasi dalam arti sebagai upaya mencari kesesuaian/ keselarasan antara peraturan perundang-undangan

agar tidak terjadi duplikasi pengaturan.[525]Dalam hal ini, harmonisasi dilakukan agar tidak terjadi pertentangan/ tidak selaras antar bunyi pasal dalam satu undang-undang untuk menghindari adanya ketidakpastian. Harmonisasi ini dilakukan melalui rekonstruksi terhadap wewenang Ankum pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Substansi rekonstruksi Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menjadi sebagai berikut :

Pasal 74 Atasan Yang Berhak Menghukum, mempunyai wewenang :

a. menyerahkan anggota di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b;
b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b;
c. menerima berkas perkara hasi penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b; dan
d. melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan terhadap anggotanya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b.

Dari rumusan rekonstruksi Pasal 74 tersebu di atas, terdapat alasan-alasannya sebagai berikut:

a. Ankum menyerahkan anak buah di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b. Hal ini sebagai konsekkuensi Ankum sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap

[525] Irwan Triadi, Harmonisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum Militer/ STHM/ No. 2/ September 2020.

anak buahnya yang sedang menjalani proses hukum. Ankum sebagai figur dalam kesatuannya, sudah sepantasnya menjadi suri tauladan dalam hal tunduk kepada hukum yang berlaku, dengan mendorong penerapan hukum terhadap siapapun, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan.

b. Ankum menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur. Hal ini sebagai konsekwensi dari tugas dan fungsi Ankum sebagai pembina dan penaggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sudah selayaknya menerima laporan pelaksanaan penyidikan terhadap anak buahnya dari penyidik Polisi militer atau Oditur, agar Ankum dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan penyidikan terhadap anak buahnya.

c. Ankum menerima berkas perkara hasi penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur. Hal ini sebagai konsekwensi dari tugas dan fungsi Ankum sebagai pembina dan penaggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sudah selayaknya menerima berkas perkara hasil penyidikan terhadap anak buahnya, untuk kepentingan penyelesaian perkara anak buahnya, dan guna mengetahui nasib anak buahnya akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

d. Ankum melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan terhadap anak buahnya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur. Hal ini dimaksudkan, agar penyidikan berjalan sesuai dengan Hapmil guna menjaga hak-hak dan perlindungan terhadap tersangka (anak buah Ankum), sehingga penyidikan dapat menghadirkan nilai-nilai keadilan terhadap para pihak.

Selanjutnya perlu dijelaskan, rekonstrusi terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan dampak yang diharapkan, dapat dijelaskan dengan table berikut ini :

**Tabel 7**

Rekonstruksi Pasal 69 (1) huruf a dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang Terkait Dengan Lembaga dan Kewenangan Penyidik, Dalam Rangka Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berkeadilan

| Isi Pasal | Kelemahan | Rekonstruksi | Dampak Yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| 1. Pasal 69 (1) Penyidik adalah:<br>a. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)<br>b. Polisi Militer.<br>c. Oditur | Dengan keberadaan penyidik Ankum yang sama-sama mendapat kewenangan penyidikan secara atributif, maka terjadi Ankum intervensi, konflik norma dengan penyidik Polisi Militer/ Oditur. Adanya konflik norma ini mengakibatkan sering terjadi konflik kewenangan (karena merasa sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan). Keadaan ini sebagai wujud tidak adanya kepastian hukum dan dapat merugikan pihak-pihak tertentu | Pasal 69 Penyidik adalah:<br>a. Polisi Militer<br>b. Oditur<br><br>(Ankum tidak lagi dijadikan sebagai penyidik, otomatis Provost satuan sebagai penyidik pembantu juga dihapus). | a.Penyidik Polisi Militer/ Oditur sebagai penyidik professional dan tidak ada konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan hukum, melindingi kepentingan tersangka dan para pihak, sehingga dapat menghadirkan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara.<br>b. Proses penyidikan dapat berjalan cepat dengan biaya murah.<br>c.Produk penyidikan berupa berkas perkara hasilnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dalam penyidikan. | | memenuhi syarat materiil dan formil |
| 2. Pasal 74<br>Ankum mempunyai wewenang:<br>a. melakukan penyidikan thd prajurit bawahannya yg ada dibawah wewenang komandonya yg pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c.<br>b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c.<br>c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c.<br>d. Melakukan | a. Sering terjadi intervensi Ankum terhadap penyidik Polisi Militer dalam proses penyidikan, disamping itu sering terjadi keterlambatan penyerahan tersangka oleh Ankum kepada penyidik Polisi Militer yang mengakibatkan proses penyidikan berjalan lambat, bahkan sering barang bukti (terutama narkoba) sudah rusak tidak bisa diuji di laboratorium.<br>b. Kewenangan penahanan terhadap tersangka berada pada Ankum, sedangkan penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak diberi kewenangan menahan tersangka. Hal ini merupakan kendala dalam proses penyidikan, karena dalam hal penahanan terhadap tersangka, yang dapat menentukan perlu tidaknya | Ankum mempunyai wewenang:<br>a.menyerahkan prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b untuk dilakukan penyidikan.<br>b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 huruf a atau huruf b.<br>c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 huruf a atau huruf b.<br>d. Melakukan pengawasan dalam proses penyidikan terhadap anak | a.Dengan penegasan bahwa Ankum berwenang menyerahkan anak buahnya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, diharapkan tidak ada konflik norma antara penyidik Pom dengan Oditur. Selanjutnya setiap prajurit patuh dan taat terhadap perintah Ankumnya untuk menjalani proses hukum, sekaligus Ankum dapat bersinergi dengan Penyidik Polisi Militer atau Oditur dan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi atau setidak-tidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya | tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan adalah penyidik yang langsung menangani perkara tersangka, yaitu Polisi Militer atau Oditur. Sedangkan Ankum tidak mengetahui pertimbangan perlu tidaknya tersangka ditahan. | buahnya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b."<br><br>Catatan: Urutan isi dari Pasal 74 ini, agar rumusan pada huruf d ditukar berada pada urutan kedua, menjadi huruf b. Urutan selanjutnya, huruf semula b menjadi c, dan yang semula c menjadi d. | prajurit.<br>b. Dengan adanya pengawasan dari Ankum terhadap penyidikan pada anggota bawahannya, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lancar, cepat, transparan dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. |

Dari tabel rekonstruksi di atas, terdapat rekonstruksi terhadap kewenangan Ankum dalam Pasal 74 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dari rumusan semula : a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yg ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c. Rekonstruksinya menjadi : a. menyerahkan prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b untuk dilakukan penyidikan. Alasannya; 1) Dengan adanya penegasan bahwa Ankum berwenang menyerahkan anak buahnya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, nantinya norma ini dapat menghindari terjadinya konflik

norma antara penyidik Polisi Militer/ Oditur dengan Ankum, karena dalam pengalaman sering terjadi Ankum tidak mau menyerahkan bawahannya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer/ Oditur. 2) Dengan adanya penegasan bahwa Ankum berwenang menyerahkan anak buahnya yang melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, diharapkan setiap prajurit patuh dan taat terhadap perintah Ankumnya untuk menjalani proses hukum, sekaligus Ankum dapat bersinergi dengan Penyidik Polisi Militer atau Oditur dan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi atau setidak-tidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh prajurit.

Selanjutnya rekonstruksi Pasal 74 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dari rumusan semula : d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. Rekonstruksinya menjadi: d. Ankum melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan terhadap anak buahnya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atau huruf b.", dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut; 1) Pengawasan oleh Ankum tidak dimaksudkan untuk mengganti fungsi pengawasan penyidikan yang secara fungsional dijalankan oleh Oditur Jenderal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tetapi pengawasan Ankum berupa pengawasan umum yang bisa dilakukan oleh Ankum, misalnya dengan memonitor secara terus menerus perkembangan perkara tersangka bawahannya dan koordinasi dengan penyidik tentang penyelesaian perkara tersangka (tetapi tidak boleh intervensi kepada penyidik). 2) Dengan adanya pengawasan dari Ankum terhadap jalannya penyidikan terhadap bawahan Ankum,

diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lancar, cepat, transparan dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak.

## G. Rekonstruksi Kultur/ Budaya Hukum.

### 1. Harmoni komponen sistem hukum.

Kultur hukum/ budaya hukum merupakan bagian komponen dari sistem hukum dan merupakan suatu kesatuan dari komponen lainnya, yaitu substansi dan struktur hukum, ketiganya saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem hukum tersebut diperlukan harmoni dan tidak menghendaki adanya konflik antar komponen sistem hukum tersebut. Tiga komponen sistem hukum tersebut (struktur, substansi dan kultur/ budaya hukum) harus harmoni dan sinergis, apabila ingin memfungsikan hukum dengan baik dan efektif. Struktur berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Substansi, berkaitan dengan materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan komponen ketiga adalah kultur atau budaya hukum, yang diartikan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian juga substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh structure hukum yang baik. Pada akhirnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga komponen sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling

berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan mutu makanan yang baik pula. Apabila ketiga komponen sistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.[526]

Walaupun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat setempat. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang berintikan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, kita tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.[527]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan/ memfungsikan hukum dan tujuan hukum berdasarkan nilai keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum, maka harus terwujud keharmonian, keserasian dan kekompakan dalam aplikasi ketiga komponen sistem hukum; struktur, substansi dan budaya hukum.

---

[526] Abdul Halim Barkatullah, BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM, *Op. Cit.,* hal. 17
[527] *Loc. Cit.*

**2. Rekonstruksi Kultur/ Budaya Hukum.**

Perlu menjadi catatan apa yang telah disinggung di atas, bahwa meskipun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannnya, dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat setempat. Artinya, budaya hukum masyarakat setempat, atau komunitas tertentu sangat mempengaruhi praktek dari struktur dan subtansi hukum.

Bagaimana dengan kultur atau budaya hukum masyarakat di lingkungan TNI, terkait dengan struktur dan substansi hukum positif di lingkungan TNI saat ini. Kesulitan kita untuk memformulasikan, bagaimana mengukur budaya hukum masyarakat TNI yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, mengingat bahwa budaya masyarakat setempat (di luar masyarakat TNI) lebih dominan, dan bagaimana pula merekonstruksi budaya hukum di lingkungan masyarakat TNI, kaitannya dengan pelaksanaan sistem peradilan militer.

Pada Bab IV pembahasan kelemahan kultur sebelumnya, telah disampaikan beberapa kelemahan pada komponen kultur/ budaya hukum masyarakat TNI, antara lain adanya budaya segan kepada atasan, sehingga tidak berani mengingatkan atasan yang melanggar hukum, termasuk kemandirian penegak hukum. Kelemahan- kelemahan itu hanya terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana di lingkungan masyarakat TNI, tetapi tidak pada kontek semua aspek kehidupan masyarakat TNI. Dengan demikian, agar lebih mudah mengukur rekonstruksi budaya hukum pada masyarakat TNI ini, harus merujuk pada aspek kelemahan- kelemahan penegakan hukum pidana dan kelemahan

penerapan hukum positif di lingkungan TNI, kaitannya dengan pelaksanaan sistem peradilan militer.

Dalam upaya rekonstruksi terhadap kelemahan- kelemahan budaya hukum dalam penegakan hukum pidana dan kelemahan hukum positif di lingkungan TNI tersebut di atas, ada 3 (tiga) hal penting yang perlu dijadikan pedoman, yaitu; pertama, sikap profesionalisme keprajuritan, dan kedua pembaharuan aspek-aspek hukum positif, dan ketiga, aspek figure pemimpin yang harus menjadi contoh tauladan bagi prajurit TNI. Aplikasinya sebagai berikut;

a. Sikap profesionalisme keprajuritan, artinya semua prajurit memegang kode etik/ etika keprajuritan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan melaksanakan tugas berpedoman pada sikap profesionalisme keprajuritan (melaksanakan tugas dilandasi oleh nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI), akan membentuk prajurit yang berdisiplin, menjunjung tinggi etika keprajuritan, berani bersikap dan bertindak sesuai norma hukum, berani menyampaikan hal-hal yang benar kepada atasan, teman dan kepada siapapun sesuai etika prajurit. Sikap profesionalisme prajurit ini pula yang memandu setiap prajurit bersikap hormat dan patuh terhadap hukum dalam bentuknya kesadaran hukum prajurit, dan pada gilirannya dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat TNI.

b. Upaya pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum militer ini sangat diperlukan mengingat substansi hukum militer saat ini masih banyak yang menggunakan warisan hukum colonial, dimana sosio kulturalnya tidak sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia. Perlunya pembaharuan hukum militer guna menyerap substansi budaya hukum

Indonesia, agar hukum dapat berlaku efektif dalam membentuk budaya kesadaran hukum prajurit TNI. Usaha pembaharuan hukum militer ini, dibutuhkan peran dari para pihak yang berkompeten, mulai dari lembaga legeslatif, pemerintah, pimpinan lembaga TNI dan lembaga hukum lainnya.

c. Figur pemimpin yang adaptif. Figur pemimpin/ komandan / setiap atasan bagi prajurit, harus menjadi agen perubahan (agen of change) ke arah yang lebih baik, dalam hal penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga menumbuhkan semangat kesadaran hukum bagi semua prajuritnya. Figur pemimpin yang adaptif akan menjadi pemandu bagi prajuritnya, dengan kepemimpinan para komandan/ pimpinan satuan yang mengayomi, melindungi dan memberi contoh tauladan yang baik. Formulasi ini, penulis anggap sebagai alat/ sarana yang sangat efektif bagi terwujudnya budaya hukum dan kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat TNI.

Peranan dari pemimpin yang adaptif ini pula yang diharapkan mendorong upaya pembaharuan hukum militer, agar substansi hukum militer berkarakter budaya hukum Indonesia (mengganti hukum warisan colonial), sehingga hukum di lingkungan peradilan militer dapat berlaku efektif dan memacu budaya dan kesadaran hukum prajurit TNI.

## H. Pandangan Para Ahli dan Praktisi Hukum Militer Terhadap Hukum Acara Pidana Militer.

Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer sudah berlaku sejak Tahun 1997 sampai

sekarang, sudah kurang lebih 24 tahun lamanya. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, tentu substansi Hapmil perlu menyesuaikan dengan perkembangan asas-asas hukum yang baru, perkembangan Hak-hak Asasi manusia, perkembangan negara hukum Pancasila, tuntutan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat militer dan perkembangan organisasi di lingkungan militer.

Terkait dengan perkembangan Hapmil ke depan, khususnya tentang issue hukum yang menjadi pokok bahasan dalam disertasi ini, yaitu rekonstruksi lembaga dan kewenangan (khususnya penyidik Ankum) dan penyidik Polisi Militer dan Oditur, penulis telah melakukan wawancara kepada para praktisi dan ahli hukum militer. Mereka dikatakan sebagai praktisi dan ahli hukum militer, karena sepanjang karirnya mengabdi di lingkungan peradilan militer. Hasil wawancara akan dituangkan dalam uraian berikut;

Hasil wawancara dengan Wahyuedho Indrajit,[528] pertama, tentang berlakunya Asas Kesatuan Komando di Hapmil dengan adanya perkembangan saat ini bahwa, hakim militer sudah dibawah Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia. Menurut Wahyuedho Indrajit, dalam perkembangan peradilan militer saat ini, dengan adanya hakim militer dibawah MA dan tidak lagi berada di bawah kendali Panglima TNI, maka Asas Kesatuan Komando memang tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan militer. Hukum acara pidana militer ke depan harus dibenahi, kita tentara harus berani merubah hukum acara pidana militer yang sesuai dengan perkembangan norma-norma dan asas-asas hukum pidana serta rasa keadilan masyarakat (termasuk masyarakat

[528] Saat wawancara sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Waka Babinkum TNI), sekarang Mayjen TNI Wahyuedho Indrajit, S.H., MH., sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021, di Kantor Babinkum TNI Mabes TNI Cilangkap Jakarta.

militer). *Kedua,* tentang asas komandan bertanggung jawab penuh kepada anak buah dan satuannya, dimana asas ini kemudian di declair bhw pada diri Ankum memiliki kewenangan sebagai penyidik kepada anak buah dibawah wewenang komandonya. Menanggapi hal ini, menurut Wahyuedho Indrajit, bahwa pemahaman tersebut lebih pada pemahaman sosiologis dari pada pemahaman secara yuridis, karena sebenarnya Ankum itu memang bukan penyidik. Ankum sebenarnya sebagai komandan yang bertanggung jawab membina dan mengendalikan anak buah dan kesatuannya. Keberadaan Ankum sebagai penyidik kontradiksi dengan tugas-tugas penyidikan, mengingat Ankum tidak pernah melakukan penyidikan, karena wewenang penyidikan pada Ankum telah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer/Oditur. *Ketiga,* dalam Pasal 69 (1) UU No 31 Thn 1997, dijelaskan bahwa penyidik terdiri dari Ankum, Polisi Militer dan Oditur. Kewenangan Ankum, Pom dan oditur sebagai penyidik diperoleh secara atributif (kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang), namun Ankum mendelegasikan/ melimpahkan kewenagan penyidikannya kepada Polisi Militer/Oditur. Dalam kajian secara yuridis/ normatif dan praktek dilapangan, timbul konflik norma yang berakibat konflik kewenangan antara penydik Ankum dengan penyidik Pom/Oditur. Menanggapi hal ini, menurut Wahyuedho Indrajit, sependapat dengan penulis, bahwa adanya konflik norma antara Ankum dengan penyidik Polisi Militer, tetapi seharusnya Ankum tidak perlu lagi menangani sendiri perkara Tersangka, karena Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer. *Keempat,* tentang keberadaan Ankum sebagai penyidik, terdapat legal gab (kesenggangan antara norma/ nilai dengan aplikasi penyidikan), misalnya, dalam persyaratan sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer, maka harus sesuai Perpang TNI, Nomor Perpang/711/XII/ 2011,

Tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di lingkungan peradilan militer, yaitu telah mengikuti pendidikan penyidik dan sebelum menjabat sebagai penyidik harus disumpah sebagai penyidik (apabila tidak disumpah, maka hasil penyidikannya tidak sah). Selain itu, Ankum bukan rumpun dari lembaga yudisiil atau Ankum tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Dari *legal gab* yang ada ini, sebenarnya Ankum tidak layak sebagai penyidik. Menurut pendapat Wahyuedho Indrajit, memang keberadaan Ankum sebagai penyidik itu perlu direkonstruksi. Ankum tidak perlu sebagai penyidik. Penyidik di lingkungan peradilan militer cukup Polisi Militer dan Oditur saja. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Ankum itu memang bukan penyidik karena kenyataannya Ankum tidak pernah melakukan penyidikan. Polisi Militer sebagai penyidik sudah dididik sebagai penyidik dan telah disumpah, sehingga bisa sebagai penyidik yang professional. *Kelima,* tentang kenyataan di lapangan bahwa Ankum sebagai penyidik akan terjadi konflik kepentingan, dimana dalam proses penyidikan Ankum cenderung akan membela anak buahnya, akibatnya terjadi tidak fair dan tidak adil dalam penegakan hukum thd prajurit bawahannya. Menurut pendapat Wahyuedho Indrajit, Kalau dalam penjelasan Pasal 69 (1) huruf a, UU No 31 Thn 1997 bahwa, Ankum dijadikan sebagai penyidik tujuannya untuk ikut menentukan nasib anak buahnya yang melakukan tindak pidana dalam proses hukumnya, namun untuk terwujudnya keadilan dalam proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, maka seperti telah disampaikan di atas, Wahyuedho Indrajit setuju Ankum sebagai penyidik direkonstruksi, cukup penyidik Polisi Militer atau Oditur saja. *Keenam*, tentang wewenang penahanan terhadap tersangka, menurut Wahyuedho Indrajit, setuju penyidik Polisi Militer/Oditur diberi kewenangan

menahan sementara terhadap tersangka, dengan catatan penyidik Polisi Militer atau Oditur wajib melaporkan penahanan Tersangka tersebut kepada Ankumnya. Mengingat Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer/Oditur, maka penyidik Polisi Militer/ Oditur seharusnya diberi kewenangan menahan tersangka. Dengan diberikannya kewenangan penyidik Polisi Militer/Oditur untuk menahan Tersangka, tidak akan mengurangi peran Ankum sebagai Dansat yang bertanggung jawab terhadap anak buah dan satuannya. *Ketujuh*, tentang kewenangan Ankum sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, mengingat Ankum tidak perlu dijadikan sebagai penyidk, maka menurut Wahyuedho Indrajit setuju kalau Ankum dijadikan sebagai pengawas jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer/ Oditur. Dengan menjadi pengawas penyidikan, maka Ankum akan mengikuti perkembangan perkara prajurit bawahannnya, sekalian agar jalannya penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang benar dan adil. Selanjutnya Wahyuedho Indrajit berharap terdapat pembaharuan hukum militer baik formil dan materiil mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan perkembangan asas-asas dan norma-norma hukum di Indonesia, agar proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer ke depan terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum.

Hasil wawancara dengan Abdul Rasyid,[529] pertama, tentang perlunya pembaharuan Hapmil. Menurut Abdul Rasyid, pada dasarnya pembaharuan dalam hukum formil ( HAPMIL) dan hukum materiil (KUHPM), sama-sama penting. Namun yang sangat mendesak adalah pembaharuan di bidang hukum Formil. Hal

[529] Mayor Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer Utama MA RI, Wawancara pada tanggal 12, Agustus, Tahun 2021, bertempat di Pengadilan Militer Utama Jakarta.

yang paling mendesak diperbaharui adalah antara lain; pemisahan antara ketentuan pasal-pasal yang mengatur peradilan militer secara kelembagaan dengan Hukum Acara Pidana Militer, pengaturan sidang secara virtual dan alat bukti elektronik, penyesuaian Asas kesatuan komando dengan konsep kemandirian hakim di bawah Mahkamah Agung dan sidang perbedaan pendapat antara Papera dan Orjen TNI. Kedua, tentang berlakunya Asas Kesatuan Komando di Hapmil dengan adanya perkembangan saat ini bahwa, hakim militer sudah dibawah Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia. Menurut Abdul Rasyid, dengan beralihnya Peradilan Militer secara organisasi administrasi dan finansial di bawah Mahkamah Agung, tidak otomatis menghilangkan asas kesatuan Komando. Karena pada prinsipnya Asas Kesatuan Komando adalah bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuannya dan anak buahnya. Asas ini sangat penting bagi organisasi militer dalam rangka pertahanan negara, namun terkait dengan peradilan militer perlu di selaraskan asas kesatuan komando dengan konsep kemandirian hakim. Ketiga, dalam Pasal 69 (1) UU No 31 Thn 1997, dijelaskan bahwa penyidik terdiri dari Ankum, Polisi Militer dan Oditur. Kewenangan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik diperoleh secara atributif (kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang), namun Ankum mendelegasikan/ melimpahkan kewenagan penyidikannya kepada Polisi Militer /Oditur. Dalam kajian secara yuridis/ normatif dan praktek dilapangan, timbul konflik norma yang berakibat konflik kewenangan antara penydik Ankum dengan penyidik Pom/Oditur. Menanggapi hal ini menurut Abdul Rasyid, dalam hal terjadi Ankum tidak mau menyerahkan anggotanya untuk di proses secara hukum dan perkaranya di sidangkan di

peradilan militer, telah ada mekanismenya yaitu dengan adanya lembaga hukum sidang perkara perbedaan pendapat yang merupakan kewenangan Dilmiltama dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Ankum atau Papera dengan Odittur Militer, sehingga penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit tetap berada pada koridor hukum yang benar. Keempat, tentang kewenangan penahanan terhadap tersangka, menurut pendapat Abdul Rasyid, kewenangan penahanan sudah tepat berada pada Ankum dan Papera, karena organisasi militer adalah organisasi dengan karakter khusus yang mana pihak paling berwenang untuk menggerakan pasukan/personil ataupun menahan pasukan/personil adalah komandannya. Dalam prakteknya kewenangan penahahan oleh Ankum/Papera sampai saat ini sangat efektif. *Kelima*, tentang kenyataan di lapangan bahwa Ankum sebagai penyidik akan terjadi konflik kepentingan, dimana dalam proses penyidikan Ankum cenderung akan membela anak buahnya, akibatnya terjadi tidak fair dan tidak adil dalam penegakan hukum thd prajurit bawahannya. Menanggapi hal ini Abdul Rasyid berpendapat, bahwa Secara Empiris dalam praktek kewenangan Ankum sebagai penyidik yang di delegasikan kepada Polisi Militer/Oditur Militer tetap efektif, karena Ankum pun harus taat hukum, dan ketaatan hukum seorang Ankum terdapat lembaga pengawasan internal TNI, apabila seorang Ankum tidak memproses anggota/prajuritnya yang melakukan tindak pidana, maka Ankum tersebut juga akan mendapatkan sanksi. Keenam, tentang keberadaan Ankum sebagai penyidik, terdapat legal gab (kesenggangan antara norma/ nilai dengan aplikasi penyidikan), misalnya, dalam persyaratan sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer, maka harus sesuai Perpang TNI, Nomor Perpang/ 711/ XII/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik

dan Penyidik Pembantu di lingkungan peradilan militer, yaitu telah mengikuti pendidikan penyidik dan sebelum menjabat sebagai penyidik harus disumpah sebagai penyidik (apabila tidak disumpah, maka hasil penyidikannya tidak sah). Selain itu, Ankum bukan rumpun dari lembaga yudisiil atau Ankum tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Dari legal gab yang ada ini, sebenarnya Ankum tidak layak sebagai penyidik. Menanggapi hal ini Abdul Rasyid berpendapat bahwa, kewenangan penyidik memang lebih efektif apabila berada pada Polisi Militer dan Oditur Militer. Dan selama ini penyidikan untuk Pro Justitia dilaksanakan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer. *Ketujuh,* tentang kewenangan Ankum sebagaimana dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana huruf a, b dan c lebih bersifat pengawasan Ankum terhadap penyidikan dari pada sebagai penyidik. Untuk itu Abdul Rasyid sependapat dengan penulis, bahwa Ankum lebih efektif apabila kewenangan Ankum dalam proses penyidikan adalah sebagai pengawas. Selanjutnya, Abdul Rasyid berharap terhadap perkembangan Hukum Acara Pidana Militer ke depannya semakin maju dan dapat secara efektif berkontribusi terhadap penegakan hukum di lingkungan prajurit dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Edy Imran[530] dan Ali Ridho,[531] serta praktisi hukum militer lainnya, tentang issue hukum yang sama seperti di atas. Mengenai asas kesatuan komando dalam Hapmil, menurut Edy Imran bahwa, Asas Kesatuan Komando dalam peradilan militer belum berubah masih berlaku. Namun dalam proses di pengadilan militer, hakim militer tetap berpedoman pada asas kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai fakta-fakta hukum yang ada

[530] Brigadir Jenderal Edy Imran, S. H., M.H., Kepala Oditur Militer Tinggi – II Jakarta, Wawancara pada tanggal 1 April 2021, di Kantor Oditur Militer Tinggi – II Jakarta.
[531] Kolonel Laut (KH) Dr. Ali Ridho, S.H., M.M., Kepala Kelompok Oditur Militer Tinggi – II Jakarta. Wawancara pada tanggal 1 April 2021, di Kantor Oditur Militer Tinggi – II Jakarta.

dalam sidang pengadilan. Peradilan militer tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan komando dan kepentingan pertahanan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Ali Ridho menambahkan bahwa, Hakim militer terkait dengan pembinaan personil, tetap di bawah Panglima TNI/ Mabes TNI, namun untuk teknis yudisiil berada di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan hakim dalam proses di pengadilan militer dalam memutus perkara tetap berpedoman dengan asas kebebasan hakim dalam sidang pengadilan. Peradilan militer tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan komando dan pertahanan negara.

Selanjutnya tentang pemahaman asas komandan bertanggung jawab penuh kepada anak buah dan satuannya, dimana asas ini kemudian di declair bhw pada diri Ankum memiliki kewenangan sebagai penyidik kpd anak buah dibawah wewenang komandonya, menurut Edy Imran benar pemahaman seperti itu. Ankum memiliki kewenangan menyidik. Pelaksanaannya, bila terjadi pelanggaran hukum oleh prajurit, pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut dilakukan oleh Ankum, setelah diketahui benar adanya tindak pidana, maka Ankum melimpahkan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer. Selanjutnya, Ali Ridho menambahkan bahwa, ditinjau dari aspek sejarah, dari dulu Ankum diberi kewenangan menyidik anggotanya.

Selanjutnya dalam Pasal 69 (1) UU No 31 Thn 1997, khususnya mengenai kewenangan Ankum, Polisi Militer dan oditur sebagai penyidik yang diperoleh secara atributif (kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang), namun Ankum mendelegasikan/melimpahkan kewenagan penyidikannya kepada Polisi Militer/Oditur. Dalam kajian secara akademik dan praktek secara empiris, timbul konflik norma yang berakibat konflik kewenangan antara penyidik Ankum

dengan penyidik Pom/Oditur. Tentang adanya konflik norma ini, menurut Edy Imran memang secara akademik benar ada konflik norma, namun apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, baik yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan, maka pertama Ankum yang menangani/ meriksut prajurit itu. Setelah jelas ada terjadi tindak pidana, maka Ankum harus melimpahkan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer.

Konflik norma (tentang kewenangan penyidikan antara Ankum dengan penyidik Polisi Militer atau Oditur), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diilustrasikan atau digambarkan sebagai berikut; dalam Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, mengatur tentang penyidik di lingkungan peradilan militer, dimana penyidik terdiri dari Ankum, Polisi Militer dan Oditur. Kemudian Pasal 71 mengatur kewenangan penyidik dan Pasal 74 mengatur tentang kewenangan Ankum. Dalam hal pelaksanaan penyidikan, terutama menyangkut masalah penahanan terhadap Tersangka, terdapat konflik norma yang mengakibatkan juga konflik kewenangan penyidikan. Misalkan, dalam hal adanya laporan dari korban tindak pidana penganiayaan yang melaporkan penganiayaan tersebut kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, kemudian penyidik Polisi Militer/Oditur akan melaksanakan penyidikan, akan tetapi Ankum yang merupakan atasan langsung dari Tersangka, tidak mau memproses atau tidak mau melimpahkan proses penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Dalam contoh kasus di atas, kalau berdasarkan kepada Pasal 71, maka antara Ankum dengan penyidik Polisi Militer atau Oditur sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penydikan terhadap Tersangka. Kemudian dalam Pasal 74, dijelaskan bahwa Ankum berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota bawahannya, namun dalam pelaksanaan penyidikan

Ankum melimpahkan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal 74 (1)), kemudian dalam hal penahanan terhadap Tersangka merupakan kewenangan Ankum (pasal 74 (4)), sedangkan penyidik Polisi Militer atau Oditur tidak mempunyai kewenangan untuk menahan Tersangka. Penyidik Polisi Militer atau Oditur hanya boleh menahan Tersangka atas perintah Ankum (Pasal 71 (2) a). Sesuai bunyi Pasal 74 (1), dalam hal pelaksanaan penyidikan Ankum melimpahkan kepada Polisi Militer atau Oditur. Dalam ketentuan hukum Administrasi, bahwa pelimpahan kewenangan penyidikan dari Ankum kepada Polisi Militer/Oditur, artinya bahwa Ankum sudah menyerahkan kewenangan penyidikan dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyidikan itu adalah penerima limpahan wewenang penyidikan (dalam hal ini penyidik Polisi Militer atau Oditur). Dari norma inilah timbul konflik norma yang berakibat adanya konflik kewenangan antara ankum dengan Polisi Militer/Oditur. Dalam contoh kasus di atas, siapakah yang berwenang melalukan penyidikan terhadap Tersangka?

Dari gambaran kasus di atas, menurut pendapat Wahyupi,[532] yang berwenang adalah penyidik Polisi Militer/Oditur, karena Ankum telah melimpahkan kewenangannya kepada penyidik Polisi Militer/Oditur, bahkan menurut Wahyupi, dalam hal Tersangka tertangkap tangan, maka kewenangan penyidikan tersebut ada pada penydik Polisi Militer/Oditur dan Ankum tidak perlu lagi mencampuri/menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer/Oditur. Wahyupi juga menegaskan perlunya ada ketegasan atau diperjelas tentang batas-batas kewenangan Ankum sebagai penyidik, agar tidak timbul konflik kewenangan dengan penyidik Polisi Militer/Oditur.

[532] Letkol Sus Wahyupi, Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Pebruari 2021, di Pengadilan Militer II – 10 Semarang.

Konflik norma tentang kewenangan penyidikan antara Ankum dengan penyidik Polisi Militer/Oditur juga terjadi dalam hal kewenangan penahanan terhadap Tersangka, seperti digambarkan di atas. Untuk kewenangan penahanan terhadap tersangka ini, Edy Imran setuju, ke depan (dalam pembaharuan Hapmil) penyidik Polisi Militer dan Oditur diberi kewenangan untuk menahan tersangka. Ankum dan Papera tidak perlu diberi kewenangan untuk menahan, dengan alasan; a) alasan dan pertimbangan pentingnya menahan Tersangka itu yang tahu (secara suyektif) penyidik Polisi Militer atau Oditur, karena dikuatirkan Tersangka melarikan diri, merusak/ menghilangkan barbuk dan mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran. b) Ankum dan Papera dengan kewenangan penahanannya bisa memperlambat penyelesaian perkara, karena terkadang lalai tentang tertib administrasi penahan Tersangka dan c) Akibat kelalaian tertib administrasi penahanan Tersangka, berakibat merampas kemerdekaan Tersangka karena masa penahanan lewat waktu tanpa surat perintah penahanan.

Selanjutnya, terkait dengan kewenangan penahanan terhadap tersangka ini, menurut Asmawi,[533] dalam hal kewenangan penahanan terhadap Tersangka, karena Ankum sudah melimpahkan kewenangan penyidikan anak buahnya kepada penyidik Polisi Militer/Oditur, maka seharusnya penyidik Polisi Militer atau Oditur berwenang atau diberi kewenangan untuk menahan Tersangka. Namun penyidik Polisi Militer harus melaporkan penahanan Tersangka tersebut kepada Ankumnya. Pertimbangannnya, selain Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer, juga mengingat kebutuhan penahanan terhadap Tersangka merupakan keinginan yang bersifat subyektif dari penyidik Polisi Militer/Oditur, dalam hal ada kekuatiran Tersangka akan melarikan diri,

[533] Letkol CHK Asmawi, S.H., M.H., Hakim Militer di Pengadilan Militer II – 10 Semarang. Wawancara pada hari Jumat, tanggal 26 Pebruari 2021, di Pengadilan Militer II – 10 Semarang.

merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, (sebagaimana ketentuan Pasal 79 (1)). Pertimbangan lainnya, apabila Tersangka perkaranya sudah disidangkan di pengadilan, maka hakim juga diberikan kewenangan untuk menahan Tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Namun kwenangan untuk menahan tersangka, diwajibkan bagi penyidik Polisi Militer atau Oditur untuk melaporkan tentang penahanan tersebut kepada Ankum Tersangka.

Hal lain yang yang ditanyakan kepada Edy Imran, menyangkut eksistensi penyidik Ankum, apakah ke depan (pembaharuan Hapmil) masih perlu Ankum diberi wewenang penyidikan? Menurut Edy Imran, kalau Hapmil masih mengacu pada asas kesatuan komando, maka masih perlu Ankum sebagai penyidik, namun kewenangannya dibatasi pada perkara tindak pidana yang ringan sifatnya, sehingga nantinya Ankum bisa menjatuhkan disiplin kepada prajurit bawahannya. Selanjutnya, menyinggung peran Ankum ke depan, apakah sebaiknya Ankum menjadi pengawas jalannya penyidikan yang dilakukan penyidik Polisi Militer atau Oditur saja dari pada sebagai penyidik, mengenai hal ini Edy Imran setuju dalam hal, apabila Ankum sebagai pengawas jalannya penyidikan, dalam pengertian umum yaitu, mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer/Oditur, agar penyidikan berjalan lancar dan adil. Tapi kalau dimaksudkan sebagai pengawas teknis penyidikan, itu sudah fungsi dari oditur.

Dari substansi hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

a. Semua praktisi dan ahli hukum militer tersebut di atas sepakat bahwa, Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) dalam Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1997, perlu dilakukan pembaharuan guna menyesuaikan dengan perkembangan asas-asas hukum pidana, perkembangan organisasi militer saat ini, kepentingan TNI dan dan rasa keadilan dalam proses peradilan militer;

b. Adanya perbedaan sudut pandang diantara praktisi dan ahli hukum militer di atas tentang eksistensi dan kewenangan penyidik Ankum ke depan (dalam pembaharuan hukum acara pidana militer), disebabkan adanya pertimbangan bahwa selama hukum acara pidana militer masih berdasarkan pada asas kesatuan komando, sehingga peran Ankum sebagai penyidik masih diperlukan. Namun dilain pihak, Wahyuedu Indajid sebagai Kepala Pembinaan Hukum TNI dengan tegas menyatakan bahwa, Ankum tidak perlu lagi sebagai penyidik, karena bertentangan dengan kenyataannya bahwa Ankum tidak pernah dan tidak bisa melakukan penyidikan, dan Ankum cukup sebagai pengawas jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, agar penyidikan berjalan dengan jujur, transparan dan adil; dan

c. Hampir semua praktisi dan ahli hukum militer di atas sependapat bahwa, dalam pembaharuan Hapmil ke depan, penyidik Polisi Militer atau Oditur harus diberi kewenangan penahanan terhadap tersangka, mengingat penyidik Polisi Militer/ Oditur yang tahu dan menentukan tentang perlunya tersangka ditahan atau tidak untuk kepentingan penyidikan.

Berkaitan dengan eksistensi penyidik Ankum dalam pembaharuan Hapmil ke depan, penulis berpendapat bahwa, meskipun Hapmil masih berdasarkan pada

asas kesatuan komando, keberadaan Ankum sebagai penyidik tidak perlu lagi dan cukup penyidik adalah Polisi Militer atau Oditur. Tidak adanya penyidik Ankum dan digantikan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur, tidak menyalahi atau tidak melanggar asas kesatuan komando, karena Polisi Militer atau Oditur merupakan organ penyidik atau penegak hukum di lingkungan peradilan militer yang menerima pelimpahan wewenang sebagai penyidik dari Panglima TNI sebagai Ankum tertinggi di lingkungan TNI.

## I. Implementasi Nilai Keadilan Dalam Hukum Acara Pidana Militer.

Implementasi nilai-nilai keadilan dan asas-asas negara hukum Pancasila dalam Hukum Acara Pidana Militer/ Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, diharapkan dapat menjamin keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak-hak asasi bagi semua pihak, sehingga terwujud kepastian hukum bagi pemcari keadilan dan dirasakan kemamfaatannya dalam proses pradilan di lingkungan peradilan militer.

Keadilan atau rasa keadilan merupakan dambaan setiap orang yang ingin diwujudkan dalam pergaulan hidup dan dalam hubungan-hubungan hukum setiap orang. Prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila, merupakan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari budaya asli bangsa Indonesia. Dalam negara hukum Pancasila, berarti bahwa semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dalam negara hukum, maka hukum menjadi panglima, bukan kekuasaan atau figur-figur personal, sebaliknya justru figur-figur personal tertentu harus menjadi penggerak dan tauladan dalam ketaatan dan penegakan hukum. Prinsip atau nilai-nilai keadilan dalam negara hukum Pancasila itulah

yang harus menjadi bahan rujukan dalam struktur, substansi dan kultur hukum di lingkungan peradilan militer di Indonesia dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil).

**1. Hukum Acara Pidana Militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) Sebagai Ius Constitutum.**

Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, sebagai hukum positif dalam peradilan militer telah berlaku kurang lebih 24 tahun. Selama kurun waktu tersebut hampir tidak ada perubahan atau tidak mengalami revisi, baik dari aspek struktur maupun substansinya. Kurun waktu hampir seperempat abad tersebut, bagi berlakunya suatu undang-undang sudah merupakan waktu yang relatif cukup lama. Bersamaan dengan itu, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup signifikan dibarengi dengan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun internasional yang begitu pesat perubahannnya. Perkembangan-perkembangan tersebut, tentu dibarengi juga dengan perkembangan ilmu hukum dan asas-asas hukum, khususnya hukum pidana. Demikian juga perkembangan konstitusi negara Indonesia, khususnya terkait dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang penjelasannya telah diuraikan di atas. Perkembangan atau perubahan konstitusi negara dan asas-asas hukum pidana, tentu berpengaruh terhadap substansi hukum militer, khususnya Hukum Acara Pidana Militer/Hapmil dalam rangka perbaikan substansi Hapmil saat ini dan yang akan datang.

Dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan, khususnya dengan tegas dimasukkannya tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) disamping perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia lainnya, seperti hak keadilan dalam ekonomi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia lainnya. Perubahan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara kita, harus mewarnai substansi hukum positif di Indonesia, termasuk substansi Hukum Acara Pidana Militer/Hapmil. Pertanyaannya, bagaimanakah substansi Hukum Acara Pidana Militer saat ini sebagai hukum positif, dihadapkan dengan perkembangan asas-asas hukum pidana dan perkembangan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia? Kiranya perlu ditelaah kembali substansi Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradian Militer, mengingat setelah diundangkan Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, telah banyak terjadi perubahan dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang terkait dengan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM) serta hak-hak sipil lainnya. Dengan adanya penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka mengandung konsekuensi harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai negara hukum sebagimana telah dijelaskan di atas. Sejalan dengan itu, adanya perkembangan asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses hukum, dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, serta tuntutan dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam proses peradilan.

Dengan adanya amandemen konstitusi Undang-undang Dasar 1945, khususnya tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dan

perkembangan asas-asas hukum pidana, khususnya yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban, maka sudah selayaknya substansi Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 harus menyesuaikan, agar substansi Hapmil selalu adaptasi dengan perkembangan sosial dan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat militer.

Dari hal-hal yang disampaikan di atas, kiranya bisa dipahami bahwa, aspek struktur dan substansi dari Hapmil yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, sudah saatnya harus direvisi disesuaikan dengan perkembangan konstitusi Undang-undang Dasar 1945, asas-asas hukum pidana dan tuntutan pemenuhan keadilan dalam proses peradilan pidana, demi untuk kepentingan perlindungan terhadap hak-hak dan keadilan terhadap prajurit TNI, serta kepentingan lembaga TNI yang lebih maju dan modern di masa yang akan datang.

### 2. Hukum Acara Pidana Militer Sebagai *Ius Constituendum*.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan keadilan. Konstitusi negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah tegas dinyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa hukum menjadi panglima, yang mengatur dan membatasi segala bentuk tindakan dari penguasa/ pemerintah sesuai aturan hukum yang berlaku. Disatu sisi juga menjamin dan melindungi hak-hak asasi dan hak hukum setiap warga negara.

Nilai-nilai keadilan dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menjadi patokan atau rujukan dalam pembuatan hukum dan

penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, pembentukan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil harus bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai Ius Constituendum, Hukum Acara Pidana Militer/Hapmil sebagai hukum formil di lingkungan peradilan militer, juga harus bersumber dari nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Pembentukan Hapmil sebagai *Ius Constituendum* harus juga sesuai dengan perkembangan asas-asas hukum pidana nasional maupun internasional. Namun Hapmil juga wajib memperhatikan kepentingan TNI dan kepentingan pertahanan negara Indonesia. Dengan kata lain, Hapmil sebagai *Ius Constituendum* harus terdapat keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentigan TNI dan pertahanan negara Indonesia.

Implementasi dari asas-asas hukum dan keadilan serta negara hukum Pancasila, harus tercermin dalam substansi Hapmil yang akan datang. Dari aspek struktural (lembaga penegak hukum), Hapmil yang akan datang, harus memastikan lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, harus kredibel dan professional serta dapat membawa keadilan bagi prajurit TNI dan pihak terkait lainnya. Dari aspek substansi, Hapmil yang akan datang juga harus dapat mewujudkan rasa keadilan dan keseimbangan antara kepentingan hukum prajurit dan kepentingan TNI, bahkan dari aspek kultur, Hapmil yang akan datang harus dapat mendorong terwujudnya budaya prajurit TNI yang taat dan patuh terhadap hukum, hukum menjadi panglima yang menjadi patokan/ rujukan dalam setiap tindakan dan langkah-langkah penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan di lingkungan militer. Dengan demikian diharapkan terwujud penegakan

hukum yang adil, berkepastian hukum dan membawa mamfaat demi kepentingan TNI yang modern dimasa yang akan datang.

## J. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer/ Hapmil, seharusnya menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana militer, mengingat substansi dari hukum pidana militer yang kini berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda (berasal dari Wetboek van Militair Strafrech) yang sampai saat ini hampir tidak ada perubahan. Hukum pidana militer yang berakar dari sistem hukum pidana militer Belanda, maka latar belakang sosio kulturalnya juga dari akar budaya Belanda/ Eropa, sehingga tidak cocok dengan sosio kultural bangsa Indonesia sebagaimana yang terangkum dalam Pancasila.

Berbeda dengan Hukum Acara Pidana Militer/ Hapmil yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Hapmil ini merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia melalui proses legeslasi dan disahkan penggunaannya/diundangkan oleh pemerintah Indonesia. Kelahiran dari Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini, sudah tentu sangat dipengaruhi oleh histori peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur beracara di lingkungan peradilan militer, di jaman dahulu setelah kemerdekaan sampai dengan kelahiran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Disamping itu, kelahiran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum acara, tentu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan kepentingan-kepentingan militer/TNI dan kepentingan pertahanan negara Indonesia saat itu.

Sejak diundangkan Hapmil (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) hingga sekarang, sudah berjalan hampir seperempat abad, tentu kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan negara sudah memgalami perubahan ke arah kemajuan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ilpengtek) di Indonesia. Seiring dengan itu, berkembang pula ilmu hukum, asas-asas hukum, khususnya asas-asas hukum pidana, perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), tuntutan demokratisasi dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, penegakan hukum yang adil bagi semua pihak dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan hak-hak korban kejahatan, dan lain sebagainya. Disamping perkembangan ilpengtek, hukum/ asas-asas hukum pidana, HAM, tuntutan keadilan dalam penegakan hukum, berkembang pula Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, khususnya SDM penegak hukum, sebagai pelaksana penegakan hukum yang profesional. Profesionalitas penegak hukum di lingkungan TNI seperti Polisi Militer (penyidik), Oditur dan Hakim Militer, diharapkan dapat mewujudkan peradilan militer yang menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bagaimanakah dengan Hapmil (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) yang saat ini berlaku di lingkungan peradilan militer? Untuk mengukur sejauh mana substansi Hapmil saat ini dihadapkan dengan perkembangan sosial, budaya, politik, asas-asas hukum, HAM dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan di lingkungan TNI/ militer saat ini, ada baiknya bila kita menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Gayuus Lumbuun,[534] sebagai pemerhati hukum militer yang mengatakan bahwa, "secara keseluruhan, substansi peradilan militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut sudah

[534]Dikutip dari Gayus Lumbuun, pada Jurnal Hukum Militer, Vol.4, No.1 Juni 2019, hal 50.

tidak sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip independensi, kepastian hukum, serta prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga peradilan militer yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, memiliki berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki melalui revisi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut. Lebih jauh Gayus Lumbuun mengatakan bahwa, dalam sistem peradilan militer perlu adanya jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan dengan peradilan militer. Hak didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan bertemu keluarga dan lain-lain, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer. Prajurit militer bagaimanapun juga merupakan warga negara, maka mereka juga memiliki hak yang sama dimuka hukum, sama dengan warga negara yang lain, dimana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam sistem peradilan militer hak-hak tersangka dan terdakwa perlu dijamin sebab prajurit TNI merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai warga negara, meskipun diduga atau terbukti melakukan kejahatan, bukan berarti anggota TNI kehilangan hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam peradilan militer masih sangat lemah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997".

Dari apa yang disampaikan Gayus Lumbuun di atas, jelas bahwa Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut sudah seharusnya diperbaharui atau direvisi untuk menyempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan asas-asas hukum pidana, HAM, pemenuhan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban. Namun yang perlu

dicatat, pembaharuan Hapmil sebagai hukum formil yang khusus berlaku di lingkungan peradilan militer, maka hal-hal khusus atau asas-asas yang berlaku khusus bagi kehidupan militer tetap dipertahankan, sepanjang dapat memberikan rasa keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum, serta demi menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan militer dalam asas kesatuan komando.

Dalam disertasi ini, penulis lebih menyoroti pentingnya pembaharuan atau revisi Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, mengingat Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, dari aspek struktur dan substansi, khususnya lembaga dan kewenangan penyidik (penyidik Ankum) yang ada sekarang menurut penulis, kurang memberikan rasa keadilan, tidak adanya independensi penyidik/ketidakberpihakan penyidik, kurang efisiensi dalam proses penyidikan dan tidak adanya profesionalisme penyidik Ankum, sehingga lembaga penyidik dan kewenangannya dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perlu diperbaharui atau direvisi, guna terwujudnya rasa keadilan, efisiensi penyidikan dan profesionalisme penyidik di lingkungan peradilan militer. Perlunya pembaharuan ataupun revisi terhadap Hapmil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer tersebut demi untuk kepentingan kebutuhan hukum yang berkeadilan bagi anggota dan lembaga TNI sekarang dan yang akan datang.

## K. Profesionalitas Penyidik Polisi Militer Di Lingkungan Peradilan Militer.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) di Indonesia sudah menjadi kebutuhan, guna menyelaraskan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan

dan tekhnologi yang terkait dengan modus operandi kejahatan, dan menyesuaikan dengan perkembanagn asas-asas hukum saat ini. Dalam pembaharuan Hapmil tersebut, khususnya lembaga penyidik penulis berharap hanya Polisi Militer dan Oditur Militer. Meskipun dalam kenyataannya selama ini yang sudah berjalan dalam proses penyidikan, yang banyak berperan adalah Polisi Militer. Oditur Militer lebih banyak berkonsentrasi pada fungsinya sebagai penuntut di dalam peradilan militer. Namun demikian, pada tingkatan Oditur Jenderal tetap mempunyai tugas dan wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara dan penuntutan di lingkungan TNI.[535]

Lembaga penyidik Polisi Militer sebagai tulang punggung di bidang penyidikan di lingkungan peradilan militer, reputasinya sebagai penyidik saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi, meskipun disadari masih banyak kekurangan-kekurangan dibidang peralatan (Laboratorium) dan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) nya, terutama dari jumlahnya belum terpenuhi semuanya. Namun dilihat dari produk hasil penyidikannya, sudah dapat dikatakan bahwa penyidik Polisi Militer (AD, AL dan AU) sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survey yang penulis lakukan terhadap produk hasil penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad). Survey hanya dilakukan terhadap penyidik Satuan Pomad, dengan alasan bahwa, satuan Pomad keberadaannya tersebar diseluruh pelosok tanah air Indonesia, yang terdiri dari : 1 Puspomad, 15 Pomdam, 46 Detasemen Polisi Militer dan 166 Sub Detasemen Polisi Militer. Untuk memberikan gambaran tentang kesiapan penyidik Pomad, dapat dilihat keadaan penyidik Pomad dan produk penyidikannya, sebagai berikut:

[535] Pasal 67 (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer.

Rekapitulasi Penyidik Pomad dan Pendidikannya,[536] dan Rekapitulasi Produk Penyidikan Penyidik Pomad:

**Tabel 8**

**Rekapitulasi Hasil Penyidikan Pomdam Seluruh Indonesia TA. 2020.[537]**

| NO | SATUAN | PERKARA | | SISA KARA 2019 | KARA MASUK 2020 | KARA SELESAI 2020 | PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pomdam Iskandar Muda | 1. | Pidana | - | 95 | 92 | 96,84 % | ➢ Berkas Perkara Pidana dari Satuan Pomad di kembalikan oleh Odmil/ Odmilti sejumlah 29 Berkas Perkara (Data dari Puspomad)<br>➢ TA 2020 tren pelanggaran pada masing-masing Pomdam menuru |
| | | 2. | Pelanggaran | - | 15 | 15 | 100 % | |
| 2. | Pomdam I Bukit Barisan | 1. | Pidana | 4 | 138 | 138 | 97,18% | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | 23 | 23 | 100% | |
| 3. | Pomdam II Sriwijaya | 1. | Pidana | - | 98 | 95 | 97% | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | 26 | Nihil | 100% | |
| 4. | Pomdam Jaya Jayakarta | 1. | Pidana | 17 | 153 | 158 | 92.94% | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | 27 | 27 | 100% | |
| 5. | Pomdam III Siliwangi | 1. | Pidana | 18 | 175 | 191 | 98,96% | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | 62 | 62 | 100% | |
| 6. | Pomdam IV Diponegoro | 1. | Pidana | 6 | 94 | 100 | 100% | |

[536] Bisa dilihat pada Bagan 7 Bab IV di atas.

[537] Survey dilaksanakan pada minggu I dan II Bulan Januari 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. | Pelanggaran | - | **23** | **23** | **100%** | **n** |
| 7. | Pomdam V Brawijaya | 1. | Pidana | **1** | **121** | **120** | **99,17%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **32** | **32** | **100%** | |
| 8. | Pomdam VI Mulawarman | 1. | Pidana | **8** | **109** | **113** | **96,5%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **45** | **45** | **100%** | |
| 9. | Pomdam IX Udayana | 1. | Pidana | **7** | **51** | **53** | **91,3%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **27** | **27** | **100%** | |
| 10. | Pomdam XII Tanjungpura | 1. | Pidana | - | **50** | **50** | **100%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **12** | **12** | **100%** | |
| 11. | Pomdam XIII Merdeka | 1. | Pidana | **5** | **52** | **52** | **96,2%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **31** | **31** | **100%** | |
| 12. | Pomdam XIV Hasanudin | 1. | Pidana | **2** | **96** | **97** | **98,98%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **6** | **6** | **100%** | |
| 13. | Pomdam XVI Patimura | 1. | Pidana | **3** | **98** | **99** | **98,01%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **116** | **116** | **100%** | |
| | | | | | | | | |
| 14. | Pomdam XVII Cenderawasih | 1. | Pidana | - | **139** | **131** | **94,25%** | |
| | | 2. | Pelanggaran | - | **9** | **9** | **100%** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Pomdam XVIII Kasuari | 1. | Pidana | - | **91** | **91** | **100%** | |
| | | 2. | Pelang garan | - | **37** | **37** | **100%** | |

Dari data-data di atas, dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Dari aspek jumlah penyidik belum ideal, karena belum memenuhi Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan (DSPP) pada masing-masing satuan, terutama satuan tingkat Denpom dan Subdenpom. Kekurangan personil penyidik ini terjadi pada semua tingkatan satuan Pomad, sehingga untuk menutupi kekurangan penyidik, bisa diatasi dengan cara memamfaatkan secara maksimal personil penyidik yang ada focus hanya bidang penyidikan, dan tidak melibatkan penyidik pada kegiatan fungsi lainnya, seperti kegiatan pengamanan tamu VIP/VVIP, rasia dan sebagainya.

b. Dari aspek pendidikan penyidik, untuk pendidikan regular seperti kursus penyidik di lembaga Pusat Pendidikan Polisi Militer, saat ini sudah hampir semua penyidik sudah mengikuti pendidikan penyidik dan sudah disumpah sebagai penyidik, sehingga modal dasar sebagai penyidik sudah cukup bagus, namun pendidikan umum atau pengembangan lainnya, seperti S1 atau S2 bidang hukum masih kurang. Semakin hari ke depan pendidikan penyidik ini semakin bertambah dan berdampak baik pada kualitas dan profesionalisme penyidik.

c. Dari aspek produk penyidikan, seperti Berkas Perkara (BP) dalam tahun laporan (TA.2020), hampir semua satuan Pomdam rata-rata antara 90 – 95 persen, BP selesai dan dikirim kepada Oditur untuk

disidangkan. Dari data produk penyidikan ini, dapat diartikan bahwa, satuan penyidik Polisi Militer (dengan sampel Pomad), sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya bidang penyidikan (seperti di jaman sebelum Tahun 1997), dimana penyidik Polisi Militer masih sebagai pembantu jaksa/ Oditur dalam hal penyidikan. Saat ini dan ke depan, profesionalitas penyidik Polisi Militer sudah cukup baik dan professional.

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan.

1. Regulasi Lembaga dan kewenangan penyidik dalam system peradilan militer saat ini, belum berbasis nilai-nilai keadilan, terkait dengan lembaga penyidik dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a (Ankum sebagai penyidik) dan penjelasannya dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, berada dalam ranah penegakan hukum pidana (hukum acara pidana militer) dalam sistem peradilan militer.

Dari aspek normatif, antara substansi Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan penjelasannya, dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat ketidaksingkronan atau pertentangan. Terjadinya ketidaksingkronan atau pertentangan tersebut menyangkut kewenangan Ankum sebagai penyidik, yang secara normatif Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidkannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf a dan penjelasannya). Dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian kewenangan penyidikan tersebut menurut teori kewenangan, seharusnya Ankum tidak bisa lagi menjalankan / melaksanakan kewenangan penyidikan tersebut, karena kewenangan penyidikan dan tanggung jawab penyidikan sudah berada/ beralih kepada penyidik Polisi Militer / Oditur. Namun dalam Pasal 74 huruf d, Ankum masih berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka (bawahan Ankum), padahal kewenangan penahanan termasuk dalam ranah kewenangan penyidikan. Selain itu, timbul adanya konflik norma antara ketentuan Pasal 71 (tentang kewenangan penyidik), dengan Pasal 74 (tentang kewenangan Ankum) khususnya

huruf a dan d. Konflik norma ini terjadi, apabila Ankum tidak mau menyerahkan/ melimpahkan anggota bawahannya yang bersalah melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer. Hal ini bisa terjadi mengingat tidak ada ketentuan yang mewajibkan berikut sanksinya apabila Ankum tidak melimpahkan anggota bawahannya untuk disidik oleh penyidik Polisi Militer/ Oditur.

Dari aspek empiris (kenyataan dalam praktek), dimana Ankum ditetapkan sebagai penyidik, namun Ankum tidak bisa dan tidak pernah melakukan penyidikan, Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik sehingga Ankum secara kelembagaan maupun produk penyidikan Ankum menjadi tidak sah secara hukum. Selain itu, Ankum sejatinya bukan tergolong lembaga yudisiil, karena fungsi Ankum tidak ada berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, ditinjau dari aspek kelayakan, kapasitas dan profesionalitas Ankum tidak layak dijadikan sebagai penyidik, karena Ankum dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tidak akan bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagaimana dalam asas Due Process Of Law yang diakomodir dalam hukum acara pidana.

2. Adanya kelemahan- kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik, dapat terjadi saat pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam hal ini, yang paling menentukan adalah peran dari anggota lembaga pembuat undang-undang (pemerintah dan legislatif). Kalau kita cermati dari substansi Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, dimana norma-norma atau nilai-nilai dalam pasal- pasal tersebut sudah jelas arti dan maksudnya, namun secara normatif masih terdapat ambigu dan ketidakpastian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa norma-norma yang

terkandung dalam Pasal 69 dan 74 tersebut, memang dikehendaki demikian oleh pembuat undang-undang.

Terjadinya norma dalam Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersbut, tidak lepas dari pihak-pihak pemegang peran, baik lembaga legeslatif bersama pemerintah, lembaga TNI sebagai pihak yang berkepentingan di dalam pembentukan hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), para ahli hukum dan lembaga- lembega hukum lainnya. Pelu dicatat bahwa saat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini dibuat dan diundangkan, posisi eksekutif / pemerintah masih sangat dominan/ penentu kebijakan, khususnya kebijakan terhadap lembaga TNI sebagai organ pertahanan Negara.

3. Rekonstruksi terhadap regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perlu dilakukan agar regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam system peradilan militer ini, berbasis pada nilai-nilai keadilan.

Rekonstruksi terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), sebagai berikut:

“ Pasal 69 : Penyidik adalah : a. Polisi Militer; dan b. Oditur Militer.

Dalam rekonstruksi ini menghapus Ankum sebagai penyidik, selanjutnya Ankum ditempatkan sebagai pengawas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur.

Rekonstruksi terhadap wewenang Ankum pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Substansi rekonstruksi juga berbasis nilai-nilai keadilan menjadi sebagai berikut;

Pasal 74 : Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menjadi sebagai berik

a. menyerahkan anggota di bawah wewenang komandonya yang melakukan tindak pidana, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan/ atau huruf b. guna dilakukan penyidikan;

b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan/ atau huruf b;

c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan/ atau huruf b; dan

d. melakukan pengawasan dalam proses penyidikan terhadap anggotanya yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan/ atau huruf b.

**B. Saran.**

1. Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, sebagai hukum positif sudah berjalan kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga perlu dilakukan pembaharuan guna menyesuaikan dengan asas-asas dan doktrin hukum, Hak-hak Asassi Manusia, nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum, guna melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dan membatasi kewenangan penegak hukum sesuai ketentuan peundang-undangan.

2. Dalam pembaharuan hukum acara pidana militer ke depan, agar tidak melibatkan Ankum sebagai penyidik, mengingat keberadaan Ankum sebagai penyidik saat ini banyak menimbulkan permasalahan, seperti Ankum tidak kredibel sebagai penyidik, Ankum tidak bisa menjamin *Due Process Of Law* dan Ankum sebenarnya tidak layak dijadikan sebagai penyidik, karena Ankum bukan

termasuk lembaga yudisiil yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ke depan, Ankum perlu ditempatkan sebagai pengawas penyidikan terhadap anak buahnya, agar penyidikan berjalan jujur dan adil.

## C. Implikasi Kajian Disertasi.

### 1. Teoritis.

Pada tataran teoritis, kajian rekonstruksi lembaga dan kewenagan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis keadilan ini, memberikan sumbangan berupa temuan baru dan dapat sebagai referensi di bidang studi hukum pidana, khususnya hukum acara pidana militer di Indonesia. Ada beberapa alasan antara lain; Pertama, kajian rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenagan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis keadilan ini, kajiannya lebih focus pada substansi dan struktur hukumnya. Sepanjang pengetahuan penulis, aspek structur hukum dalam Hapmil (lembaga penydik dan kewenangannya) belum ada yang mengkajinya, sehingga kajian ini dapat sebagai pengayaan dalam hukum pidana militer. Kedua, tidak banyak penulis yang menulis bidang hukum militer, terutama yang mengkaji masalah lembaga Ankum dan kewenangannya sebagai penyidik di lingkungan peradilan militer, sehingga kajian ini dapat menambah referensi, khususnya dalam bidang hukum pidana militer.

### 2. Praktis.

Pada tataran praktis, kajian ini dapat dijadikan salah satu jalan keluar/ solusi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam proses penyidikan pada sistem peradilan militer. Dalam proses penyidikan, kewenangan Ankum sebagai penyidik secara yuridis sangat dominan, seperti pelimpahan perkara bawahannya kepada penyidik dan kewenangan

penahanan terhadap tersangka. Dalam kenyataannya, sering terjadi Ankum mengambil keputusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau dapat merugikan pihak korban/pelapor atau pihak terkait lainnya. Solusinya adalah dengan cara merekonstruksi Pasal-pasal tertentu dalam Hapmil, khususnya; 69 (1) huruf a dan ayat 2 Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tetang Peradilan Militer. Dengan merekonstruksi pasal-pasal tersebut, eksistensi Ankum ditempatkan sebagai pengawas penyidikaan, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam proses penyidikan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku:


Aan Efendi dan Freddy Purnomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ali Zaidan, M. 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.

Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok, Rajawali Press.

Asep N. Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

A. Wahab Daud, 1999, *Hukum Militer*, Jakarta, Pusbakum.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bachsan Mustafa, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group.

Barda Nawawi Arief, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integratif (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister.

Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta.

Backy Krisnayuda, 2017, *Pancasila & Undang-Undang, Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010),* PT Galaxy Puspa Mega.

Dewa Gede Atmaja, 2018, *Teori- Teori Hukum*, Malang, Setara Press.

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Iniversity.

Edi Setiadi, H, dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP.

E. Fernando M. Manullang, 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana.

Erlyn Endarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Eduardus Marius Bo, 2019, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press.

Faisal Salam, Moch., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Fajrurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press.

Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2018, *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan*, Depok, Prenadamedia Group.

H. Abdul Latif, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group Jakarta.

H. Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi dan Tasis,* Jakarta: Rajawali Pers.

H. Sarjana, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Thafa Media.

H. Wirman Burhan, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,* Depok, Rajawali Pers.

H. Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Helvis, 2010, *Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendra Mulyadi, 2018, TESIS : *Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tarhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika* (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang).

Ibnu Katsir, 2021, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung, Jabal.

I Made Pasek Diantha, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia* , Jakarta : Kompas.

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Juctice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Kaelan, Edisi Reformasi 2016, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara.

Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : ANDI.

Moch. Faisal Salam,2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Babinkum TNI, 2015, *Kamus Hukum Militer.*

Mahmutarom, HR, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam),* Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional, Semarang Universitas Diponegoro.

Margono, 2019, *Asas Keadilan kemamfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya*, Laksbang Justitia.

Oly Viana Agustina, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok : Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Rawamangun Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2007 , *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Edisi khusus, Peradaban.

Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press.

Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Press.

R. Soesilo, 1985, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Politeia Bogor.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang PRESindo.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, GENTA Publishing.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Depok, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers.

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM – PETEHAEM.

Tim Grasindo, 2017, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Jakarta, Grasindo.

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada.

Widiada Gunakaya, A., 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ANDI.

W.J.S Poerwodarminta, 1996, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran.

Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zainal Arifin Hoesin, 2016, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Malang, Setara Press.

Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta* : Sinar Grafika.

**B. Perundang - Undangan.**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, (Amandemen keempat).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara. Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1946, diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946, Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1947, Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1947.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950, Tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950). Disahkan di Jakarta, pada tanggal 20 Juli 1950 dan diumumkan, pada tanggal 4 Agustus 1050. (Lembaran Negara Tahun 1950).

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1954, Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, LN Tahun 1954 Nomor 84.

Republik Indonesia, Undang-undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1958, Tentang Perubahan Undang-udang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53), Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1958, TLN Nomor 1493.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. (Lembaran Negara Nomor 51 tahun 1982 dan Lembaran Negara Nomor 3 Tahun1988).

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3713.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Jakarta Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembahan Negara Nomor 127.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5164.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4401.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 1 Oktober 1948, Diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1948, Sekretaris Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**C. Jurnal Hukum**

Agustinus PH dan Yuliana Yuli, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasiona*l, Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta, Vol.1 No.2, Desember 2014.

Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.

Ahmad Makbul, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol.4/No.2/Nopember 2019.

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Justisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No.2 Mei- Agustus 2014.

Irwan Triadi, Harmonisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum Militer/ STHM/ No. 2/ September 2020.

Made Hendra Wijaya, Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi FH Unhas Vol. 5 No.2 September 2015.

T. Gayus Lumbuun, *Peranan Peradilan Militer Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer Di Indonesia (Materi Kuliah Umum di STHM Ditkumad, pada tanggal 2 Mei 2018)*, Jurnal Hukum Militer/ STHM/Vol.4/No.1/Juni 2019.

Tamzyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, Ejournal Unisba, Volume XVIII No.3 Juli – September 2002:337 – 352.

W. Indrajid, *Peran TNI Dalam Konsep Keamanan Nasional (National security) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer/ STHM/ Vol.3/No.1/Oktober 2018.

Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, 001: 10.22437/ujh.2.2.409-431.

**D. Internet.**

Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141.

Agus Roni Arbaben, https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

Aji Sakti Hidayatullah, https://www.academia.edu/41087526/HUKUM PERADILAN MILITER, Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

Akhmad Bumi, *Pancasila Adalah Cita Hukum (Rechtsidee)*, https://tabloidmatahati.com/pancasila-adalah-cita-hukumrechtsidee/#.YIzsCLUzbIU.

Anang Fajrul U., Pojok Wacana. Com.

Ardiansyah, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, https://customslawyer.wordpress.com/2014/0621/keadilan-dalam-perspektif-islam.

Bambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio legal dan Konsekuensi Metodologinya*, diakses dari http://herlambangperdana,files,wordpress.com/2008/06/penelitian-sosial-legal-dalam-tun.pdf. pada tanggal 25 juli 2019.

Diah Ratna Sari Hariyanto, 2017, *Laporan Penelitian Due Process Of Law Dalam Kuhap di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Uayana, Hal. 8. http://erepo.unud.ac.id.

E-journal, http://e-journal.uajy.ac.id/17131/3/HK117952.pdf., hal. 1920, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, hal.11. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/ download/1545/1310.

Hans Lura, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh). http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php /kinaa/ article/view/1046/823.

H. Saeful Anwar, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran Analisis Tafsir Maudui*. https://media.neliti.com/media/publications/282949-keadilan-dalam-al-quran-c2770940.pdf.

http://digilib.uns.ac.id.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Bela_Diri Jepang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Bersenjata _Republik_Korea.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/bdab235797398bb7613a0cb31889994d.pdf.

https://www.hukumonline.co/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi—delegasi-dan-mandat/, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64892/92594/F1457735324/AZE64892.

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3364&vm=02&re=02.

https://www.refworld.org/docid/3ae6b5af0.html.

Jimly Assiddiqie, http//ww.jimly.com/MAKALAH/sb/penegakan_hukum.PDF.

Kurniawan Hermawanto dkk, 2017, *Teori Sistem Hukum Lawrece M.Friedman*, hal. 1-2 https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN

Kurnisar, *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia*. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/467/385.

Kurnisar, *Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*, Abstrak. DOI: http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, dalam Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.https://www.researchgate.net/publication/337365333 MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA INDONESIA.

Makalah Dispancaula, -https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/, tanpa halaman, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020. https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19319/node/638/rancangan-uu-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer. Diunduh, 3 Agustus 2020.

Muhammad Mahatir, -http://mahatir71.blogspot.com/2011/12/peradilan-militer.html?m=1 , Diunduh pada tanggal 19 september 2020.

Muhammad Risqi Abdulloh, *Asas Profesionalitas,* https://id.scribd.com/doc/111429311/ Asas-Profesionalitas.

Nur Fatin, -http://seputarpengertian.blongspot.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan.html?m=. Diunduh pada tnggal 10 Agustus 2020. Sovia Hasanah.

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia*: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf.

Ray Pratama Siadari, 2015, *Teori Penegakan Hukum*, https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html Turiman Fachturahman nur, Menggunakan Paradigma konstruktivisme Dalam Penelitian Hukum, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/10/ menggunakan-paradigma-konstruktivisme.html?m=1.

RUU Peradilan Militer, dibuat oleh hukum Online. https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19319/node/638/rancangan-uu-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer. Diunduh, 3 Agustus 2020.

Sator Sapan Bangin, *Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer Di Indonesia*, tanpa halaman, http://Sthm ahm pthm.ac.id. Diunduh tanggal 18 Oktober 2021.

Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia, https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/propfil-pengadilan/sejarah-pengadilan-militer.html, (tanpa halaman), diunduh tanggal 19 September 2020.

Slamet Sarwo Edy, 2017, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 112. Email: slametsarwoedy@gmail.com).

Sovia H. https://www.hukumonline.co/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi—delegasi-dan-mandat/, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan/. Diunduh pada tanggal 25 agustus 2020.

https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html. Diunduh tanggal 22 Desember 2021.

http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html?m=1

Abdul Halim Barkatullah, BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/45925/4/DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj2mJaGnvn0AhXiTWwGHYJkAqYQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2-0jQSkuvPwfT5WzTwasB1.

**E. SUMBER LAIN**.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Nomor III/MPR/2000, *Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.* Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2000.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/IV/2007, Tanggal 18 April 2007, Tentang Penunjukan Papera Di Lingkungan TNI.

Peraturan Panglima TNI Nomor 55, Tanggal 30 Desember 2020, Tentang Atasan yang Berhak Menghukum.

Peraturan Panglima TNI Nomor 56, Tanggal 30 Desember 2020, Tentang Perwira Penyerah Perkara.

Keputusan Panglima TNI, Nomor: Perpang/171/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية